



KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia



DjID
Direktorat Jenderal
Infrastruktur Digital

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I PALEMBANG

Alamat :

Jl. Macan Kumbang Raya No. 50 RT. 40/11,
Kel. Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang,
Sumatera Selatan - 30153

Telp/Fax :

Telp. : 0711 - 444423 ; Fax. : 0711 - 444424

e-Mail :

balmon.palembang@gmail.com

Follow us :

   @balmonsfrpalembang



SCAN ME

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I PALEMBANG



KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia



DjID
Direktorat Jenderal
Infrastruktur Digital

LAPORAN KINERJA

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I PALEMBANG



BerAKHLAK # **bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa

2025

LAPORAN KINERJA
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I PALEMBANG
DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR DIGITAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

TAHUN 2025



KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia



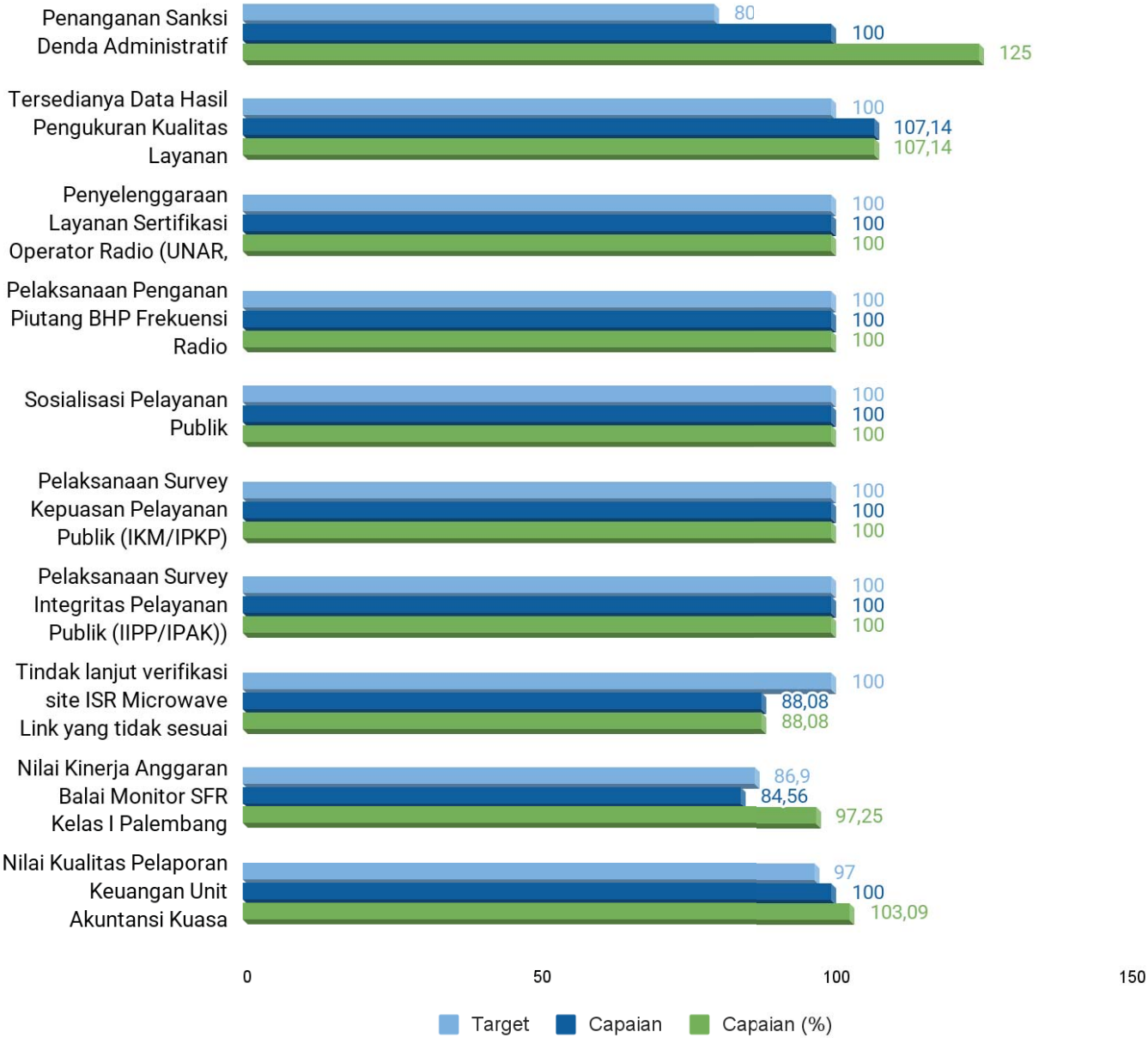
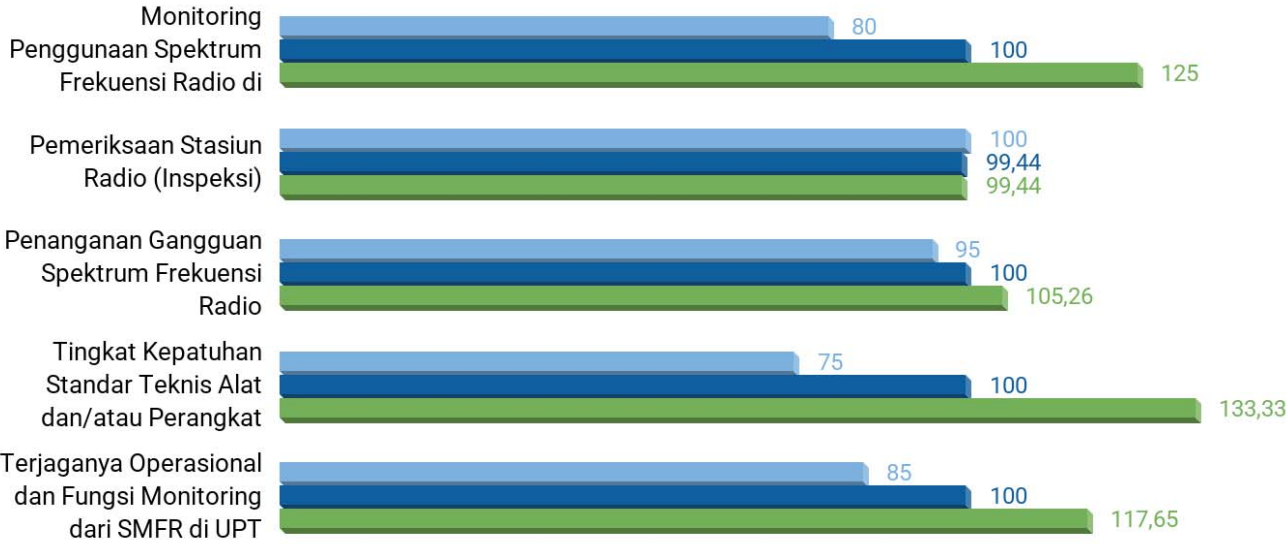
Direktorat Jenderal
Infrastruktur Digital

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika yang kini menjadi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital, yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian dibidang penggunaan spektrum frekuensi radio wilayah kerja Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Balmon Palembang memulai perencanaan kinerja, pengumpulan data kinerja dan berakhir dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balmon Palembang Tahun 2025. LAKIP Balmon Palembang Tahun 2025 ini menyajikan dan mengungkapkan pencapaian kinerja dari 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

Grafik Capaian Seluruh Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2025



1. SASARAN KEGIATAN MENINGKATNYA KEPATUHAN DAN KUALITAS PENGENDALIAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO, PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI

1.1 Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
Pada tahun 2025 target indikator kinerja sasaran kegiatan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di Kabupaten/Kota ditetapkan sebesar 80% Kabupaten/Kota termonitor (14 Kabupaten/Kota) dari jumlah seluruh Kabupaten/Kota yang menjadi Wilayah Kerja Balmon Palembang (17 Kabupaten/Kota). Sepanjang tahun 2025 ini Balmon Kelas I Palembang telah melakukan kegiatan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di 17 Kabupaten/Kota dengan realisasi kinerja monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 125%.

1.2 Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)
Pada tahun 2025 target indikator kinerja sasaran kegiatan pemeriksaan stasiun radio ditetapkan sebesar 100% dari jumlah data yang ditetapkan Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital. Indikator ini bertujuan untuk memverifikasi kesesuaian data yang ada pada database SIMS dengan data existing di lapangan berupa data teknis dan data administrasi yang meliputi pengguna frekuensi radio *microwave link*, lembaga penyiaran FM dan Televisi Digital di lapangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada data Izin Stasiun Radio (ISR). Realisasi capaian kinerja Balmon Kelas I Palembang pada tahun 2025 adalah sebesar 99.44% dari target yang telah ditetapkan, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 99.44%.

1.3 Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Pada tahun 2025 target indikator kinerja sasaran kegiatan layanan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio terhadap aduan masyarakat (pengguna frekuensi) ditetapkan sebesar 95% dari total aduan masyarakat (pengguna frekuensi) harus dapat ditangani. Selama kurun waktu tahun 2025 terdapat 5 aduan masyarakat (pengguna frekuensi) dan tertangani seluruhnya dengan realisasi kinerja 100% dari target yang telah ditentukan, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 105.26%.

1.4 Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

Pada tahun 2025 target indikator kinerja sasaran kegiatan tingkat kepatuhan standar teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital ditetapkan sebesar 75% dari jumlah perangkat yang termonitor. Perhitungan tersebut dihitung dari perbandingan antara jumlah perangkat bersertifikat yang berhasil dimonitor ditambah dengan jumlah pelanggaran penggunaan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital yang telah ditindaklanjuti, terhadap total jumlah perangkat yang termonitor pada periode pelaporan. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan monitoring dan penertiban Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital pada tahun 2025, realisasi kinerja sebesar 100% dari target yang telah ditentukan, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 133.3%.

1.5 Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT

Pada tahun 2025 target indikator sasaran kegiatan terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT ditetapkan sebesar 85% dari jumlah Alat dan/atau Perangkat Monitoring Balmon Palembang. Nilai capaian diperoleh dari indikator stasiun monitor siap beroperasi untuk melakukan monitoring dan stasiun monitoring yang mengalami kerusakan dan telah dilaporkan, tidak termasuk dalam perhitungan. Realisasi capaian kinerja Balmon Kelas I Palembang pada tahun 2025 diperoleh hasil sebesar 99.27% dari target yang telah ditentukan, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 116.79%.

1.6 Penanganan Sanksi Denda Administratif

Pada tahun 2025 target indikator kinerja sasaran kegiatan penanganan sanksi denda administratif ditetapkan sebesar 80% dari pelanggaran penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital. Balmon Kelas I Palembang telah melaksanakan kegiatan penanganan sanksi denda administratif pada tahun 2025 ini dengan capaian realisasi kinerja sebesar 100% dari target yang telah ditentukan, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 125%.

1.7 Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan

Pada tahun 2025 target indikator kinerja sasaran kegiatan tersedianya data hasil pengukuran kualitas layanan ditetapkan sebesar 100% dari 14 Kabupaten/Kota di Wilayah Kerja Balmon Palembang. Pada tahun 2025, Balmon Kelas I Palembang berhasil melakukan pengukuran kualitas layanan di 15 Kabupaten/kota, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 107.14%.

1.8 Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS- IKRAN)

Pada tahun 2025 target indikator kinerja sasaran kegiatan penyelenggaraan layanan sertifikat operator radio Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) berbasis CAT ditetapkan sebesar 100% dari target pelaksanaan kegiatan UNAR sebanyak 6 kali kegiatan. Pada tahun 2025 Realisasi capaian kinerja yaitu 13 kegiatan UNAR (UNAR Reguler dan Non Reguler), Sehingga capaian kinerja penyelenggaraan layanan sertifikat operator radio (UNAR) diperoleh hasil 100%.

Adapun Indikator kinerja sasaran kegiatan penyelenggaraan layanan sertifikat operator radio MOTS-IKRAN dalam bentuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan teknis SRC/LRC ditetapkan sebesar 100% dari target minimal sebanyak 30 peserta. Realisasi capaian sebanyak 50 peserta dengan realisasi capaian kinerja 100%. Capaian indikator kinerja penyelenggaraan

layanan sertifikasi operator radio secara keseluruhan diperoleh hasil 100% dengan persentase capaian 100%.

1.9 Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio

Pada tahun 2025 target indikator kinerja sasaran kegiatan pelaksanaan penanganan piutang BHP Frekuensi Radio ditetapkan sebesar 100%, diukur melalui pelaksanaan pencegahan dan pengurangan piutang sebesar 80%, dan melaksanakan koordinasi penanganan piutang dengan KPKNL setempat sebesar 100%. Sepanjang tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas I Palembang telah melakukan penanganan piutang dengan menghubungi sebanyak 959 wajib bayar (sesuai data pada aplikasi Billing ISR) melalui komunikasi media online, pos/ekspedisi maupun kunjungan lapangan. Selain itu, hasil koordinasi dengan KPKNL setempat terdapat 7 wajib bayar berstatus Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) dan telah dilakukan upaya penanganan piutang serta pengumpulan dokumen wajib bayar untuk persyaratan penghapusan mutlak, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

1.10 Sosialisasi Pelayanan Publik

Pada tahun 2025 target Indikator kinerja sasaran kegiatan sosialisasi pelayanan publik ditetapkan sebesar 100%, dengan ketentuan minimal satu kali pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan diikuti minimal 30 peserta. Realisasi kegiatan

sosialisasi pelayanan publik telah dilaksanakan sebanyak satu kali dengan diikuti 93 peserta. Sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

1.11 Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/ IPKP)

Pada tahun 2025 Indikator kinerja sasaran kegiatan pelaksanaan survey kepuasan pelayanan publik (IKM/ IPKP) ditetapkan sebesar 100% dengan ketentuan survei dilakukan minimal satu kali dalam setahun, diikuti minimal 30 responden, dan hasil nilai indeks sekurang-kurangnya 3,2 dari skala 4.0. Sepanjang Tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas I Palembang telah melaksanakan survei sebanyak satu kali yang diikuti 38 responden dengan hasil nilai IKM/IPKP sebesar 3.78 dari skala 4.0, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

1.12 Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/ IPAK)

Pada tahun 2025 Indikator kinerja sasaran kegiatan pelaksanaan survey integritas pelayanan publik (IIPP/ IPAK) ditetapkan sebesar 100% dengan ketentuan survei dilakukan minimal satu kali dalam setahun, diikuti minimal 30 responden, dan hasil nilai indeks sekurang-kurangnya 3,2 dari skala 4.0. Balai Monitor SFR Kelas I Palembang telah melaksanakan survei sebanyak satu kali yang diikuti 38 responden dengan hasil nilai IIPP/IPAK sebesar 3.72 dari skala 4.0, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

1.13 Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)

Pada tahun 2025 indikator kinerja sasaran kegiatan tindak lanjut verifikasi site ISR microwave link yang tidak sesuai (PrimaAksi) ditetapkan sebesar 100% dari jumlah site ISR microwave link yang tidak sesuai dan telah ditindaklanjuti melalui modifikasi koordinat sesuai Master Data Referensi Site (MDRS) atau penghentian penggunaan *microwave link*. Terdapat 520 ISR yang menjadi target di tahun 2025 dan telah ditindaklanjuti sebanyak 458 ISR, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 88.08%.



2. MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA DITJEN INFRASTRUKTUR DIGITAL YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

2.1 Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas I Palembang Tahun 2025

Pada tahun 2025 target indikator kinerja sasaran kegiatan Nilai Kinerja Anggaran ditetapkan sebesar 86.95 dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Smart. Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dari beberapa indikator yang menjadi dasar pembobotan oleh Kementerian Keuangan seperti: penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, Revisi DIPA, Deviasi halaman III DIPA, LPJ Bendahara, Renkas, Kesalahan SPM, Retur SP2D, Pagu Minus dan Dispensasi. Capaian nilai kinerja anggaran

Balmon Palembang Tahun 2025 sebesar 84.56 dengan persentase capaian 97.25%.

2.2 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Pada tahun 2025 target indikator kinerja sasaran kegiatan nilai kualitas pelaporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) ditetapkan sebesar 97. Nilai capaian UAKPA diukur berdasarkan enam indikator yaitu jumlah transaksi koreksi audit, kesalahan penggunaan akun belanja modal/barang, saldo kas di bendahara akhir tahun, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ke entitas pelaporan, hasil penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan, dan ketepatan waktu penyampaian laporan hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) ke entitas pelaporan. Capaian nilai UAKPA Balmon Palembang tahun 2025 adalah sebesar 100 dari target yang telah ditentukan dengan persentase capaian 103.09%.

Tabel Target dan Capaian Kinerja Balmon Palembang dalam kurun waktu 5 Tahun

No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	2021		2022		2023		2024		2025	
		T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
Sasaran Kegiatan Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi											
1	Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	80	88	80	100	100	100	100	100	80	100
2	Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)	50	61	100	130	100	100	100	100	100	99.44
3	Persentase (%)Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	97	100	98	100	99	100	100	100	95	100
4	Persentase (%)Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	70	92	90	99	93	100	93	107.53	75	100
5	Persentase (%) Terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT	85	98	95	99	95	98	95	105.26	85	100
6	Persentase (%)Penanganan Sanksi Denda Administratif	-	-	-	-	-	-	-	-	80	100
7	Persentase (%)Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	-	-	-	-	-	-	-	-	100	107.14
8	Persentase (%)Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS- IKRAN)	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	Bimbingan Teknis SRC/LRC	90	150	-	-	100	100	100	100	-	-
	Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	100	100	-	-	100	100	100	100	-	-
	ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKRAN	90	150	-	-	100	60	100	100	-	-
9	Persentase (%)Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	2021		2022		2023		2024		2025	
		T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
10	Persentase (%)Sosialisasi Pelayanan Publik	80	129	-	-	100	100	100	100	100	100
11	Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
12	Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK))	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
13	Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)	-	-	-	-	-	-	-	-	100	88.08
	Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site) program MOTS IKRAN	90	91	-	-	100	69	100	100	-	-
Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien											
1	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI	88	86	86	91.5	100	200	87	90	90	118.32
2	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	-	-	-	-	87	89	80	0	100	95

Keterangan : T = Target ; C = Capaian (%)



KATA PENGANTAR

**AGUS SUMITRO**

Plt. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Kelas I Palembang

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Puji syukur atas segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa serta kerjasama seluruh pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang, sehingga dapat menyelesaikan program kerja Tahun 2025 dan dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini sesuai yang diharapkan.

Laporan Kinerja ini merupakan potret dan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 2025, serta merupakan komponen dari prinsip good governance yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya kepada semua pihak yang berkepentingan. Sumber daya tersebut di atas meliputi keseluruhan anggaran keuangan, tenaga/SDM, dan waktu yang digunakan dalam memenuhi pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya sesuai dengan prosedur dan peraturan serta ketentuan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang diharapkan juga dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai dan semua pihak yang terlibat hingga terselesaikan nya Laporan Kinerja ini. Dan kami juga menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan. Semoga Laporan ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Palembang, Mei 2026
Plt. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Kelas I Palembang



Agus Sumitro, S.Kom., M.Kom

DAFTAR ISI

2 Ringkasan Eksekutif

8 Kata Pengantar

10 Daftar Isi

11 Daftar Tabel

12 Daftar Gambar

13 Daftar Grafik

BAB I

PENDAHULUAN

17 Latar Belakang

17 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

19 Maksud dan Tujuan

20 Mandat, Peran dan Permasalahan Strategis

21 Sistematika Pelaporan

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

23 Rencana Strategis Tahun 2025-2029

24 Sasaran Program

32 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

33 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

35 Pengukuran Kinerja Tahun 2025

36 Capaian Kinerja 2021-2025

37 Analisa Capaian Kinerja

128 Capaian Kinerja Lainnya

BAB IV

PENUTUP

137 Penutup

LAMPIRAN

DOKUMENTASI KEGIATAN

139 Dokumentasi Kegiatan

DAFTAR TABEL

Tabel	Target dan Capaian Kinerja Balmon Palembang dalam kurun waktu 5 Tahun	6
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	32
Tabel 2.2	Pagu Anggaran Berdasarkan Rincian Output (Satker Lama 613455)	33
Tabel 2.3	Pagu Anggaran Berdasarkan Rincian Output (Satker Baru 694701)	33
Tabel 3.1	Perjanjian Kinerja (PK) dan Realisasi Capaian Kinerja	35
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2021-2025	36
Tabel 3.3	Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	40
tabel 3.4	Target Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota	40
tabel 3.5	Penggunaan Stasiun Tetap/Transportable Tahun 2025	43
tabel 3.6	Benchmarking Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	48
tabel 3.7	Realisasi Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi) Tahun 2025	49
tabel 3.8	Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link	51
tabel 3.9	Hasil Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Televisi Digital	54
tabel 3.10	Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Siaran Radio FM dan Televisi Digital	54
tabel 3.11	Benchmarking Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspkesi)	58
tabel 3.12	Capaian Penanganan Gangguan SFR	60
tabel 3.13	Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Gangguan SFR	61
tabel 3.14	Tanggal Penerbitan SPT Penanganan Gangguan SFR	62
tabel 3.15	Benchmarking Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	64
tabel 3.16	Target Jenis Perangkat Prioritas	65
tabel 3.17	Temuan Pelanggaran Penertiban Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	67
tabel 3.18	Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Penertiban standar teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	68
tabel 3.19	Benchmarking Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	71
tabel 3.20	Kegiatan Inspeksi/Kunjungan ke Stasiun Slave dan Stasiun Transportable	72
tabel 3.21	Kegiatan Pemeliharaan Perangkat Monitoring	73
tabel 3.22	Perangkat Utama dan Pendukung yang Masuk Perhitungan	74
tabel 3.23	Benchmarking Terjaganya Opsional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi di UPT	78
tabel 3.24	Rekapitulasi Pengenaan Sanksi Denda Administratif	79
tabel 3.25	Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Sanksi Denda Administratif	81
tabel 3.26	Benchmarking Penanganan Sanksi Denda Administratif	84
tabel 3.27	Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Kualitas Layanan	86
tabel 3.28	Benchmarking Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	89
tabel 3.29	Peserta UNAR Reguler	91
tabel 3.30	Peserta UNAR Non Reguler	91
tabel 3.31	Benchmarking Persentase Penyelenggaraan Layanan Sertifi kasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	95
tabel 3.32	Pelaksanaan Penanganan Pencegahan dan Pengurangan Piutang BHP Frekuensi	97
tabel 3.33	Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Piutang dan Pengumpulan Dokumen Penghapusan Mutlak dan PPNTD	98
tabel 3.34	Benchmarking Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100

DAFTAR TABEL

tabel 3.35	Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik	101
tabel 3.36	Kegiatan Bimtek E-Licensing	102
tabel 3.37	Benchmarking Sosialisasi Pelayanan Publik	105
tabel 3.38	Benchmarking Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik	109
tabel 3.39	Benchmarking Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik	113
tabel 3.40	Tindak Lanjut Verifi kasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi) Tahun 2025	115
tabel 3.41	Pelaksanaan Kegiatan Tindak Lanjut Verifi kasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi)	115
tabel 3.42	Benchmarking Tindak Lanjut Verifi kasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi)	118
tabel 3.43	Nilai IKPA Tahun 2025	120
tabel 3.44	Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025	121
tabel 3.45	Benchmarking Nilai Kinerja Anggaran	123
tabel 3.46	Hasil Penilaian Kualitas Pelaporan UAKPA	125
tabel 3.47	Benchmarking Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA	128
tabel 3.48	Rekapitulasi Pengadaan Barang/Jasa	129
tabel 3.49	Kegiatan Pengelolaan BMN	130
tabel 3.50	Daftar Kenaikan Pangkat Tahun 2025	131
tabel 3.51	Daftar Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Tahun 2025	131
tabel 3.52	Pagu Anggaran Satker 613455 (Januari - Juni 2025)	132
tabel 3.53	Realisasi Anggaran Sebelum Cut off Satker 613455 (Januari - Juni 2025)	132
tabel 3.54	Pagu Anggaran Satker 694701 (Oktober - Desember 2025)	133
tabel 3.55	Realisasi Anggaran Satker 694701 (Juli - Desember 2025)	133
tabel 3.56	Realisasi Anggaran Keseluruhan	134

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Capaian Seluruh Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2025	2
Grafik 1.1	Struktur Organisasi Balmon Kelas I Palembang	18
Grafik 1.2	Perbandingan Jumlah Pegawai Periode 2021-2025	18
Grafik 1.3	Komposisi pegawai berdasarkan jenis pegawai	19
Grafik 1.4	Komposisi ASN berdasarkan pendidikan	19
Grafik 3.1	Capaian Realisasi Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	39
Grafik 3.2	Capaian 15 Pita Frekuensi Termonitor per Kab/Kota	41
Grafik 3.3	Capaian ISR Termonitor per Kab/Kota	42
Grafik 3.4	Capaian Hasil Monitor Teridentifi kasi per Kab/Kota	43
Grafik 3.5	Hasil Pemeriksaan Stasiun Radio <i>Microwave Link Remote Site</i> dan <i>Open Shelter</i>	50
Grafik 3.6	Hasil Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link Operator Seluler per Kab/Kota	50
Grafik 3.7	Hasil Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link Per Operator Seluler	51
Grafik 3.8	Capaian Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Siaran Radio FM	52
Grafik 3.9	Hasil Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Radio FM per Kab/Kota	53
Grafik 3.10	Capaian Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Televisi Digital	54
Grafik 3.11	Jumlah Penanganan Gangguan SFR (month to month)	61
Grafik 3.12	Hasil Monitoring Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	66
Grafik 3.13	Capaian Kinerja Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT Palembang	75
Grafik 3.14	Data Invoice Pengenaan Sanksi Denda Administratif	79
Grafik 3.15	Jenis Pelanggaran	79
Grafik 3.16	Data Nominal Denda Pengenaan Sanksi Denda Administratif	80
Grafik 3.17	Capaian Pengukuran Kualitas Layanan Telekomunikasi Tahun 2025	86
Grafik 3.18	Capaian Penyelenggaraan Layanan Sertifi kasi Operator Radio Melalui Ujian Negara Amatir Radio (UNAR)	92
Grafik 3.19	Persentase Capaian Peserta Berdasarkan Jenis Tingkatan UNAR Tahun 2025	92
Grafik 3.20	Capaian Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (MOTS-IKRAN)	92
Grafik 3.21	Target dan Realisasi Peserta Sosialisasi Pelayanan Publik	102
Grafik 3.22	Responden Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	106
Grafik 3.23	Capaian Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	106
Grafik 3.24	Capaian Responden Survei Pelaksanaan Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	110
Grafik 3.25	Capaian Nilai Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	111
Grafik 3.26	Capaian Tindak Lanjut Verifi kasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi) Berdasarkan Wilayah	115
Grafik 3.27	Perbandingan Jumlah Pelatihan yang Diikuti Pegawai 2024 dan 2025	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Balmon Kelas I Palembang	18
Gambar 3.1	Kegiatan Monitoring Penggunaan SFR di Kabupaten Musi Rawas Utara	39
Gambar 3.2	Pemetaan Data Target Monitor ISR 2025	41
Gambar 3.3	Kegiatan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Kab. Empat Lawang	42
Gambar 3.4	Kegiatan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Kab. Musi Rawas	44
Gambar 3.5	Kegiatan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Kab. PALI	46
Gambar 3.6	Kegiatan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Kota Pagaralam	46
Gambar 3.7	Kegiatan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Kota Palembang	47
Gambar 3.8	Kegiatan Pemeriksaan stasiun radio Microwave Link di Kab. Muara Enim	49
Gambar 3.9	Sebaran Stasiun Penyiaran di Provinsi Sumatera Selatan	52
Gambar 3.10	Kegiatan Pengukuran Parameter Teknis Radio Siaran Radio FM di Kabupaten Ogan Ilir	54
Gambar 3.11	Peta Capaian Kinerja Penanganan Gangguan SFR UPT Indonesia	59
Gambar 3.12	Kegiatan Penanganan Gangguan SFR di Banyuasin	60
Gambar 3.13	Kegiatan Penanganan Gangguan SFR di Palembang	62
Gambar 3.14	Kegiatan Penanganan Gangguan SFR di Ogan Ilir	63
Gambar 3.15	Kegitan Monitoring Alat dan atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital di Kab. Musi Rawas	66
Gambar 3.16	Kegiatan Monitoring dan Penertiban standar teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital di Kota Palembang	67
Gambar 3.17	Kegiatan Monitoring dan Penertiban standar teknis Alat dan/ atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital di Kota Palembang	67
Gambar 3.18	Kegitan Monitoring Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital di Kabupaten Ogan Ilir	69
Gambar 3.19	Kegitan Monitoring Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital di Kota Palembang	69
Gambar 3.20	Terjaganya Operasional dan Fungsi Stasiun Monitoring Frekuensi Radio	73
Gambar 3.21	Terjaganya Operasional dan Fungsi Stasiun Monitoring Frekuensi Radio	76
Gambar 3.22	Terjaganya Operasional dan Fungsi Stasiun Monitoring Frekuensi Radio	77
Gambar 3.23	Kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif Kab. Musi Banyuasin (Sungai lilin)	80
Gambar 3.24	Kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif Kab. Lahat	81
Gambar 3.25	Kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif Kab. Muara Enim	82
Gambar 3.26	Kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif Kab. Musi Banyuasin	83
Gambar 3.27	Kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif Kota Prabumulih	84
Gambar 3.28	Kegiatan Pengukuran Kualitas Layanan di Kota Palembang	86
Gambar 3.29	Palaksanaan Sertifikasi Layanan Operator Radio UNAR	90
Gambar 3.30	Pelaksanaan Layanan Sertifikasi Operator Radio MOTS	93
Gambar 3.31	Kegiatan Sertifikasi Layanan Operator Radio UNAR	94
Gambar 3.32	Kegiatan Sertifikasi Layanan Operator Radio UNAR	95
Gambar 3.33	Pelaksanaan Layanan Sertifikasi Operator Radio MOTS	95
Gambar 3.34	Pelaksanaan Pananganan Piutang BHP Radio	97
Gambar 3.35	Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik	100
Gambar 3.36	Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik	101
Gambar 3.37	Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.38	Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik	103
Gambar 3.39	Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik	104
Gambar 3.40	Pelaksanaan Survei IKM	106
Gambar 3.41	Pelaksanaan Survei IIPP	110
Gambar 3.42	Kegiatan Tindak Lanjut Verifi kasi Site ISR <i>Microwave Link</i> yang Tidak Sesuai (Prima Aksi)	113
Gambar 3.43	Kegiatan Tindak Lanjut Verifi kasi Site ISR <i>Microwave Link</i> yang Tidak Sesuai (Prima Aksi)	114

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Mandat, Peran dan Permasalahan Strategis
- E. Sistematika Pelaporan

A

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah memberikan ruang gerak yang cukup leluasa bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, yang juga telah membawa dampak pada sistem administrasi manajemen pemerintahan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan keterbukaan (transparansi), efisiensi dan pelayanan yang lebih baik. Menyadari situasi dan kondisi yang berkembang dewasa ini, Pemerintah cukup responsif dan secara bertahap telah melakukan pembenahan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan menuju terwujudnya Good Governance.

Penyelenggaraan Good Governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu upaya untuk mewujudkan Good Governance ini diantaranya adalah dengan menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban atas kepercayaan dan amanat yang telah diberikan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang.

Balmon Palembang dalam melaksanakan kegiatan selalu menanamkan CoreValus BerAKHLAK dalam setiap pelaksanaan tugas seperti Berorientasi Pelayanan yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, Akuntabel yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan, Kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, Harmonis yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, Loyal yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara, Adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, Kolaboratif yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai BerAKHLAK dalam setiap aspek kinerja, Balmon Palembang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang efisien, layanan publik yang berkualitas, dan kontribusi positif terhadap pembangunan nasional. Laporan Akuntabilitas Kinerja menjadi wujud konkret dari implementasi nilai-nilai BerAKHLAK dalam upaya mencapai visi dan misi instansi.

Melalui laporan akuntabilitas ini, dapat dilakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan termasuk efektivitas pelaksanaan program kerja ataupun kegiatan-kegiatan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan di masa yang akan datang.

B

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen SDPPI, Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2022 adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio yang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program;
2. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
3. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika;
4. Pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
5. Penyampaian Izin Stasiun Radio dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna frekuensi radio;

6. Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
7. Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
8. Pelaksanaan ujian amatir radio; dan
9. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang terdiri dari :

1. **Kepala Balai Monitor SFR Kelas I Palembang**
Bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan, dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur organisasi di bawahnya.

2. Subbagian Umum

Mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.

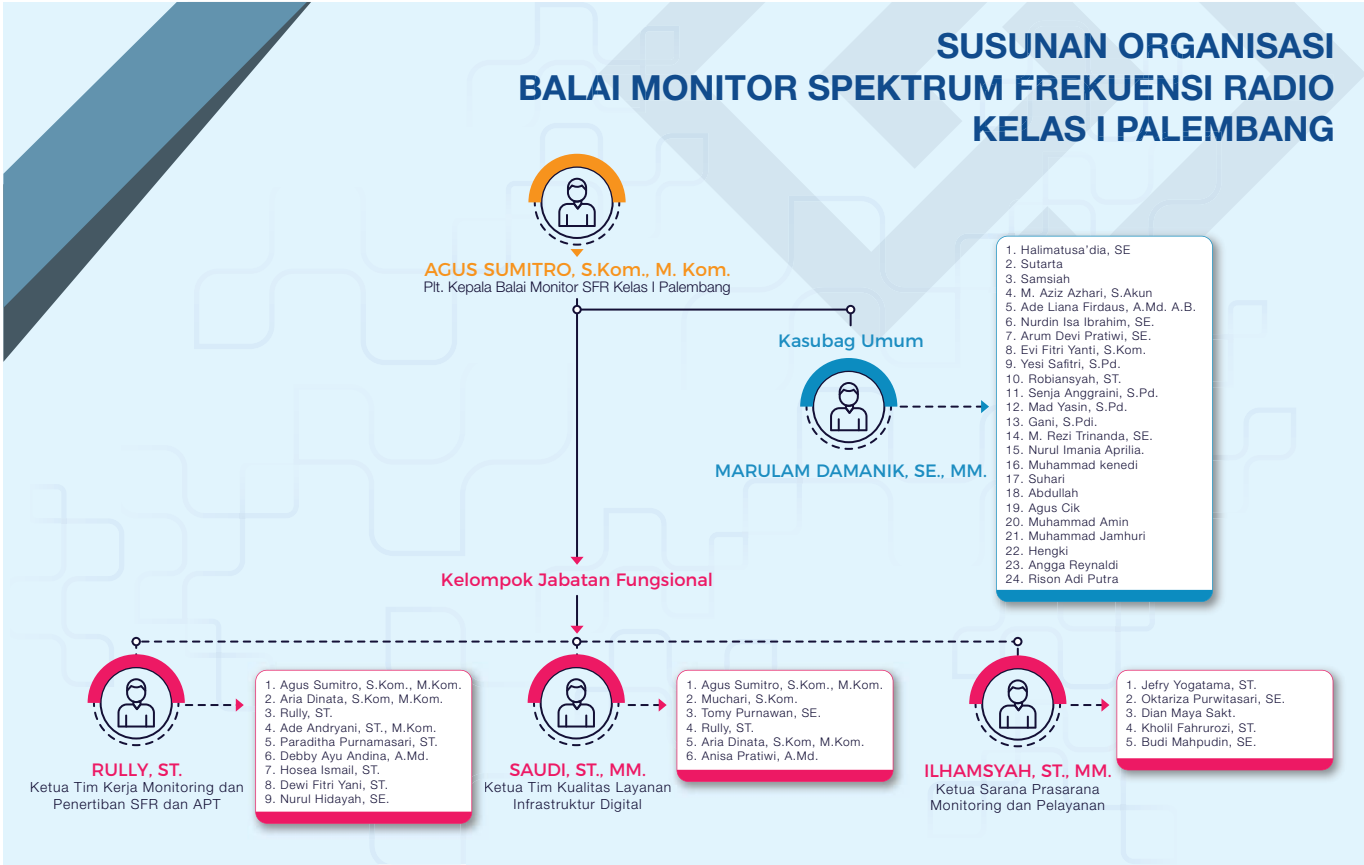
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Monitor Bidang Spektrum Frekuensi Radio sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan, yang terdiri dari:

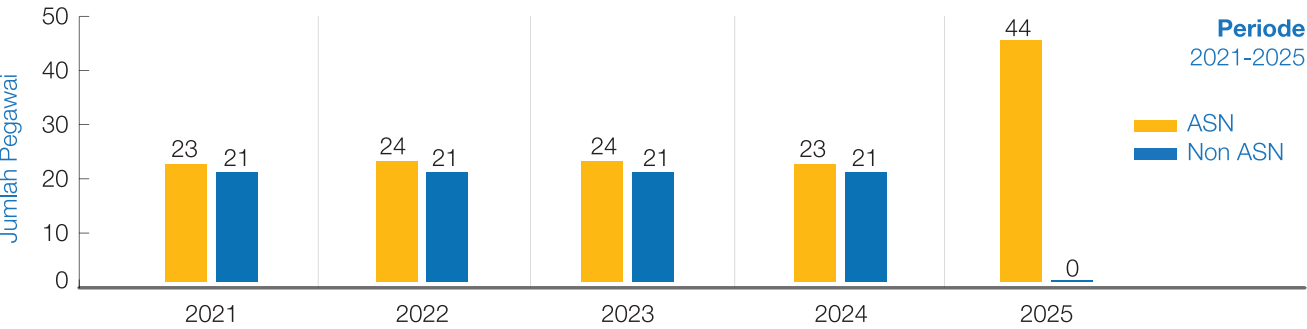
- a. Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi Spektrum Frekuensi Radio dan Alat dan Perangkat Telekomunikasi.
- b. Tim Kerja Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat dan Perangkat Telekomunikasi.
- c. Tim Kerja Pemeliharaan Infrastruktur Sistem Monitoring Frekuensi Radio dan Konsultasi Publik.

Adapun bagan struktur organisasi dan komposisi pegawai Balai Monitor SFR Kelas I Palembang tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balmon Kelas I Palembang

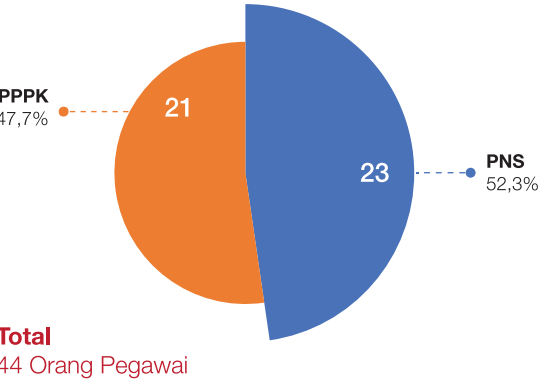


Grafik 1.2 Perbandingan Jumlah Pegawai Periode 2021-2025



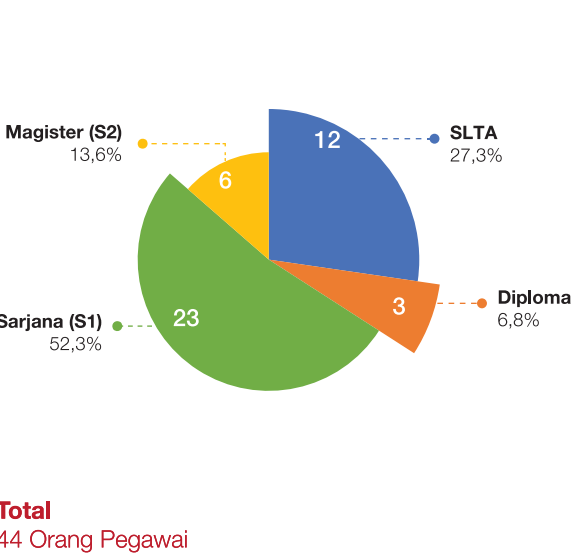
Grafik 1.2 menunjukkan perbandingan jumlah pegawai ASN dan Non ASN pada periode 2021–2025. Pada tahun 2021 hingga 2024, jumlah pegawai ASN relatif stabil pada kisaran 23–24 orang, sedangkan pegawai Non ASN juga tetap konsisten sebanyak 21 orang setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2025 terjadi perubahan yang signifikan, di mana jumlah pegawai ASN meningkat menjadi 44 orang, sementara pegawai Non ASN tercatat menjadi 0 orang, yang disebabkan pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK).

Grafik 1.3 Komposisi pegawai berdasarkan jenis pegawai



Grafik 1.3 menggambarkan komposisi pegawai berdasarkan jenis kepegawaian dengan total 44 orang pegawai. Dari keseluruhan pegawai tersebut, sebanyak 23 orang atau sekitar 52,3% merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan 21 orang atau sekitar 47,7% merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Komposisi ini menunjukkan bahwa jumlah PNS sedikit lebih dominan dibandingkan PPPK, namun secara keseluruhan proporsi kedua jenis pegawai relatif seimbang dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Grafik 1.4 Komposisi ASN berdasarkan pendidikan



Grafik 1.4 menunjukkan komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan. Dari total 44 orang pegawai, mayoritas ASN memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 23 orang atau 52,3%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai telah memiliki kualifikasi pendidikan tinggi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Selanjutnya, ASN dengan pendidikan SLTA berjumlah 12 orang atau 27,3%, sementara pegawai dengan pendidikan Magister (S2) tercatat sebanyak 6 orang atau 13,6%. Adapun ASN dengan pendidikan Diploma merupakan jumlah paling sedikit, yaitu 3 orang atau 6,8%.

Secara keseluruhan, komposisi ini mencerminkan bahwa tingkat pendidikan ASN didominasi oleh lulusan pendidikan tinggi, yang diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik.

MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LAKIP ini disusun untuk memberikan gambaran yang transparan dan akurat mengenai kinerja instansi. Maksudnya adalah memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai kontribusi, inovasi, serta dampak yang dihasilkan oleh Balmon Palembang dalam mendukung visi dan misi Ditjen Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital.

Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja instansi selama tahun berjalan, memaparkan program yang dilaksanakan, serta mengevaluasi efektivitas strategi yang telah diterapkan. Selain itu juga menjadi sarana pertanggungjawaban instansi kepada publik dan untuk memberikan informasi agar dapat dipahami oleh masyarakat umum tentang kinerja konkret yang telah dicapai.

Laporan Akuntabilitas Kinerja juga diarahkan untuk menjadi dasar perbaikan dan inovasi. Melalui analisis yang cermat, instansi dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan peningkatan serta merumuskan strategi untuk menghadapi

tantangan yang muncul serta memberikan landasan bagi perencanaan strategis ke depannya. Dengan menganalisis tren dan perkembangan, instansi dapat merancang kebijakan yang lebih adaptif dan relevan dengan dinamika lingkungan.

D MANDAT, PERAN DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Ditjen Infrastruktur Digital memiliki peran strategis dalam mengelola aspek-aspek krusial sumber daya dan teknologi informasi serta memainkan peran sentral dalam mendukung efisiensi operasional, inovasi, dan akuntabilitas kinerja di tingkat pemerintahan. Untuk mendukung RPJMN tahun 2025–2029, Sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital, Ditjen Infrastruktur Digital memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur digital dengan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang infrastruktur digital;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur digital;
3. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur digital;
4. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sasaran Program Ditjen Infrastruktur Digital sesuai Rencana Strategis tahun 2025-2029 antara lain:

1. Meningkatnya coverage Broadband yang menjangkau ke seluruh Indonesia;
2. Meningkatnya Penetrasi dan Utilisasi (Take-Up) Internet Broadband;
3. Meningkatnya Kualitas Internet Broadband Nasional;
4. Meningkatnya Pertumbuhan Industri telekomunikasi dan Data Center yang berkelanjutan;
5. Meningkatnya pengembangan industri perangkat dalam negeri yang aman dan terstandarisasi;
6. Meningkatnya Akselerasi Penyediaan Infrastruktur dan Sumber Daya untuk Layanan Khusus secara nasional;
7. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan PNBPN Bidang Infrastruktur dan Perangkat Digital;
8. Terwujudnya Transformasi Internal Manajemen Ditjen Infrastruktur Digital yang adaptif dan resilien.



Ditjen Infrastruktur Digital memberi mandat kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam melaksanakan penyelenggaraan layanan publik Bidang Frekuensi dan Perangkat TIK dan memiliki titik fokus pada kegiatan Meningkatkan Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi di wilayah kerjanya.

Balmon Kelas I Palembang disamping melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap frekuensi radio juga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan digital, dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio dan/atau perangkat telekomunikasi dan digital di lapangan dihadapkan dengan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Banyaknya penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan parameter teknis dan ketentuan yang berlaku;
2. Banyaknya wilayah pengguna spektrum frekuensi radio yang menjadi objek tidak dapat dijangkau karena akses yang kurang memadai;
3. Masih kurangnya kesadaran atau pemahaman masyarakat tentang penggunaan spektrum frekuensi radio sehingga diperlukan pemberian edukasi yang berkesinambungan berupa sosialisasi.

E SISTEMATIKA PELAPORAN

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Kelas I Palembang berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Laporan Kinerja Balmon Kelas I Palembang meliputi:

PENDAHULUAN

berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi;

AKUNTABILITAS KINERJA

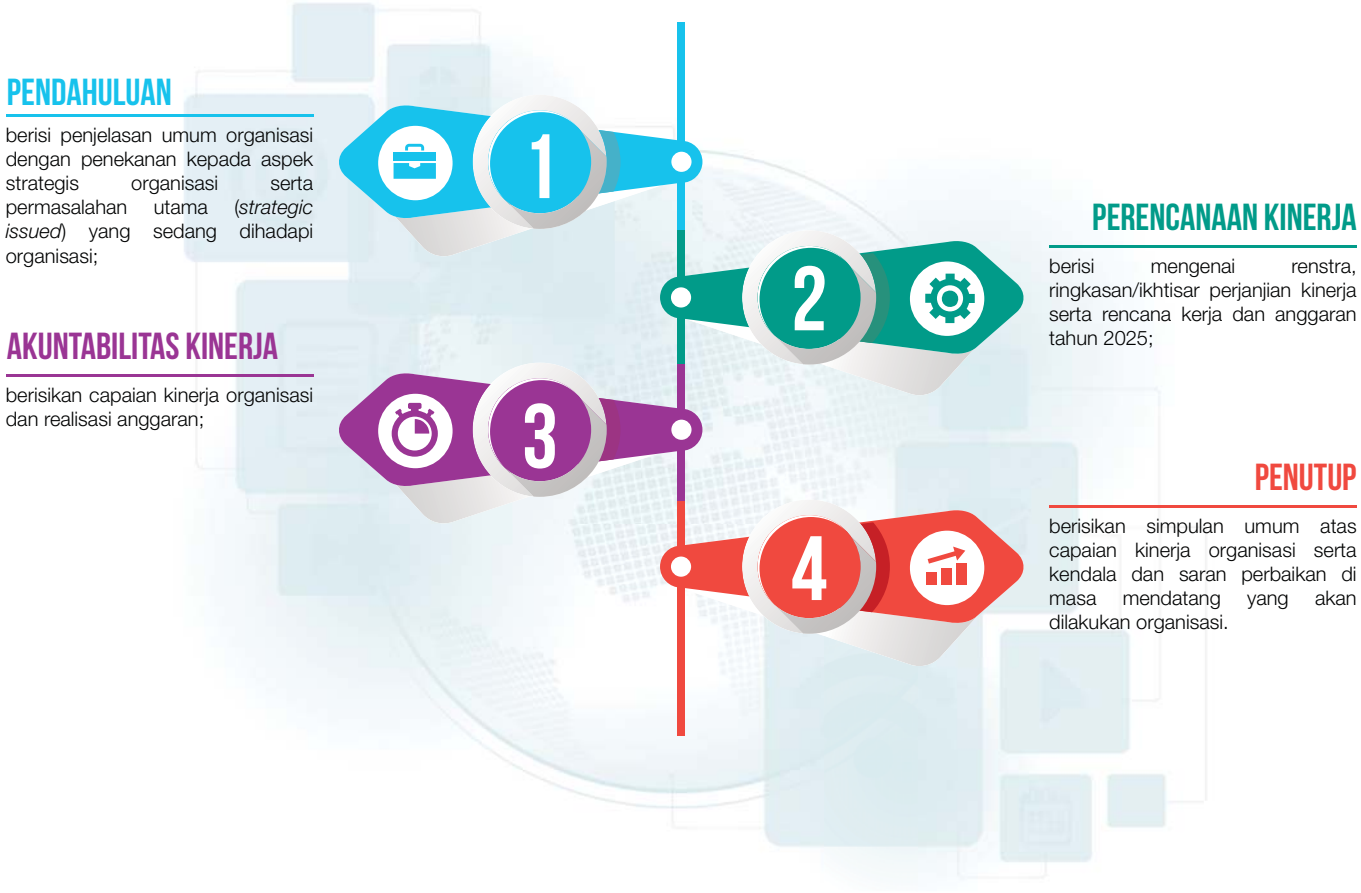
berisikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran;

PERENCANAAN KINERJA

berisi mengenai renstra, ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja serta rencana kerja dan anggaran tahun 2025;

PENUTUP

berisikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta kendala dan saran perbaikan di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi.



02

PERENCANAAN
KINERJA

- A. Rencana Strategis Tahun 2025-2029
- B. Sasaran Program
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- D. Rencana Kerja dan Anggaran 2025

A

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra Ditjen Infrastruktur Digital disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra Ditjen Infrastruktur Digital tahun 2025–2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan untuk tahun 2025–2029.

Visi dan misi presiden menjadi acuan bagi setiap kementerian dalam menyusun rencana strategis kementerian. Dalam hal ini kementerian tidak perlu lagi menyusun visi karena visinya harus sesuai dengan visi dan misi presiden, sama halnya dengan rumusan visi Infrastruktur Digital yang sesuai dengan visi Kementerian Komunikasi dan Digital.

Secara umum visi presiden yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 dengan Misi, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Dengan mengacu pada visi Kementerian Komunikasi serta tugas dan fungsi Ditjen Infrastruktur Digital, maka visi Ditjen Infrastruktur Digital dapat dirumuskan sebagai berikut: **“Terwujudnya Infrastruktur Digital Nasional yang Inklusif, berkualitas, efektif dan efisien serta Berkelanjutan untuk Mendukung Transformasi Digital dalam rangka mewujudkan Asta Cita”.**

Visi ini menekankan pada elemen utama:

1. Inklusif artinya menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat terhubung;
2. Berkualitas artinya kapasitas, kualitas, dan ketersediaan jaringan memenuhi kebutuhan industri digital dan layanan kepada masyarakat;
3. Efektif dan efisien, artinya pengelolaan dan penyediaan infrastruktur digital dapat mendorong penyediaan layanan dan pengembangan industri digital yang efektif dan efisien;
4. Berkelanjutan, artinya penyediaan infrastruktur digital yang berkelanjutan dengan mendorong pertumbuhan industri digital sehingga dapat melakukan peningkatan investasi dalam pengembangan infrastruktur dan layanan digital.

Dalam upaya untuk mewujudkan misi Kementerian Komdigi dan sesuai fungsi dan peran Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, maka misi Ditjen Infrastruktur Digital dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mendukung percepatan konektivitas digital yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau termasuk ekosistem digital yang aman dan berkelanjutan;
2. Mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan dalam mempercepat tersedianya konektivitas digital;
3. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam rangka mengurangi gangguan, marabahaya serta peredaran perangkat digital yang ilegal;
4. Meningkatkan profesionalitas dan kapasitas SDM Ditjen Infrastruktur Digital dalam kerangka Reformasi Birokrasi.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang selaku UPT perpanjangan tangan Ditjen Infrastruktur Digital tentunya mendukung sepenuhnya rencana strategis tahun 2025-2029 yang telah disusun oleh Ditjen Infrastruktur Digital. Selanjutnya agar mampu mendukung dan mensukseskan rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025-2029 secara khusus, sistem perencanaan pembangunan nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045 secara umum melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah diturunkan ke UPT.



B SASARAN PROGRAM

Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital berusaha mewujudkan tujuan dari Kementerian Komdigi sesuai tugas dan fungsi Ditjen Infrastruktur Digital yaitumenyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur digital. Oleh karena itu tujuan dari Ditjen Infrastruktur Digital antara lain:

1. Terwujudnya pemerataan infrastruktur dan konektivitas digital di seluruh Indonesia;
2. Terwujudnya peningkatan penetrasi dan utilisasi internet broadband;
3. Terwujudnya peningkatan kualitas layanan melalui pengembangan konektivitas kecepatan tinggi
4. Terwujudnya pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi dan orbit satelit yang efektif dan efisien dalam mendorong pertumbuhan industri digital yang berkelanjutan
5. Terwujudnya pengelolaan standardisasi dan sertifikasi perangkat yang memberikan keamanan kepada masyarakat pengguna
6. Mendukung ketersediaan layanan khusus untuk kepentingan publik
7. Terwujudnya Peningkatan pelayanan publik bidang infrastruktur digital

Dengan mengacu pada sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Digital serta sesuai fokus tugas pokok dan fungsinya, maka

1. MENINGKATNYA KEPATUHAN DAN KUALITAS PENGENDALIAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO, PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI

Pada tahun 2025 telah ditetapkan 13 indikator kinerja sasaran kegiatan Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi dengan rincian sebagai berikut:

1.1. Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Indikator Kinerja	Target
1. Verifikasi Data Koordinat Site ISR <i>Microwave Link</i> dan Penyiaran (<i>QR Code Site</i>) program MOTS IKRAN	80%

Kegiatan monitoring pita frekuensi radio di Kabupaten/ Kota dilaksanakan melalui kegiatan observasi dan identifikasi spektrum frekuensi radio. Pita frekuensi radio yang di monitor mencakup dinas siaran, bergerak darat, dinas tetap (selain microwave link), serta dinas-dinas yang mencakup marabahaya (dinas maritim dan dinas penerbangan).

Adapun target observasi dan identifikasi frekuensi radio pada tahun 2025 dilakukan minimal terhadap 15 subservice/pita frekuensi. Lebih lanjut, apabila ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil kegiatan

Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital merumuskan sasaran program sebagai berikut:

1. Meningkatnya coverage Broadband yang menjangkau ke seluruh Indonesia;
2. Meningkatnya Penetrasi dan Utilisasi (Take-Up) Internet Broadband;
3. Meningkatnya Kualitas Internet Broadband Nasional;
4. Meningkatnya Pertumbuhan Industri telekomunikasi dan Data Center yang berkelanjutan;
5. Meningkatnya pengembangan industri perangkat dalam negeri yang aman dan terstandarisasi;
6. Meningkatnya Akselerasi Penyediaan Infrastruktur dan Sumber Daya untuk Layanan Khusus secara nasional;
7. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan PNPB Bidang Infrastruktur dan Perangkat Digital; dan
8. Terwujudnya Transformasi Internal Manajemen Ditjen Infrastruktur Digital yang adaptif dan resilien.

Dalam mendukung tercapainya sasaran program Ditjen Infrastruktur Digital, Balmon Palembang mempunyai sasaran kegiatan sebagai berikut:

tersebut, maka wajib dilakukan pengenaan sanksi secara kumulatif dan bersamaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun indikator Kab/Kota termonitor adalah sebagai berikut:

1. 15 Pita Frekuensi Termonitor;
2. 60% ISR Termonitor;
3. 80% Hasil Monitor Teridentifikasi; dan
4. Pengenaan Sanksi Terhadap Temuan Pelanggaran dari Hasil Monitor Teridentifikasi

1.2. Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Indikator Kinerja	Target
2. Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)	100%

Kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) merupakan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang untuk memastikan bahwa data stasiun pengguna frekuensi radio yang digunakan di lapangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin Stasiun Radio (ISR). Kegiatan ini merupakan bentuk pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan digital, untuk mewujudkan terciptanya tertib penggunaan spektrum frekuensi radio dan tertib penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan digital.

Ada tiga sub indikator pada kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi), yaitu pemeriksaan stasiun radio microwave link, pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran Radio FM dan pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran Televisi Digital.

Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi) terdiri dari :

1. **Pemeriksaan stasiun radio *Microwave Link***
Pemeriksaan stasiun radio *microwave link* dilaksanakan melalui tahapan yang mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Stasiun Radio. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan perizinan serta optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio.

Target pemeriksaan ditetapkan oleh Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital dan dibagi menjadi dua metode, yaitu pemeriksaan remote site dan inspeksi lapangan (*open shelter*). Pemeriksaan remote site wajib dilaksanakan sekurang-kurangnya 100% dari total data target yang tercantum dalam Aplikasi Pemeriksaan Stasiun Radio (APSTARD).

Sementara itu, pemeriksaan melalui inspeksi langsung (*open shelter*) dilakukan sekurang-kurangnya 60% dari total data target yang telah ditetapkan.

Adapun pada tahun 2025 target pemeriksaan remote site yaitu 6.303 link. Sedangkan inspeksi langsung (*open shelter*) yaitu 593 link.

2. Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Siaran Radio FM

Pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran dilakukan pada pita frekuensi siaran Radio FM. Pengukuran stasiun siaran Radio FM dilakukan melalui tahapan sesuai dengan SOP Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Stasiun Radio FM. Adapun target pengukuran stasiun siaran terdiri dari Seluruh stasiun siaran Radio FM pada Aplikasi Pemeriksaan Stasiun Radio (APSTARD). Pada tahun 2025 target pengukuran untuk siaran Radio FM di Wilayah Kerja Balai Monitor SFR Kelas I Palembang adalah sekurang-kurangnya 50 ISR yang tersebar di 17 Kab/Kota.

3. Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Siaran Televisi Digital

Pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siarandilakukan pada pita frekuensi siaran TV Digital. Pengukuran stasiun siaran TV Digital dilakukan melalui tahapan sesuai dengan SOP Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Stasiun TV Digital. Pada tahun 2025 target pengukuran untuk Radio FM berjumlah 11 Televisi Digital yang tersebar di 7 Kab/Kota.



1.3. Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Indikator Kinerja	Target
3. Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%

Target penanganan gangguan Spektrum Frekuensi Radio adalah untuk mengatasi interferensi pada sinyal radio yang di sebabkan antara lain seperti, gangguan elektromagnetik, gangguan dari perangkat elektronik lain atau gangguan dari radio frekuensi itu sendiri, tujuan dari kegiatan penanganan gangguan Spektrum Frekuensi Radio antara lain untuk meningkatkan kualitas sinyal radio, mengatasi interferensi menjadi clear pada komunikasi radio, meningkatkan keandalan sistem komunikasi radio, mengurangi risiko kesalahan atau kegagalan komunikasi.

Indikator kegiatan ini meliputi sebagai berikut:

1. 95% jumlah aduan gangguan SFR tertangani (Dinas Amatir, Dinas Penerbangan, Dinas Siaran, Dinas Tetap, Dinas Bergerak Darat, Dinas Maritim, Dinas Satelit, dan Dinas Lainnya);
2. Tertangani yang dimaksud pada nomor 1 di atas dilihat dari terbitnya Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh Ka. UPT;
3. Terhadap gangguan pada dinas keselamatan batas maksimal waktu terbitnya Surat Perintah Tugas (SPT) oleh Ka. UPT adalah 1x24 jam, sedangkan

- untuk dinas non keselamatan batas maksimal waktu terbitnya Surat Perintah Tugas (SPT) oleh Ka. UPT adalah 7x24 jam;
4. Penanganan gangguan SFR dilaksanakan terhadap seluruh dinas/service sesuai antrian tiket aduan gangguan pada aplikasi lapor gangguan SFR trouble ticket kecuali terhadap aduan gangguan terkait dinas keselamatan yang memiliki prioritas lebih utama untuk ditangani;
 5. Gangguan pada band high frequency (HF) dilaporkan/dikoordinir oleh pusat melalui Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital c.q Koordinator HF;
 6. Gangguan yang melibatkan batas negara dan internasional wajib dikoordinasikan dengan Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital.
 7. Penanganan gangguan SFR wajib memperhatikan kecepatan waktu penyelesaian.

1.4. Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

Indikator Kinerja	Target
4. Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75%

Kegiatan monitoring dan penertiban Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital dilaksanakan terhadap berbagai jenis perangkat telekomunikasi dengan mengutamakan perangkat prioritas yang telah ditetapkan. Penetapan perangkat prioritas tersebut bertujuan untuk memastikan kegiatan monitoring dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pengawasan perangkat telekomunikasi. Target monitoring dan penertiban ditetapkan berdasarkan cakupan wilayah dan jumlah perangkat yang dimonitor sebagai indikator kinerja utama kegiatan.

Pada Tahun 2025, target kegiatan monitoring dan penertiban Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital mencakup 10 Kabupaten/Kota yang termonitor dengan jumlah perangkat yang dimonitor sebanyak 300 perangkat. Pelaksanaan monitoring dan penertiban dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan terhadap perangkat prioritas pada wilayah sasaran. Melalui pencapaian target tersebut, diharapkan monitoring dan penertiban terhadap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital dapat terlaksana secara optimal serta mendukung tersedianya data monitoring dan penertiban yang akurat dan komprehensif sebagai bahan evaluasi kinerja dan pengambilan kebijakan.

1.5. Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT

Indikator Kinerja	Target
5. Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85%

Stasiun Monitoring Frekuensi Radio merupakan infrastruktur utama dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Kelas I Palembang dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Sumatera Selatan.

Pada tahun 2025 target kegiatan terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio adalah untuk menjaga perangkat dalam kondisi baik dan siap digunakan, sehingga stasiun monitor frekuensi radio dapat dioperasikan untuk melakukan kegiatan monitoring.

Capaian kinerja dipengaruhi oleh indikator sebagai berikut:

1. Melaporkan kondisi perangkat setiap bulan dalam bentuk Nota Dinas ke Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital dan melakukan update status perangkat pada Aplikasi Pemeliharaan SMFR (<https://smfr.postel.go.id>);
2. Melakukan upload hasil monitoring pengukuran pita dan monitoring okupansi sesuai penugasan kedalam Aplikasi *Report Online* (ROL) <https://rol.postel.go.id> dan Aplikasi Sistem Monitoring Spektrum Nasional (SMSN) <https://smsn.postel.go.id/>;
3. *Service Level Agreement* (SLA) Stasiun Monitor Tetap/*Transportable* di UPT sama dengan rata-rata dari SLA seluruh stasiun monitor tetap/*transportable*;
4. SLA Stasiun Monitor Bergerak di UPT sama dengan rata-rata dari SLA seluruh stasiun monitor bergerak;

5. Untuk stasiun monitor dengan kondisi baik (tidak ada perangkat yang rusak), maka :
 - a). SLA Stasiun Monitor Tetap/*Transportable* = 100% bila menyampaikan data monitoring pada Aplikasi ROL sebanyak minimal 1 kali per bulan dan data monitoring okupansi di SMSN sebanyak minimal 1 kali per minggu (4 kali dalam sebulan), bila tidak menyampaikan (input) data monitoring sesuai target maka SLAnya = 0%
 - b). SLA Stasiun Monitor Bergerak = 100% bila menyampaikan data monitoring pada Aplikasi ROL sebanyak minimal 1 kali per bulan, bila tidak menyampaikan (input) data monitoring maka SLAnya = 0 %
6. Perangkat Utama dan Pendukung yang masuk ke dalam perhitungan SLA Stasiun Monitor adalah sebagai berikut:
 - a). Stasiun Monitor Tetap/*Transportable* Pabrikasi TCI
 - *All Band Receiver*/Radio *Direction Finder* (utama)
 - Antenna (utama)
 - Router (pendukung)
 - UPS (pendukung)
 - b). Stasiun Monitor Bergerak
 - *All Band Receiver*/ Radio *Direction Finder* (utama)
 - Antenna (utama)
 - *Telescopic Mast* (pendukung)
 - Laptop (pendukung)
 - *Software Spectrum Monitoring* (utama)
 - Mobil (pendukung)

1.6. Penanganan Sanksi Denda Administratif

Indikator Kinerja	Target
6. Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%

Penanganan Sanksi Denda Administratif dapat dilaksanakan jika kegiatan monitoring dan penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital terlaksana. Pelanggaran yang ditemukanali dari hasil Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital akan dikenakan sanksi diantaranya sanksi denda administratif.

Jenis pelanggaran yang dikenakan sanksi denda administratif meliputi pelanggaran ISR, Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) dan sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital yang mengacu pada SOP pengenaan sanksi denda administratif, Permen Kominfo No 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk pelaksanaan penetapan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada sektor sumber

daya dan perangkat pos dan informatika serta Perdirjen Infrastruktur Digital No 3 tahun 2025 tentang Tata cara pembinaan, pengawasan, dan peneanaan sanksi

terhadap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio, dan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunkasi.

1.7. Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan

Indikator Kinerja	Target
7. Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%

Indikator yang memengaruhi capaian kinerja pengukuran kualitas layanan mengacu pada berbagai faktor teknis dan operasional mengenai efektivitas penggunaan spektrum frekuensi radio yang berdampak langsung pada kualitas jaringan telekomunikasi. Dalam pelaksanaannya, pengukuran kualitas layanan ini difokuskan pada penyelenggaraan jaringan bergerak seluler di wilayah kerja UPT dengan prioritas yang telah ditetapkan, di mana seluruh rangkaian kegiatan dilakukan melalui tahapan pengukuran yang sistematis dan terukur.

Penentuan keberhasilan kinerja ini didasarkan pada kriteria target yang mewajibkan pengukuran dilaksanakan minimal pada 80% kabupaten/kota di wilayah kerja Balmon Palembang. Adapun perhitungan capaian target dalam Perjanjian Kinerja (PK) menggunakan formula.

$$\frac{\text{Jumlah kabupaten/kota yang sudah diukur}}{\text{Jumlah 80\% kabupaten/kota}} \times 100\%$$

1.8. Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)

Indikator Kinerja	Target
8. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	100%

Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio merupakan pelayanan publik dalam memberikan legalitas/sertifikasi kecakapan dalam penggunaan alat komunikasi radio sesuai ketentuan yang berlaku. Layanan sertifikasi operator radio yang diselenggarakan adalah Ujian Nasional Amatir Radio (UNAR) bagi pengguna amatir radio untuk memperoleh Izin Amatir Radio dan Sosialisasi/bimbingan teknis komunikasi radio nelayan (MOTS-IKRAN).

sertifikat kepada peserta yang mengikuti kegiatan Bimtek.

Indikator capaian kinerja Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN) adalah terselenggaranya kegiatan UNAR sebanyak 6 kali dan MOTS-IKRAN sebanyak 1 kali.

Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) dilakukan dengan sistem *Computer Assisted Test* (CAT). Untuk mencapai target, UNAR dilaksanakan secara reguler dan non reguler. UNAR reguler dilaksanakan di Kantor Balmon Kelas I Palembang, sedangkan UNAR non reguler dilaksanakan di luar kantor. Peserta yang dinyatakan lulus ujian diberikan Izin Amatir Radio (IAR).

Adapun pemberian sosialisasi/bimbingan teknis untuk komunikasi radio nelayan berupa bimtek *Short Range Certificate* (SRC) & *Long Range Certificate* (LRC). Bimbingan teknis ini memberikan pemahaman komunikasi radio maritim bagi nelayan dan pemberian



1.9. Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio

Indikator Kinerja	Target
9. Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%

Pelaksanaan penanganan piutang BHP Frekuensi Radio merupakan salah satu indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Balmon Palembang Tahun 2025 yang bertujuan untuk mencegah terjadinya piutang Biaya Hak Pengguna (BHP) oleh wajib bayar. Indikator tercapainya kinerja dapat diukur dengan rumusan sebagai berikut:

1. Penanganan pencegahan dan pengurangan Piutang minimal 80% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Penangan Piutang} = \frac{\text{Jumlah piutang dihubung}}{\text{Target Piutang}} \times 100\%$$

2. Koordinasi Penanganan Piutang (dengan KPKNL, pengumpulan dokumen penghapusan mutlak dan PPNT0).

1.10. Sosialisasi Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Target
10. Sosialisasi Pelayanan Publik	100%

Sosialisasi pelayanan publik merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh Balmon Kelas I Palembang kepada masyarakat khususnya pengguna frekuensi radio. Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarkan informasi terkait penggunaan spektrum frekuensi radio dan mendapat umpan balik terhadap kualitas layanan yang telah diterima oleh masyarakat (pengguna frekuensi).

Indikator capaian kinerja Sosialisasi Pelayanan Publik adalah terselenggaranya sosialisasi minimal sekali dalam setahun secara *offline/online* dengan jumlah minimal 30 peserta.

1.11. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)

Indikator Kinerja	Target
11. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%

Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan persepsi kualitas pelayanan yang diperoleh secara kuantitatif dan kualitatif terhadap pelayanan publik yang diberikan Balmon SFR Kelas I Palembang.

Berdasarkan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, survey dilaksanakan minimal satu kali kegiatan selama satu tahun dengan jumlah minimal 30 responden. Nilai minimum IKM/IPKP sesuai dengan persyaratan pada pembangunan Zona Integritas menuju WBK yaitu 3,2 (skala 4).

Parameter penyusunan pertanyaan pada survey IKM/ IPKP sebagai berikut:

1. Persyaratan;
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
3. Waktu penyelesaian;
4. Biaya/tarif;
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi pelaksana;
7. Perilaku pelaksana;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
9. Sarana dan Prasarana

1.12. Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK))

Indikator Kinerja	Target
12. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%

Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik bertujuan untuk mengukur Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) terhadap pelayanan publik yang diberikan Balmon SFR Kelas I Palembang terhadap Masyarakat khususnya pengguna ferkuensi radio. Parameter penyusunan pertanyaan pada survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) sebagai berikut :

1. Diskriminasi Pelayanan;

2. Pelayanan di luar prosedur;

3. Penerimaan imbalan;

4. Pungutan liar;

5. Percaloan/perantara tidak resmi.

Indikator capaian kinerja Survey Integritas Pelayanan Publik yaitu pelaksanaan kegiatan secara mandiri atau dengan lembaga survey dan melaporkan hasil pengolahan survey pada tahun berjalan. Nilai minimum IIPP/IPAK sesuai dengan persyaratan pada pembangunan Zona Integritas menuju WBK yaitu 3,6 (skala 4). Survey dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun dengan jumlah minimal 30 responden.

1.13. Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)

Indikator Kinerja	Target
13. Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)	100%

Prima Aksi merupakan kegiatan lanjutan dari verifikasi koordinat site ISR yang telah dilakukan UPT sejak tahun 2023–2024. Pada tahun 2025, fokus kegiatan tidak lagi pada verifikasi, tetapi pada memastikan hasil verifikasi yang menyatakan “tidak sesuai” benar-benar ditindaklanjuti oleh pemegang ISR melalui modifikasi data koordinat ISR atau penghentian ISR.

Adapun perhitungan capaian target dalam Perjanjian Kinerja (PK) menggunakan formula:

Jumlah site tidak sesuai yang telah ditindaklanjuti

Jumlah Total site ISR yang tidak sesuai

x 100%

Kriteria site dinyatakan telah ditindaklanjuti apabila Koordinat ISR telah dimodifikasi sesuai hasil verifikasi dan mengacu pada MDRS, atau ISR telah dihentikan (status tidak aktif).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tahapan evaluasi data verifikasi sebelumnya, penetapan target kinerja, monitoring dan evaluasi triwulanan, serta dukungan layanan *fast-track* perizinan ISR. Implementasi MDRS menjadi kunci dalam memastikan keseragaman referensi koordinat dan mencegah kesalahan data berulang.

Kegiatan ini berkontribusi langsung pada peningkatan akurasi data ISR nasional, penurunan potensi penolakan ISR akibat kesalahan koordinat, efisiensi pengawasan spektrum, serta mendukung keandalan jaringan telekomunikasi yang dimanfaatkan masyarakat luas.



2. MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA DITJEN INFRASTRUKTUR DIGITAL YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien yang ditetapkan tahun 2025 yaitu Nilai kinerja pelaksanaan anggaran dengan target nilai yaitu 86.95 dan Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA dengan target nilai 100.

2.1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas I Palembang Tahun 2025

Nilai kinerja anggaran merujuk pada pengukuran atau evaluasi sejauh mana penggunaan anggaran suatu organisasi atau instansi pemerintah dapat mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Hal Ini mencakup efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan atau program.

Indikator Kinerja	Target
1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas I Palembang Tahun 2025 Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas I Palembang Tahun 2025	86,95%

Indikator Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Infrastruktur Digital meliputi kualitas perencanaan, pelaksanaan dan realisasi anggaran, didukung dengan monitoring dan evaluasi sehingga perencanaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Tujuan Pengukuran IKPA yaitu:

1. Kelancaran pelaksanaan Anggaran meliputi pembayaran/realisasi anggaran, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, SPM yang akurat dan kebijakan dispensasi SPM.

2. Mendukung Manajemen kas meliputi pengelolaan UP/TUP, revisi DIPA, Renkas RPD, Deviasi Halaman III Dipa dan Return SP2D.

3. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan meliputi penyampaian LPJ bendahara dan penyelesaian pagu minus belanja.

Dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

NKA =

NK Perencanaan Satker Baru + (NK Pelaksanaan Satker Baru + NK Pelaksanaan Satker Lama)

2

2.1. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Laporan keuangan UAKPA juga mencerminkan transparansi dan akuntabilitas, dengan menyajikan informasi keuangan secara terinci dan akurat, laporan ini membantu meningkatkan kepercayaan dari pihak-pihak yang terlibat. Transparansi menjadi landasan yang kuat untuk membangun tata kelola keuangan yang baik dan efisien dalam suatu organisasi atau unit kerja. dengan demikian, laporan keuangan UAKPA memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan keuangan yang berkelanjutan dan akuntabilitas.

Indikator Kinerja	Target
1. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	100%

Indikator Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA diukur berdasarkan 6 indikator yaitu jumlah transaksi koreksi audit, kesalahan penggunaan akun belanja modal/barang, saldo kas di bendahara akhir tahun, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ke entitas pelaporan, hasil penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan, dan ketepatan waktu penyampaian laporan hasil penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan ke entitas pelaporan.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen kesepakatan berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

PK merupakan instrumen manajemen kinerja yang penting dalam mengukur pencapaian tujuan dan memberikan arah dalam peningkatan kinerja pegawai. Penetapan kinerja Balmon Palembang tahun 2025 dalam wujud Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Infrastruktur Digital kepada Kepala Balai Monitor SFR Kelas I Palembang, dijabarkan dalam 2 Sasaran Kegiatan dengan 15 Indikator Kinerja Sasaran kegiatan (IKSK), sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	80%
		2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)	100%
		3. Persentase (%)Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%
		4. Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75%
		5. Persentase % Terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT	85%
		6. Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%
		7. Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%
		8. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKLAN)	100%
		9. Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%
		10. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	100%
		11. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%
		12. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK))	100%
		13. Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas I Palembang Tahun 2025	86,95 (Nilai)
		2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97 (Nilai)



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025

Dalam upaya mencapai target Perjanjian Kinerja 2025, Balmon Palembang didukung dengan Pagu Anggaran yang terbagi menjadi 2 DIPA dikarenakan adanya proses likuidasi Kementerian/Lembaga dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pagu Anggaran Berdasarkan Rincian Output (Satker Lama 613455)

Program/Kegiatan/RO		Anggaran (Rp)
Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik		
078	Layanan dukungan pengawasan spektrum frekuensi radio UPT	553.445.000
U00	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Sumatera	20.148.000
U01	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Sumatera	151.528.000
U04	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota Wilayah Sumatera	8.965.000
U05	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Sumatera	26.064.000
U06	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut/ Sungai Wilayah Sumatera	2.870.000
CCL	Pemeliharaan Alat Monitoring UPT	36.575.000
Program Dukungan Manajemen		
994	Layanan Perkantoran	3.177.299.000
Jumlah		3.976.894.000

Tabel 2.3
Pagu Anggaran Berdasarkan Rincian Output (Satker Baru 694701)

Program/Kegiatan/RO		Anggaran (Rp)
Program Dukungan Manajemen		
078	Layanan dukungan pengawasan spektrum frekuensi radio UPT	1.522.069.000
U00	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Sumatera	30.141.000
U01	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Sumatera	209.250.000
U03	Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut/ Sungai Wilayah Sumatera	52.756.000
U04	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota Wilayah Sumatera	20.988.000
U05	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Sumatera	162.529.000
U06	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut/ Sungai Wilayah Sumatera	35.718.000
CCL	Pemeliharaan Alat Monitoring UPT	486.819.000
Program Dukungan Manajemen		3.976.894.000
960	Layanan organisasi dan tata kelola internal	2.000.000
994	Layanan Perkantoran	4.207.877.000
951	Layanan sarana internal	111.713.000
Jumlah		6.841.860.000



Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, LAKIP 2025 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran kegiatan yang ingin dicapai oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang.

A

PENGUKURAN KINERJA 2025

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka, dan jumlah persentase pencapaian, rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana kegiatan semakin baik.

Pengukuran kinerja memegang peranan penting dalam sistem akuntabilitas kinerja, karena merupakan alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Kinerja Balmon Palembang tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Perjanjian Kinerja (PK) dan Realisasi Capaian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Capaian
1.	Meningkatkan Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	80	100	125
		2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)	100	99.44	99.94
		3. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95	100	105.26
		4. Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75	100	133.33
		5. Persentase % Terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT	85	100	117.65
		6. Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	80	100	125
		7. Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100	107.14	107.14
		8. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS- IKRAN)	100	100	100
		9. Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100	100	100
		10. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	100	100	100
		11. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100	100	100
		12. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100	100	100
		13. Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)	100	88.08	88.08
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien	1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas I Palembang Tahun 2025	86,95	84.56	97.25
		2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97	100	103.09

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa target dengan persentase capaian di atas 100% sebanyak 7 Indikator Kinerja, target dengan capaian realisasi sama dengan 100% sebanyak 5 Indikator Kinerja, target dengan capaian

realisasi dibawah 100% sebanyak 3 Indikator Kinerja, sehingga secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 99.91% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK).

B
CAPAIAN KINERJA 2021-2025

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, indikator capaian kinerja yang telah dicapai oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025
Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi						
1	Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	110	125	100	100	125
2	Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)	122	130	100	100	99.44
3	Persentase (%)Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	103.09	102.04	101.01	100	105.26
4	Persentase (%)Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	131.43	110	107.53	107.53	133.33
5	Persentase (%) Terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT	115.27	104.21	103.16	105.26	117.65
6	Persentase (%)Penanganan Sanksi Denda Administratif	-	-	-	-	125
7	Persentase (%)Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	-	-	-	-	107.14
8	Persentase (%)Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKLAN)					100
	Bimbingan Teknis SRC/LRC	166.67	-	100	100	-
	Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	100	-	100	104	-
	ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKLAN	166.67	-	100	100	-
9	Persentase (%)Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100	-	100	100	100
10	Persentase (%)Sosialisasi Pelayanan Publik	161.25	-	100	100	100
11	Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	-	-	-	-	100
12	Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK))	-	-	-	-	100
13	Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)	-	-	-	-	88.08
	Verifikasi Data Koordinat Site ISR <i>Microwave Link</i> dan Penyiaran (<i>QR Code Site</i>) program MOTS-IKLAN	101.11	-	69	100	-
Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien						
1	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Infrastruktur Digital	106.4	200	103.45	118.32	97.25
2	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	-	102.3	0	95	103.09

C
ANALISA CAPAIAN KINERJA

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Frekuensi Radio Ditjen Infrastruktur Digital mendukung sepenuhnya program dan sasaran kinerja serta Indikator Kinerja Program (IKP) yang disusun oleh Ditjen Infrastruktur Digital, yaitu :

1. Tersedianya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia;
2. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat poa dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan;
3. Terwujudnya tata kelola yang bersih, efisien dan efektif.

Dalam rangka mendukung program Ditjen Infrastruktur Digital, Balai Monitor SFR Kelas I Palembang menetapkan sasaran program sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengawasan legalitas penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) dan Alat/Perangkat Telekomunikasi (APT) di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 17 Kabupaten/Kota.
2. Meningkatnya tingkat kesesuaian penggunaan SFR dan APT dengan ketentuan perizinan yang berlaku, berdasarkan hasil monitoring dan pengukuran teknis di lapangan.

3. Meningkatnya efektivitas penanganan gangguan Spektrum Frekuensi Radio, sehingga setiap gangguan dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan secara cepat, tepat, dan akuntabel.
4. Meningkatnya penertiban penggunaan SFR dan APT yang tidak sesuai ketentuan, berdasarkan:
 - a. Hasil pemantauan spektrum frekuensi radio
 - b. Pengukuran parameter teknis stasiun radio
 - c. Deteksi sumber pancaran frekuensi radio
5. Meningkatnya kesesuaian data frekuensi pada Izin Stasiun Radio (ISR) dengan frekuensi aktual di lapangan, berdasarkan hasil observasi monitoring.
6. Terjaganya kesiapan dan keandalan perangkat Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) yang meliputi:
 - a. Stasiun Tetap
 - b. Transportable
 - c. Bergerak
 - d. Jinjing

Secara lengkap capaian kinerja dari rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Balai Monitor SFR Kelas I Palembang, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital tahun 2025 adalah sebagai berikut:

KINERJA 1. Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi

Tercapainya Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi 17 Kab/Kota, sasaran kegiatan ini menggambarkan upaya dalam memastikan bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio dilakukan secara tertib, legal, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan pengguna spektrum frekuensi radio menjadi faktor penting untuk mencegah terjadinya interferensi serta menjamin kualitas layanan komunikasi radio bagi masyarakat dan berbagai sektor layanan publik.

Peningkatan kepatuhan pengguna frekuensi radio dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti monitoring dan pengukuran spektrum frekuensi radio, inspeksi terhadap stasiun radio, penertiban penggunaan frekuensi yang tidak sesuai izin, serta pembinaan dan sosialisasi kepada para pemegang izin penggunaan frekuensi radio. Melalui kegiatan tersebut, pengguna spektrum diharapkan memahami kewajiban perizinan, penggunaan frekuensi sesuai alokasi, serta kewajiban pembayaran BHP frekuensi radio.

Selain itu, peningkatan kualitas pengendalian spektrum frekuensi radio juga didukung oleh pemanfaatan peralatan monitoring yang memadai, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta koordinasi dengan instansi terkait. Langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, mempercepat penanganan gangguan frekuensi, serta memastikan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dengan tercapainya sasaran kegiatan ini, diharapkan tercipta pengelolaan spektrum frekuensi radio yang lebih tertib, efisien, dan bebas dari gangguan, sehingga dapat mendukung kelancaran layanan telekomunikasi, penyiaran, dan berbagai sistem komunikasi radio lainnya yang dimanfaatkan oleh masyarakat maupun instansi pemerintah.

Capaian Sararan Kegiatan ini dapat dilihat dari perbandingan antara target dengan persentase capaian pada 13 Indikator Kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja 1-1

Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota

1. Latar Belakang

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang terletak di bagian Selatan Pulau Sumatera dengan ibu kota Palembang, yang memiliki 13 Kabupaten dan 4 Kota. Pada tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang melakukan monitoring penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di seluruh kabupaten/kota sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 80% kabupaten/kota termonitor.

Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio untuk melihat karakteristik penggunaan frekuensi radio dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam rangka terciptanya tertib penggunaan spektrum frekuensi radio.

Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui jumlah pendudukan kanal spektrum frekuensi radio pada titik observasi yang diprediksi memiliki tingkat kepadatan frekuensi tinggi disertai dengan mengetahui legalitas dari stasiun pengguna spektrum frekuensi radio yang termonitor.

2. Analisa Capaian Kinerja 2025

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	100%	100%

Berdasarkan Indikator Kinerja Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di kabupaten/kota, target kinerja yang ditetapkan sebesar 80% kabupaten/kota termonitor. Pada tahun 2025, realisasi capaian kinerja mencapai 100% kabupaten/kota termonitor, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio telah melampaui target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data capaian kinerja eksisting secara nasional (Report Online), seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) telah mencapai target indikator kinerja monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio, dengan jumlah UPT yang memenuhi target sebanyak 35 UPT. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara agregat pelaksanaan kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio secara nasional telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Strategi dan inovasi yang dapat dipelajari dari beberapa UPT dengan capaian waktu yang lebih cepat adalah pelaksanaan kegiatan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio difokuskan pada awal Semester I. Pendekatan tersebut memungkinkan percepatan pemenuhan target indikator kinerja, sehingga sisa waktu pelaksanaan dapat dimanfaatkan untuk penguatan kualitas data dan pengendalian kegiatan.

Penerima manfaat dari pencapaian kegiatan ini mencakup masyarakat umum sebagai pengguna akhir layanan spektrum frekuensi radio, khususnya yang bergantung pada layanan siaran, komunikasi bergerak darat, serta layanan radio yang bersifat kritikal seperti dinas maritim dan penerbangan. Melalui kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio tercipta penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib, aman, dan sesuai dengan peruntukannya.

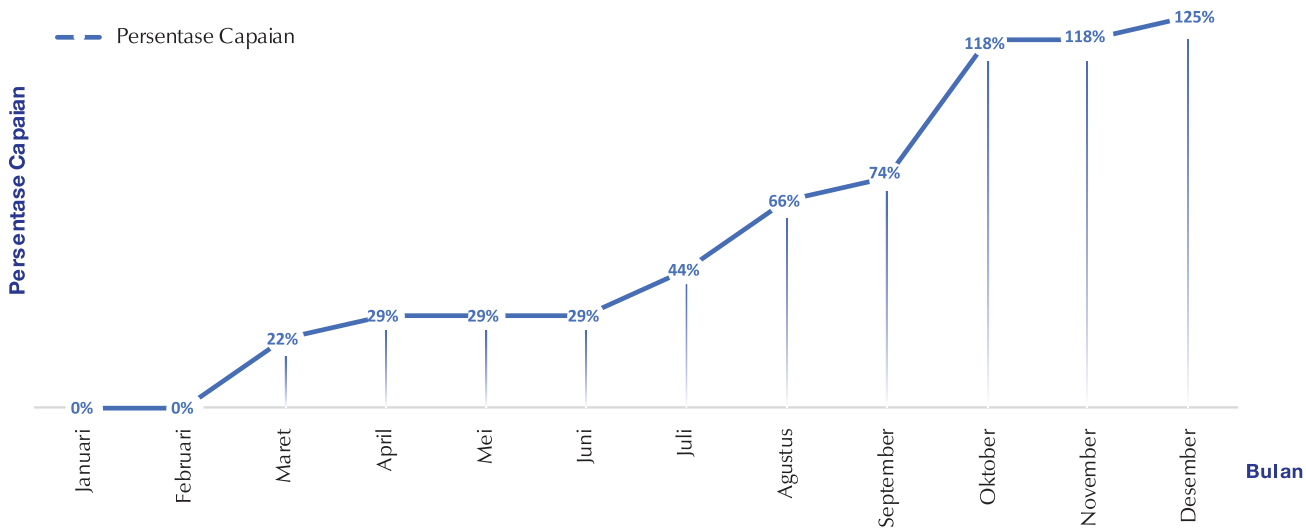
Selain itu, instansi pemerintah, penyelenggara layanan publik, dan pelaku usaha yang memanfaatkan spektrum frekuensi radio memperoleh kepastian hukum dan kualitas layanan yang lebih baik melalui pengawasan kepatuhan perizinan frekuensi radio. Informasi mengenai tingkat kepadatan penggunaan spektrum frekuensi radio juga menjadi dasar penting dalam penataan dan perencanaan frekuensi di masa mendatang, sehingga mendukung keberlanjutan pengelolaan spektrum frekuensi radio yang efektif, efisien, optimal, dan berkeadilan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Balmon Palembang, meskipun tidak termasuk dalam peringkat Top 5 Capaian PK Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, namun juga tidak termasuk dalam peringkat Bottom 5 Capaian PK, tetapi menunjukkan kinerja yang stabil dan konsisten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Namun demikian, capaian antar-UPT tidak dapat dibandingkan secara langsung dan eksplisit, mengingat adanya perbedaan karakteristik wilayah kerja, khususnya jumlah kabupaten/kota yang menjadi objek monitoring pada masing-masing UPT. Oleh karena itu, evaluasi kinerja perlu mempertimbangkan konteks dan kompleksitas wilayah kerja masing-masing UPT sebagai faktor pembeda dalam pelaksanaan kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio.

Capaian Kegiatan Pemantauan Frekuensi Radio di Kabupaten/ Kota pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang selama tahun 2025 terlihat pada grafik berikut:

Grafik 3.1
Capaian Realisasi Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota



Sumber: Aplikasi Report Online (<https://rol.postel.go.id/>)

Dengan Formula Pada Perjanjian Kinerja:

Jumlah Kabupaten/Kota Temonitor

Jumlah Kabupaten/Kota Wil. Kerja UPT

Grafik Capaian Realisasi Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota menunjukkan tren peningkatan capaian kinerja sepanjang tahun anggaran. Pada bulan Januari hingga Februari, realisasi masih berada pada angka 0% karena belum diterbitkannya nota dinas penugasan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio dari Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital, sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan.

Capaian mulai meningkat pada bulan Maret dan April masing-masing sebesar 22% dan 29%. Namun pada Triwulan II, khususnya bulan Mei hingga Juni, capaian cenderung

stagnan pada angka 29% akibat kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan masa cut-off selama kurang lebih dua bulan dan berdampak pada penundaan kegiatan monitoring.

Pertumbuhan signifikan mulai terlihat pada Juli dengan kenaikan menjadi 44%, lalu meningkat cukup tajam pada Agustus menjadi 66% dan September 74%. Lonjakan paling besar terjadi pada Oktober, di mana capaian melampaui target tahunan dengan mencapai 118%. Tren positif ini berlanjut hingga November yang tetap berada di angka 118%, dan ditutup pada Desember dengan capaian 125%.

Secara keseluruhan, capaian tersebut menunjukkan kemampuan unit kerja dalam menyesuaikan pelaksanaan kegiatan terhadap dinamika kebijakan dan anggaran, serta tetap menjaga pencapaian target kinerja sesuai perencanaan.

Gambar 3.1
Kegiatan Monitoring Penggunaan SFR di Kabupaten Musi Rawas Utara



Tabel 3.3
Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

No	Tanggal	Lokasi
1	11 s.d 14 Maret 2025	Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu
2	18 s.d 21 Maret 2025	Kecamatan Belitang dan Martapura, Kabupaten OKU Timur
3	24 s.d 27 Maret 2025	Kecamatan Ilir Barat I Kel. Demang Lebar Daun, Kota Palembang
4	15 s.d 18 April 2025	Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir
5	15 s.d 18 Juli 2025	Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih
6	22 s.d 25 Juli 2025	Kecamatan Kayuagung dan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir
7	12 s.d 15 Agustus 2025	Kecamatan Talang Ubi dan Tanah Merah, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
8	19 s.d 22 Agustus 2025	- Kecamatan Merapi Timur dan Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat - Kecamatan Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang
9	26 s.d 29 Agustus 2025	Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir
10	02 s.d 05 September 2025	Kecamatan Muara Enim dan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim
11	15 s.d 18 September 2025	Kecamatan Ilir Barat I Kel. Bukit Lama, Kota Palembang
12	01 s.d 04 Oktober 2025	- Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuk Linggau - Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas - Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara
13	07 s.d 10 Oktober 2025	Kecamatan Ilir Barat I Kel. Demang Lebar Daun, Kota Palembang
14	14 s.d 17 Oktober 2025	Kecamatan Sekayu dan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin
15	22 s.d 25 Oktober 2025	Kecamatan Muara Dua, Kabupaten OKU Selatan
16	22 s.d 25 Oktober 2025	Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin
17	04 s.d 07 November 2025	Kecamatan Babat Toman dan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin
18	25 s.d 29 November 2025	Kecamatan Tungal Ilir, Kabupaten Banyuasin
19	22 s.d 26 Desember 2025	Kecamatan Sukarami, Kota Palembang
20	09 s.d 13 Desember 2025	Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam

Capaian indikator kinerja monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di Kab/Kota terpenuhi jika tiga kriteria sub indikator terlampaui, yaitu:

- a). **15 Pita Frekuensi Termonitor**
Berdasarkan Nota Dinas Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital Nomor: 334/DJID.6/PR.01.02/03/2025 tanggal 03 Maret 2025 perihal Penugasan terkait Penyampaian Perjanjian Kinerja (PK) UPT Bidang Pengendalian Infrastruktur

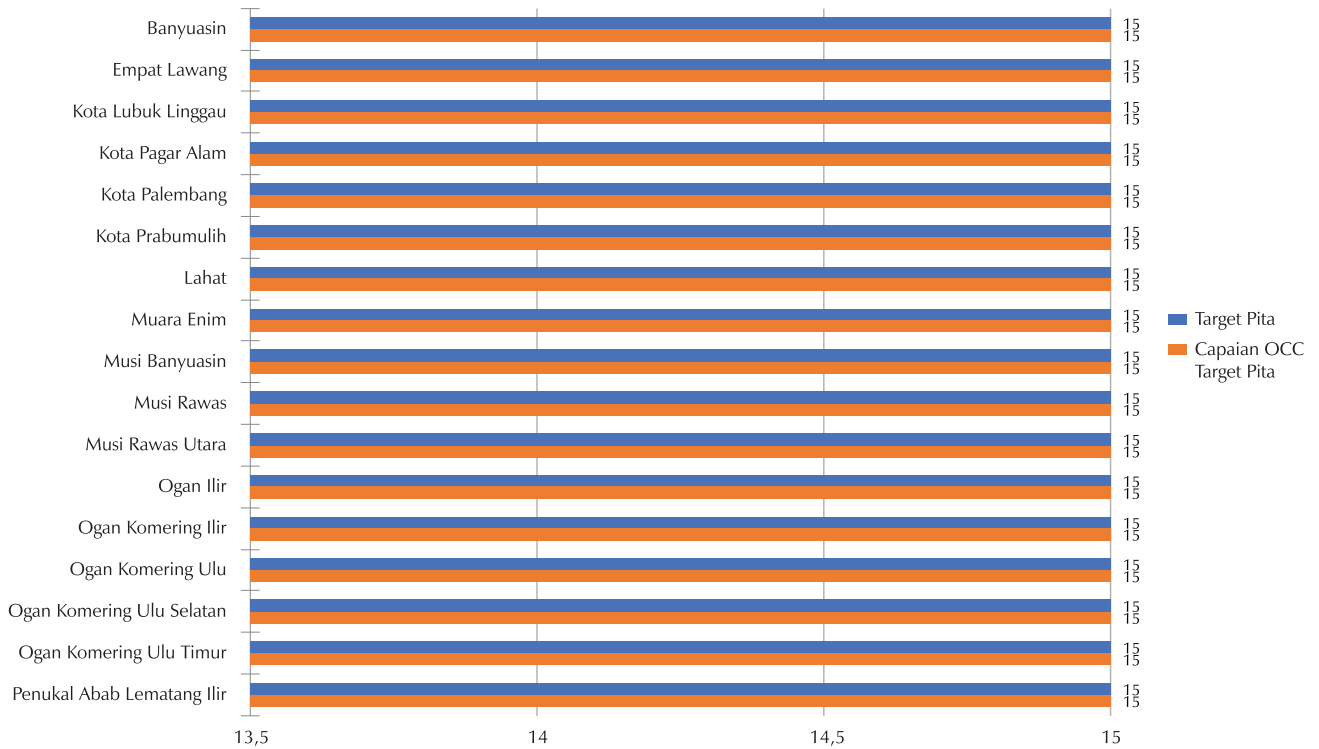
Digital dan Penjelasan terkait Pencapaian PK UPT Tahun 2025, terdapat 15 subservice/pita frekuensi radio yang harus dimonitor sebagai berikut:

Tabel 3.4
Target Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota

No	Subservice	Pita Frekuensi (MHz)
1	Radio FM, DRM *INS04	87 - 108
2	Penerbangan VHF *INS36	108 - 137
3	Komrad VHF, Instansi Pemerintah/Badan Usaha Keperluan Publik *INS04A *INS04B, Maritim VHF *INS36	137 - 174
4	DRM, DAB *INS05	174 - 230

No	Subservice	Pita Frekuensi (MHz)
5	Tetap *INS08B, Bergerak *INS08 *INS08A *INS08C *INS0D, Marabahaya *INS36	300 - 430
6	Komrad UHF *INS11 *INS08C *INS08D	430 - 460
7	Tetap, Bergerak *INS11 *INS12	460 - 470
8	Televisi UHF *INS13B *INS13C, IMT *INS13	478 - 806
9	Trunking *INS14, Downlink Seluler 800 *INS15	806 - 880
10	Downlink Seluler 900 *INS16	925 - 960
11	International Mobile Telecommunications (IMT) *INS17A	1427 - 1518
12	Downlink Seluler 1800 *INS19	1805 - 1880
13	Downlink Seluler 2100 *INS21A	2110 - 2170
14	International Mobile Telecommunications (IMT) *INS22	2170 - 2200
15	Seluler, Broadband 2.3 GHz *INS24	2300 - 2400

Grafik 3.2
Capaian 15 Pita Frekuensi Termonitor per Kab/Kota



Sumber: Aplikasi Report Online (<https://rol.postel.go.id/>)

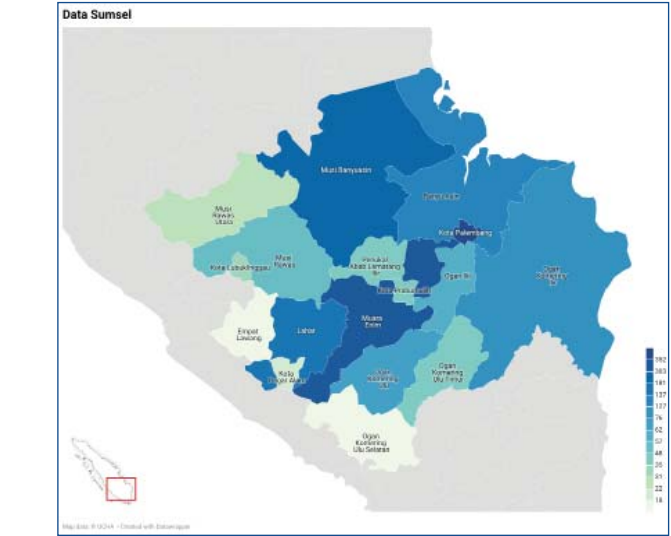
Grafik menunjukkan capaian monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio pada seluruh kabupaten/kota di wilayah kerja Balmon Palembang. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa capaian monitoring pita frekuensi radio di masing-masing kabupaten/kota telah memenuhi target yang ditetapkan, dengan capaian OCC berada pada level yang sama dengan target pita.

- b). **Memonitor 60% dari ISR yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Aplikasi Report Online (ROL)**
Masih pada Nota Dinas yang sama dijelaskan bahwa syarat kedua untuk kabupaten/kota dinyatakan termonitor jika berhasil Memonitor 60% dari ISR yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Aplikasi Report Online (ROL). Berikut pemetaan data target monitor ISR 2025 pada Gambar 3.2.

Berdasarkan gambar pemetaan target monitoring ISR per Kabupaten/Kota pada Gambar 3.2, total ISR yang menjadi sasaran monitoring adalah sebanyak 1.542 ISR yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Selatan.

Target monitoring terbesar berada di Kota Palembang sebanyak 352 ISR, diikuti oleh Kabupaten Muara Enim sebanyak 303 ISR, dan Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 181 ISR. Selanjutnya, target yang cukup signifikan juga terdapat di Kabupaten Lahat (137

Gambar 3.2
Pemetaan Data Target Monitor ISR 2025



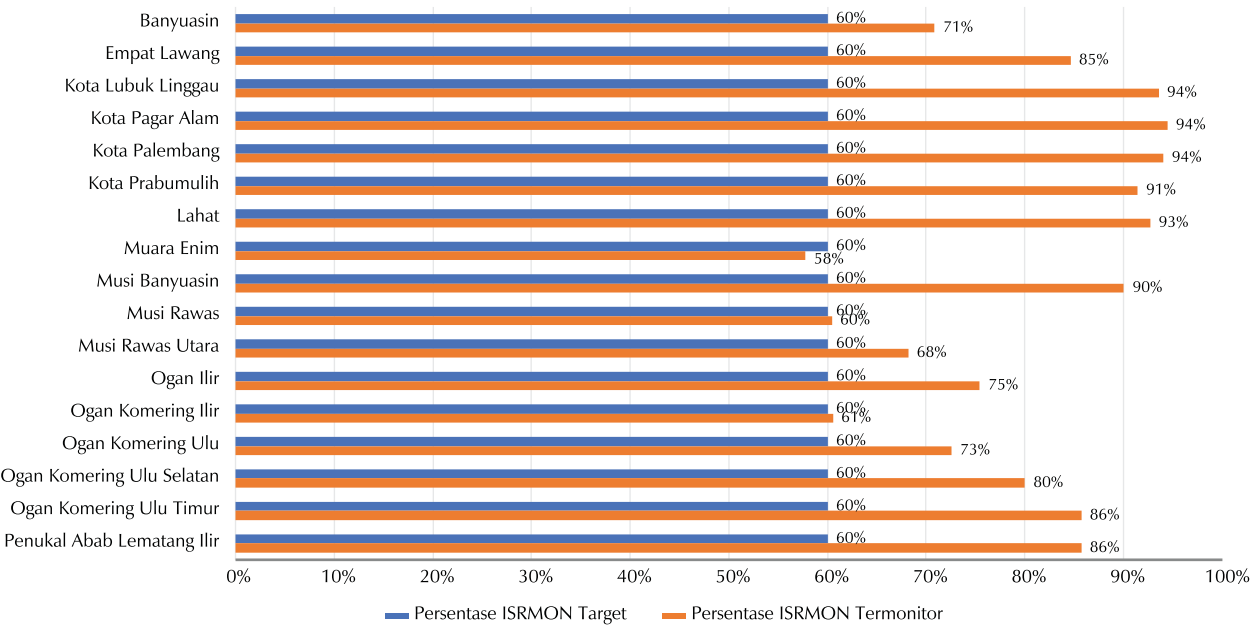
ISR) dan Kabupaten Banyuasin (127 ISR). Tingginya target pada wilayah-wilayah tersebut menunjukkan konsentrasi penggunaan spektrum frekuensi radio yang relatif padat sehingga memerlukan pengawasan lebih intensif.

Sementara itu, beberapa daerah memiliki target monitoring yang relatif lebih kecil, seperti Ogan Komering Ulu Selatan (10 ISR), Empat Lawang (13 ISR), Kota Pagar Alam (18 ISR), dan Musi Rawas Utara (22

ISR). Secara umum, distribusi target monitoring ISR menunjukkan bahwa kegiatan monitoring difokuskan secara proporsional sesuai dengan tingkat kepadatan dan jumlah ISR di masing-masing Kabupaten/Kota, guna memastikan kepatuhan penggunaan spektrum frekuensi radio berjalan optimal dan tertib.

Adapun capaian di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Grafik 3.3
Capaian ISR Termonitor per Kab/Kota



Sumber: Aplikasi Report Online (<https://rol.postel.go.id/>)

Grafik diatas menunjukkan perbandingan antara target dan realisasi persentase monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio (ISR MON) pada seluruh kabupaten/kota di wilayah kerja Balmon Palembang. Target monitoring yang ditetapkan secara merata sebesar 60% pada setiap kabupaten/kota, pada umumnya telah berhasil dicapai dan bahkan dilampaui oleh sebagian besar wilayah.

Realisasi capaian monitoring menunjukkan variasi persentase di setiap kabupaten/kota, dengan capaian terendah sebesar 58% di Kabupaten Muara Enim dan capaian tertinggi mencapai 95% di Kabupaten Lahat. Beberapa wilayah lainnya, seperti Kota Palembang, Kota Pagaralam, Kota Lubuk Linggau, dan Kota Prabumulih, juga menunjukkan capaian yang sangat tinggi dengan realisasi di atas 90%. Sementara itu, sebagian kabupaten/kota lainnya mencatat capaian antara 68 hingga 86%, yang tetap berada di atas target minimal yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa pelaksanaan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja Balmon Palembang telah berjalan efektif dan melampaui target kinerja yang ditetapkan.

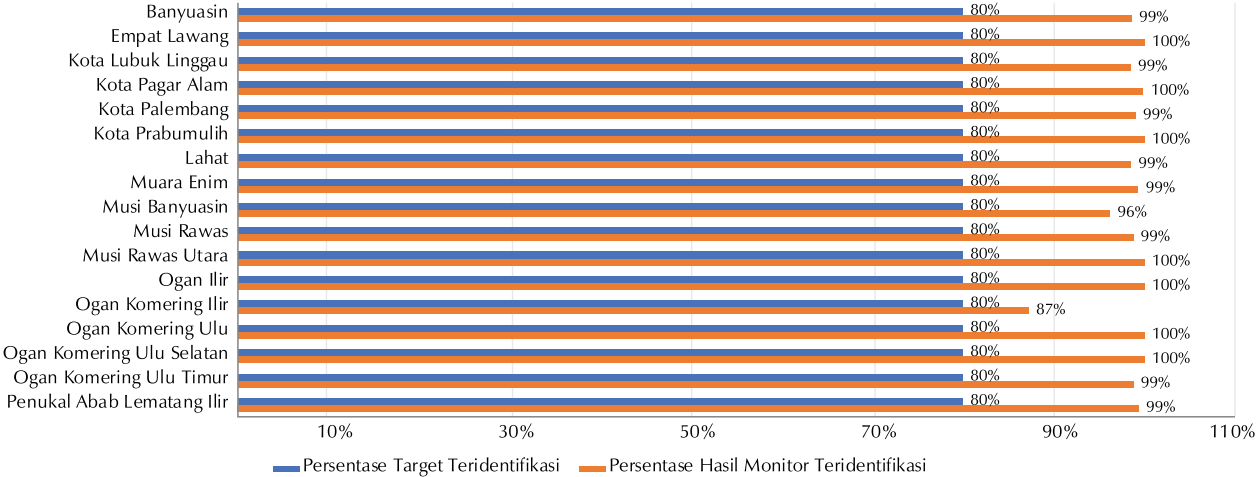


Gambar 3.3
Kegiatan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Kab. Empat Lawang

c). **80% Hasil monitor SFR harus teridentifikasi**

Setelah tercapai target memonitor 60% dari ISR yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Aplikasi *Report Online* (ROL) maka hasil monitoring yang telah dilaksanakan harus 80% teridentifikasi, yang menjadi syarat ketiga untuk kabupaten/kota dinyatakan termonitor. Adapun capaian di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Grafik 3.4
Capaian Hasil Monitor Teridentifikasi per Kab/Kota



Sumber: Aplikasi Report Online (<https://rol.postel.go.id/>)

Grafik diatas menunjukkan bahwa realisasi hasil monitoring teridentifikasi pada seluruh kabupaten/kota di wilayah kerja Balmon Palembang telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 80%. Capaian realisasi berada pada kisaran 87 hingga 100%, dengan sebagian besar wilayah mencapai tingkat identifikasi mendekati atau sama dengan 100%. Tingginya capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan monitoring serta optimalisasi proses identifikasi hasil pemantauan spektrum frekuensi radio. Perbedaan persentase antar wilayah dipengaruhi oleh karakteristik wilayah kerja dan jumlah objek monitoring, namun tidak berdampak pada pencapaian

target kinerja secara keseluruhan. Dengan capaian tersebut, kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio mampu menghasilkan data yang andal sebagai dasar pengawasan, penegakan kepatuhan, dan pengambilan keputusan kebijakan di wilayah kerja Balmon Palembang.

Selain dari target diatas, Balmon Palembang juga diberikan target yaitu untuk kabupaten/kota yang memiliki stasiun tetap/transportable dilakukan observasi dan identifikasi minimal 1 (satu) kali setiap bulan per-stasiun tetap/transportable. Adapun capaian nya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Penggunaan Stasiun Tetap/Transportable Tahun 2025

No	"Stasiun Tetap/Transportable"	Tahun 2025												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Kenten Laut	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
2	Gandus	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
3	Rambutan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
4	Pagar Alam	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10

Tabel 3.5 menunjukkan pelaksanaan kegiatan observasi dan identifikasi terhadap stasiun tetap/transportable pada Tahun 2025 yang dilaksanakan secara berkala sesuai dengan target minimal satu kali setiap bulan per stasiun. Berdasarkan data tersebut, seluruh stasiun yang tercantum telah melaksanakan kegiatan observasi dan identifikasi secara konsisten sepanjang tahun pelaporan.

Stasiun Kenten Laut, Gandus, dan Rambutan masing-masing telah melaksanakan observasi dan identifikasi sebanyak 11 kali dalam satu tahun, sedangkan Transportable Pagaralam melaksanakan kegiatan tersebut sebanyak 10 kali. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan observasi dan identifikasi telah mendekati dan memenuhi target

frekuensi bulanan yang ditetapkan, meskipun terdapat beberapa bulan tertentu yang tidak dilaksanakan akibat penyesuaian jadwal.

Pada pelaksanaan kegiatan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kabupaten/kota, Balmon

Palambang menyandingkan kegiatan ini dengan kegiatan monitoring dan penertiban alat dan/atau perangkat telekomunikasi, yang akan dijabarkan pada penjelasan mengenai capaian IK-4 Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital.

3. Target dan Realisasi Jangka Menengah (2021-2025)

2021			2022			2023			2024			2025		
T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	%
80	88	110	80	100	125	100	100	100	100	100	100	80	100	125

Keterangan :
T = Target
C = Capaian
% = Persentase Capaian

4. Kendala dan Solusi

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Tahun 2025, terdapat satu kabupaten yang belum sepenuhnya mencapai target indikator ISR termonitor, yaitu Kabupaten Muara Enim dengan realisasi sebesar 58% dari target 60% yang telah ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh karakteristik wilayah Kabupaten Muara Enim yang memiliki cakupan geografis luas dan memanjang serta berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten/kota lain. Karakteristik tersebut berdampak pada tingkat aksesibilitas antarwilayah yang relatif jauh, dengan sebaran pengguna frekuensi radio yang tersebar di sebagian besar kecamatan. Faktor-faktor ini menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan berpengaruh terhadap belum optimalnya pencapaian target ISR termonitor di wilayah tersebut.

Untuk mengantisipasi kendala tersebut pada tahun berikutnya, diperlukan perencanaan awal yang komprehensif dan terukur, dimulai dari penetapan lokasi strategis sebagai titik pelaksanaan monitoring serta proses identifikasi guna memastikan keakuratan dan validitas data hasil pemantauan. Melalui pemetaan lokasi sejak awal, wilayah sasaran dapat ditentukan lebih dini sehingga pelaksanaan monitoring menjadi lebih terarah, efisien, dan tepat sasaran. Selain itu, penyusunan rencana kerja yang rinci dan terstruktur perlu dilakukan dengan mencakup penetapan prioritas lokasi, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan waktu pelaksanaan agar kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu. Penyempurnaan sistem pelaporan dan dokumentasi hasil monitoring melalui pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi pengolahan data, sehingga proses pengambilan keputusan dan koordinasi dalam merespons potensi interferensi maupun penggunaan frekuensi radio yang tidak sesuai ketentuan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.

5. Strategi Keberhasilan/Inovasi

Keberhasilan capaian monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio sepanjang tahun 2025 yang mencapai target hingga 100% tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung. Salah satunya adalah tersedianya Aplikasi Report Online (ROL) yang dikembangkan oleh Direktorat Pengendalian pada Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dan dimanfaatkan sebagai media pelaporan hasil monitoring spektrum frekuensi radio. Aplikasi ini memberikan kemudahan dalam pemantauan capaian Perjanjian Kinerja (PK) melalui dashboard kinerja yang dapat dipantau secara

real time berdasarkan data yang telah diinput. Selain itu, tersedianya perangkat dan peralatan monitoring yang andal yang dimiliki oleh Balmon Palembang turut berperan penting dalam menunjang pelaksanaan kegiatan monitoring secara efektif dan akurat di lapangan.

Di samping dukungan sistem dan sarana prasarana, keberhasilan tersebut juga didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, khususnya pegawai Balmon Palembang yang menduduki jabatan fungsional Pengendali Frekuensi Radio baik di tingkat pelaksana maupun ahli, dengan kompetensi dan keahlian teknis yang memadai dalam pelaksanaan monitoring. Penguatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan melalui kegiatan sosialisasi penggunaan spektrum frekuensi radio juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pengguna terhadap ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya.

6. Dampak

Pencapaian target indikator monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio memberikan dampak langsung bagi masyarakat secara umum, khususnya dalam terwujudnya kualitas layanan komunikasi yang lebih andal dan bebas gangguan. Monitoring yang dilaksanakan secara optimal memungkinkan deteksi dini terhadap potensi interferensi serta penggunaan spektrum yang tidak sesuai ketentuan, sehingga dapat segera dilakukan penanganan untuk mencegah gangguan layanan komunikasi publik maupun private. Tertibnya penggunaan spektrum frekuensi radio

juga berdampak pada meningkatnya keandalan layanan telekomunikasi yang dimanfaatkan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kelancaran siaran radio FM dan siaran televisi digital.

Dampak tersebut juga tercermin pada terjaminnya keamanan layanan komunikasi penerbangan, tersedianya komunikasi radio yang bersih dan bebas gangguan bagi instansi pemerintah maupun badan usaha untuk kepentingan publik dan maritim, serta terjaganya layanan komunikasi darurat dan marabahaya. Selain itu, optimalnya pengelolaan spektrum frekuensi radio turut mendukung kualitas layanan operator seluler bagi masyarakat luas. Dengan terjaganya pemanfaatan spektrum frekuensi radio secara optimal dan terkelola dengan baik, masyarakat memperoleh layanan komunikasi yang lebih stabil, aman, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi di wilayah kerja Balmon Palembang.

7. Implementasi BerAKHLAK

Dalam proses pencapaian target persentase monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kabupaten/kota, Balmon Palembang telah mengimplementasikan budaya nilai BerAKHLAK, yaitu:

- a. Berorientasi Pelayanan, yaitu memastikan penggunaan spektrum frekuensi radio dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memberikan kepastian hukum serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- b. Akuntabel, yaitu menjamin bahwa hasil kegiatan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio disampaikan secara jelas, transparan, dan bertanggung jawab sebagai dasar peningkatan kualitas tata kelola spektrum frekuensi radio di wilayah Sumatera Selatan.
- c. Kompeten, yaitu memastikan petugas pelaksana kegiatan monitoring senantiasa meningkatkan kapasitas dan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, penguasaan perangkat monitoring terkini, serta pemahaman yang komprehensif terhadap regulasi spektrum frekuensi radio.
- d. Harmonis, yaitu membangun dan memelihara hubungan kerja yang sinergis, baik antarpegawai maupun dengan masyarakat serta pengguna spektrum frekuensi radio, guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, nyaman, dan produktif, baik di lapangan maupun di lingkungan perkantoran.
- e. Loyal, yaitu menunjukkan komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan monitoring secara konsisten, termasuk kesiapan menghadapi tantangan kondisi lapangan di berbagai kabupaten/kota di wilayah Sumatera Selatan.
- f. Adaptif, yaitu melaksanakan kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan perangkat monitoring



Gambar 3.4
Kegiatan Monitoring Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio Kab. Musi Rawas



Gambar 3.5
Kegiatan Monitoring Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio Kab. PALI

terkini guna meningkatkan efektivitas dan akurasi pengawasan.

- g. Kolaboratif, yaitu melaksanakan kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio melalui kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain pemerintah daerah, dinas terkait, dan pengguna spektrum frekuensi radio. Kolaborasi ini menjadi faktor penting dalam penanganan potensi gangguan frekuensi serta dalam mewujudkan penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib, efisien, dan berkelanjutan di wilayah Sumatera Selatan.

8. Efisiensi

Keberhasilan Balmon Palembang pada tahun berjalan tercermin dari capaian indikator kinerja utama berupa persentase monitoring pita frekuensi radio di wilayah kerja. Dari target sebesar 80% kabupaten/kota termonitor atau setara dengan 14 kabupaten/kota, Balmon Palembang mampu merealisasikan monitoring di seluruh 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Capaian tersebut menunjukkan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan spektrum frekuensi radio, sekaligus mencerminkan komitmen dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang spektrum frekuensi radio serta mendukung terciptanya pengelolaan spektrum yang tertib, efisien, dan berkelanjutan. Di tengah penerapan kebijakan efisiensi anggaran Tahun 2025, Balmon Palembang tetap mampu mempertahankan capaian kinerja sesuai target melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya, baik dari sisi tenaga kerja, teknologi pendukung, maupun pengelolaan waktu pelaksanaan kegiatan.

Dengan pendekatan tersebut, kegiatan monitoring dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien tanpa mengurangi kualitas hasil, serta tetap menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Pelaksanaan monitoring yang meliputi okupansi, identifikasi, dan pengawasan terhadap sekitar 60% pengguna Izin Stasiun Radio (ISR) dapat diselesaikan dalam rentang waktu 4–5 hari kerja oleh tim yang terdiri atas 4–5 personel dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas sesuai peran masing-masing. Setiap anggota tim berkontribusi secara optimal dalam monitoring pita frekuensi radio pada tingkat kabupaten/kota, sehingga melalui koordinasi yang baik dan pembagian tugas yang efektif, seluruh kegiatan dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan.

9. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025, tercatat adanya pengembangan inovasi aplikasi pelaporan pemantauan spektrum frekuensi radio berupa Aplikasi Report Online (ROL) yang dikembangkan oleh Direktorat Pengendalian



Gambar 3.6
Kegiatan Monitoring Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio Kota Pagaram

Infrastruktur Digital. Aplikasi tersebut telah dimanfaatkan secara optimal oleh Balmon Palembang sepanjang tahun 2025 sebagai sarana pemantauan capaian kinerja secara real time, sekaligus untuk memastikan kejelasan dan kepastian atas target kegiatan yang telah maupun belum dilaksanakan.

Laporan kinerja tahun sebelumnya telah dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen evaluasi dan pengambilan keputusan, khususnya pada indikator kinerja monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di tingkat kabupaten/kota. Pemanfaatan laporan kinerja tersebut digunakan untuk mengukur tingkat capaian kinerja, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang menjadi dasar penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja pada tahun berikutnya.

10. Rekomendasi Tindak Lanjut Tahun 2026

Dalam rangka peningkatan kinerja pada Tahun 2026, Balmon Palembang perlu melakukan penguatan perencanaan kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio secara lebih terukur, terstruktur dan sistematis dengan pendekatan berbasis resiko. Perencanaan difokuskan pada penetapan prioritas wilayah dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya, tingkat kepadatan pengguna spektrum frekuensi radio, serta potensi gangguan, khususnya pada wilayah dengan cakupan luas seperti Kabupaten Muara Enim, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir dan Lahat. Optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Report Online (ROL) juga perlu terus ditingkatkan melalui



Gambar 3.7
Kegiatan Monitoring Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio Kota Palembang

penguatan kualitas identifikasi hasil monitoring, pemantauan capaian kinerja secara berkala, serta evaluasi rutin terhadap progres Perjanjian Kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan.

Selain itu, diperlukan peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan melalui penyusunan rencana kerja yang rinci, pengaturan jadwal monitoring yang terintegrasi, serta optimalisasi pembagian tugas tim agar pelaksanaan okupansi, identifikasi, dan pengawasan/pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan peningkatan koordinasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan juga menjadi langkah strategis untuk mendorong kepatuhan penggunaan spektrum frekuensi radio. Dengan upaya tersebut, diharapkan pada tahun 2026 capaian kinerja tidak hanya mempertahankan hasil yang telah dicapai, tetapi juga meningkatkan capaian yang lebih optimal.

11. Benchmarking

Benchmarking dilakukan dengan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung, dengan luas wilayah kerja UPT 33.575,41 km² dan jumlah pengguna frekuensi sebanyak 15.413.

Tabel 3.6
Benchmarking Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota

Indikator Kinerja	Balmon Lampung		Balmon Palembang		Perbandingan Capaian
	Target	Capaian	Target	Capaian	
Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota	80%	125%	80%	125%	0%

Sumber : Aplikasi Janji Kinerja

Indikator Kinerja 1-2

Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)

1. Latar Belakang

Kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) merupakan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang untuk memastikan bahwa data stasiun pengguna frekuensi radio yang digunakan di lapangan (existing) sesuai dengan data yang ada pada Izin Stasiun Radio (ISR). Kegiatan ini merupakan bentuk pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi, untuk mewujudkan terciptanya tertib penggunaan spektrum frekuensi radio, dan tertib penggunaan alat/perangkat telekomunikasi. Selain itu adanya pelanggaran dapat mengakibatkan timbulnya gangguan yang merugikan pengguna frekuensi radio lainnya dan juga menyebabkan kerugian negara yaitu penggunaan frekuensi radio tanpa izin (ilegal), penggunaan daya pancar dan lebar pita yang melebihi ketentuan akan menyebabkan perbedaan terhadap pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio yang merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Ada tiga sub indikator pada kegiatan pemeriksaan stasiun radio yaitu:

1. Pemeriksaan stasiun radio Microwave Link;
2. Pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran Radio FM;
3. Pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran pada siaran Televisi Digital.

Penerima manfaat dari pencapaian kegiatan ini adalah berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan layanan telekomunikasi dan penyiaran. Mencakup lembaga penyiaran, operator jaringan dan masyarakat umum. Melalui kegiatan pemeriksaan stasiun radio tercipta penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib dan sesuai perizinan, serta memberikan manfaat ekonomi, operasional, regulatif, dan sosial bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem penyiaran dan telekomunikasi.



2. Analisa Capaian Kinerja 2025

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)	100%	99,44%

Sumber: Aplikasi APSTARD (<https://apstard.postel.go.id/>) dan Aplikasi New Rol (<https://rol.postel.go.id/>)

Berdasarkan Indikator Kinerja Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi), target yang ditetapkan untuk Pemeriksaan Stasiun radio (Inspeksi) adalah 100%. Adapun realisasi di tahun 2025 dengan detail sebagai berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi) Tahun 2025

Sub Indikator	Target	Realisasi
1.a Pemeriksaan melalui Inspeksi (Open Shelter)	593	580
1.b Pemeriksaan melalui Remote Site	6303	6277
2 Pengukuran Radio FM	80	80
3 Pengukuran Televisi Digital	11	11
	6987	6948

Sumber: Aplikasi APSTARD (<https://apstard.postel.go.id/>) dan Aplikasi New Rol (<https://rol.postel.go.id/>)

Berdasarkan tabel capaian Sub Indikator, secara umum realisasi kinerja telah mencapai hasil yang sangat optimal mendekati target yang ditetapkan. Pada kegiatan Pemeriksaan melalui Inspeksi (*Open Shelter*), dari target 593 kegiatan terealisasi 580 kegiatan atau sekitar 97,8%. Sementara itu, Pemeriksaan melalui *Remote Site* menunjukkan capaian yang tinggi, dengan realisasi 6.277 dari target 6.303 kegiatan atau sekitar 99,6%. Untuk kegiatan Pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran Radio FM dan Televisi Digital, seluruh target telah terealisasi secara penuh, masing-masing sebesar 100% (80 dari 80 dan 11 dari 11). Secara keseluruhan, dari total target 6.987 kegiatan, telah terealisasi 6.948 kegiatan atau sekitar 99,44%, yang menunjukkan tingkat pencapaian kinerja yang sangat baik dan konsisten di seluruh sub indikator.

Secara nasional, pelaksanaan Pemeriksaan stasiun radio *Microwave Link* menunjukkan bahwa metode pemeriksaan melalui open shelter dan remote site telah menjadi pola kerja utama UPT dalam memastikan kesesuaian data ISR dengan kondisi riil di lapangan.

Untuk capaian kinerja pada setiap sub indikator kegiatan pemeriksaan stasiun radio adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan stasiun radio Microwave Link

Kegiatan pemeriksaan stasiun radio *microwave link* dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Stasiun Radio dengan metode pemeriksaan *remote site* dan inspeksi lapangan (*open shelter*). Target pemeriksaan ditetapkan oleh Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital melalui Aplikasi Pemeriksaan Stasiun Radio (APSTARD).

Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan secara bertahap sepanjang bulan April sampai dengan Desember 2025, mencakup berbagai kabupaten dan kota dengan mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan tugas serta lokasi Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pemeriksaan dilakukan baik melalui inspeksi langsung (*open shelter*) maupun pemeriksaan jarak jauh (*remote site*).

Gambar 3.8
Kegiatan Pemeriksaan stasiun radio Microwave Link di Kab. Muara Enim



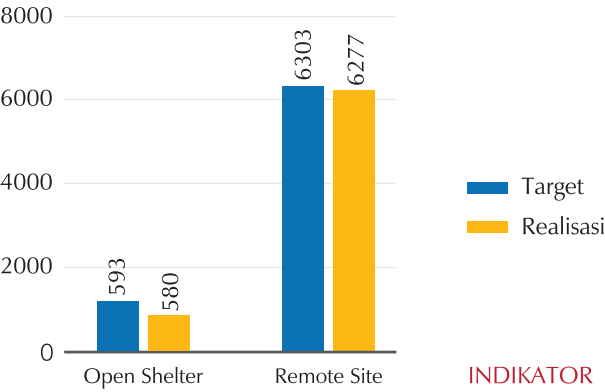
Dari data nasional, total pemeriksaan yang dilakukan seluruh UPT mencapai 11.193 untuk *open shelter* dan 103.212 untuk *remote site*. Pola ini menunjukkan bahwa secara nasional strategi pengawasan lebih banyak mengandalkan pemeriksaan *remote site* sebagai metode yang efisien, cepat, dan mampu menjangkau objek pemeriksaan dalam jumlah besar, sementara *open shelter* tetap dilakukan untuk memastikan validasi fisik pada lokasi yang memerlukan pemeriksaan langsung.

Dalam konteks tersebut, Balmon Palembang merealisasikan pemeriksaan 580 *open shelter* dan 6.277 *remote site*, yang mencerminkan proporsi pelaksanaan yang sejalan dengan pola nasional, yaitu dominasi pemeriksaan berbasis *remote site* dengan tetap menjaga kualitas melalui inspeksi lapangan.

Perbandingan secara nasional tidak dapat dilihat semata dari jumlah pemeriksaan, karena dipengaruhi oleh perbedaan jumlah ISR, luas wilayah kerja, serta karakteristik geografis masing-masing UPT. Namun demikian, dari sisi pola pelaksanaan, capaian Balmon Palembang telah merepresentasikan praktik pengawasan yang selaras dengan strategi nasional,

yaitu optimalisasi pemeriksaan *remote site* yang didukung validasi lapangan (*open shelter*) untuk mewujudkan tertib penggunaan spektrum frekuensi radio.

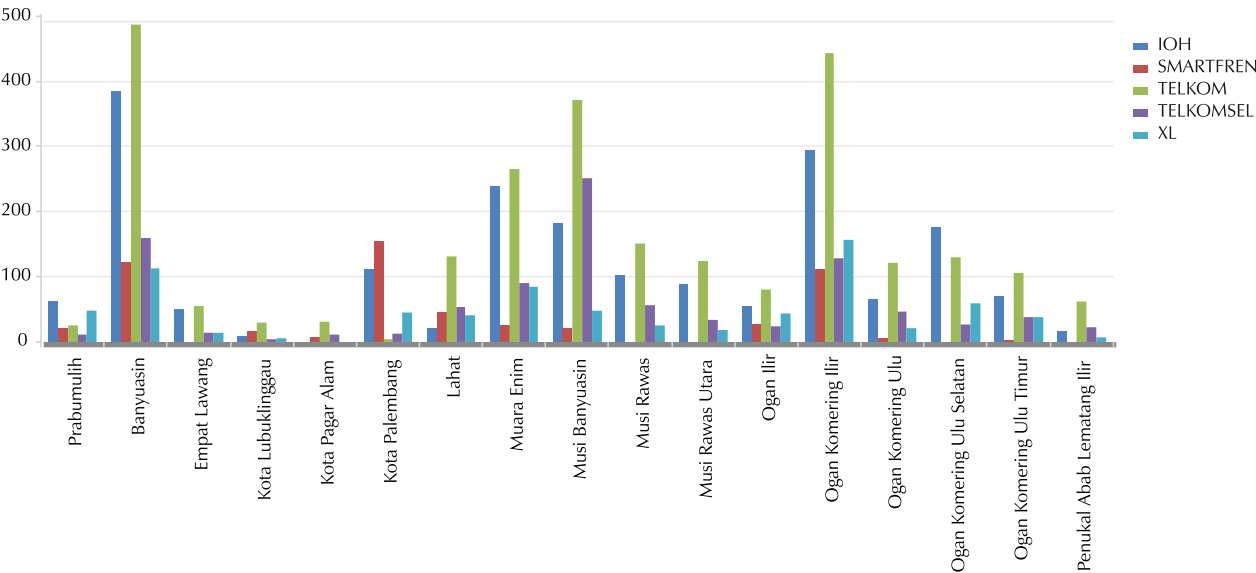
Grafik 3.5
Hasil Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link Remote Site dan Open Shelter



Sumber: Aplikasi APSTARD (<https://apstard.postel.go.id/>)

Untuk metode *remote site*, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 6.277 *link* dari total target 6.303 *link*, dengan tingkat capaian sebesar 99,58%. Sementara itu, pemeriksaan melalui metode *open shelter* telah dilaksanakan terhadap 580 *link* dari target 593 *link*, dengan tingkat capaian sebesar 98%.

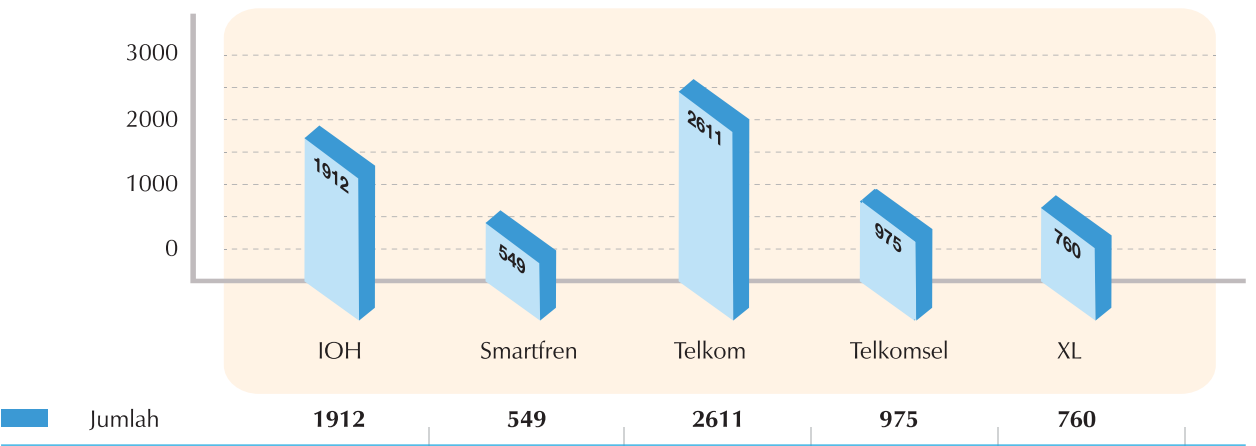
Grafik 3.6
Hasil Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link Operator Seluler per Kab/Kota



Sumber: Aplikasi APSTARD (<https://apstard.postel.go.id/>)

Grafik diatas merupakan sebaran pelaksanaan pemeriksaan stasiun radio Microwave Link melalui metode *open shelter* dan *remote site* di seluruh kabupaten/kota wilayah kerja Balmon Palembang, menggambarkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan dilakukan secara proporsional sesuai sebaran dan jumlah site di masing-masing wilayah.

Grafik 3.7
Hasil Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link Per Operator Seluler



Sumber: Aplikasi APSTARD (<https://apstard.postel.go.id/>)

Grafik menunjukkan distribusi target pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link Tahun 2025 berdasarkan masing-masing operator yang mana memperlihatkan bahwa sebagian besar pemeriksaan terkonsentrasi pada TELKOM dan IOH, yang secara kumulatif mencakup lebih dari separuh total pemeriksaan. Perbedaan jumlah ini menunjukkan variasi kepemilikan atau pengelolaan infrastruktur Microwave Link antar operator.

Tabel 3.8
Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link

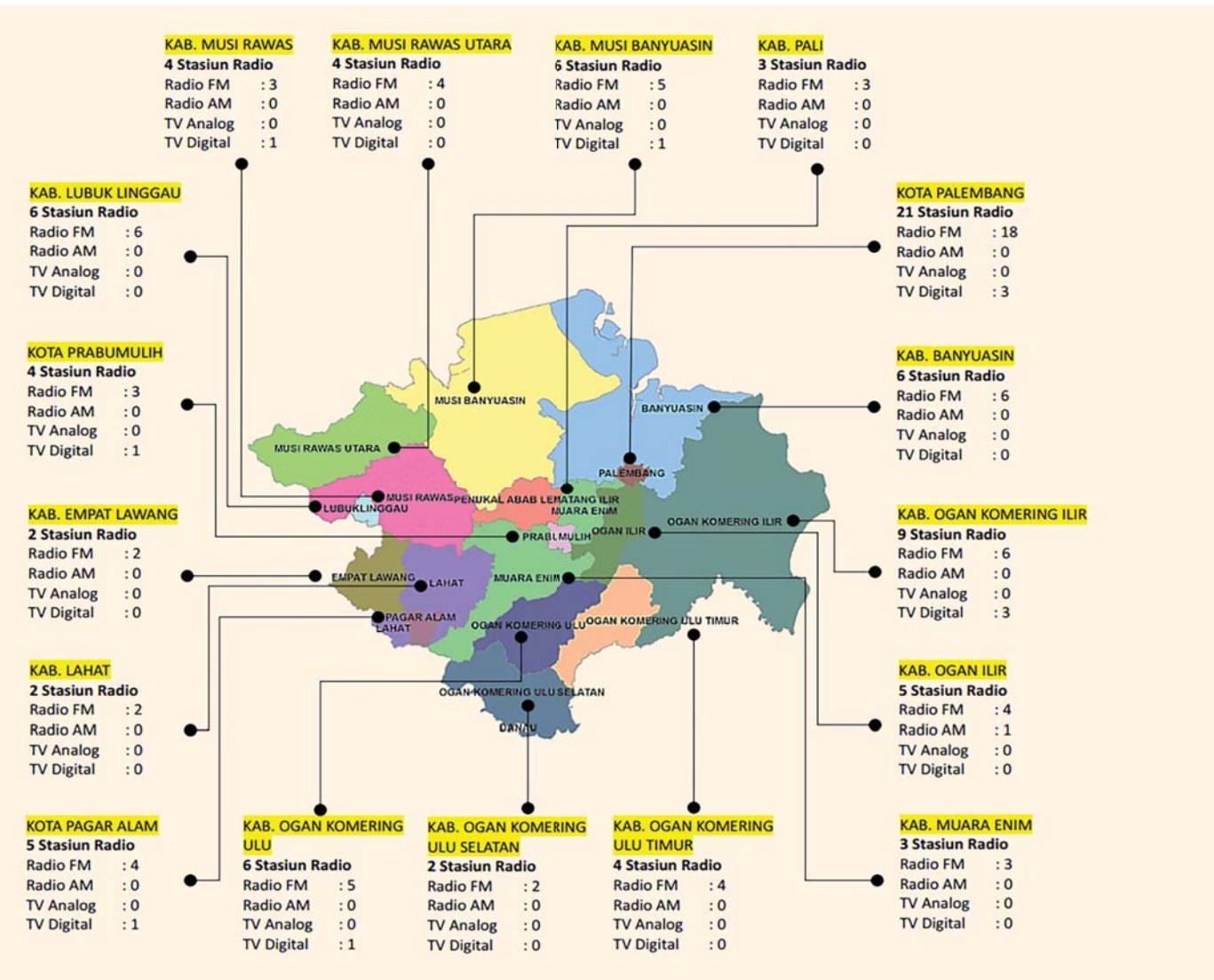
No	Tanggal	Lokasi	Jenis Kegiatan
1	15 - 18 April 2025	Kabupaten Ogan Ilir	Open Shelter
2	22 - 25 April 2025	Kota Prabumulih dan Kabupaten Penuk Abab Lematang Ilir	Open Shelter
3	14 - 17 Mei 2025	Kota Pagaralam dan Kabupaten Lahat	Open Shelter
4	19 - 21 Mei 2025	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Remote Site
5	02 - 04 Juni 2025	Kabupaten Banyuasin	Remote Site
6	10 - 12 Juni 2025	Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Ogan Ilir	Remote Site
7	15 - 18 Juli 2025	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Open Shelter
8	22 - 25 Juli 2025	Kabupaten Muara Enim	Open Shelter
9	28 Juli - 01 Agustus 2025	Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Banyuasin	Remote Site
10	06 - 08 Agustus 2025	Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Empat Lawang	Remote Site
11	12 - 15 Agustus 2025	Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas Utara	Open Shelter
12	26 - 29 Agustus 2025	Kabupaten Banyuasin	Open Shelter
13	18 - 19 September 2025	Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten OKU Timur dan Kabupaten OKU Selatan	Remote Site
14	18 - 20 November 2025	Kota Palembang	Open Shelter
15	09 - 11 Desember 2025	Kota Palembang	Open Shelter
16	16 - 18 Desember 2025	Kota Palembang	Open Shelter

b). Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Siaran Radio FM

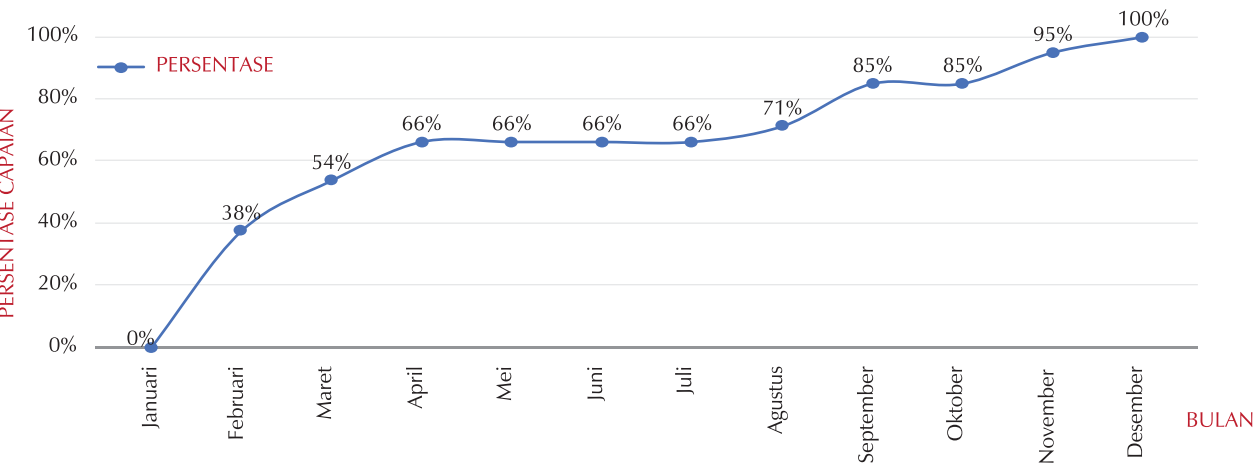
Pada kegiatan pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran Radio FM, sasaran pengukuran stasiun siaran terdiri dari seluruh stasiun siaran FM di wilayah Sumatera Selatan. Pada tahun 2025 target pengukuran untuk siaran Radio FM di UPT Balai Monitor SFR Kelas I Palembang adalah sekurang-kurangnya 50 ISR dari 80 ISR yang tersebar di 17 Kab/Kota. Secara nasional jumlah Radio FM yang terukur tahun 2025 berjumlah 1.733 ISR ini berarti secara persentase 4.6%

Radio FM ada di Sumatera Selatan. Adapun capaian kegiatan pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun Radio FM adalah sebagai berikut:

Gambar 3.9
Sebaran Stasiun Penyiaran di Provinsi Sumatera Selatan



Grafik 3.8
Capaian Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Siaran Radio FM



Sumber: Aplikasi APSTARD (<https://apstard.postel.go.id/>)

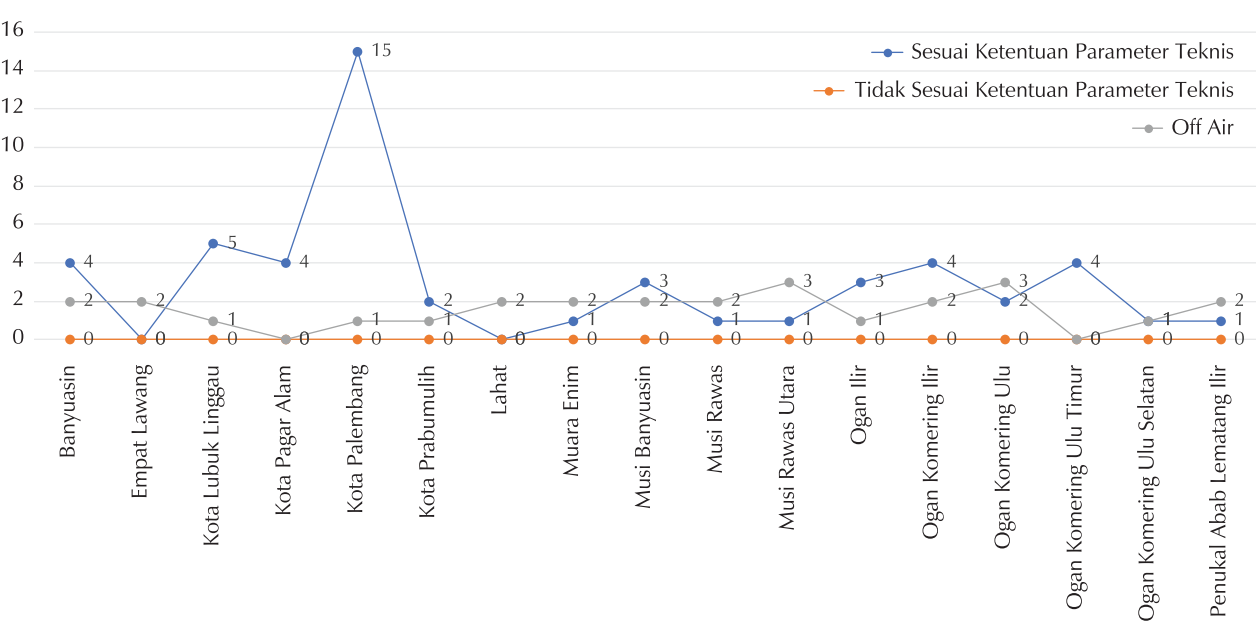
Berdasarkan grafik persentase capaian diatas, terlihat adanya tren peningkatan kinerja yang progresif sepanjang tahun. Pada bulan Januari, capaian masih berada di angka 0%, kemudian meningkat signifikan pada Februari menjadi 38%, dan kembali naik pada Maret menjadi 54%.

Memasuki April hingga Juli, capaian relatif stagnan di angka 66%, menunjukkan fase cut-off pelaksanaan kegiatan. Pada Agustus terjadi peningkatan menjadi 71%, yang kemudian kembali meningkat cukup

signifikan pada September dan Oktober hingga mencapai 85%.

Pada dua bulan terakhir, kinerja menunjukkan akselerasi yang sangat baik, dengan capaian 95% pada November dan akhirnya mencapai 100% pada Desember. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan pola peningkatan yang konsisten dan terukur, dengan penguatan realisasi pada triwulan IV sehingga target tahunan dapat terpenuhi secara optimal pada akhir tahun.

Grafik 3.9
Hasil Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Radio FM per Kab/Kota



Sumber: Aplikasi APSTARD (<https://apstard.postel.go.id/>)

Berdasarkan Grafik 3.10 hasil Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Radio FM per kabupaten/kota, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar hasil pengukuran sesuai ketentuan parameter teknis yang berlaku.

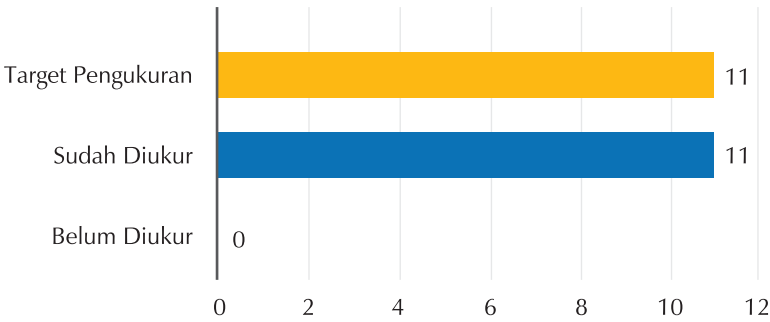
Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan hasil Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Radio FM yang relatif baik, ditandai dengan tidak ditemukannya pelanggaran ketidaksesuaian teknis. Namun, adanya radio FM yang berstatus Off Air di sejumlah kabupaten/kota menjadi perhatian dan memerlukan tindak lanjut berupa pembinaan, klarifikasi status operasional, serta pengawasan lanjutan agar seluruh radio FM dapat mengudara secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c). **Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Siaran Televisi Digital**

Pada kegiatan pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran Televisi Digital, sasaran pengukuran stasiun siaran terdiri dari seluruh televisi digital di wilayah Sumatera Selatan. Tahun 2025 target pengukuran televisi digital adalah 11 Mux. Secara nasional jumlah pemancar stasiun Televisi Digital yang terukur di Indonesia berjumlah 459 Mux yang berarti 2.4% Televisi Digital berada di Sumatera Selatan.

Adapun capaian kegiatan pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun Televisi Digital adalah sebagai berikut:

Grafik 3.10
Capaian Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Televisi Digital



Sumber: Aplikasi Report Online (<https://rol.postel.go.id/>)

Berdasarkan grafik, jumlah Target Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Televisi Digital yang ditetapkan adalah sebanyak 11 televisi digital. Dari total tersebut, seluruhnya telah diukur yaitu sebanyak 11 dengan hasil ukur 10 sesuai ISR dan 1 tidak aktif.

Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pengukuran telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan, tanpa adanya pengukuran yang tertunda. Capaian ini mencerminkan pelaksanaan kegiatan yang optimal, terencana dengan baik, serta efektif dalam memenuhi target pengukuran secara menyeluruh.

Gambar 3.10
Kegiatan Pengukuran Parameter Teknis Radio Siaran Radio FM di Kabupaten Ogan Ilir



Tabel 3.9
Hasil Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Televisi Digital

No	Wilayah Layanan	Nama Penyelenggara Layanan Multipleksing	Status	Hasil Ukur
1	Sumatera Selatan - 1	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	On Air	Sesuai
2	Sumatera Selatan - 1	Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh, Pt	On Air	Sesuai
3	Sumatera Selatan - 1	Indosiar Visual Mandiri, Pt.	On Air	Sesuai
4	Sumatera Selatan - 1	Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh, Pt	On Air	Sesuai
5	Sumatera Selatan - 1	Indosiar Visual Mandiri, Pt.	On Air	Sesuai
6	Sumatera Selatan - 1	Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh, Pt	On Air	Sesuai
7	Sumatera Selatan - 2	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	On Air	Sesuai
8	Sumatera Selatan - 3	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	On Air	Sesuai
9	Sumatera Selatan - 4	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	On Air	Sesuai
10	Sumatera Selatan - 5	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	On Air	Sesuai
11	Sumatera Selatan - 6	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	Off Air	Tidak Aktif

Tabel 3.10
Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Siaran Radio FM dan Televisi Digital

No	Tanggal	Lokasi
1	04 - 07 Februari 2025	Kota Palembang
2	04 - 07 Februari 2025	Kota Palembang
3	11 - 14 Februari 2025	kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
4	11 - 14 Februari 2025	Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat
5	18 - 21 Februari 2025	Kabupaten Banyuasin
6	18 - 21 Februari 2025	Kabupaten Musi Banyuasin
7	25 - 28 Februari 2025	Kabupaten Empat Lawang dan Kota Lubuk Linggau
8	25 - 28 Februari 2025	Kota Pagar Alam

No	Tanggal	Lokasi
9	24 - 27 Maret 2025	Kota Palembang
10	15 - 18 April 2025	Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Ogan Komering Ulu Selatan
11	22 - 25 April 2025	Kota Prabumulih dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
12	19 - 22 Agustus 2025	Kabupaten Ogan Ilir
13	08 - 11 September 2025	Kota Palembang
14	09 - 12 September 2025	Kabupaten Ogan Komering Ilir
15	11 - 14 November 2025	Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara
16	15 - 19 Desember 2025	Kabupaten Banyuasin
17	22 - 26 Desember 2025	Kota Palembang

3. Target dan Realisasi Jangka Menengah (2021-2025)

2021			2022			2023			2024			2025		
T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	%
50	61	122	100	130	130	100	100	100	100	100	100	100	99.44	99.44

Keterangan :
T = Target
C = Capaian
% = Persentase Capaian

3. Kendala dan Solusi

a). Kendala dan Solusi dalam Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link.

Kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan meliputi beberapa aspek yang cukup kompleks. Aksesibilitas lokasi yang sulit menjadi tantangan utama, terutama pada daerah terpencil atau terisolir dengan kondisi medan berat seperti perbukitan, hutan, jalan rusak, maupun wilayah dengan tingkat keamanan yang kurang kondusif. Selain itu, keterbatasan peralatan juga menjadi hambatan, baik karena perangkat yang digunakan belum mendukung teknologi microwave link secara optimal, sudah usang, maupun kurang mendapatkan pemeliharaan dan kalibrasi secara berkala. Interferensi sinyal dari sumber lain turut mempersulit proses identifikasi, khususnya ketika stasiun microwave link berada dalam jarak yang sangat berdekatan atau terdapat perangkat elektronik dan jaringan wireless lain yang tidak memenuhi standar teknis. Di sisi lain, kompleksitas konfigurasi jaringan seperti topologi point-to-point atau point-to-multipoint, penggunaan repeater atau amplifier, serta integrasi dengan sistem routing dan switching juga menambah tingkat kesulitan dalam penanganan. Permasalahan semakin diperparah dengan data yang tidak terbaru akibat keterlambatan atau kesalahan input, lemahnya manajemen data, serta kurangnya koordinasi antar divisi, sehingga berdampak pada ketepatan analisis dan pengambilan keputusan.

Adapun solusi yang dapat diterapkan dalam mengatasi kendala-kendala diatas antara lain:

- Menyusun rencana inspeksi yang lebih rinci dan realistis, termasuk pemetaan lokasi.
- Mengadopsi teknologi yang lebih baik dalam peralatan monitoring dan inspeksi untuk meningkatkan efisiensi.
- Mengikuti pelatihan atau melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja.
- Mengatur jadwal yang lebih fleksibel untuk mengakomodir kebutuhan mendesak dan cuaca yang tidak menentu.
- Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak terkait untuk mempercepat proses izin dan pelaksanaan inspeksi.

b). Kendala dan Solusi dalam pelaksanaan Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Siaran Radio FM dan Siaran Televisi Digital.

Pelaksanaan pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran radio FM dan televisi digital menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek teknis lapangan maupun administratif. Dari sisi lokasi dan geografis, akses menuju lokasi pemancar kerap menjadi hambatan utama, terutama untuk pemancar yang berada di daerah terpencil atau kawasan perbukitan dengan kondisi medan yang sulit dijangkau, serta mempertimbangkan faktor keamanan pada wilayah tertentu yang berpotensi konflik. Karakteristik

topografi seperti perbukitan, lembah, dan kontur tanah yang tidak merata juga turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Kendala administratif yang umumnya berkaitan dengan kesesuaian perizinan, kelengkapan dokumen teknis, serta implementasi ketentuan regulasi. Permasalahan ini sering muncul dalam bentuk ketidaksesuaian antara parameter teknis pemancar yang beroperasi dengan data teknis yang tercantum dalam izin stasiun siaran, sehingga memerlukan verifikasi dan penyesuaian lebih lanjut.

Adapun solusi yang dapat diterapkan dalam mengatasi kendala-kendala diatas yaitu perencanaan yang baik serta penerapan metode pengukuran yang tepat, dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan kerja dan kelancaran operasional di lapangan. Perencanaan ini mencakup penentuan metode, peralatan yang digunakan, serta pembagian tugas personel agar kegiatan pengukuran dapat berjalan efektif dan efisien.

Selain itu, perlu dilakukan penyiapan dan verifikasi kelengkapan dokumen administratif sebelum pelaksanaan pengukuran. Verifikasi awal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan administratif, perizinan, dan aspek legalitas telah terpenuhi, sehingga kegiatan pengukuran di lapangan tidak mengalami kendala yang dapat menghambat waktu maupun proses pelaksanaan.

4. Strategi Keberhasilan/Inovasi

Faktor keberhasilan dalam kegiatan pemeriksaan stasiun radio Microwave Link, Pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran pada pita frekuensi siaran Radio FM dan TV Digital yaitu memastikan bahwa seluruh kegiatan pengukuran dilaksanakan berdasarkan prinsip standardisasi dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Proses pengukuran wajib mengacu pada standar nasional dan internasional, termasuk ketentuan yang ditetapkan oleh International Telecommunication Union (ITU), guna menjamin keseragaman metode, batas toleransi parameter teknis, serta validitas dan keterbandingan hasil ukur. Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut menjadi dasar dalam menilai kinerja sistem siaran dan transmisi serta memastikan bahwa setiap penyelenggara memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan. Selain itu, kami mewajibkan penggunaan peralatan ukur yang telah dikalibrasi dan dipelihara secara berkala untuk menjamin akurasi, konsistensi, dan ketertelusuran hasil pengukuran.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, pentingnya validasi data sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan



standar teknis yang berlaku. Proses validasi dilakukan untuk memastikan bahwa data hasil pengukuran memiliki integritas dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan keputusan teknis maupun regulatif. Di samping itu, pengembangan kompetensi sumber daya manusia menjadi perhatian utama, melalui peningkatan kapasitas dan pemahaman terhadap perkembangan teknologi terkini, sehingga pelaksanaan pengukuran dan interpretasi data dapat dilakukan secara profesional, objektif, dan akurat.

6. Dampak

Penerapan standardisasi serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku memungkinkan penyelenggara siaran dan jaringan transmisi memastikan seluruh parameter teknis beroperasi sesuai dengan ketentuan perizinan dan peraturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan ini dapat meminimalkan potensi pelanggaran teknis, mencegah terjadinya interferensi, serta mengurangi risiko sanksi administratif. Selain itu, penggunaan metode pengukuran yang terstandar dan peralatan ukur yang sesuai menghasilkan data yang lebih akurat dan reliabel. Tingkat akurasi yang tinggi tersebut meningkatkan keandalan hasil evaluasi teknis, sehingga kondisi aktual sistem siaran dan microwave link dapat diketahui secara tepat, objektif, dan terukur.

7. Implementasi BerAKHLAK

Implementasi Budaya Bernilai BerAKHLAK dalam kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi) dilakukan melalui beberapa cara :

- Berorientasi Pelayanan, Memberikan perlindungan hak kepada pengguna frekuensi radio yang memiliki Izin Stasiun Radio (ISR), dan melakukan kegiatan teknis untuk pemenuhan kualitas layanan siaran yang optimal bagi masyarakat.
- Akuntabel, Seluruh proses kegiatan pengukuran dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas untuk dipertanggungjawabkan melalui penerapan sesuai SOP. Data hasil pengukuran dilaporkan secara sistematis, sehingga setiap keputusan teknis yang diambil memiliki dasar data yang valid.
- Kompeten, Pengendali Frekuensi Radio sebagai petugas dituntut memiliki kompetensi teknis yang kompeten melalui pelatihan dan penguasaan teknologi pengukuran.
- Harmonis, Komunikasi yang baik dan saling menghargai dengan stakeholder dalam mendukung kegiatan serta penyelesaian permasalahan teknis untuk tujuan bersama.
- Loyal, Kegiatan pengukuran parameter teknis dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok, serta komitmen menjaga kualitas dan ketertiban penggunaan spektrum frekuensi.
- Adaptif, Dalam menghadapi perkembangan teknologi siaran dan transmisi, petugas mampu bersikap adaptif terhadap perubahan metode, peralatan, dan sistem pengukuran.

- Kolaboratif, Mampu melakukan kerjasama antara petugas dan stakeholder serta institusi pendidikan. Kolaborasi ini dapat menambah wawasan teknis, meningkatkan kualitas pengukuran, serta mendukung pengembangan dalam pengelolaan siaran dan microwave link.

8. Efisiensi

Faktor efisiensi pengukuran parameter teknis siaran radio FM, televisi digital, dan microwave link :

Melakukan pemeliharaan dan kalibrasi perangkat secara berkala merupakan langkah penting untuk memastikan keandalan alat ukur serta mempercepat proses pengambilan data secara akurat. Dengan kondisi perangkat yang terjaga dan terkalibrasi sesuai standar, potensi kesalahan pengukuran dapat diminimalkan sehingga mengurangi kebutuhan pengukuran ulang dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas di lapangan.

Pemanfaatan aplikasi pelaporan daring seperti Apstard dan New Rol dapat meningkatkan kecepatan serta akurasi dalam penyampaian hasil pemeriksaan stasiun radio. Sistem pelaporan berbasis digital memungkinkan proses dokumentasi dan pengolahan data dilakukan secara lebih sistematis, terintegrasi, dan mudah ditelusuri. Di sisi lain, pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas teknis juga berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas, sekaligus mendukung kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi baru di bidang pengukuran dan pengelolaan frekuensi radio.

9. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Melakukan evaluasi kepatuhan teknis merupakan langkah strategis sebagai referensi dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan guna memastikan seluruh kegiatan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar teknis yang berlaku. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan laporan hasil inspeksi stasiun radio Microwave Link, pengukuran parameter teknis, serta pengujian karakteristik pemancar stasiun siaran pada pita frekuensi siaran Radio FM dan siaran Televisi Digital. Dengan evaluasi yang sistematis, tingkat kesesuaian operasional di lapangan terhadap regulasi dapat teridentifikasi secara objektif dan terukur.

Evaluasi kinerja juga perlu dilaksanakan untuk mengetahui efektivitas proses pemeriksaan stasiun radio Microwave Link, pengukuran parameter teknis, serta karakteristik pemancar pada pita frekuensi Radio FM dan Televisi Digital. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam menetapkan langkah perbaikan yang diperlukan, baik melalui penyempurnaan proses pelaksanaan kegiatan maupun perencanaan yang lebih terstruktur. Dengan demikian, tindakan korektif yang

dilakukan dapat meningkatkan kualitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio.

10. Rekomendasi Tindak Lanjut Tahun 2026

Tindak lanjut yang akan datang perlu difokuskan pada penguatan sistem pengawasan dan peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan teknis secara berkelanjutan. Salah satu langkah strategis adalah melakukan peningkatan mekanisme pemeriksaan stasiun radio melalui pemanfaatan sistem pelaporan berbasis digital yang terintegrasi, sehingga proses pemeriksaan dapat dilakukan secara real time dan lebih akurat. Selain itu, perlu dilakukan inovasi serta standarisasi prosedur pemeriksaan stasiun radio Microwave Link, pengukuran parameter teknis, dan karakteristik pemancar siaran Radio FM maupun Televisi Digital agar sesuai dengan perkembangan regulasi dan teknologi terkini.

Tabel 3.11
Benchmarking Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)

Indikator Kinerja	Balmon Medan		Balmon Palembang		Perbandingan Capaian
	Target	Capaian	Target	Capaian	
Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)	100%	100%	100%	99.44%	0.56%

Sumber : Aplikasi Janji Kinerja 2025

Berdasarkan hasil tabel diatas, indikator kinerja Pemeriksaan Stasiun Radio Balmon Medan dan Balmon Palembang sama-sama memiliki target kinerja sebesar 100%. Balmon Medan berhasil mencapai target tersebut dengan realisasi 100%, sehingga kinerjanya sesuai dengan yang direncanakan. Sedangkan, Balmon Palembang mencatat capaian sebesar 99,44%, berada di bawah target yang telah ditetapkan. Perbandingan capaian antara kedua UPT menunjukkan selisih sebesar 0,56%, yang mengindikasikan adanya perbedaan dalam tingkat pencapaian kinerja.

Capaian kinerja Balmon Palembang terdiri dari pemeriksaan stasiun radio microwave link berupa inspeksi dengan metode *remote site* sebesar 99.6% yang seharusnya berdasarkan target pemeriksaan Perjanjian Kinerja (PK) adalah 100% dikarenakan target ISR yang ditetapkan berada diluar wilayah kerja Balmon Palembang, sehingga tidak dapat untuk dilakukan pemeriksaan ISR. Pemeriksaan stasiun radio *microwave link* berupa inspeksi dengan metode *Open Shelter* sebesar 97.8% melebihi target Perjanjian Kinerja (PK) yang ditetapkan sebesar 60%. Sedangkan Inspeksi yang dilakukan melalui kegiatan pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran radio FM dan televisi digital telah dilaksanakan sebesar 100%.

Penguatan kapasitas kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis perlu menjadi prioritas untuk memastikan petugas mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kondisi alat ukur serta kalibrasi peralatan ukur secara berkala guna menjaga akurasi dan keandalan data. Lebih lanjut, peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder pengguna frekuensi dapat mendukung pengembangan metode pengawasan yang lebih efektif serta menciptakan tata kelola spektrum frekuensi yang tertib, efisien, dan sesuai peruntukannya.

11. Benchmarking

Benchmarking dengan UPT Balai Monitor SFR Kelas I Medan, luas wilayah kerja UPT 72.461 km², pengguna frekuensi 30.877.

Indikator Kinerja 1-3

Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

1. Latar Belakang

Penanganan gangguan spektrum frekuensi radio merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang dan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang harus di prioritaskan. Kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio ini dimaksudkan agar pengguna frekuensi yang memiliki izin terlindungi hak nya, dimana sasaran utama penanganan gangguan spektrum frekuensi radio mencari sumber gangguan yang mempengaruhi kualitas layanan komunikasi sehingga tercipta tertib penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya.

Penanganan gangguan dilakukan dengan mengidentifikasi deteksi sumber pancaran gangguan spektrum frekuensi radio dengan menggunakan Alat/Perangkat Monitoring, mengumpulkan data dan informasi, kemudian mengambil tindakan untuk mengatasi gangguan spektrum frekuensi radio. Beberapa dampak gangguan spektrum frekuensi radio:

1. Gangguan pada komunikasi radio dapat menyebabkan komunikasi tidak lancar/pesan tidak tersampaikan.
2. Hilangnya data, seperti data yang tidak terkirim atau data yang rusak.
3. Gangguan pada sistem navigasi atau sistem marabahaya dapat mengancam keselamatan jiwa.

Penerima manfaat dari pencapaian indikator ini mencakup seluruh masyarakat dan pemilik ISR di Sumatera Selatan yang membutuhkan keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan spektrum frekuensi radio sesuai peruntukannya. Selain itu, Instansi dan lembaga khusus yang menjadi prioritas seperti BMKG dan bandara turut memperoleh keamanan dalam menggunakan spektrum frekuensi radio untuk menjalankan tugasnya yang vital, sehingga spektrum frekuensi radio yang digunakan harus bebas dari gangguan. Dengan demikian, penanganan gangguan spektrum frekuensi radio secara menyeluruh berdampak langsung pada kehidupan dan aktivitas masyarakat, instansi, dan perusahaan di Sumatera Selatan.

2. Analisa Capaian Kinerja 2025

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%	100%

Sumber: Aplikasi APSTARD (<https://apstard.postel.go.id/>) dan Aplikasi New Rol (<https://rol.postel.go.id/>)

Target kinerja penanganan gangguan spektrum frekuensi radio pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 95% yang artinya setiap gangguan yang telah dilaporkan oleh pengguna ISR harus dapat terselesaikan seluruhnya. Lebih lanjut, realisasi penanganan gangguan spektrum frekuensi radio yang telah dicapai pada tahun 2025 adalah 100% (melebihi dari target yang ditetapkan) dengan rincian 5 gangguan yang terselesaikan dari 5 laporan gangguan spektrum frekuensi radio di Sumatera Selatan.

Gambar 3.11
Peta Capaian Kinerja Penanganan Gangguan SFR UPT Indonesia



Sumber: Aplikasi Lapar Gangguan (<https://laporgangguansfr.postel.go.id/>)

Gambar 3.10 menunjukkan Capaian Kinerja Penanganan Gangguan SFR UPT Indonesia. Balmon Kelas I Palembang mencatat capaian gangguan sebanyak 105.26% (100% gangguan tertangani dari target PK sebesar 95%) dengan rincian 5 gangguan yang terselesaikan dari 5 laporan gangguan spektrum frekuensi radio di Sumatera Selatan. Sementara itu, secara keseluruhan 33 UPT Balmon di seluruh Indonesia juga mencatat capaian penanganan gangguan sebanyak 105.26% dengan jumlah yang bervariasi (warna hijau) dan ada 2 UPT yang memiliki laporan gangguan sebanyak 0 gangguan (warna merah). Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penanganan gangguan telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Balmon Kelas I Palembang masih termasuk dalam posisi tertinggi penyelesaian gangguan spektrum frekuensi radio bersama dengan UPT lain. Hasil ini bisa dicapai dengan berbagai strategi yang telah dilakukan seperti pemudahan proses pelaporan gangguan pemilik ISR, keefektifan koordinasi dengan pihak terkait, dan kecepatan serta ketepatan dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan

gangguan yang dilaporkan. Dari strategi tersebut, Balmon Kelas I Palembang dapat menjalankan tugas penanganan gangguan dengan baik dan bisa mencapai bahkan melebihi target yang ditentukan dalam PK tahun 2025.

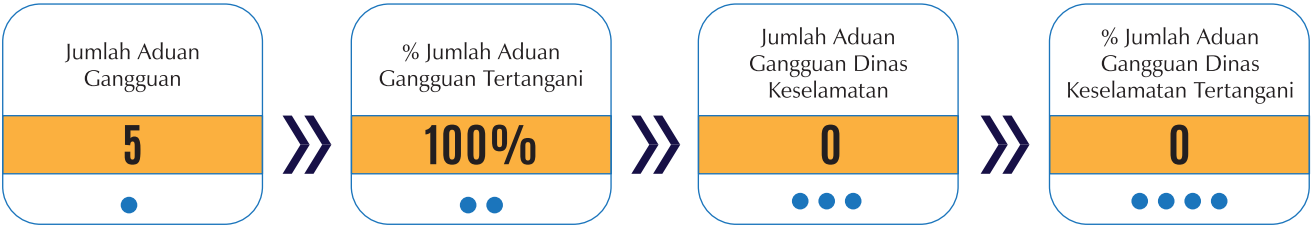
Perbandingan capaian antar-UPT dalam penanganan gangguan spektrum frekuensi radio tidak dapat dilakukan secara langsung dan eksplisit, dikarenakan adanya perbedaan luas wilayah kerja, jumlah ISR, dan tingkat kepadatan penduduk yang bisa menjadi tantangan tersendiri bagi UPT. Oleh karena itu, evaluasi kinerja perlu mempertimbangkan kompleksitas dan keadaan lapangan dari setiap wilayah kerja sebagai faktor pembeda dalam pelaksanaan spektrum frekuensi radio.

Capaian kinerja kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio pada tahun 2025 adalah terdapat 5 laporan aduan gangguan, dan keseluruhan laporan aduan tersebut dapat diselesaikan (*clear*) sehingga presentase capaian kinerja 105.26%

Gambar 3.12
Kegiatan Penanganan Gangguan SFR di Banyuasin



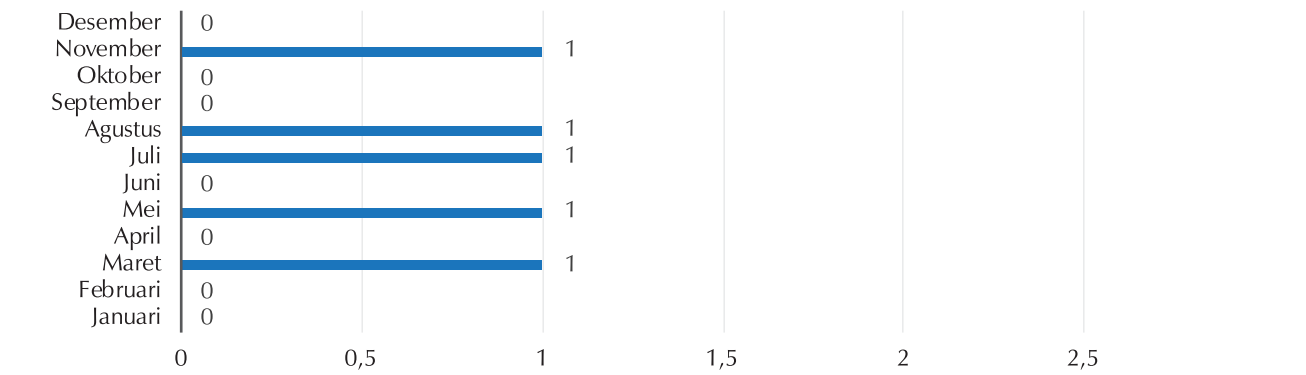
Tabel 3.12
Capaian Penanganan Gangguan SFR



Sumber : Aplikasi Lapor Gangguan (<https://laporganguansfr.postel.go.id/>)

Tabel 3.12 Capaian Penanganan Gangguan SFR menunjukkan jumlah gangguan yang dilaporkan pengguna ISR sepanjang tahun 2025. Data menunjukkan bahwa 5 gangguan yang dilaporkan berasal dari pemilik ISR non-dinas keselamatan dan semuanya dapat tertangani sampai selesai. Data juga menunjukkan tidak adanya aduan gangguan dari dinas keselamatan yang berarti bahwa sepanjang tahun 2025, dinas keselamatan telah memanfaatkan spektrum frekuensi radio yang sudah didapat dengan baik dan tanpa gangguan.

Grafik 3.11
Jumlah Penanganan Gangguan SFR (*month to month*)



Sumber : Aplikasi Lapor Gangguan (<https://laporganguansfr.postel.go.id/>)

Grafik Capaian Penanganan Gangguan SFR (*month to month*) menunjukkan waktu terjadinya gangguan spektrum frekuensi radio yang dilaporkan pengguna ISR sepanjang tahun 2025. Data menunjukkan dalam satu bulan, jumlah maksimal dari gangguan yang terlapor berjumlah 1 gangguan per bulan dimana adanya aduan gangguan terjadi di bulan Maret, Mei, Juli, Agustus, dan November.

Tabel 3.13
Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Gangguan SFR

No	Tanggal	Lokasi	Pelapor	Penggangu
1	18 s.d 21 Maret 2025w	Kabupaten Muara Enim	PT Musi Hutan Persada (Frekuensi TX 172.4250 MHz RX 167.3750 MHz)	PT. KAI - Irisan frekuensi pada kanal yang sama dengan spektrum frekuensi radio milik PT. KAI RX 172.4250 MHz
2	14-17 Mei 2025	Kota Palembang	CV. Jaya Perkasa Abadi (Frekuensi TX 160.350 MHz RX 165.350 MHz)	Interferensi frekuensi dari pengguna frekuensi lain
3	16 s.d 19 Juli 2025	Kabupaten Ogan Ilir	PT. Essa Industries Indonesia Tbk. (Frekuensi TX 158.7500 MHz RX 153.7500 MHz)	Interferensi frekuensi dari pengguna frekuensi lain
4	13 s.d 16 Agustus 2025	Kabupaten Ogan Ilir	Universitas Sriwijaya (Frekuensi TX 162.0500 MHz RX 169.5500 MHz)	Interferensi frekuensi dari pengguna frekuensi lain
5	4 s.d 7 November 2025	Kota Palembang	BMKG Kota Palembang (Frekuensi TX 5640.000 MHz RX 5640.000 MHz)	PT. RMK Energy - Penggunaan frekuensi yang berdekatan oleh PT. RMK Energy (frekuensi 5664 MHz, Bandwidth 107 MHz)

Tabel Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Gangguan SFR menunjukkan deskripsi singkat dari gangguan spektrum frekuensi radio yang dilaporkan sepanjang tahun 2025 dengan rincian: 3 gangguan yang dilaporkan berasal dari sektor industri, 1 laporan gangguan dari institusi pendidikan tinggi, dan 1 laporan gangguan dari BMKG. Penyebab gangguan yang ditemukan umumnya berasal dari interferensi dari pengguna frekuensi lain dan juga penggunaan kanal frekuensi yang sama atau berdekatan dengan pemilik ISR lainnya.

- Capaian indikator kinerja penanganan gangguan spektrum frekuensi radio terpenuhi jika:
1. Telah terbit Surat Perintah Tugas (SPT) yang terkait dengan gangguan spektrum frekuensi radio yang telah dilaporkan
 2. Pada gangguan dinas keselamatan, batas maksimal waktu terbitnya Surat Perintah Tugas (SPT) oleh Ka UPT adalah 1x24 jam, sedangkan untuk dinas non keselamatan batas maksimal waktu terbitnya Surat Perintah Tugas (SPT) oleh Ka UPT adalah 7x24 jam.

Tabel 3.14
Tanggal Penerbitan SPT Penanganan Gangguan SFR

No	Pelapor	Tanggal Pengaduan	SPT Terbit
1	PT Musi Hutan Persada	16 Maret 2025	17 Maret 2025
2	CV. Jaya Perkasa Abadi	02 Mei 2025	05 Mei 2025
3	PT. Essa Industries Indonesia Tbk.	14 Juli 2025	15 Juli 2025
4	Universitas Sriwijaya	12 Agustus 2025	13 Agustus 2025
5	BMKG Kota Palembang	04 November 2025	04 November 2025

Tabel Tanggal Penerbitan SPT Penanganan Gangguan SFR menunjukkan waktu penerbitan SPT dari gangguan SFR yang dilaporkan. Data menunjukkan bahwa gangguan SFR yang tertangani semuanya telah memiliki SPT yang dikeluarkan UPT dan penerbitan SPT tidak menghabiskan waktu lebih dari 7x24 jam sesuai dengan ketentuan PK dalam Nota Dinas Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital Nomor: 334/DJID.6/PR.01.02/03/2025 tanggal 03 Maret 2025 tentang penerbitan SPT penanganan gangguan dinas non keselamatan. Data juga menunjukkan bahwa penerbitan SPT penanganan gangguan spektrum frekuensi radio di tahun 2025 umumnya hanya memerlukan waktu 1 hari kerja.

3. Target dan Realisasi Jangka Menengah (2021-2025)

2021			2022			2023			2024			2025		
T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	%
97	100	103.09	98	100	102.04	99	100	101.01	100	100	100	95	100	105.26

Keterangan :
T = Target
C = Capaian
% = Persentase Capaian

4. Kendala dan Solusi

Kendala dalam kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio di antaranya kesulitan dalam mendeteksi sumber pancaran gangguan yang bersumber dari sinyal yang intermitten. Solusi yang dapat dilakukan yaitu melakukan pemantauan secara continue dan intense sehingga sumber pancaran gangguan dapat terdeteksi dan ditemukanali.

5. Strategi Keberhasilan/Inovasi

- Capaian kinerja Balmon Palembang di tunjang oleh beberapa hal antara lain:
1. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait informasi detail lokasi, jenis gangguan, frekuensi yang digunakan dan informasi lain yang diperlukan;
 2. Adanya dukungan sarana dan prasarana monitoring yang dimiliki oleh Balmon Kelas I Palembang;



Gambar 3.13
Kegiatan Penanganan Gangguan SFR di Palembang

3. Adanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi serta keahlian khusus di bidang Pengendalian Frekuensi.

6. Dampak

Persentase Capaian di tahun 2025 mencapai 105%, melebihi dari target awal yang ditetapkan sebesar 95%. Dampak langsung dari keberhasilan penanganan gangguan frekuensi radio tersebut adalah terjaganya kualitas dari penggunaan spektrum frekuensi radio yang digunakan oleh masyarakat, instansi pemerintah, serta sektor-sektor strategis lainnya.

Masyarakat dapat menggunakan layanan komunikasi radio secara lebih aman, lancar, dan bebas interferensi, sehingga mendukung kelancaran aktivitas sehari-hari, termasuk komunikasi darurat, keselamatan publik, transportasi, dan kegiatan ekonomi. Selain itu, penanganan gangguan yang cepat dan menyeluruh juga meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi pemegang izin frekuensi radio, karena penggunaan spektrum frekuensi radio dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap peran pemerintah dalam mengelola spektrum frekuensi radio secara efektif dan bertanggung jawab.

7. Implementasi BerAKHLAK

Implementasi Budaya Bernilai BerAKHLAK dalam kegiatan Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio dilakukan melalui beberapa cara:

- a. Berorientasi Pelayanan, Memberikan perlindungan kepada pengguna frekuensi yang memiliki ISR dan menjamin penggunaan spektrum frekuensi radio bebas dari interference.
- b. Akuntabel, Menjamin penanganan aduan gangguan spektrum frekuensi terselesaikan hingga tuntas (*clear*).
- c. Kompeten, Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pengguna frekuensi secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Harmonis, Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif dan mengedepankan kerja sama yang baik kepada pengguna frekuensi.
- e. Loyal, Pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan dilakukan sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Adaptif, Beradaptasi dengan perkembangan teknologi dalam proses penerimaan aduan, koordinasi dengan stakeholder, dan penyelesaian penanganan gangguan.
- g. Kolaboratif, Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan para *stakeholder* yang mengalami gangguan frekuensi radio, selalu mengutamakan etika komunikasi yang baik, jelas dan efektif dalam percepatan penyelesaian penanganan gangguan.

8. Efisiensi

Pencapaian indikator penanganan gangguan frekuensi radio tahun 2025 diupayakan melalui pemanfaatan sumber daya yang efisien dan terukur. Seluruh laporan gangguan dapat diselesaikan tanpa perubahan di luar perencanaan awal dan sesuai standar operasional prosedur, sehingga setiap laporan dapat ditangani dalam



Gambar 3.14
Kegiatan Penanganan Gangguan SFR di Ogan Ilir

satu siklus penanganan. Hal ini menunjukkan optimalisasi sumber daya sekaligus penghematan waktu operasional.

Dalam pelaksanaannya, Balmon Kelas I Palembang memanfaatkan peralatan monitoring, sistem pelaporan, serta koordinasi yang telah tersedia untuk mendukung efisiensi anggaran operasional. Dengan dukungan teknologi dan kerja sama bersama instansi terkait serta para *stakeholder*, pelayanan penanganan gangguan frekuensi radio dapat dilaksanakan secara cepat, efektif, dan efisien sehingga setiap gangguan dapat diselesaikan dengan baik.

9. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio telah dilakukan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dalam PK tahun 2025. Waktu yang diperlukan dalam penanganan gangguan digunakan secara efektif mulai dari kegiatan awal sampai pelaporan hasil penanganan dan juga data yang diperlukan dalam proses pembuatan laporan gangguan berdasarkan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator PK yang telah ditetapkan.

Laporan kinerja tahun sebelumnya juga telah dimanfaatkan sebagai instrumen evaluasi dan pembelajaran terkait penanganan gangguan, terutama tentang indikator dan tantangan-tantangan yang dihadapi saat penanganan gangguan spektrum frekuensi radio di tahun sebelumnya. Pemanfaatan laporan kinerja digunakan sebagai pengetahuan awal tentang tantangan yang akan dihadapi dalam proses penanganan gangguan dan juga menjadi dasar dalam merumuskan perbaikan dan tindakan pembaharuan yang efektif dalam menangani laporan gangguan spektrum frekuensi radio.

Tabel 3.15
Benchmarking Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Indikator Kinerja	Balmon Tangerang		Balmon Palembang		Perbandingan Capaian
	Target	Capaian	Target	Capaian	
Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%	100%	95%	100%	0%

Sumber : Aplikasi Janji Kinerja 2025

Tabel ini menunjukkan capaian kinerja antara Balmon Palembang dan Balmon Tangerang yang menunjukkan karakteristik yang sama. Benchmarking dilakukan dengan Balmon Tangerang mengingat Balmon Tangerang menjadi UPT yang berhasil menangani gangguan dalam jumlah terbanyak, yaitu sebanyak 17 gangguan spektrum frekuensi radio.

Capaian tersebut dapat diraih karena Balmon Tangerang menerapkan pengelolaan dan prosedur penanganan gangguan spektrum frekuensi radio yang efektif dan tepat. Penanganan gangguan dilakukan secara konsisten yang didukung dengan

10. Rekomendasi Tindak Lanjut Tahun 2026

Pencapaian kinerja penanganan gangguan spektrum frekuensi radio tahun 2025 telah melampaui target PK, namun masih tetap memerlukan penguatan strategi terkait penanganan gangguan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Salah satu rekomendasi tindak lanjut yang perlu ditingkatkan adalah mendeteksi sumber gangguan, khususnya terhadap sinyal yang bersifat intermitten, dan juga melakukan pemantauan yang lebih intensif dan berkelanjutan. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan peralatan monitoring dan sistem pelaporan perlu terus ditingkatkan agar proses penanganan berjalan semakin cepat dan gangguan dapat diatasi secara akurat, dan terintegrasi sejak tahap awal hingga pelaporan akhir. Selain aspek teknis, tindak lanjut perbaikan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 juga diarahkan pada penguatan tata kelola dan koordinasi antar instansi. Meskipun proses pelaporan dan penanganan gangguan pada tahun 2025 sudah bisa dilaksanakan secara cepat, efisien, dan menyeluruh, peningkatan kinerja dan perbaikan tetap diperlukan. Dengan memperkuat sinergi, meningkatkan kualitas pelaporan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, diharapkan pelayanan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio dapat dilakukan secara profesional, berkelanjutan, dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Evaluasi dari laporan kinerja sebelumnya perlu terus dijadikan referensi dalam menyusun kebijakan operasional, standar pelayanan, dan inovasi penanganan gangguan.

11. Benchmarking

Benchmarking dengan Balmon Tangerang, luas wilayah kerja 9.662,92 km2, Pengguna frekuensi 21.433.

ketelitian dan ketepatan dalam mengidentifikasi gangguan, koordinasi yang cepat, pemanfaatan sumber daya yang optimal, dan perencanaan yang matang. Personil yang ditugaskan juga memiliki komitmen yang tinggi sehingga seluruh laporan gangguan dapat terselesaikan dengan baik.

Indikator Kinerja 1-4

Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

1. Latar Belakang

Kegiatan monitoring dan penertiban standar teknis Alat dan/ atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menegaskan bahwa setiap perangkat telekomunikasi yang diproduksi, dirakit, diperdagangkan, diimpor, dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis dan memiliki sertifikat.

Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2024 mengatur kewajiban pemenuhan Standar Teknis bagi setiap alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemenuhan standar teknis dimaksud harus dibuktikan melalui Sertifikat Pemenuhan Standar Teknis yang diterbitkan berdasarkan

hasil pengujian. Selain itu, perangkat telekomunikasi dengan merek dan tipe yang sama namun berasal dari negara yang berbeda diwajibkan memiliki sertifikat tersendiri. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh perangkat telekomunikasi yang beredar dan digunakan telah memenuhi standar teknis yang ditetapkan serta tidak menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.

Penerima manfaat kegiatan monitoring dan penertiban alat/perangkat telekomunikasi adalah masyarakat umum khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Pengguna spektrum frekuensi dan alat perangkat telekomunikasi radio, penyelenggara telekomunikasi. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi yang tertib, legal, dan bebas dari gangguan, sehingga mendukung kualitas layanan telekomunikasi, kelancaran komunikasi publik, serta penegakan regulasi di bidang telekomunikasi.

2. Analisa Capaian Kinerja 2025

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75%	133.3%

Sumber: Aplikasi APSTARD (<https://apstard.postel.go.id/>) dan Aplikasi New Rol (<https://rol.postel.go.id/>)

Kegiatan monitoring dan penertiban standar teknis Alat dan/ atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital dilaksanakan terhadap berbagai jenis perangkat telekomunikasi dengan mengutamakan perangkat prioritas yang telah ditetapkan. Penetapan perangkat prioritas tersebut bertujuan untuk memastikan kegiatan monitoring dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pengawasan perangkat telekomunikasi. Target jenis perangkat prioritas.

Tabel 3.16
Target Jenis Perangkat Prioritas

1. HF All Band Transceiver	11. Handy Talkie (HT)
2. Mobile Transceiver/Radio Rig	12. Radio POC
3. Wireless Access Point (Wifi Extender, Wireless Repeater)	13. Set Top Box
4. Pemancar FM	14. Perangkat Low Power (Wireless Keyboard termasuk Keyboard Aksara Daerah, True Wireless Sound/TWS, Wireless Microphone, Bluetooth Speaker, Smart Watch)
5. Simbox/modempool	15. Optical Line Terminal (OLT) dan Optical Network Terminal (ONT)
6. Fake BTS/IMSI Catcher	16. APT Rakitan
7. Repeater/Penguat Signal Seluler	
8. Jammer	
9. GPS Tracker	
10. Microwave Link (IDU/ODU)	

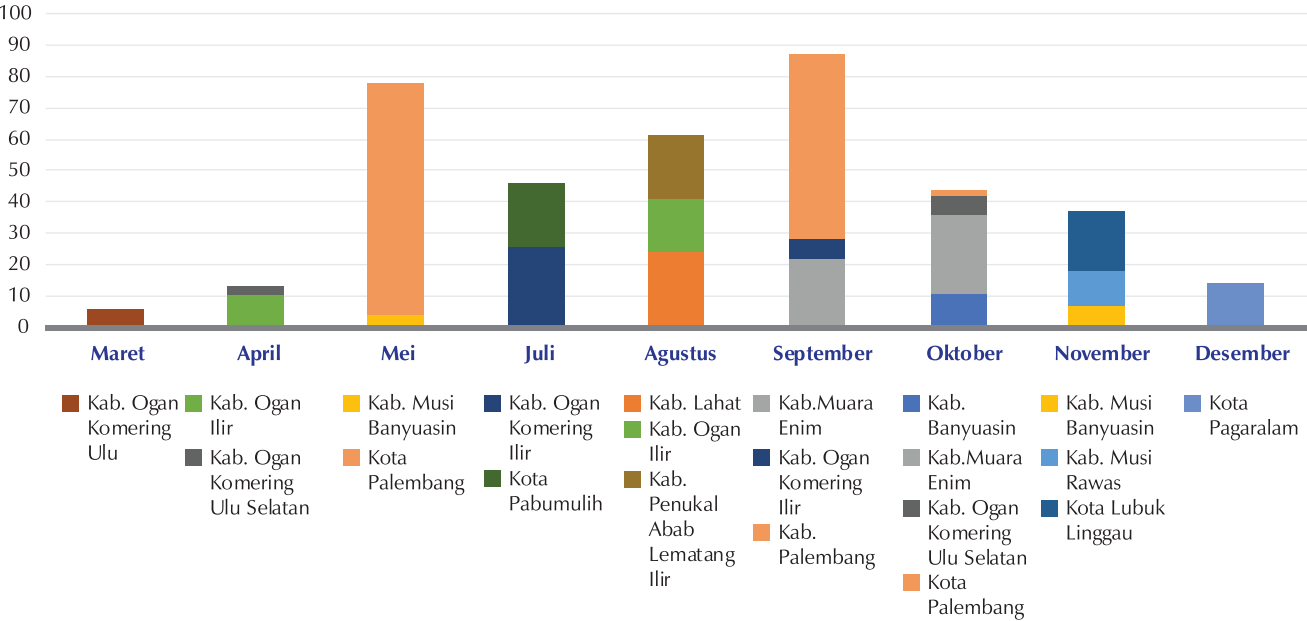
Secara nasional, pelaksanaan monitoring dan penertiban standar teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan merata. Berdasarkan data capaian UPT se-Indonesia, sebanyak 35 Unit Pelaksana Teknis (UPT) telah melaksanakan monitoring terhadap 14.125 perangkat, dengan 13.859 perangkat dinyatakan bersertifikat dan 266 perangkat tidak bersertifikat. Dari total temuan tersebut, sebanyak 264 pelanggaran telah ditindaklanjuti. Terdapat selisih kecil sebanyak 2 perangkat antara jumlah temuan dan tindak lanjut yang tercatat, yang disebabkan oleh proses penanganan yang masih berjalan pada saat penutupan periode pelaporan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan tidak hanya berhenti pada aspek pemantauan, tetapi juga diikuti dengan langkah penegakan kepatuhan standar teknis secara konsisten dan berkelanjutan.

Selain capaian dari sisi jumlah perangkat, kualitas dan pemerataan pelaksanaan pengawasan juga tercermin dari capaian cakupan wilayah. Seluruh UPT berhasil mencapai

100% target Kabupaten/Kota termonitor, bahkan sebagian besar UPT melampaui target minimal yang ditetapkan, dengan realisasi cakupan wilayah di atas 10 Kabupaten/Kota. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan monitoring dan penertiban standar teknis telah dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah kerja, tanpa adanya kesenjangan signifikan antar UPT, meskipun masing-masing UPT memiliki karakteristik wilayah dan beban pengawasan yang berbeda.

Sejalan dengan capaian nasional tersebut, pada Tahun 2025 target kegiatan monitoring dan penertiban standar teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital di UPT Palembang ditetapkan mencakup 10 Kabupaten/Kota yang termonitor dengan jumlah perangkat yang dimonitor sebanyak 300 perangkat. Berdasarkan data capaian, pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap dan progresif mulai bulan Maret hingga Desember. Cakupan wilayah monitoring dimulai pada 1 Kabupaten pada bulan Maret, meningkat menjadi 3 Kabupaten/Kota pada bulan April, 5 Kabupaten/Kota pada bulan Mei, 7 Kabupaten/Kota pada bulan Juli, dan mencapai 9 Kabupaten/Kota pada bulan Agustus. Pada bulan September, kegiatan monitoring telah menjangkau 10 Kabupaten/Kota, sehingga target cakupan wilayah dapat terpenuhi sesuai dengan perencanaan kinerja. Hingga akhir tahun, kegiatan monitoring telah menjangkau 14 Kabupaten/Kota dengan jumlah perangkat termonitor secara kumulatif mencapai 386 perangkat, melampaui target yang ditetapkan sebesar 300 perangkat. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan monitoring dan penertiban standar teknis di UPT Palembang telah berjalan efektif dan berkelanjutan serta mampu mempertahankan Tingkat Kepatuhan Standar Teknis sebesar 100%.

Grafik 3.12
Hasil Monitoring Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital



Sumber: Aplikasi SMART (<https://smart.postel.go.id/>)

Gambar 3.15
Kegiatan Monitoring Alat dan atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital di Kab. Musi Rawas



Berdasarkan grafik hasil Monitoring dan Penertiban standar teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital Tahun 2025, kegiatan dilaksanakan secara terencana, bertahap, dan berkelanjutan sepanjang periode Maret hingga Desember 2025. Kegiatan tersebut menjangkau berbagai Kabupaten/Kota di wilayah kerja, dengan sebaran pelaksanaan yang relatif merata serta peningkatan intensitas pada bulan-bulan tertentu sesuai dengan prioritas pengawasan.

Capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat positif, tercermin dari jumlah perangkat yang berhasil dimonitor sebanyak 386 perangkat, melampaui target tahunan sebesar 300 perangkat atau mencapai 128,67 persen. Tingginya realisasi tersebut didukung oleh optimalisasi pelaksanaan kegiatan lapangan, efektivitas perencanaan lokasi sasaran, serta sinergi yang baik khususnya pada wilayah dengan tingkat aktivitas perangkat yang tinggi seperti Kota Palembang. Pencapaian yang melampaui target ini menggambarkan komitmen dan kapasitas pelaksanaan kegiatan monitoring yang semakin baik, sekaligus menunjukkan bahwa pengawasan terhadap standar teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi telah berjalan secara optimal. Capaian tersebut turut memperkuat ketersediaan data monitoring yang akurat dan komprehensif sebagai dasar evaluasi kinerja serta perumusan kebijakan pengawasan di tahun berikutnya.

Tabel 3.17
Temuan Pelanggaran Penertiban Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

No	NAMA	KOTA	NAMA PERANGKAT	MERK	MODEL	JENIS PELANGGARAN
1	PT. Bangun Nusa Network	KOTA PALEMBANG	Server	DELL EMC	R250	1. Tidak Bersertifikat 2. Tidak Berlabel & QR Code
2	PT. Djaya Sampoerna Net	KOTA PALEMBANG	Router	MikroTik	CCR1009-8G-1S	1. Tidak Bersertifikat 2. Tidak Berlabel & QR Code
3	PT Tunas Artha Gardatama	KOTA PALEMBANG	POC Radio	SOG 600	S-R1309-G	1. Tidak Bersertifikat 2. Tidak Berlabel & QR Code

Sumber: Aplikasi SMART (<https://smart.postel.go.id/>)

Berdasarkan hasil kegiatan monitoring dan penertiban alat dan perangkat telekomunikasi melalui Sistem Aplikasi SMART, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang menemukan beberapa pelanggaran di wilayah Kota Palembang. Pelanggaran tersebut meliputi penggunaan perangkat server, router, dan POC radio oleh sejumlah penyelenggara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sertifikasi serta tidak dilengkapi label dan QR Code sebagaimana dipersyaratkan.

Atas temuan tersebut, Balmon Palembang melakukan langkah penertiban dan pembinaan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta mewujudkan tertib penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi di wilayah Sumatera Selatan.

Gambar 3.16
Kegiatan Monitoring dan Penertiban standar teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital di Kota Palembang



Gambar 3.17
Kegiatan Monitoring dan Penertiban standar teknis Alat dan/ atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital di Kota Palembang



Tabel 3.18
Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Penertiban standar teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

No	Tanggal	Lokasi
1	11 s.d 14 Maret 2025	Kabupaten Ogan Komering Ulu
2	15 s.d 18 April 2025	Kabupaten Ogan Ilir
3	15 s.d 18 April 2025	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
4	05 s.d 09 Mei 2025	Kota Palembang
5	05 s.d 09 Mei 2025	Kabupaten Musi Banyuasin
6	15 s.d 19 Juli 2025	Kota Pabumulih
7	22 s.d 25 Juli 2025	Kabupaten Ogan Komering Ilir
8	12 s.d 15 Agustus 2025	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
9	19 s.d 22 Agustus 2025	Kabupaten Ogan Ilir
10	19 s.d 22 Agustus 2025	Kabupaten Lahat
11	02 s.d 05 September 2025	Kabupaten Muara Enim
12	09 s.d 12 September 2025	Kabupaten Ogan Komering Ilir
13	09 s.d 12 September 2025	Kota Palembang
14	15 s.d 19 September 2025	Kota Palembang
15	22 s.d 25 Oktober 2025	Kabupaten Banyuasin
16	22 s.d 25 Oktober 2025	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
17	27 s.d 30 Oktober 2025	Kota Palembang
18	28 s.d 31 Oktober 2025	Kabupaten Muara Enim
19	11 s.d 14 November 2025	Kabupaten Musi Rawas
20	11 s.d 14 November 2025	Kota Lubuk Linggau
21	18 s.d 22 November 2025	Kabupaten Musi Banyuasin
22	09 s.d 13 Desember 2025	Kota Pagaralam

3. Target dan Realisasi Jangka Menengah (2021-2025)

2021			2022			2023			2024			2025		
T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	%
70	92	131.43	90	99	110	93	100	107.53	93	107.53	107.53	75	100	133.33

Keterangan :

T = Target
C = Capaian
% = Persentase Capaian

4. Kendala dan Solusi

Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan penertiban standar teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital, ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu dari aspek teknis, beragamnya jenis, merek, dan tipe perangkat telekomunikasi yang beredar di lapangan menuntut ketelitian tinggi dalam proses verifikasi dan pencocokan status sertifikasi, selain itu keterbatasan kualitas jaringan internet di lokasi monitoring mempengaruhi kelancaran pengecekan dan input data secara daring. Dari aspek sumber daya, keterbatasan alokasi anggaran menjadi tantangan utama karena kegiatan monitoring perangkat yang menargetkan cakupan 10 kabupaten/kota belum didukung anggaran khusus, sehingga pelaksanaannya harus diintegrasikan dengan kegiatan lain yang telah memiliki dukungan anggaran. Di samping itu, keterbatasan jumlah petugas monitoring dan PPNS yang melakukan penindakan mengharuskan penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan ketersediaan personel.

Adapun Solusi yang dapat diterapkan untuk kegiatan monitoring dan penertiban standar teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital antara lain:

- Mengintegrasikan kegiatan Monitoring Alat/Perangkat Telekomunikasi dengan kegiatan lain yang relevan dan telah memiliki perencanaan serta dukungan anggaran, sehingga pelaksanaan monitoring tetap dapat dilaksanakan secara efektif tanpa memerlukan alokasi anggaran khusus.

Gambar 3.18
Kegitan Monitoring Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital di Kabupaten Ogan Ilir



- Meningkatkan pemahaman dan konsistensi petugas melalui pembekalan teknis terkait prosedur monitoring dan verifikasi sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- Peningkatan kegiatan sosialisasi kepada para pelaku usaha perdagangan atau penyelenggara alat perangkat telekomunikasi tentang pentingnya memperdagangkan atau menggunakan alat perangkat telekomunikasi yang sudah bersertifikat.
- Dalam rangka peningkatan efektifitas pengawasan dan penegakan hukum perlu penambahan personel PPNS, saat ini jumlah PPNS yang tersedia masih terbatas belum sebanding dengan beban tugas serta cakupan wilayah pengawasan yang luas.

5. Strategi Keberhasilan/Inovasi

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan monitoring dan penertiban alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

- Ketersediaan Data dan Informasi Pendukung
Ketersediaan data dan informasi pendukung yang lengkap, akurat, dan terintegrasi menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan monitoring dan penertiban Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi. Data tersebut meliputi database perangkat telekomunikasi, serta data sertifikasi perangkat yang dimonitor, yang diperoleh dan diverifikasi melalui sistem informasi sertifikasi perangkat telekomunikasi pada website <https://sertifikasi.postel.go.id/> serta aplikasi mobile SIRANI.
- Koordinasi dan Kolaborasi dengan Pihak Terkait
Pelaksanaan kegiatan monitoring dan penertiban melibatkan koordinasi dengan pemilik perangkat, penyelenggara telekomunikasi, distributor, serta instansi

Gambar 3.19
Kegitan Monitoring Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital di Kota Palembang



- terkait lainnya. Kolaborasi yang baik mempermudah proses pemeriksaan dan klarifikasi terhadap perangkat yang dimonitor.
- Strategi dan Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan
Strategi pelaksanaan kegiatan monitoring dan penertiban disusun secara terencana, meliputi penentuan lokasi monitoring, jenis perangkat prioritas, pembagian tugas personel, kesiapan peralatan pendukung, serta evaluasi hasil kegiatan guna mengidentifikasi kendala dan capaian yang telah diperoleh.

6. Dampak

Capaian indikator kinerja kegiatan monitoring dan penertiban alat/perangkat telekomunikasi melampaui target yang ditetapkan. Dari target sebesar 75%, realisasi capaian mencapai 133,3%. Capaian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan teknis dan sertifikasi perangkat telekomunikasi.

Dampak langsung dari capaian tersebut dirasakan oleh masyarakat melalui meningkatnya kualitas dan keandalan perangkat telekomunikasi yang digunakan. Berkurangnya peredaran perangkat tidak bersertifikat turut menekan potensi gangguan jaringan serta memberikan perlindungan kepada konsumen, sehingga mendukung terselenggaranya layanan telekomunikasi yang aman, tertib, dan berkualitas.

7. Implementasi BerAKHLAK

Implementasi nilai-nilai BerAKHLAK dalam kegiatan monitoring dan penertiban alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi Tahun 2025 diwujudkan melalui:

- Berorientasi Pelayanan, Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pemilik perangkat melalui pelaksanaan monitoring dan penertiban yang informatif, edukatif, serta disertai sosialisasi mengenai ketentuan perizinan

dan sanksi adiministratif terhadap pelanggaran standar perangkat telekomunikasi.

- b. Akuntabel, Melaksanakan kegiatan monitoring dan penertiban alat perangkat secara transparan, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Kompeten, Personel memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis yang memadai dalam melakukan monitoring dan penertiban alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi serta terus meningkatkan kompetensi seiring perkembangan teknologi.
- d. Harmonis, Menjalin hubungan kerja yang baik dengan masyarakat, pemilik perangkat, serta sesama personel guna menciptakan suasana kerja yang kondusif.
- e. Loyal, Menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan, menjaga integritas, serta menjunjung tinggi etika dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan penertiban alat perangkat telekomunikasi.
- f. Adaptif, Mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lapangan, perubahan teknologi, serta kondisi lingkungan kerja yang beragam.
- g. Kolaboratif, Membangun kerja sama yang efektif dengan tim internal maupun pihak eksternal terkait guna mendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan monitoring dan penertiban alat perangkat telekomunikasi

8. Efisiensi

Balai Monitor Kelas I Palembang telah berhasil dalam pencapaian indikator Kinerja utama dari Kegiatan monitoring dan penertiban alat perangkat telekomunikasi yang targetnya di 75% capaian kinerjanya di 133,3% dengan target 10 Kabupaten termonitor secara pencapaian 14 kabupaten Kota Termonitor. Capaian ini menunjukkan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian penggunaan alat perangkat telekomunikasi berjalan secara optimal dan menyeluruh. Ditengah kebijakan efesiensi anggaran tahun 2025, Balmon Palembang tetap mampu mempertahankan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Efesiensi anggaran mendorong optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia,pemanfaatan teknologi pendukung, maupun pengelolaan waktu pelaksanaan kegiatan dengan pendekatan tersebut kegiatan monitoring dan penertiban alat perangkat telekomunikasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien tanpa mengurangi kualitas dan hasil.

9. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Tindak lanjut pemanfaatan Laporan Kinerja pada kegiatan monitoring dan penertiban Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Tahun 2025 dilakukan melalui evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tahun sebelumnya guna menilai efektivitas metode, prosedur, dan proses kegiatan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Selain itu, dilakukan identifikasi terhadap berbagai permasalahan yang muncul selama kegiatan monitoring dan penertiban, baik yang berkaitan dengan aspek teknis perangkat, perizinan, maupun tingkat kepatuhan terhadap standar teknis dan

ketentuan sertifikasi yang berlaku, berdasarkan hasil laporan monitoring dan penertiban tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi tersebut, dilaksanakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan melalui penyesuaian proses pelaksanaan kegiatan, peningkatan koordinasi dengan pihak terkait, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia dan peralatan pendukung. Di samping itu, dilakukan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Digital melalui kegiatan sosialisasi kepada pengguna frekuensi sebelum pelaksanaan tindakan penertiban.

10. Rekomendasi Tindak Lanjut Tahun 2026

Rekomendasi tindak lanjut kegiatan monitoring dan penertiban Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Tahun 2026 diarahkan pada penguatan sistem pengawasan berbasis evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Kegiatan monitoring perlu dilaksanakan secara lebih terstruktur dan berbasis risiko (risk-based monitoring) dengan memprioritaskan wilayah dan pengguna perangkat yang memiliki tingkat potensi pelanggaran lebih tinggi. Selain itu, diperlukan penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP), penguatan sistem pelaporan berbasis digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan regulasi guna memastikan keseragaman pemahaman terhadap standar teknis dan ketentuan sertifikasi yang berlaku.

Di samping itu, pada Tahun 2026 perlu ditingkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait, termasuk aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya, guna memperkuat efektivitas penertiban serta meningkatkan tingkat kepatuhan pengguna perangkat telekomunikasi. Sosialisasi regulasi perlu dilakukan secara lebih masif dan berkelanjutan melalui berbagai media komunikasi agar pengguna frekuensi dan perangkat telekomunikasi memahami kewajiban serta konsekuensi hukum yang berlaku. Dengan langkah tersebut, diharapkan kegiatan monitoring dan penertiban pada Tahun 2026 dapat berjalan lebih optimal, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kepatuhan penggunaan spektrum frekuensi radio.

11. Benchmarking

Benchmarking Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja UPT Palembang dengan UPT Jambi sebagai UPT terdekat secara geografis yang memiliki pengguna frekuensi sebanyak 10.092 pengguna. Benchmarking ini bertujuan untuk memperoleh gambaran komparatif atas pelaksanaan pengawasan standar teknis pada wilayah yang memiliki karakteristik relatif berdekatan, khususnya dalam aspek cakupan wilayah kerja dan intensitas pelaksanaan monitoring.

UPT Palembang memiliki cakupan wilayah kerja seluas 91.592,43 km², sedangkan UPT Jambi memiliki cakupan wilayah kerja seluas 49.027 km². Perbandingan ini menjadi dasar analisis untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan monitoring dan penertiban standar teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan digital.

Tabel 3.19 Benchmarking Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

Indikator Kinerja	Balmon Jambi		Balmon Palembang		Perbandingan Capaian
	Target	Capaian	Target	Capaian	
Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75%	100%	75%	100%	0%

Sumber : Aplikasi Janji Kinerja 2025

Berdasarkan hasil benchmarking sebagaimana disajikan dalam tabel di atas, UPT Palembang dan UPT Jambi sama-sama berhasil mencapai Tingkat Kepatuhan Standar Teknis sebesar 100%, melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar 75%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan standar teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan digital pada kedua UPT telah berjalan secara optimal.

Dari sisi pelaksanaan kegiatan, UPT Palembang telah mengidentifikasi terhadap 386 perangkat hasil kegiatan monitoring perangkat, dengan 3 perangkat yang tidak bersertifikasi dilakukan penertiban sebagai tindak lanjut pengawasan. Sementara itu, UPT Jambi mengidentifikasi terhadap 450 perangkat hasil kegiatan monitoring perangkat, dengan 2 perangkat tidak bersertifikasi dilakukan penertiban. Perbedaan jumlah perangkat hasil kegiatan monitoring perangkat tersebut dipengaruhi oleh karakteristik benchmarpengguna di wilayah kerja dan dinamika objek pengawasan pada masing-masing UPT.

Meskipun jumlah perangkat yang dimonitor berbeda dan beragam, kedua UPT tetap mampu mencapai tingkat kepatuhan standar teknis secara penuh. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan monitoring dan penertiban tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga pada efektivitas pengawasan dan kepatuhan terhadap standar teknis yang ditetapkan.

Hasil benchmarking ini menjadi dasar evaluasi untuk mempertahankan capaian kinerja yang telah dicapai serta sebagai bahan perumusan strategi peningkatan kualitas pengawasan standar teknis pada periode berikutnya.

Indikator Kinerja 1-5

Terjaganya Opsional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi di UPT

1. Latar Belakang

Indikator capaian kinerja Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi di UPT ditetapkan untuk menjaga perangkat dalam kondisi baik dan siap digunakan, sehingga stasiun monitor frekuensi radio dapat dioperasikan untuk melakukan kegiatan monitoring. Melalui indikator ini, pemerintah dapat memastikan bahwa penggunaan frekuensi radio berjalan tertib, legal, dan bebas gangguan sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna layanan spektrum frekuensi radio.

Penerima manfaat utama dari terjaganya operasional dan pemanfaatan perangkat SMFR ini adalah pengguna spektrum frekuensi radio, sektor keselamatan penerbangan dan maritim serta masyarakat umum yang menikmati layanan komunikasi tanpa gangguan dimana hal ini dapat memastikan keandalan pemantauan dan penertiban penggunaan frekuensi.

2. Analisa Capaian Kinerja 2025

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi di UPT	85%	100%

Sumber: Aplikasi APSTARD (<https://apstard.postel.go.id/>) dan Aplikasi New Rol (<https://rol.postel.go.id/>)

Pada tahun 2025, Capaian Indikator Kinerja Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi di Balmon Palembang sebesar 100%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 85%. Keberhasilan ini bukan sekadar pencapaian

angka, melainkan cerminan dari efektivitas manajemen pemeliharaan proaktif salah satunya pemeriksaan rutin perangkat monitoring, kunjungan rutin ke stasiun *slave* dan *transportable*. Jika dibandingkan dengan tantangan teknis di lapangan, keberhasilan mempertahankan *zero downtime* pada infrastruktur stasiun monitoring ini menempatkan Balmon Palembang sebagai unit yang responsif dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Sumatera Selatan.

Namun, di balik keberhasilan teknis tersebut, terdapat tantangan struktural yang perlu menjadi perhatian strategis. Mengingat sebagian besar stasiun monitoring yang dimiliki telah berusia lebih dari 10 tahun dengan beban operasional

nonstop, risiko degradasi komponen elektronika menjadi semakin nyata seiring habisnya masa aktif komponen tersebut. Oleh karena itu, capaian tinggi di tahun 2025 ini harus dipandang sebagai momentum transisi untuk melakukan peremajaan infrastruktur pada tahun mendatang. Langkah ini sangat krusial guna meningkatkan kesiapan stasiun monitoring dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Sumatera Selatan.

Adapun kegiatan untuk Menjaga Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi di UPT pada tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel Inspeksi/Kunjungan ke Stasiun Monitoring diatas

Tabel 3.20
Kegiatan Inspeksi/Kunjungan ke Stasiun Slave dan Stasiun Transportable

NO	NAMA STASIUN	KEGIATAN	HASIL	KETERANGAN
1	Stasiun Transportable Pagar Alam	Kegiatan berkala pengecekan, pemeliharaan ringan dan uji fungsi stasiun Transportable pada tanggal 19 -21 Maret 2025	Kondisi perangkat masih dapat melakukan kegiatan monitoring dengan baik, akan tetapi ada beberapa error pada saat melakukan BIST	Secara umum hasil verifikasi fungsi pada stasiun dapat berfungsi dengan baik, namun ditemukan alarm pada modul perangkat setiap stasiun monitor
2	Stasiun Tetap Gandus, Kenten Laut dan Rambutan	Kegiatan berkala pengecekan dan uji fungsi stasiun slave/ tetap pada tanggal 29 - 30 April 2025	Kondisi perangkat masih dapat melakukan kegiatan monitoring dan DF dengan baik, namun ditemukan alarm pada modul perangkat setiap stasiun monitor	Secara umum hasil verifikasi fungsi ketiga stasiun dapat berfungsi dengan baik, namun ditemukan alarm pada modul perangkat setiap stasiun monitor
3	Stasiun Transportable Pagar Alam	Kegiatan berkala Pengecekan dan uji fungsi stasiun Transportable pada tanggal 24-26 Juli 2025	Kondisi perangkat masih dapat melakukan kegiatan monitoring dengan baik, namun ditemukan alarm pada modul perangkat setiap stasiun monitor	Secara umum hasil verifikasi fungsi pada stasiun dapat berfungsi dengan baik, namun ditemukan alarm pada modul perangkat setiap stasiun monitor
4	Stasiun Tetap Gandus, Kenten Laut dan Rambutan	Kalibrasi perangkat bersama tim BBPPT pada tanggal 16-19 September 2025	Sertifikasi hasil kalibrasi pada stasiun monitoring sehingga dapat mengetahui akurasi dan ketelusuran sebagai alat ukur frekuensi radio	Secara umum dari hasil kalibrasi ketiga stasiun monitor maish dalam ambang batas toleransi pengukuran
5	Stasiun Tetap Gandus, Kenten Laut dan Rambutan	Kegiatan Pengecekan dan uji fungsi stasiun slave/ tetap pada 14 - 15 Oktober 2025	Kondisi perangkat masih dapat melakukan kegiatan monitoring dan DF dengan baik, namun ditemukan alarm pada modul perangkat setiap stasiun monitor	Secara umum hasil verifikasi fungsi ketiga stasiun dapat berfungsi dengan baik, namun ditemukan alarm pada modul perangkat setiap stasiun monitor
6	Stasiun Transportable Pagar Alam	Kegiatan berkala Pengecekan dan uji fungsi stasiun Transportable pada tanggal 16-18 Oktober 2025	Kondisi perangkat masih dapat melakukan kegiatan monitoring dengan baik, namun ditemukan alarm pada modul perangkat setiap stasiun monitor	Secara umum hasil verifikasi fungsi pada stasiun dapat berfungsi dengan baik, namun ditemukan alarm pada modul perangkat setiap stasiun monitor
7	Stasiun Tetap Gandus, Kenten Laut dan Rambutan	Kegiatan Pengecekan dan uji fungsi stasiun slave/ tetap pada 18 -20 Desember 2025	Kondisi perangkat masih dapat melakukan kegiatan monitoring dan DF dengan baik, namun ditemukan alarm pada modul perangkat setiap stasiun monitor	Secara umum hasil verifikasi fungsi ketiga stasiun dapat berfungsi dengan baik, namun ditemukan alarm pada modul perangkat setiap stasiun monitor
8	Stasiun Transportable Pagar Alam	Kegiatan berkala Pengecekan dan uji fungsi stasiun Transportable pada tanggal 15 Desember 2025	Kondisi perangkat masih dapat melakukan kegiatan monitoring dengan baik, akan tetapi ada beberapa error pada saat melakukan BIST	Secara umum hasil verifikasi fungsi pada stasiun dapat berfungsi dengan baik, namun ditemukan alarm pada modul perangkat setiap stasiun monitor

menggambarkan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana prasarana stasiun monitor pada Stasiun Tetap Gandus, Kenten Laut, dan Rambutan dan Stasiun Transportable Pagar Alam. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengecekan rutin, uji fungsi perangkat (BIST), serta kalibrasi bersama Balai Besar Pengujian Perangkat dan Telekomunikasi, dengan hasil secara umum menunjukkan bahwa seluruh stasiun monitoring berfungsi dengan baik dan mampu mendukung kegiatan monitoring. Meskipun demikian, hasil inspeksi juga mengidentifikasi adanya temuan teknis yang relatif beragam, yaitu indikasi alarm pada beberapa modul perangkat di masing-masing stasiun, yang menjadi dasar untuk tindak lanjut pemeliharaan dan perbaikan guna memastikan kondisi stasiun monitoring tetap terjaga secara optimal.

Gambar 3.20
Terjaganya Operasional dan Fungsi Stasiun Monitor Frekuensi Radio



Tabel 3.21
Kegiatan Pemeliharaan Perangkat Monitoring

NO	Nama Stasiun Monitor	Sarana Prasana	Kegiatan Yang Dilakukan
1	Slave Rambutan	Stabilizer	Pemeliharaan unit stabilizer tegangan
2	Slave Rambutan	Personal Computer	pengecekan dan perbaikan pada power supply unit komputer
3	Slave Rambutan	Genset	Sambaran petir mengakibatkan sistem kelitrisan stasiun monitor mengalami kerusakan pada Kwh meter, genset (baterai dan charger) dan panel listrik sehingga dilakukan pengecekan menyeluh selanjutnya dilakukan perbaikan
4	Slave Rambutan	Lampu Pagar dan Tower	pengantian lampu pagar yang rusak/mati dan lampu indikator ketinggian tower
5	Slave Rambutan	Tower	pemeliharaan dengan melakukan pengecatan pada tower dan melakukan pengecekan kondisi tower masih layak digunakan
6	Slave Gandus	Pendingin Ruangan/AC	Pemeliharaan/perbaikan pendingin ruangan
7	Slave Gandus	Genset	pemeliharaan rutin genset dengan penggantian oli, filter udara, pengecekan baterai dan lain -lain
8	Slave Gandus	Stabilizer	Pemeliharaan unit stabilizer tegangan
9	Slave Gandus	Lampu Pagar	pengantian lampu pagar yang rusak/mati dan lampu indikator ketinggian tower
10	Slave Gandus	Tower	pemeliharaan dengan melakukan pengecatan pada tower dan melakukan pengecekan kondisi tower masih layak digunakan
11	Slave Kenten Laut	Spectrum Processor	melakukan penggantian power supply unit hasil kolaborasi dengan Balmon Jakarta
12	Slave Kenten Laut	Genset	pemeliharaan rutin genset dengan penggantian oli, filter udara, pengecekan baterai dan lain -lain
13	Slave Kenten Laut	Lampu Pagar dan Tower	pengantian lampu pagar yang rusak/mati dan lampu indikator ketinggian tower
14	Slave Kenten Laut	Tower	pemeliharaan dengan melakukan pengecatan pada tower dan melakukan pengecekan kondisi tower masih layak digunakan
	Slave Kenten Laut	CCTV	Melakukan pengecekan, perbaikan dan setting ulang NVR dan kamera CCTV outdoor
15	Transportable Pagar Alam	CCTV	perbaikan dan pemasangan ulang dengan memastikan bahwa sambungan aman dari air dengan menambahkan pengamanan duradus dengan spesifikasi waterproof
16	SMFR Bergerak ESMD	Power Management Unit	Pengecekan baterai charger dan baterai unit untuk memastikan sistem kelistrikan berfungsi dengan baik dan melakukan pengecekan komponen overcharger
17	SMFR Bergerak DDF205	Baterai Perangkat	Penggantian baterai perangkat yang sudah soak
18	SMFR Bergerak DDF206	System Kelistrikan	penggantian overprotection termal DC yang tidak berfungsi
19	SMFR Bergerak DDF207	Jaringan LAN	Pengecekan dan pemeliharaan jaringan LAN perangkat ke laptop pengendali

NO	Nama Stasiun Monitor	Sarana Prasana	Kegiatan Yang Dilakukan
20	Handheld	Portable Mon DF - DDF007	perbaikan perangkat berupa penggantian casing, modul audio card dan kalibrasi pabrikan di vendor resmi
21	Handheld	Spektrum Analyzer N9340B	perbaikan part berupa penggantian layar dan casing perangkat
22	Handheld	Antenna AH System TV1	perbaikan elemant antenna AH System
23	Handheld	Spektrum Analyzer SAF	optimalisasi koneksi wifi antara perangkat dengan remote kendali
24	Handheld	Spektrum Analyzer MS2090A	penggantian baterai perangkat
25	Alat komunikasi lainnya	Icom IC9500	perbaikan layar dan setting perangkat icom IC9500
26	Alat komunikasi lainnya	HT Yaesu	perbaikan komponen HT

Tabel diatas menggambarkan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, perbaikan, dan optimalisasi sarana prasarana pendukung stasiun monitoring spektrum frekuensi radio pada berbagai stasiun monitor tetap/transportable, stasiun monitor bergerak, serta perangkat *handheld* sepanjang tahun 2025. Kegiatan mencakup pemeliharaan sistem kelistrikan dan pendukungnya (genset, stabilizer, baterai, power management), perbaikan perangkat monitoring kesisteman (spectrum processor, *spectrum analyzer*, antenna, dan jaringan LAN), serta perawatan infrastruktur pendukung seperti tower, lampu pagar, CCTV, dan pendingin ruangan. Seluruh kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan kondisi peralatan monitoring agar tetap berfungsi optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio.

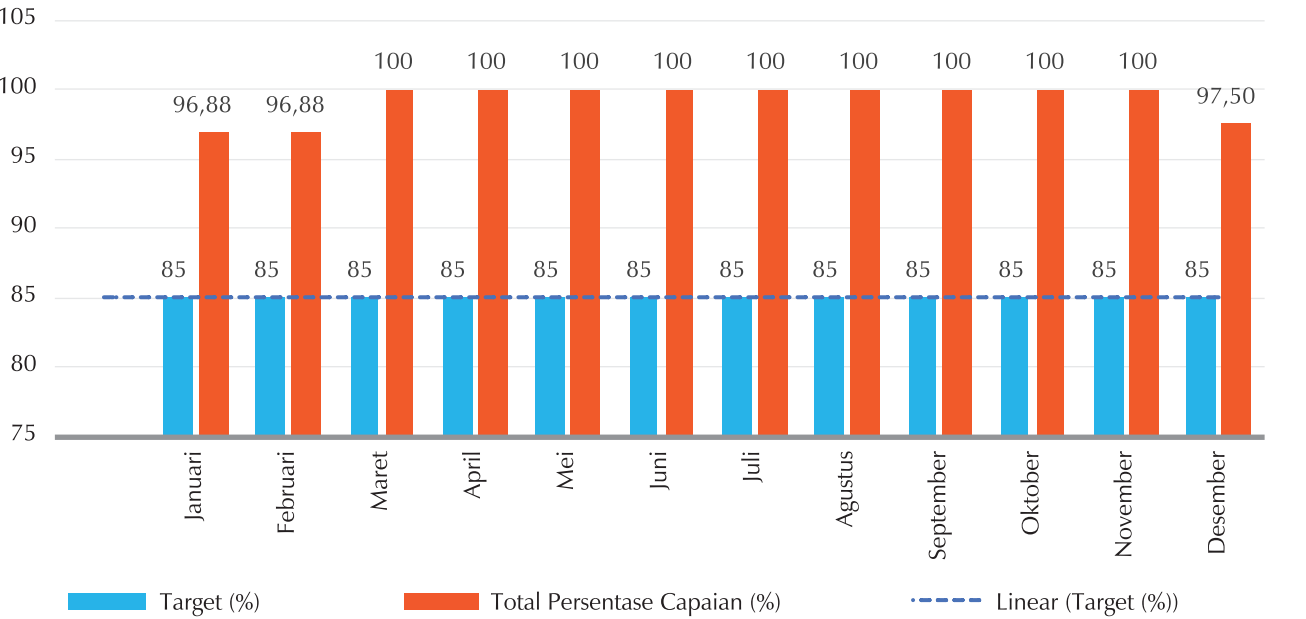
Tabel 3.22
Perangkat Utama dan Pendukung yang Masuk Perhitungan

No	Nama Stasiun	Jenis Stasiun	Nama Barang	Merk/Tipe	Jenis Perangkat	Kondisi	Tahun
1	Gandus	Tetap VUHF	All Band Receiver	TCI 737	Utama	Baik	2015
2	Gandus	Tetap VUHF	Antena	TCI 7031	Utama	Baik	2015
3	Gandus	Tetap VUHF	Antena	TCI 641	Utama	Baik	2015
4	Gandus	Tetap VUHF	Router	Mikrotik	Pendukung	Baik	2015
5	Gandus	Tetap VUHF	UPS	APC	Pendukung	Baik	2015
6	Kenten Laut	Tetap VUHF	All Band Receiver	TCI 737	Utama	Baik	2015
7	Kenten Laut	Tetap VUHF	Antena	TCI 7031	Utama	Baik	2015
8	Kenten Laut	Tetap VUHF	Antena	TCI 641	Utama	Baik	2015
9	Kenten Laut	Tetap VUHF	Router	Mikrotik	Pendukung	Baik	2015
10	Kenten Laut	Tetap VUHF	UPS	APC	Pendukung	Baik	2015
11	Mobil Mon DF1	Bergerak	Antena	HE010	Utama	Baik	2011
12	Mobil Mon DF1	Bergerak	Antena	HE500	Utama	Baik	2011
13	Mobil Mon DF1	Bergerak	Antena DF	ADD295	Utama	Baik	2011
14	Mobil Mon DF1	Bergerak	Laptop	Laptop	Pendukung	Baik	2011
15	Mobil Mon DF1	Bergerak	Mast Tower	Telescopic Mast	Pendukung	Baik	2011
16	Mobil Mon DF1	Bergerak	Mobil Monitoring Frekuensi	Toyota Hilux	Pendukung	Baik	2011
17	Mobil Mon DF1	Bergerak	Radio Direction Finder	DDF205	Utama	Baik	2011
18	Mobil Mon DF1	Bergerak	Software	Argus 5.4.2	Utama	Baik	2011
19	Mobil Mon DF2	Bergerak	Antena	HE010	Utama	Baik	2023
20	Mobil Mon DF2	Bergerak	Antena	HE600	Utama	Baik	2023
21	Mobil Mon DF2	Bergerak	Antena	HF907OM	Utama	Baik	2023
22	Mobil Mon DF2	Bergerak	Antena DF	ADD295	Utama	Baik	2023
23	Mobil Mon DF2	Bergerak	Laptop	Laptop	Pendukung	Baik	2023
24	Mobil Mon DF2	Bergerak	Mast Tower	Telescopic Mast	Pendukung	Baik	2023
25	Mobil Mon DF2	Bergerak	Mobil Monitoring Frekuensi	Toyota Hilux	Pendukung	Baik	2023
26	Mobil Mon DF2	Bergerak	Radio Direction Finder	ESMD with DF (Front Panel)	Utama	Baik	2023
27	Mobil Mon DF2	Bergerak	Software	Argus 6.1	Utama	Baik	2023
28	Pagar Alam	Transportable	All Band Receiver	TCI 707	Utama	Baik	2015
29	Pagar Alam	Transportable	Antena	TCI 7031	Utama	Baik	2015

No	Nama Stasiun	Jenis Stasiun	Nama Barang	Merk/Tipe	Jenis Perangkat	Kondisi	Tahun
30	Pagar Alam	Transportable	Antena	TCI 640	Utama	Baik	2015
31	Pagar Alam	Transportable	Router	Mikrotik	Pendukung	Baik	2015
32	Pagar Alam	Transportable	UPS	APC	Pendukung	Baik	2015
33	Rambutan	Tetap VUHF	All Band Receiver	TCI 737	Utama	Baik	2015
34	Rambutan	Tetap VUHF	Antena	TCI 7031	Utama	Baik	2015
35	Rambutan	Tetap VUHF	Antena	TCI 641	Utama	Baik	2015
36	Rambutan	Tetap VUHF	Router	Mikrotik	Pendukung	Baik	2015
37	Rambutan	Tetap VUHF	UPS	APC	Pendukung	Baik	2015

Tabel Perangkat Utama dan Pendukung Stasiun Monitor diatas merupakan perangkat yang menjadi lokus utama untuk mengukur capaian terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT Balmon Kelas I Palembang. Dari Tabel diatas di ketahui bahwa perangkat utama dan pendukung dalam kondisi baik sehingga opsional dan fungsi stasiun monitor berjalan dengan baik.

Grafik 3.13
Capaian Kinerja Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT Palembang



Grafik menunjukkan capaian terjaganya opsional dan fungsi monitoring stasiun monitor frekuensi radio UPT Palembang. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa capaian terjaganya operaasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio telah memenuhi target (85%) yang ditetapkan, dengan persentase capaian sebesar 117.65%.

Grafik diatas juga menunjukkan variasi persentase di setiap bulannya dengan capaian terendah sebesar 96,88% pada bulan Januari dan Februari dan capaian tertinggi mencapai 100% pada bulan Maret hingga November 2025. Sementara itu, pada bulan Desember 2025 capaian turun menjadi 97,5% karena terdapat perangkat yang mempengaruhi perhitungan namun tidak mempengaruhi operasional dan fungsi monitoring stasiun radio, sehingga capaian realisasi tetap berada di atas target minimal yang ditetapkan.



3. Target dan Realisasi Jangka Menengah (2021-2025)

2021			2022			2023			2024			2025		
T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	%
85	98	115.27	95	99	104.21	95	98	103.16	95	105	105.26	85	100	117.65

Keterangan :

T = Target
C = Capaian
% = Persentase Capaian

4. Kendala dan Solusi

Kendala dalam menjaga operasional dan fungsi stasiun monitor frekuensi radio di UPT diantaranya adalah usia perangkat yang sudah lebih 10 tahun sehingga sering muncul kerusakan ringan, tegangan listrik yang tidak stabil dan terbatasnya vendor yang mampu melakukan perbaikan perangkat serta faktor alam seperti sambaran petir. Sebagai langkah untuk mencegah/menurunkan resiko kerusakan pada perangkat monitoring yaitu dilakukan pemeliharaan secara rutin baik secara fisik maupun pengujian fungsi, dilakukan perbaikan jika terdapat perangkat/komponen yang rusak, serta optimalisasi penggunaan stabilizer tegangan dan sistem proteksi penangkal petir.

5. Strategi Keberhasilan/Inovasi

Dalam mencapai target yang telah ditetapkan salah satu upaya yang terus menerus dilakukan oleh Balmon Kelas I Palembang adalah dengan menjaga operasional stasiun monitoring maupun perangkat pendukung lainnya. Dengan cara melakukan pengecekan rutin, perbaikan skala prioritas, serta melakukan kalibrasi agar akurasi hasil monitoring dan pengukuran dalam batas toleransi.

6. Dampak

Dampak dari indikator terjaganya operasional dan fungsi stasiun monitor frekuensi radio bagi masyarakat secara umum adalah kepastian layanan telekomunikasi yang aman, stabil dan bebas dari gangguan. Dampak yang lebih utamanya meliputi komunikasi seluler, radio FM dan TV Siaran yang lancar serta jaminan perlindungan dari penggunaan frekuensi ilegal, sehingga terciptanya tertib penggunaan spektrum frekuensi radio, efektif dan efisien serta berkualitas bagi masyarakat.

7. Implementasi BerAKHLAK

Implementasi nilai budaya BerAKHLAK dalam kegiatan terjaganya operasional dan fungsi stasiun monitor frekuensi radio, Balai Monitor SFR Kelas I Palembang telah menerapkan budaya nilai berakhlak dalam kegiatannya yang meliputi :

- Berorientasi Pelayanan, bahwa dengan berfungsinya perangkat utama maupun perangkat pendukung, maka kegiatan yang akan dilakukan oleh Tim Monitoring

Gambar 3.21
Terjaganya Operasional dan Fungsi Stasiun
Monitoring Frekuensi Radio



- dan Penertiban dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga harapan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Balmon Kelas I Palembang dapat terwujud
- Akuntabel, bahwa petugas yang diberikan wewenang untuk melakukan pemeliharaan perangkat memiliki kemampuan dan tanggungjawab yang baik, sehingga target yang dicapai dapat terpenuhi.
- Kompeten, bahwa petugas yang diberikan wewenang untuk melakukan pemeliharaan perangkat senantiasa terus belajar untuk meningkatkan kemampuan dirinya dengan selalu melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan kapabilitasnya.

Gambar 3.22
Terjaganya Operasional dan Fungsi Stasiun
Monitoring Frekuensi Radio



- Harmoni, dapat bekerjasama dengan tim lain, sehingga setiap permasalahan yang terjadi dapat dicarikan solusinya agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
- Loyal, Selalu berusaha untuk mengerjakan tugasnya dengan baik meski harus bekerja diluar jam kerja yang telah ditentukan dikarenakan kerusakan perangkat harus segera dilakukan perbaikan agar tim *monev* dapat bekerja secara optimal dan target yang telah ditentukan dapat tercapai.
- Adaptif, Siap menerima masukan dari rekan kerja dan selalu mempunyai keinginan untuk mengembangkan kreatifitasnya.
- Kolaboratif, Mau menerima saran dari rekan kerja dan membagi ilmu tentang tatacara perbaikan perangkat kepada teman kerja.

8. Efisiensi

Efisiensi yang dilakukan terkait terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio adalah fokus pada peningkatan akurasi, kecepatan deteksi gangguan dan optimalisasi aset operasional. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan kalibrasi rutin alat ukur, otomasi pemantauan berbasis AI/Software, dan pemeliharaan preventif perangkat *fixed/mobile station*.

9. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Tindak lanjut dari pemanfaatan laporan kinerja yang dilakukan agar target yang diinginkan dapat tercapai adalah melakukan pemeliharaan preventif, perbaikan segera (korektif), melakukan kalibrasi berkala dan peningkatan kualitas perangkat untuk mencapai SLA 100% guna memastikan monitoring dan pengawasan frekuensi berjalan secara optimal.

Untuk mencapai target ditahun berikutnya agar dapat tercapai seperti tahun-tahun sebelumnya, maka dilakukan inventaris kembali terhadap perangkat monitoring yang usianya sudah melebihi umur 10 tahun, mengusulkan pengadaan perangkat baru/regenerasi perangkat lama.

10. Rekomendasi Tindak Lanjut Tahun 2026

Sebagai tindak lanjut tahun 2026, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang perlu melakukan inventarisasi dan pemetaan prioritas peremajaan perangkat monitoring yang telah berusia di atas 10 tahun, disertai pengusulan peremajaan/regenerasi perangkat utama dan pendukung secara bertahap guna meminimalkan risiko degradasi fungsi. Selain itu, penguatan skema pemeliharaan preventif berbasis risiko, peningkatan sistem proteksi kelistrikan dan penangkal petir, serta optimalisasi kalibrasi berkala untuk menjaga akurasi alat ukur.



11. Benchmarking

Tabel 3.23
Benchmarking Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi di UPT

Indikator Kinerja	Balmon Tangerang		Balmon Palembang		Perbandingan Capaian
	Target	Capaian	Target	Capaian	
Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi di UPT	85%	92.86%	85%	100%	7.14%

Sumber : Aplikasi Janji Kinerja 2025

Berdasarkan hasil analisis *benchmarking* terhadap kinerja pengelolaan perangkat, Dalam mengukur efektivitas pengelolaan infrastruktur monitoring frekuensi radio, Balmon Kelas I Palembang menunjukkan performa yang baik jika disandingkan dengan unit pelaksana teknis lainnya (Balmon Tangerang). Berdasarkan indikator kinerja terjaganya operasional dan fungsi stasiun monitoring frekuensi radio dengan target sebesar 85%, Balmon Palembang berhasil mencatatkan realisasi sebesar 100%. Capaian ini tidak hanya melampaui target minimum secara signifikan, tetapi juga mencerminkan tingkat ketersediaan layanan (*service availability*) yang cukup optimal.

Sebagai perbandingan antar-UPT, Balmon Tangerang yang juga mengelola wilayah dengan kompleksitas spektrum yang tinggi, mencatatkan capaian sebesar 92,86%. Meskipun kedua UPT ini sama-sama berhasil melampaui target 85%, selisih sebesar 7,14% yang lebih tinggi pada Balmon Palembang menunjukkan adanya konsistensi dalam pemeliharaan preventif dan kecepatan respons perbaikan (*mean time to recovery*). Keberhasilan ini membuktikan bahwa sistem pemeliharaan rutin di Balmon Palembang telah berjalan optimal.

Indikator Kinerja 1-6

Persentase Penanganan Sanksi Denda Administratif

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, maka dalam pelaksanaan tugas pengawasan di bidang Spektrum Frekuensi Radio serta Alat dan Perangkat Telekomunikasi harus menerapkan penanganan denda administratif. Dalam konteks ini, Ditjen Infrastruktur Digital melalui unit pelaksana teknis (UPT) yaitu Balmon Palembang perlu memastikan seluruh kegiatan pengawasan, penegakan kepatuhan, serta pengelolaan sanksi administrasi berjalan selaras dengan ketentuan peraturan terbaru.

Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan penanganan sanksi denda administratif adalah penenaan sanksi denda administratif terhadap pelanggaran penggunaan frekuensi radio dan/atau alat perangkat telekomunikasi serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam rangka terciptanya tertib penggunaan spektrum frekuensi radio.

Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk memberi efek jera terhadap pengguna frekuensi ilegal dan pelaku pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau alat perangkat telekomunikasi dan memberikan perlindungan terhadap pengguna frekuensi yang berizin.

Dengan penegakan hukum berupa sanksi administratif ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum yang merupakan pengguna akhir layanan spektrum frekuensi radio, khususnya yang bergantung pada layanan siaran, komunikasi bergerak darat, serta layanan radio yang bersifat kritikal seperti dinas maritim dan penerbangan. Melalui kegiatan penanganan sanksi denda administratif ini diharapkan tercipta penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib, aman, dan sesuai perizinan yang berlaku.

Penerima manfaat lainnya yaitu instansi pemerintah, penyelenggara layanan publik, dan pelaku usaha yang memanfaatkan spektrum frekuensi radio memperoleh kepastian hukum dan kualitas layanan yang lebih baik. sehingga mendukung keberlanjutan pengelolaan spektrum frekuensi radio yang efisien, optimal, dan berkeadilan bagi seluruh pemangku kepentingan.

2. Analisa Capaian Kinerja 2025

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%	125%

Sumber: Aplikasi APSTARD (<https://apstard.postel.go.id/>) dan Aplikasi New Rol (<https://rol.postel.go.id/>)

Selama tahun 2025 Balmon Palembang telah melaksanakan penanganan sanksi denda administratif, kinerja penegakan kepatuhan menunjukkan capaian yang signifikan dan konsisten. dari target 80% yang ditetapkan capaian tahun ini adalah 125%. Berdasarkan rekapitulasi data, total denda administratif yang berhasil dikenakan dan ditagihkan sepanjang tahun 2025 adalah 44 Invoice dengan nominal mencapai Rp. 561.145.200, yang berasal dari berbagai kegiatan pengawasan dan penertiban di sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Persentase Penenaan Sanksi Denda Administratif :

$$= \frac{\Sigma \text{ Inv. Denda yang Terbayar} + (\text{Bobot} \times \text{Tindak Lanjut Inv. Dendan Belum Terbayar}) + \text{Inv. Baru Belum Jatuh Tempo}}{\Sigma \text{ Inv. Denda Administratif}} \times 100\%$$

Keterangan :

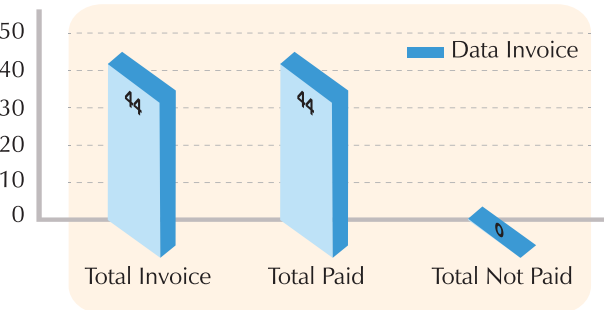
Total Invoice Denda Administratif :

- » Invoice Aktif
- » Exclude Invoice Expired dan Canceled

Tindak Lanjut Invoice Denda Belum Terbayar berupa :

- » Penyampaian Surat Reminder
- » Hasil Klarifikasi dengan UPT untuk Denda Belum Terbayar
- » Bobot Tindak Lanjut Invoice Berdasarkan Surat Reminder
 - 1) Reminder 1 : 0,9
 - 2) Reminder 2 : 0,8
 - 3) Reminder 3 : 0,7
 - 4) Pelimpahan KPKNL : 0,6

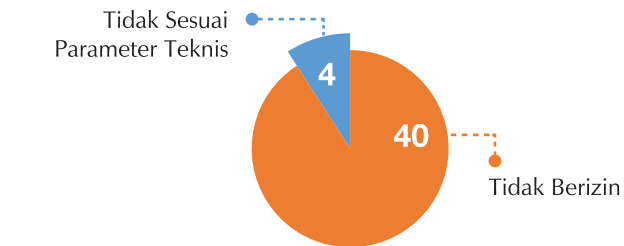
Grafik 3.14
Data Invoice Penenaan Sanksi Denda Administratif



Sumber: Aplikasi Denda Administratif (<https://dendaadministratif.postel.go.id>)

Penenaan denda dilakukan terhadap berbagai bentuk pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan penanganan gangguan, penertiban, inspeksi dan pengukuran serta kegiatan bimbingan teknis. Hal ini mencerminkan meningkatnya efektivitas pengawasan serta komitmen satuan kerja dalam menegakkan regulasi secara adil dan terukur.

Grafik 3.15
Jenis Pelanggaran



Sumber: Aplikasi Denda Administratif (<https://dendaadministratif.postel.go.id>)

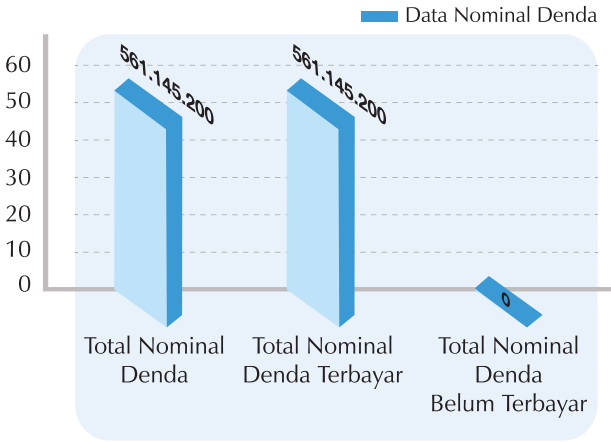
Ditinjau dari sebaran waktu, capaian denda menunjukkan tren peningkatan pada pertengahan hingga akhir tahun 2025. Pada periode April–Juni, denda yang dikenakan masih relatif terbatas. Namun, pada periode Juli–September, terjadi lonjakan yang sangat signifikan dengan total denda mencapai Rp. 253.799.700, yang menjadi kontribusi terbesar dalam satu tahun berjalan.

Selanjutnya, pada periode Oktober–November dan Desember, capaian tetap terjaga dengan nilai masing-masing Rp. 133.887.600 dan Rp. 168.606.900, menunjukkan keberlanjutan penanganan sanksi denda administratif hingga akhir tahun.

Tabel 3.24
Rekapitulasi Penenaan Sanksi Denda Administratif

No	Periode	Jumlah Denda Administratif
1	Januari - Maret	Rp. 0
2	April - Juni	Rp. 4,851,000
3	Juli - September	Rp. 253,799,700
4	Oktober - November	Rp. 133,887,600
5	Desember	Rp. 168,606,900
Total		Rp. 561,145,200

Grafik 3.16
Data Nominal Denda Pengenaan Sanksi Denda Administratif



Sumber: Aplikasi Denda Administratif
(<https://dendaadministratif.postel.go.id>)

Secara keseluruhan, capaian ini tidak hanya mencerminkan optimalisasi fungsi pengawasan dan penindakan, tetapi juga menunjukkan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan para pengguna frekuensi terhadap ketentuan yang berlaku. Pengenaan sanksi denda administratif sepanjang tahun 2025 menjadi instrumen strategis dalam mendorong tertib regulasi, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balmon Kelas I Palembang.

Berdasarkan laporan nasional penanganan sanksi denda administrasi pelanggaran Spektrum Frekuensi Radio (SFR) dan Alat dan Perangkat Telekomunikasi (APT) Tahun 2025, capaian penerimaan denda administrasi secara nasional mencapai Rp. 23.202.232.930 yang berasal dari 846 surat tagihan yang berhasil ditagihkan dan dibayarkan sepanjang periode 1 Januari hingga 31 Desember 2025.

Angka ini mencerminkan skala penanganan pelanggaran yang luas secara nasional, mencakup akumulasi pelanggaran lintas wilayah, penyelesaian tunggakan tahun sebelumnya, serta efektivitas koordinasi antarunit dalam proses penagihan. Di sisi lain, capaian denda administrasi di Balmon Palembang selama Tahun 2025 tercatat sebesar Rp. 561.145.200. Secara proporsional, capaian ini memberikan kontribusi sekitar 2,42% terhadap total penerimaan nasional. Meskipun secara nominal terlihat lebih kecil dibandingkan capaian nasional, capaian daerah tersebut harus dipahami dalam konteks ruang lingkup kewenangan, karakteristik wilayah kerja, serta jumlah dan kompleksitas kasus pelanggaran yang ditangani di daerah.

Sebaliknya, capaian di tingkat daerah lebih mencerminkan efektivitas pengawasan langsung di lapangan, kecepatan respons terhadap pelanggaran yang bersifat operasional,

serta optimalisasi penindakan administratif pada kasus-kasus aktual di wilayah kerja. Peningkatan signifikan capaian daerah pada periode semester II Tahun 2025 menunjukkan bahwa intensifikasi pengawasan dan penegakan aturan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan penerimaan denda administrasi sekaligus mendorong kepatuhan pengguna.

Secara holistik, hubungan antara capaian nasional dan capaian daerah bersifat komplementer dan saling menguatkan. Capaian nasional menggambarkan kekuatan sistem, kebijakan, dan tata kelola penagihan secara makro, sementara capaian daerah berperan sebagai ujung tombak implementasi kebijakan, yang secara langsung bersentuhan dengan pelanggaran di lapangan. Tanpa kinerja daerah yang konsisten, capaian nasional tidak akan terbangun secara berkelanjutan.

Dengan demikian, capaian denda administrasi Tahun 2025 di tingkat daerah dapat dinilai selaras dengan arah kebijakan nasional, berkontribusi nyata terhadap penerimaan negara, serta menjadi indikator meningkatnya efektivitas pengawasan dan penegakan regulasi di wilayah. Ke depan, penguatan sinergi pusat dan daerah, percepatan penyelesaian piutang, serta peningkatan kualitas pengawasan berbasis risiko diharapkan dapat semakin meningkatkan kontribusi daerah terhadap capaian nasional secara berkelanjutan.

Gambar 3.23
Kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif Kab. Musi Banyuasin (Sungai Ilin)



Tabel 3.25
Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Sanksi Denda Administratif

No	Tanggal	Lokasi
1	5-9 Mei 2025	Kota Palembang dan Kabupaten Musi Banyuasin
2	5-8 Agustus 2025	Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan ilir dan Banyuasin
3	16-19 September 2025	Kabupaten Ogan Komering Ilir (Wilayah Perairan)
4	27-30 Oktober 2025	Kota Palembang, Kabupaten Muara Enim dan Lahat
5	18-22 Nopember 2025	Kabupaten Musi Banyuasin
6	2-5 Desember 2025	Kota Prabumulih dan Kabupaten Ogan Komering Ulu

3. Target dan Realisasi Jangka Menengah (2021-2025)

2021			2022			2023			2024			2025		
T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	100	125

Keterangan :
T = Target
C = Capaian
% = Persentase Capaian

4. Kendala dan Solusi

Pelaksanaan indikator pengenaan sanksi denda administratif tahun 2025 belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya kepatuhan sebagian pengguna frekuensi radio, keterbatasan sumber daya pengawasan dibandingkan luas dan kompleksitas wilayah kerja, serta kendala teknis dan administratif dalam proses penindakan dan tindak lanjut. Selain itu, tidak semua potensi pelanggaran dapat ditangani secara optimal karena adanya prioritas kasus tertentu, keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, serta kebutuhan koordinasi lintas unit dan pemangku kepentingan yang pada beberapa kasus memerlukan waktu lebih panjang.

Meskipun demikian, berbagai upaya perbaikan terus dilakukan melalui penguatan pendekatan preventif berupa peningkatan sosialisasi dan pembinaan kepada pengguna frekuensi, optimalisasi penertiban mandiri, serta peningkatan efektivitas pengawasan berbasis pemetaan wilayah dan kepadatan pengguna. Penguatan koordinasi internal dan pemanfaatan teknologi dalam pengawasan, pemantauan, dan pelaporan juga dilakukan untuk mempercepat tindak lanjut dan meningkatkan akurasi data. Secara umum, pelaksanaan sanksi administratif tetap berdampak positif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan regulasi, menciptakan tertib administrasi, serta mendukung lingkungan layanan publik yang lebih tertib dan berkelanjutan.

5. Strategi Keberhasilan/Inovasi

Capaian kinerja Penanganan Sanksi Denda Administratif yang melampaui target menunjukkan bahwa strategi penguatan pengawasan dan penegakan kepatuhan penggunaan

Gambar 3.24
Kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif Kab. Lahat



spektrum frekuensi radio telah berjalan efektif. Hal ini dilakukan melalui pemetaan pengguna frekuensi secara berkala dan berbasis risiko, sehingga potensi pelanggaran dapat diidentifikasi lebih dini dan ditindaklanjuti secara tepat sasaran. Selain itu, optimalisasi proses penanganan sanksi administratif dilakukan dengan penertiban alur administrasi mulai dari penerbitan invoice, pemantauan status pembayaran, hingga penyelesaian denda, yang didukung pemanfaatan sistem informasi dan basis data internal untuk memastikan keakuratan data serta ketepatan waktu penagihan.

Dari sisi inovasi, Balmon Palembang menerapkan pendekatan komunikasi persuasif dan edukatif melalui sosialisasi langsung

Gambar 3.25
Kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif Kab. Muara Enim



maupun media komunikasi digital guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengguna frekuensi radio terhadap kewajiban pemenuhan sanksi administratif. Upaya ini mendorong kepatuhan sukarela dan menurunkan potensi penunggakan denda. Penguatan koordinasi internal dan lintas unit dalam pengawasan lapangan serta tindak lanjut administrasi juga dilakukan, disertai monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin agar seluruh tahapan penanganan sanksi berjalan sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan.

6. Dampak

Pencapaian target indikator pengenaan sanksi denda administratif memberikan dampak langsung yang nyata dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum. Penegakan regulasi yang konsisten mendorong meningkatnya kepatuhan pengguna frekuensi radio terhadap ketentuan yang berlaku, sehingga tercipta tertib administrasi dan penggunaan frekuensi radio yang lebih bertanggung jawab. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya potensi gangguan, pelanggaran, dan ketidakteraturan yang dapat merugikan kepentingan publik, khususnya dalam aspek keamanan, kenyamanan, dan kualitas layanan yang diterima masyarakat.

Selain itu, keberhasilan pencapaian indikator tersebut meningkatkan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran negara dalam menegakkan aturan secara objektif dan transparan. Masyarakat merasakan adanya kepastian hukum serta perlindungan dari dampak negatif pelanggaran yang sebelumnya berpotensi menimbulkan gangguan frekuensi radio. Secara langsung, lingkungan yang lebih tertib dan terawasi ini mendukung aktivitas masyarakat yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.

7. Implementasi BerAKHLAK

Implementasi Budaya Bernilai BerAKHLAK dalam kegiatan Penanganan Sanksi Denda Administratif dilakukan melalui beberapa cara:

- Berorientasi Pelayanan, Pelaksanaan Penanganan Sanksi Denda Administratif dilakukan dengan mengedepankan pelayanan yang responsif, jelas, dan mudah
- dipahami oleh pengguna frekuensi radio. Setiap informasi terkait sanksi, mekanisme pembayaran, serta tindak lanjut disampaikan secara terbuka dan tepat waktu guna memberikan kepastian layanan serta mendorong kepatuhan pengguna.
- Akuntabel, Seluruh proses penanganan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur yang berlaku. Setiap tahapan, mulai dari penetapan sanksi hingga penyelesaian pembayaran, didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan negara.
- Kompeten, Petugas yang terlibat dalam penanganan sanksi denda administratif memiliki pemahaman yang memadai terhadap regulasi, prosedur teknis, serta sistem administrasi yang digunakan. Peningkatan kompetensi dilakukan secara berkelanjutan melalui pembelajaran internal dan koordinasi teknis untuk memastikan kualitas pelaksanaan tugas tetap terjaga.
- Harmonis, Penanganan sanksi dilakukan dengan menjaga hubungan kerja yang baik, saling menghormati, dan mengedepankan komunikasi yang efektif, baik antarpegawai maupun dengan pengguna frekuensi radio. Pendekatan yang persuasif dan edukatif diterapkan untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif serta meminimalkan potensi konflik.
- Loyal, Seluruh pegawai melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan komitmen terhadap organisasi serta negara. Penanganan sanksi denda administratif dilaksanakan secara konsisten dan objektif sebagai wujud loyalitas terhadap kebijakan pemerintah

dan upaya penegakan ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio.

- Adaptif, Pelaksanaan penanganan sanksi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan menyesuaikan dengan perkembangan sistem kerja yang berlaku. Pemanfaatan sistem digital dalam pemantauan dan pencatatan sanksi membantu meningkatkan efisiensi, ketepatan waktu, dan akurasi proses administrasi.
- Kolaboratif, Penanganan sanksi denda administratif dilaksanakan melalui kerja sama yang solid antarunit kerja serta koordinasi dengan pihak terkait. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan setiap temuan pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat, sekaligus mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

8. Efisiensi

Dalam upaya mencapai target pengenaan sanksi denda administratif, telah dilakukan pengelolaan sumber daya secara efisien dan terukur. Efisiensi tersebut tercermin dari optimalisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penindakan dengan memanfaatkan pola kerja terpadu, sehingga jumlah kegiatan lapangan yang dilaksanakan mampu menjangkau lebih banyak objek pengawasan tanpa penambahan signifikan terhadap kebutuhan personel dan anggaran. Dengan pendekatan ini, capaian pengenaan denda selama satu tahun dapat direalisasikan melalui pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimal.

Secara kuantitatif, efisiensi sumber daya terlihat dari rasio hasil terhadap input, di mana pelaksanaan pengawasan terhadap puluhan entitas pengguna berhasil menghasilkan akumulasi nilai denda yang signifikan dengan penggunaan sumber daya yang relatif kecil. Selain itu, peningkatan pemanfaatan mekanisme Tertib Mandiri dan pembinaan administratif turut mengurangi kebutuhan penindakan lanjutan, sehingga waktu kerja, biaya operasional, dan beban personel dapat ditekan.

Efisiensi ini memungkinkan organisasi untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia ke kegiatan pengawasan lain yang bersifat prioritas, tanpa mengurangi kualitas penegakan dan pencapaian indikator kinerja.

9. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pada tahun 2025, proses penanganan sanksi denda administratif menggunakan aplikasi denda administratif yang dikembangkan oleh Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital dan telah dimanfaatkan secara optimal oleh Balmon Palembang. Aplikasi ini digunakan untuk menentukan besaran nominal denda dan penerbitan invoice, sekaligus memastikan kejelasan dan kepastian target operasi yang

Gambar 3.26
Kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif Kab. Musi Banyuasin



telah maupun belum dilaksanakan. Dalam penetapan Target Operasi (TO), dilakukan kajian mendalam terhadap kemampuan wajib bayar dalam memenuhi kewajiban denda guna mencegah timbulnya piutang macet atau temuan dari lembaga pengawasan seperti BPKP, serta mendukung efektivitas pengawasan berbasis risiko.

Selain itu, dalam rangka mendukung digitalisasi dan efisiensi administrasi, akan dilakukan integrasi aplikasi denda dengan aplikasi New ROL dan APSTARD dengan masa transisi Januari hingga Maret 2026. Untuk memastikan keakuratan dan keterpaduan data, setiap temuan pelanggaran Spektrum Frekuensi Radio (SFR) dan Alat/Perangkat Telekomunikasi (APT) harus terlebih dahulu dimasukkan ke aplikasi New ROL untuk memperoleh ID ROL, yang selanjutnya digunakan pada aplikasi Denda untuk mendapatkan Kode Billing. Pemanfaatan laporan kinerja tersebut menjadi dasar untuk mengukur capaian kinerja, mengidentifikasi permasalahan, serta merumuskan rekomendasi perbaikan guna penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja pada tahun berikutnya.

10. Rekomendasi Tindak Lanjut Tahun 2026

Rekomendasi tindak lanjut perbaikan tahun 2025 yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 difokuskan pada penguatan

Gambar 3.27
Kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif Kota Prabumulih



Penguatan kapasitas sumber daya pengawasan, penyusunan prioritas penanganan kasus berbasis tingkat risiko, serta penyempurnaan mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin juga menjadi bagian penting untuk menjaga konsistensi capaian indikator pada tahun berikutnya.

Selanjutnya, untuk mendukung digitalisasi dan efisiensi administrasi, pada tahun 2026 akan dilaksanakan integrasi aplikasi denda administratif dengan aplikasi New ROL dan APSTARD guna memastikan keterpaduan data temuan pelanggaran SFR dan APT, percepatan penerbitan kode billing, serta peningkatan akurasi pelaporan kinerja. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi ini perlu diiringi dengan

standarisasi alur administrasi, peningkatan kompetensi petugas, serta penguatan dokumentasi dan akuntabilitas proses penanganan sanksi. Selain itu, diperlukan strategi percepatan penyelesaian invoice belum terbayar melalui mekanisme reminder berjenjang dan koordinasi dengan unit terkait, agar efektivitas penagihan semakin meningkat. Melalui langkah - langkah perbaikan tersebut, diharapkan pelaksanaan penanganan sanksi denda administratif pada tahun 2026 semakin optimal, selaras dengan kebijakan nasional, serta mampu meningkatkan tertib penggunaan spektrum frekuensi radio secara berkelanjutan.

efektivitas pengawasan, penegakan hukum, serta optimalisasi pengelolaan sanksi denda administratif sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Langkah perbaikan diarahkan pada peningkatan pengawasan berbasis risiko melalui pemetaan pengguna frekuensi radio secara berkala, penguatan kajian kemampuan wajib bayar dalam penetapan Target Operasi (TO) guna meminimalkan potensi piutang macet, serta peningkatan kualitas koordinasi lintas unit dalam proses penindakan dan tindak lanjut administrasi. Selain itu, diperlukan peningkatan intensitas sosialisasi dan pembinaan kepada pengguna frekuensi radio dengan pendekatan persuasif dan edukatif untuk mendorong kepatuhan sukarela dan mengurangi pelanggaran berulang.

11. Benchmarking

Benchmarking dengan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makasar, dengan luas wilayah kerja 45.330,55 km² dan jumlah pengguna frekuensi sebanyak 21.627.

Tabel 3.26
Benchmarking Penanganan Sanksi Denda Administratif

Indikator Kinerja	Balmon Makassar		Balmon Palembang		Perbandingan Capaian
	Target	Capaian	Target	Capaian	
Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%	123.93%	80%	125%	1.07%

Sumber : Aplikasi Janji Kinerja 2025

Berdasarkan hasil benchmarking dengan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makasar pada indikator Penanganan Sanksi Denda Administratif, diketahui bahwa kedua UPT telah melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar 80%. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makasar mencatat capaian kinerja sebesar 123,93%, sedangkan Balmon Palembang mencapai 125%. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa capaian kinerja Balmon Palembang lebih tinggi dengan rasio perbandingan sebesar 1,07.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa meskipun Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makasar memiliki wilayah kerja yang lebih luas dan jumlah pengguna frekuensi yang lumayan besar, Balmon Palembang mampu melaksanakan penanganan sanksi denda administratif secara efektif dan optimal. Hal ini mencerminkan pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan kepatuhan penggunaan spektrum frekuensi radio yang berjalan dengan baik, didukung oleh pengelolaan administrasi sanksi yang tertib, pemantauan yang konsisten, serta tindak lanjut yang tepat waktu. Dengan demikian, kinerja Balmon Palembang pada indikator tersebut dapat dinilai sangat baik dan mendukung pencapaian sasaran kinerja organisasi sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja.

Indikator Kinerja 1-7
Persentase Penanganan Sanksi Denda Administratif

1. Latar Belakang

Kualitas layanan frekuensi radio yang optimal menjadi kunci dalam mendukung operasional di berbagai sektor, seperti telekomunikasi, transportasi penyiaran dan keamanan indikator seperti ketersediaan frekuensi, kecepatan proses perizinan dan tingkat gangguan frekuensi menjadi acuan untuk menilai kualitas layanan, dengan memantau indikator-indikator ini, dapat dilakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan frekuensi dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital bagi masyarakat umum dengan kualitas layanan yang baik seperti jaringan internet yang lebih cepat dan stabil akan meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat umum akan meningkat, daerah-daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

Konektivitas jaringan nir kabel yang baik akan lebih meningkatkan akses informasi dan layanan mudah dan

cepat secara otomatis akan mengurangi kesenjangan digital, giat UMKM dengan jaringan yang berkualitas akses pasar akan lebih luas, pemasaran online lebih efektif sehingga meningkatkan daya saing dan pendapatan, dalam segi pendidikan dengan jaringan nir kabel yang baik akses ke sumber belajar berbasis online lebih mudah dan cepat pembelajaran jarak jauh (*e-learnig*) lebih efektif kolaborasi dan pertukan informasi lebih yang lebih lancar, dengan kualitas layanan frekuensi radio yang baik juga akan berdampak positif bagi dunia kesehatan dan pemerintahan seperti telemedicine dan konsultasi dapat dilakukan secara online, konsultasi pasien dapat dilakukan jarak jauh, akses informasi kesehatan lebih cepat, pelayanan public online pemerintahan lebih efisien, sistem administrasi lebih cepat dan transparan dan pengawasan lebih efektif dengan teknologi IoT dan smart city.

2. Analisa Capaian Kinerja 2025

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%	107.14%

Sumber: Aplikasi APSTARD (<https://apstard.postel.go.id/>) dan Aplikasi New Rol (<https://rol.postel.go.id/>)

Hingga Desember 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang menunjukkan performa yang sangat impresif dengan melampaui target tahun berjalan. Dari target yang ditetapkan sebanyak 14 Kabupaten/Kota, tim teknis berhasil melakukan pengukuran di 15 Kabupaten/Kota, yang menghasilkan angka capaian sebesar 107,14%.

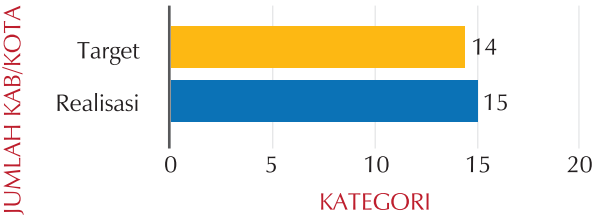
Secara teknis, capaian tersebut diperoleh melalui pelaksanaan pengukuran kualitas layanan dengan metode static test dan drive test pada jaringan bergerak seluler di setiap kabupaten/kota target. Kegiatan diawali dengan perencanaan rute pengukuran, penentuan titik ukur prioritas berdasarkan kepadatan layanan dan potensi kualitas sinyal, serta penyiapan perangkat ukur standar untuk merekam parameter kualitas jaringan.

Pelaksanaan pengukuran di lapangan tidak hanya mengikuti rute utama perkotaan, tetapi juga menjangkau area pinggiran dan jalur penghubung antarwilayah guna memperoleh gambaran kualitas layanan yang lebih representatif. Dalam prosesnya, tim teknis menghadapi variasi kondisi geografis, akses jalan, kepadatan trafik jaringan, serta pengaruh cuaca yang memengaruhi durasi dan efektivitas pengukuran di setiap lokasi.

Secara nasional, kegiatan pengukuran kualitas layanan pada beberapa UPT menunjukkan capaian yang sangat baik, di mana sebagian besar UPT mampu memenuhi target 100% bahkan terdapat yang melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Perbandingan capaian antar-UPT secara nasional tidak dapat dinilai hanya dari persentase, karena dipengaruhi oleh luas wilayah kerja, kondisi geografis, dan karakteristik jaringan di masing-masing daerah. Namun demikian, capaian Balmon Palembang yang melampaui target menunjukkan bahwa pola pelaksanaan pengukuran kualitas layanan telah sejalan dengan praktik nasional yang efektif, terencana, dan berbasis data untuk mendukung kualitas jaringan telekomunikasi yang lebih baik bagi masyarakat.

Grafik 3.17
Capaian Pengukuran Kualitas Layanan Telekomunikasi Tahun 2025



Dibandingkan dengan target yang direncanakan pada awal tahun, realisasi kegiatan menunjukkan konsistensi pelaksanaan pengukuran secara bertahap dan berkesinambungan sepanjang tahun 2025. Pelaksanaan pengukuran tidak hanya dilakukan pada periode reguler, namun juga diintegrasikan dengan kegiatan strategis nasional seperti Posko Idul Fitri 1446 H, sehingga meningkatkan cakupan wilayah pengukuran.

Capaian ini mencerminkan efektivitas perencanaan, koordinasi tim, serta optimalisasi sumber daya yang dimiliki Balmon Palembang dalam memastikan tersedianya data kualitas layanan telekomunikasi secara menyeluruh dan akurat.

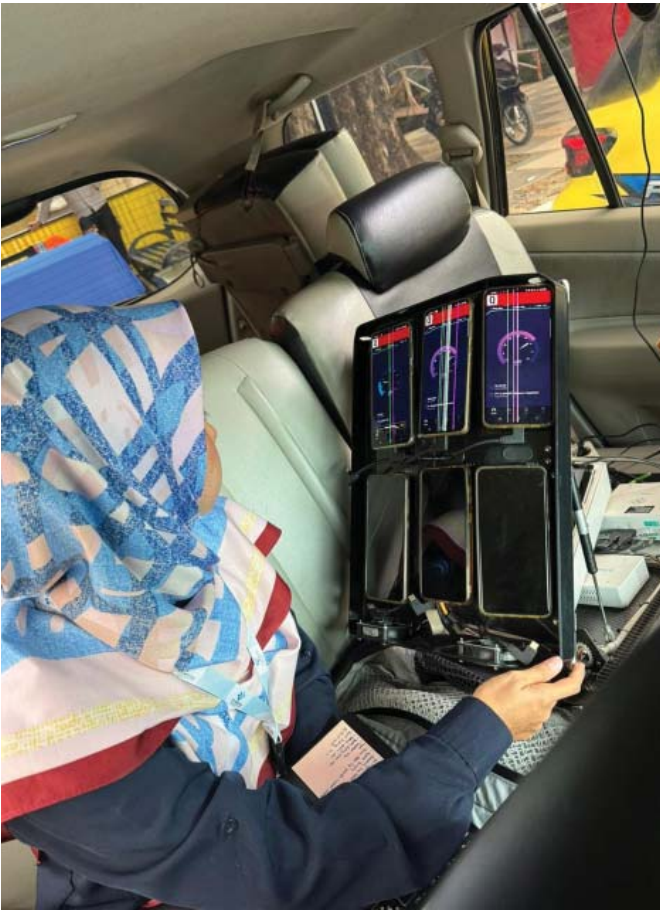
Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa strategi dan faktor pendukung, antara lain:

- Perencanaan dan Penjadwalan yang Terstruktur
Pengukuran kualitas layanan direncanakan secara sistematis sepanjang tahun anggaran sehingga seluruh target wilayah dapat terakomodasi
- Integrasi dengan Kegiatan Strategis Nasional
Pelaksanaan pengukuran yang terintegrasi dengan

Tabel 3.27
Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Kualitas Layanan

No	Tanggal Pelaksanaan	Kabupaten/Kota
1	18 - 19 Maret 2025	Kab. OKU Timur
2	26 - 30 Maret 2025	Kota Palembang (Khusus Posko Idul Fitri 1446H)
3	15 - 16 April 2025	Kab. Ogan Ilir
4	22 - 25 April 2025	Kota Prabumulih
5	22 - 25 April 2025	Kab. PALI
6	14 - 17 Mei 2025	Kab. Lahat

Gambar 3.28
Kegiatan Pengukuran Kualitas Layanan di Kota Palembang



- kegiatan seperti Posko Idul Fitri memberikan efisiensi sekaligus memperluas cakupan wilayah pengukuran.
- Optimalisasi Sumber Daya
Pemanfaatan sumber daya manusia dan sarana pengukuran secara optimal memungkinkan pencapaian target bahkan melampaui yang direncanakan.
 - Pendekatan Pengawasan Berbasis Data
Ketersediaan data hasil pengukuran menjadi dasar utama dalam memastikan kualitas layanan telekomunikasi serta mendukung fungsi pengawasan yang efektif.

No	Tanggal Pelaksanaan	Kabupaten/Kota
7	14 - 17 Mei 2025	Kota Pagaralam
8	15 - 18 Juli 2025	Kab. OKI
9	22 - 25 Juli 2025	Kab. Muara Enim
10	12 - 15 Agustus 2025	Kota Lubuk Linggau
11	12 - 15 Agustus 2025	Kab. Muratara
12	26 - 29 Agustus 2025	Kab. Banyuasin
13	29 Sept - 02 Okt 2025	Kab. Musi Banyuasin
14	14 - 17 Oktober 2025	Kab. OKU
15	14 - 17 Oktober 2025	Kab. OKU Selatan
16	18 - 20 November 2025	Kota Palembang

3. Target dan Realisasi Jangka Menengah (2021-2025)

2021			2022			2023			2024			2025		
T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	107.14	107.14

Keterangan :

T = Target

C = Capaian

% = Persentase Capaian

4. Kendala dan Solusi

Meskipun secara akumulatif pencapaian indikator Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan berhasil melampaui target dengan realisasi sebesar 107,14%, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala realistis yang memengaruhi konsistensi pengukuran di lapangan. Faktor geografis dan teknis di wilayah Sumatera Selatan tetap menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh tim teknis Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang. Beberapa wilayah kabupaten/kota memiliki topografi yang menantang, sehingga waktu tempuh menuju titik pengukuran (drive test) terkadang melebihi jadwal yang direncanakan. Selain itu, kondisi cuaca ekstrem membatasi mobilitas tim lapangan.

Sebagai langkah antisipatif dan solusi atas kendala tersebut yaitu berupa Optimalisasi Perencanaan Rute dengan melakukan pemetaan ulang rute pengukuran yang lebih efisien dengan mengelompokkan wilayah-wilayah yang berdekatan dalam satu rangkaian perjalanan dinas guna memitigasi hambatan geografis.

5. Strategi Keberhasilan/Inovasi

Keberhasilan pencapaian indikator Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan Telekomunikasi didukung oleh penerapan strategi dan inovasi pelaksanaan kegiatan, antara lain melalui perencanaan pengukuran yang terstruktur dan berkelanjutan sepanjang tahun, integrasi

kegiatan pengukuran dengan agenda strategis nasional, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia dan sarana pengukuran.

6. Dampak

Tercapainya target pengukuran hingga melebihi batas minimal memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas. Dengan terlaksananya pengukuran di 15 Kabupaten/Kota, kualitas jaringan telekomunikasi seluler menjadi lebih terpantau dan terjamin stabilitasnya. Dampak langsung yang dirasakan masyarakat berupa Kelancaran Aktivitas Digital yaitu Terjaganya kualitas sinyal mendukung kelancaran kegiatan ekonomi digital, pendidikan daring, dan akses informasi bagi warga di wilayah Sumatera Selatan, bahkan di wilayah yang sebelumnya memiliki kualitas sinyal marginal.

7. Implementasi BerAKHLAK

Implementasi Budaya Bernilai BerAKHLAK dalam kegiatan dilakukan melalui beberapa cara:

- Berorientasi Pelayanan, Melaksanakan pengukuran kualitas layanan telekomunikasi secara menyeluruh dan berkelanjutan sebagai upaya menjamin layanan yang andal dan merata bagi masyarakat.
- Akuntabel, Melaksanakan seluruh kegiatan pengukuran sesuai standar operasional prosedur serta memastikan data hasil pengukuran valid, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

- c. Kompeten, Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia dalam penguasaan metode serta perangkat pengukuran kualitas layanan telekomunikasi.
- d. Harmonis, Menjaga kerja sama dan komunikasi yang baik antar tim guna mendukung kelancaran pelaksanaan pengukuran.
- e. Loyal, Menjalankan tugas pengawasan kualitas layanan telekomunikasi secara konsisten sebagai bentuk komitmen terhadap kebijakan dan program pemerintah.
- f. Adaptif, Menyesuaikan pelaksanaan pengukuran dengan kondisi geografis, dinamika lapangan, dan perubahan situasi agar kegiatan tetap berjalan efektif.
- g. Kolaboratif, Membangun sinergi dengan instansi pusat dalam rangka mendukung pelaksanaan pengukuran dan pemanfaatan hasilnya.

8. Efisiensi

Dalam mencapai indikator kinerja Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan Telekomunikasi, Balmon Palembang menerapkan prinsip efisiensi sumber daya secara terukur. Dengan target pengukuran sebanyak 14 Kabupaten/ Kota, realisasi pengukuran berhasil dilakukan pada 15 Kabupaten/Kota, sehingga terjadi peningkatan output sebesar 7,14% dibandingkan target yang ditetapkan. Peningkatan output tersebut dicapai tanpa penambahan target anggaran dan jumlah sumber daya manusia yang direncanakan pada awal tahun.

Efisiensi dicapai melalui optimalisasi penjadwalan kegiatan, penggabungan pelaksanaan pengukuran pada beberapa wilayah yang berdekatan, serta integrasi kegiatan pengukuran dengan agenda strategis nasional. Dengan pendekatan tersebut, satu siklus pelaksanaan kegiatan mampu menghasilkan output pengukuran yang lebih besar dibandingkan perencanaan awal. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya pada Tahun 2025 berjalan secara lebih efisien, ditandai dengan meningkatnya rasio output terhadap input yang digunakan.

9. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Kegiatan pengukuran kualitas layanan telekomunikasi Tahun 2025 yang mendukung indikator tersedianya data hasil pengukuran telah dimanfaatkan secara nyata, tidak hanya sebagai pemenuhan target kinerja, tetapi juga sebagai basis evaluasi kualitas jaringan seluler. Pengukuran yang dilakukan di 15 Kabupaten/Kota menjadi rujukan untuk mengidentifikasi wilayah dengan kualitas sinyal kategori marginal, potensi gangguan frekuensi, serta tingkat kepatuhan penyelenggara jaringan terhadap standar layanan yang ditetapkan. Data tersebut memberikan gambaran faktual kondisi jaringan, khususnya di wilayah Sumatera Selatan.

Selain itu, laporan kinerja dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi internal dalam penyusunan rencana kegiatan tahun berikutnya, termasuk penentuan rute pengukuran yang lebih efisien, pengelompokan wilayah kerja, dan integrasi dengan agenda strategis nasional. Data hasil pengukuran juga digunakan sebagai bahan koordinasi dengan unit kerja pusat serta sebagai dasar klarifikasi dan pembinaan kepada penyelenggara jaringan apabila ditemukan kualitas layanan yang belum memenuhi standar. Dengan demikian, laporan kinerja berfungsi sebagai alat kendali mutu yang mendukung peningkatan kualitas layanan telekomunikasi secara berkelanjutan

10. Rekomendasi Tindak Lanjut Tahun 2026

Pada Tahun 2026, kegiatan pengukuran kualitas layanan telekomunikasi perlu ditingkatkan melalui perluasan cakupan wilayah pengukuran serta penerapan metode berbasis prioritas pada daerah dengan kategori sinyal marginal dan potensi gangguan frekuensi yang tinggi. Optimalisasi pemanfaatan perangkat ukur dan sistem pengolahan data secara digital perlu diperkuat agar hasil pengukuran lebih cepat dianalisis dan ditindaklanjuti. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan pemutakhiran pemahaman terhadap standar kualitas layanan guna menjaga konsistensi dan akurasi hasil pengukuran di lapangan.

Selanjutnya, hasil pengukuran kualitas layanan perlu dimanfaatkan secara lebih strategis melalui penguatan mekanisme koordinasi dengan unit kerja pusat dan penyelenggara jaringan telekomunikasi. Di samping itu, penyusunan perencanaan kegiatan pengukuran Tahun 2026 perlu berbasis data historis dan tren hasil pengukuran sebelumnya, sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan telekomunikasi secara berkelanjutan.



11. Benchmarking

Benchmarking dilakukan dengan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung, dengan jumlah capaian Hasil Pengukuran Kualitas Layanan sebanyak 22 kab/ kota dari target 18 kab/kota.

Tabel 3.28
Benchmarking Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan

Indikator Kinerja	Balmon Bandung		Balmon Palembang		Perbandingan Capaian
	Target	Capaian	Target	Capaian	
Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%	122%	100%	107.14%	14.86%

Sumber : Aplikasi Janji Kinerja 2025

Perbandingan capaian indikator kinerja Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan menunjukkan bahwa kedua UPT melampaui target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian kinerja Balmon Bandung sebesar 122%, sedangkan Balmon Palembang mencapai 107,14%. Selisih capaian kinerja antara keduanya adalah 14,86%.

Perbedaan ini mencerminkan bahwa Balmon Bandung mampu memperluas cakupan pengukuran kualitas layanan lebih besar dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Sementara itu, Balmon Palembang juga menunjukkan kinerja yang dapat melampaui target, menandakan pelaksanaan pengukuran kualitas layanan berjalan optimal.

Meskipun terdapat selisih persentase capaian, kedua UPT menunjukkan pola kinerja yang sama, yaitu optimalisasi sumber daya dan perluasan cakupan wilayah pengukuran melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menegaskan komitmen kedua UPT dalam memastikan tersedianya data hasil pengukuran kualitas layanan sebagai dasar pengawasan kualitas jaringan telekomunikasi.

Indikator Kinerja 1-8

Persentase Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)

1. Latar Belakang

Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) baik reguler dan non reguler bertujuan untuk menjaring calon anggota amatir radio yang mempunyai hobi dibidang amatir radio dan penelitian ilmiah amatir radio. Materi-materi dalam pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) adalah Pancasila, Peraturan Radio, Teknik Radio dan Bahasa Inggris. Ujian dilaksanakan berbasis Computer Assisted Test (CAT) dimana hasil ujian langsung diketahui setelah peserta selesai melaksanakan ujian. Kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) ini merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Balmon Kelas I Palembang kepada masyarakat.

Penerima manfaat dari kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) berbasis CAT adalah masyarakat pengguna frekuensi radio amatir yang ingin mendapatkan Izin Amatir Radio (IAR) atau menaikkan tingkat IAR, sehingga tercipta tertib penggunaan frekuensi radio amatir.

Selain itu, Balmon Palembang menyelenggarakan program layanan sertifikat operator radio Maritim on The Spot (MOTS) - Izin Komunikasi Radio Nelayan (IKRAN) dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis SRC/LRC yang diberikan kepada para nelayan, pemilik kapal dan nakhoda.

Pentingnya kegiatan Bimbingan Teknis SRC/LRC ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi para nelayan di laut serta penggunaan frekuensi radio yang aman, nyaman dan legal. Mengingat penggunaan frekuensi yang digunakan oleh para nelayan kerap kali menimbulkan gangguan terhadap pengguna frekuensi lain terutama frekuensi penerbangan.

Penerima manfaat dari kegiatan bimbingan teknis SRC/LRC ini adalah para nelayan, nakhoda dan pemilik kapal yang sebelumnya mereka tidak mengetahui bahwa penggunaan frekuensi diatur oleh Pemerintah sesuai Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio dan jika penggunaannya tidak sesuai peruntukannya dapat menimbulkan gangguan frekuensi kepada pengguna lain, bahkan bisa menyebabkan kematian bagi orang lain.

2. Analisa Capaian Kinerja 2025

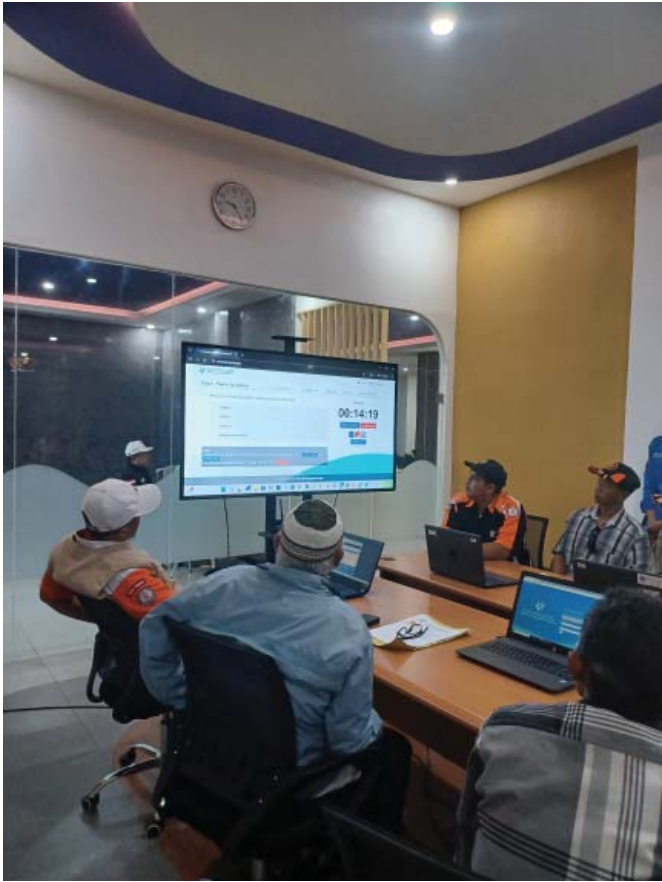
Indikator Kinerja	Target	Capaian
Persentase Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	100%	100%

Sumber: Aplikasi APSTARD (<https://apstard.postel.go.id/>) dan Aplikasi New Rol (<https://rol.postel.go.id/>)

Capaian kinerja pelaksanaan layanan sertifikasi operator radio melalui Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) berbasis Computer Assisted Test (CAT) tahun 2025 sebesar 100% dan melampaui target indikator yang telah ditetapkan. Dari target pelaksanaan kegiatan sebanyak 6 kali, Balmon Palembang berhasil merealisasikan 13 kali pelaksanaan kegiatan UNAR (12 Reguler dan 1 Non Reguler) dengan total 97 peserta, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 217%.

Capaian ini mencerminkan tingginya efektivitas layanan serta kemampuan unit kerja dalam merespons kebutuhan masyarakat terhadap sertifikasi operator radio. Dalam konteks yang lebih luas, digitalisasi proses sertifikasi telah menjadi standar untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi layanan. Dibandingkan dengan institusi lain yang masih menghadapi keterbatasan layanan sertifikasi secara digital, capaian Balmon Palembang menunjukkan posisi yang relatif baik dalam penyediaan layanan sertifikasi yang mudah diakses.

Gambar 3.29 Pelaksanaan kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) reguler



Keberhasilan pencapaian target tersebut didukung oleh beberapa faktor kunci, antara lain pemanfaatan teknologi CAT yang memungkinkan fleksibilitas pelaksanaan, perencanaan jadwal yang adaptif sesuai permintaan peserta, serta optimalisasi sumber daya dan koordinasi internal yang efektif. Strategi ini memastikan bahwa peningkatan kuantitas layanan tetap diiringi dengan terjaganya kualitas, akuntabilitas, dan integritas proses sertifikasi. Dengan demikian, capaian kinerja ini tidak hanya memenuhi indikator yang ditetapkan, tetapi juga menjadi praktik baik (best practice) dalam penyelenggaraan layanan publik berbasis digital.

Selain itu, penyelenggaraan layanan sertifikasi MOTS-IKRAN melalui bimbingan teknis SRC/LRC pada tahun 2025 mencatatkan persentase capaian sebesar 146%, dengan jumlah sebanyak 44 peserta dari target 30 peserta. Secara holistik, indikator ini menunjukkan efektivitas jangkauan layanan komunikasi maritim dalam mendukung pemenuhan standar keselamatan pelayaran yang ditetapkan oleh International Maritime Organization (IMO).

Di tingkat regional, capaian Indonesia dalam sertifikasi nelayan tradisional menunjukkan progresivitas yang relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara berkembang di kawasan Asia Tenggara, yang umumnya masih menghadapi kendala akses birokrasi dan geografis bagi pelaut di wilayah rural. Hal ini mengindikasikan bahwa layanan sertifikasi yang diselenggarakan telah bersifat inklusif dan kompetitif secara global dalam pemenuhan kompetensi operator radio maritim.

Secara keseluruhan, Balmon Kelas I Palembang berhasil memenuhi indikator kinerja yang ditetapkan dalam penyelenggaraan layanan sertifikasi berbasis digital dan kolaboratif. Ke depan, keberhasilan ini menjadi modal strategis untuk menjaga keberlanjutan kinerja, memperluas jangkauan layanan, serta memastikan kontribusi nyata terhadap pengelolaan spektrum frekuensi radio yang tertib, aman, dan berdaya guna bagi masyarakat.

Adapun jadwal Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) secara reguler, Jumlah peserta dan tingkat kelulusan peserta UNAR dapat dilihat pada tabel Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) Reguler dibawah ini:

Tabel 3.29 Peserta UNAR Reguler

No	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta		Jumlah Lulus	Jumlah Tidak Lulus
1	20 Januari 2025	Siaga	: 0	0	0
		Penggalang	: 0	0	0
		Penegak	: 0	0	0
2	10 Februari 2025	Siaga	: 1	1	0
		Penggalang	: 0	0	0
		Penegak	: 0	0	0
3	17 Maret 2025	Siaga	: 6	5	1
		Penggalang	: 0	0	0
		Penegak	: 0	0	0
4	14 April 2025	Siaga	: 6	4	2
		Penggalang	: 0	0	0
		Penegak	: 0	0	0
5	29 Mei 2025	Siaga	: 1	1	0
		Penggalang	: 0	0	0
		Penegak	: 1	1	0
6	16 Juni 2025	Siaga	: 2	1	1
		Penggalang	: 2	2	0
		Penegak	: 0	0	0
7	14 Juli 2025	Siaga	: 7	4	3
		Penggalang	: 5	5	0
		Penegak	: 1	1	0
8	19 Agustus 2025	Siaga	: 13	11	2
		Penggalang	: 2	2	0
		Penegak	: 0	0	0
9	15 September 2025	Siaga	: 4	3	1
		Penggalang	: 2	2	0
		Penegak	: 0	0	0
10	20 Oktober 2025	Siaga	: 5	2	3
		Penggalang	: 0	0	0
		Penegak	: 0	0	0
11	17 Nopember 2025	Siaga	: 2	2	0
		Penggalang	: 1	1	0
		Penegak	: 0	0	0
12	15 Desember 2025	Siaga	: 4	3	1
		Penggalang	: 0	0	0
		Penegak	: 0	0	0
TOTAL		Siaga	: 53	43	10
		Penggalang	: 12	12	0
		Penegak	: 2	2	0

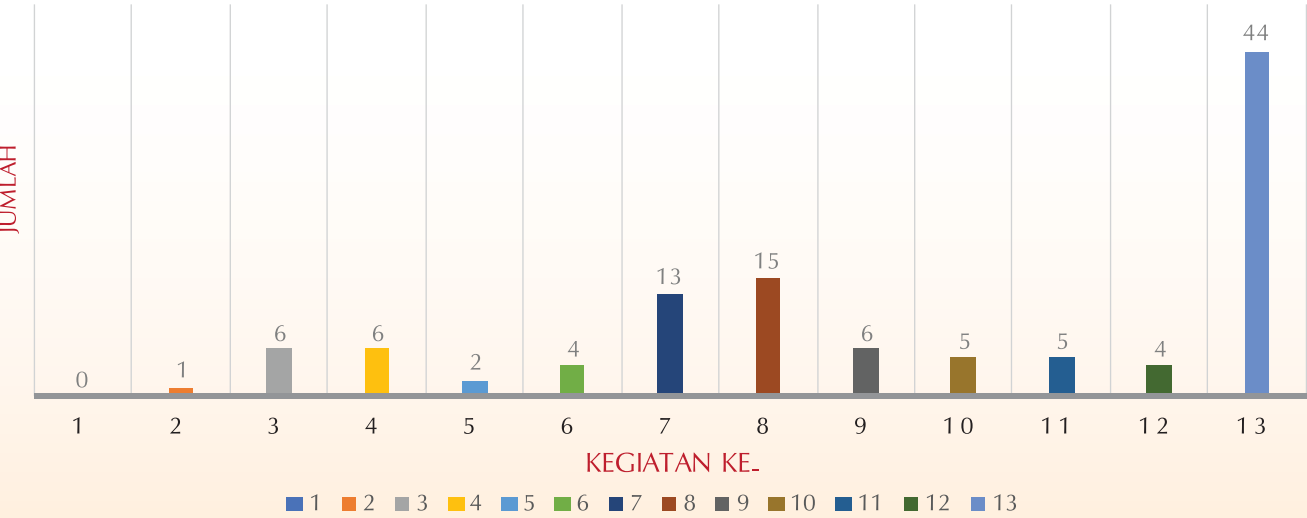
Berdasarkan tabel peserta UNAR Reguler tahun 2025, tercatat sebanyak 12 kali pelaksanaan dengan total 67 peserta, yang terdiri dari 53 peserta tingkat Siaga, 12 Penggalang, dan 2 Penegak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 57 peserta dinyatakan lulus dan 10 peserta tidak lulus, dengan tingkat kelulusan yang relatif tinggi terutama pada tingkat Penggalang dan Penegak yang mencapai 100%. Variasi jumlah peserta dan kelulusan pada setiap periode pelaksanaan menunjukkan adanya dinamika kompetensi peserta, namun secara umum data ini mencerminkan efektivitas penyelenggaraan UNAR berbasis CAT yang mampu memfasilitasi proses ujian secara konsisten, terukur, dan akuntabel sepanjang tahun.

Tabel 3.30 Peserta UNAR Non Reguler

No	Tempat/Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta		Jumlah Lulus	Jumlah Tidak Lulus
1	Kabupaten Ogan Komering Ulu, 15 November 2025	Siaga	: 23	18	5
		Penggalang	: 16	12	4
		Penegak	: 5	5	0
TOTAL		Siaga	: 23	18	5
		Penggalang	: 16	12	4
		Penegak	: 5	5	0

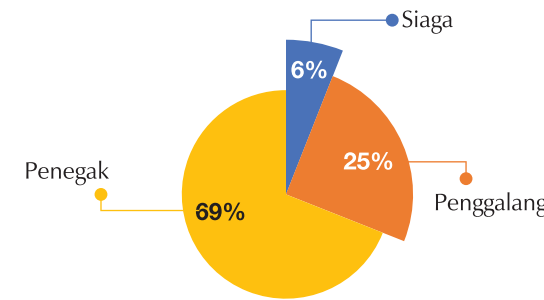
Adapun Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) Non Reguler yang dilaksanakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu pada November 2025 diikuti oleh 44 peserta yang terdiri dari tingkat Siaga sebanyak 23 peserta, Penggalang 16 peserta, dan Penegak 5 peserta. Dari total peserta tersebut, sebanyak 35 peserta dinyatakan lulus dengan rincian 18 peserta tingkat Siaga, 12 peserta tingkat Penggalang, dan seluruh peserta tingkat Penegak sebanyak 5 orang dinyatakan lulus, sedangkan 9 peserta lainnya belum lulus. Secara umum, pelaksanaan kegiatan UNAR Non Reguler berjalan dengan lancar dan menunjukkan tingkat kelulusan yang cukup baik.

Grafik 3.18
Capaian Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio Melalui Ujian Negara Amatir Radio (UNAR)



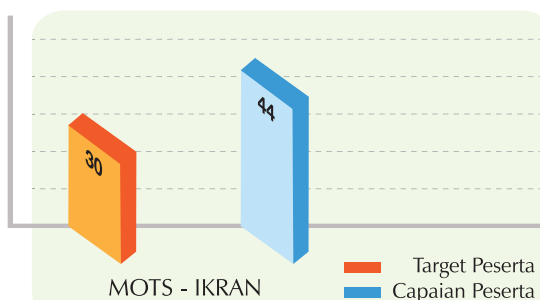
Grafik capaian penyelenggaraan layanan sertifikasi operator radio melalui Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) Tahun 2025 menunjukkan bahwa jumlah peserta pada setiap pelaksanaan kegiatan mengalami variasi, jumlah peserta terbanyak terjadi pada periode pelaksanaan terakhir (UNAR Non Reguler), dimana tercatat sebanyak 44 peserta. Peningkatan jumlah peserta pada periode tersebut menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat dalam mengikuti UNAR serta efektivitas pelaksanaan sosialisasi dan penyelenggaraan kegiatan, sehingga capaian peserta pada periode ini menjadi yang tertinggi dibandingkan periode pelaksanaan lainnya sepanjang tahun 2025.

Grafik 3.19
Persentase Capaian Peserta Berdasarkan Jenis Tingkatan UNAR Tahun 2025



Grafik persentase capaian peserta berdasarkan jenis tingkatan peserta UNAR Tahun 2025 menunjukkan bahwa peserta didominasi oleh tingkat Siaga dengan persentase sebesar 69%, diikuti oleh tingkat Penggalang sebesar 25%, dan tingkat Penegak sebesar 6%. Komposisi ini menunjukkan bahwa minat masyarakat dalam mengikuti Ujian Negara Amatir Radio masih didominasi oleh peserta tingkat pemula, sementara peserta pada tingkat lanjutan relatif lebih sedikit, sehingga diperlukan upaya pembinaan berkelanjutan untuk mendorong peningkatan peserta pada tingkat yang lebih tinggi.

Grafik 3.20
Capaian Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (MOTS-IKRAN)



Grafik capaian penyelenggaraan layanan Sertifikasi Operator Radio (MOTS-IKRAN) menunjukkan bahwa realisasi capaian peserta telah melampaui target yang ditetapkan. Dari target peserta sebanyak 30 orang, realisasi yang dicapai mencapai 44 peserta, sehingga menunjukkan tingkat capaian yang sangat baik. Hal ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan dan minat masyarakat terhadap layanan sertifikasi operator radio serta efektivitas pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pelayanan yang telah dilakukan.

Gambar 3.30
Pelaksanaan Layanan Sertifikasi Operator Radio MOTS



3. Target dan Realisasi Jangka Menengah (2021-2025)

2021			2022			2023			2024			2025		
T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100

Keterangan :
T = Target
C = Capaian
% = Persentase Capaian

4. Kendala dan Solusi

Dalam pelaksanaan pelayanan sertifikasi, Balmon Kelas I Palembang menghadapi tantangan berlapis yang mencakup aspek infrastruktur, literasi digital, hingga kondisi geografis. Pada kegiatan UNAR berbasis CAT, kendala utama muncul saat pelaksanaan non-reguler di wilayah kabupaten, yakni akses internet yang tidak stabil dan rendahnya literasi teknologi di kalangan peserta (seperti petani atau masyarakat umum) yang belum terbiasa menggunakan komputer. Selain itu, terdapat tren penurunan minat masyarakat untuk menjadi anggota ORARI, yang menjadi tantangan tersendiri dalam pencapaian target jumlah peserta. Sementara itu, pada kegiatan Bimtek SRC/LRC, kondisi geografis Sumatera Selatan yang didominasi rawa serta ketiadaan pelabuhan laut/TPI formal menyulitkan tim dalam menghimpun basis massa nelayan secara terpusat.

Untuk mengatasi berbagai hambatan, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang menerapkan solusi kolaboratif dan teknis secara strategis melalui koordinasi dengan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) lokal serta sekolah atau instansi yang memiliki fasilitas laboratorium komputer dan akses internet guna mendukung pelaksanaan ujian, termasuk pendampingan teknis sebelum ujian agar peserta lebih siap. Selain itu, dilakukan pendataan ulang callsign yang kedaluwarsa bekerja sama dengan ORARI

Daerah untuk reaktivasi melalui mekanisme ujian, serta sinergi dengan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota dengan memanfaatkan database KUSUKA sebagai sasaran kegiatan Bimtek SRC/LRC dan Izin Komunikasi Perikanan (IKRAN) agar pelaksanaan kegiatan lebih tepat sasaran dan efektif.

5. Strategi Keberhasilan/Inovasi

Strategi keberhasilan dalam mencapai target penyelenggaraan layanan sertifikasi operator radio melalui kegiatan UNAR dan MOTS-IKRAN sebagai berikut:

- a. Berkerjasama dengan pengurus ORARI daerah/lokal untuk menjaring masyarakat yang memiliki hobi Amatir Radio.
- b. Menyeberluaskan informasi pelaksanaan kegiatan UNAR melalui media sosial.
- c. Melakukan pendataan IAR yang telah habis masa berlakunya dan mengingatkan untuk mengikuti UNAR agar IAR nya aktif kembali.
- d. Menjalin kemitraan dengan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota target sasaran Bimtek SRC/LRC dan Izin Komunikasi Perikanan (IKRAN).

6. Dampak

Dampak yang timbul kepada masyarakat melalui kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) berbasis CAT adalah terukurnya kompetensi teknis, pengetahuan regulasi

dan etika pengoperasian perangkat telekomunikasi oleh peserta dimana hal ini dapat menjamin legalitas penggunaan spektrum frekuensi radio, mendorong tertib administrasi serta meningkatkan kualitas dan profesionalisme komunikasi amatir radio di Indonesia.

Dampak yang timbul kepada masyarakat melalui kegiatan bimbingan teknis SRC/LRC adalah meningkatkan kepatuhan penggunaan spektrum frekuensi radio, menjamin keselamatan komunikasi di laut, dan meningkatkan pengetahuan teknis masyarakat dan nelayan.

7. Implementasi BerAKHLAK

Seiring dengan keberhasilan program yang telah dibuat dan untuk mencapai hasil sesuai dengan garis kebijakan yang telah ditetapkan, maka Balmon Kelas I Palembang senantiasa berupaya agar kebijakan yang akan diterapkan harus memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan, yaitu :

- a. Berorientasi Pelayanan, bahwa para peserta yang akan mengikuti Ujian Negara Amatir Radio adalah menjadi mitra Balmon Kelas I Palembang dalam ikut serta menjaga ketertiban pemakaian frekuensi radio, sehingga pada saat pendaftaran dan pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio dilakukan secara transparan dan proses pendaftaran secara online melalui web yang sudah ditetapkan.
- b. Akuntabel, bahwa pada saat pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) secara CAT seluruh peserta diperlakukan sama antara peserta tingkat Siaga, Penggalang dan Penegak.
- c. Kompeten, bahwa petugas pengawas Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) adalah petugas yang sesuai dengan kapasitasnya dan petugas yang selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuannya dalam pelaksanaan pengawasan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) secara CAT.
- d. Harmoni, Melakukan pekerjaan secara profesional sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.
- e. Loyal, Melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan selalu mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara daripada kepentingan pribadi dengan tidak menerima imbalan apapun pada saat pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) secara CAT berlangsung.
- f. Adaptif, Mempunyai sikap mau melakukan perubahan dan selalu berusaha melakukan tugasnya dengan penuh rasa antusias untuk menghadapi perubahan.
- g. Kolaboratif, Dapat membangun komunikasi yang baik dengan peserta Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) secara CAT dengan memberikan pelayanan secara prima tanpa disertai dengan permintaan imbalan dari peserta Ujian Negara Amatir Radio (UNAR).

Gambar 3.31 Kegiatan Sertifikasi Layanan Operator Radio UNAR



8. Efisiensi

Dalam penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) berbasis CAT, efisiensi dicapai melalui optimalisasi produktivitas waktu dan sumber daya manusia. Penggunaan sistem CAT memungkinkan hasil ujian diketahui secara instan sehingga memangkas waktu pengolahan nilai dan meningkatkan transparansi. Selain itu, pelaksanaan bimbingan teknis satu hari sebelum ujian terbukti mampu menurunkan kendala teknis akibat rendahnya literasi digital peserta, sehingga meminimalkan risiko penjadwalan ulang. Optimalisasi proses bisnis tersebut berkontribusi pada peningkatan produktivitas organisasi hingga 116%, yang ditunjukkan dengan kemampuan merealisasikan 7 kegiatan tambahan di luar target dasar tanpa penambahan anggaran maupun personel.

Sementara itu, pada kegiatan Bimbingan Teknis SRC/LRC, efisiensi difokuskan pada akurasi sasaran peserta melalui pemanfaatan database kartu KUSUKA dari Dinas Perikanan Kabupaten/Kota. Dengan pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas instansi, sumber daya dapat difokuskan pada peningkatan kualitas materi dan pendampingan teknis, sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kompetensi operator radio maritim.

9. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Tindaklanjut dari pemanfaatan laporan kinerja difokuskan pada evaluasi, peningkatan efisiensi dan perbaikan kualitas teknis. Data hasil CAT digunakan untuk analisis tingkat kesulitan soal, optimalisasi sistem ujian, dan penguatan kompetensi teknis operator maritim dengan cara penyusunan program bimbingan teknis SRC/LRC bagi peserta.

10. Rekomendasi Tindak Lanjut Tahun 2026

Sebagai tindak lanjut tahun 2026, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang perlu memperkuat keberlanjutan layanan sertifikasi operator radio melalui peningkatan stabilitas dan kapasitas infrastruktur CAT, serta perluasan pelaksanaan UNAR non-reguler ke wilayah dengan potensi peserta tinggi melalui kolaborasi lebih intensif bersama ORARI dan pemerintah daerah. Selain itu, program MOTS-IKRAN perlu diperluas dengan pendekatan berbasis klaster nelayan melalui data KUSUKA agar jangkauan peserta lebih tepat sasaran, disertai penguatan materi keselamatan komunikasi maritim guna meminimalkan potensi gangguan frekuensi penerbangan dan layanan keselamatan lainnya.

11. Benchmarking

Tabel 3.31 Benchmarking Persentase Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)

Indikator Kinerja	Balmon Tangerang		Balmon Palembang		Perbandingan Capaian
	Target	Capaian	Target	Capaian	
Persentase Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	100%	100%	100%	100%	0%

Sumber : Aplikasi Janji Kinerja 2025

Dalam hal penyelenggaraan layanan sertifikasi operator radio, baik Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) maupun sertifikasi MOTS-IKRAN, Balmon Palembang berhasil meraih capaian sempurna sebesar 100%. Capaian ini sejajar dengan

Gambar 3.32 Kegiatan Sertifikasi Layanan Operator Radio UNAR



UPT Tangerang yang juga mencatatkan angka 100% terhadap target yang ditetapkan oleh Direktorat Layanan Infrastruktur Digital.

Persamaan capaian 100% antara UPT Palembang dan UPT Tangerang ini membuktikan bahwa kedua UPT memiliki komitmen yang setara dalam standarisasi pelayanan publik berbasis digital (CAT) dan kepatuhan terhadap regulasi. Namun, keberhasilan Balmon Palembang dalam menjaga angka 100% di tengah kendala literasi teknologi masyarakat lokal dan keterbatasan infrastruktur internet di wilayah tertentu memberikan nilai tambah (added value) tersendiri.

Hal ini menegaskan bahwa sistem manajemen pelayanan di Balmon Palembang telah matang dan mampu beradaptasi dengan dinamika kebutuhan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan secara efektif dan akuntabel.

Gambar 3.33 Pelaksanaan Layanan Sertifikasi Operator Radio MOTS



Indikator Kinerja 1-9

Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio

1. Latar Belakang

Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah (Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).

Piutang negara muncul akibat tidak dibayarkannya BHP frekuensi radio sesuai batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Kegiatan penanganan piutang dilaksanakan dengan melakukan penagihan secara langsung terhadap (client) wajib bayar pengguna frekuensi radio.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 bahwa piutang dengan nilai sampai dengan Rp 8. 000.000,- penagihannya diserahkan ke Kementerian/ Lembaga terkait. Sedangkan piutang dengan nilai lebih dari Rp 8. 000.000,- pengurusannya diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Indikator dari kegiatan pelaksanaan penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL yang ditetapkan kepada Balmon Kelas I Palembang pada tahun 2025 sebesar 100%.

Kegiatan pelimpahan piutang ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimana sebagai salah satu

Instansi Pemerintah yang mendapatkan Pemasukan kepada Negara melalui Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital mengeluarkan invoice kepada perusahaan-perusahaan yang menggunakan frekuensi radio untuk mendukung kegiatan usahanya. Piutang ini timbul dari perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo pembayaran dan dikarenakan tidak dibayar, maka menjadi piutang yang harus dilakukan penagihan oleh Pihak Balmon Kelas I Palembang secara langsung kelapangan dan jika piutang tersebut nilainya melebihi dari Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) harus diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kementerian Keuangan.

Adapun dari kegiatan penanganan piutang yang menerima manfaatnya adalah:

- Negara melalui peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang kemudian digunakan untuk pembangunan nasional;
- Masyarakat luas yang dapat menikmati kualitas layanan telekomunikasi yang lebih teratur, terukur dan bebas dari gangguan frekuensi;
- Industri Telekomunikasi dimana terciptanya keadilan dan ketertiban dalam penggunaan sumber daya spektrum frekuensi yang terbatas;
- Pengguna frekuensi (pemegang izin) yang mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap frekuensi yang digunakan setelah memenuhi kewajiban pembayaran.

dengan praktik pengelolaan piutang di berbagai negara yang mengedepankan sistem peringatan dini (early reminder system), pemanfaatan komunikasi digital, serta koordinasi lintas lembaga sebagai strategi utama dalam menekan pertumbuhan piutang negara.

Balmon Palembang mengimplementasikan strategi pencegahan dan pengurangan piutang melalui penyampaian tagihan secara aktif kepada wajib bayar setelah terbitnya Surat Perintah Pembayaran, baik melalui telepon, aplikasi pesan singkat, maupun pengiriman melalui pos. Sepanjang tahun 2025 telah disampaikan sebanyak 959 tagihan BHP, sehingga capaian indikator pencegahan piutang mencapai 100% dari target minimal 80%. Strategi ini sejalan dengan praktik pengelolaan piutang modern yang menekankan pendekatan

preventif melalui komunikasi intensif dan peningkatan kesadaran wajib bayar sebelum piutang masuk dalam kategori bermasalah.

Pada aspek koordinasi penanganan piutang, Balmon Palembang juga menunjukkan kinerja optimal melalui koordinasi rutin dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), termasuk pengumpulan dokumen penghapusan mutlak dan pemenuhan persyaratan Piutang Negara Dapat Ditagih Optimal (PPNTO). Dari total 7 wajib bayar yang ditangani, sebanyak 2 wajib bayar melakukan pelunasan penuh, sementara 5 wajib bayar telah diproses melalui pengumpulan dokumen untuk penyelesaian status hukum. Pendekatan ini mencerminkan praktik tata kelola yang sejalan dengan prinsip good governance, dimana keberhasilan pengelolaan piutang tidak hanya diukur dari nominal pelunasan, tetapi juga dari kepastian penyelesaian administrasi dan hukum.

Keberhasilan capaian kinerja ini didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain penerapan strategi preventif melalui penyampaian tagihan secara aktif, koordinasi intensif dengan KPKNL dalam percepatan penyelesaian piutang, serta konsistensi pelaksanaan monitoring terhadap wajib bayar.

Gambar 3.34 Pelaksanaan Pananganan Piutang BHP Radio



Dengan realisasi capaian sebesar 100%, Balmon Palembang dinilai berhasil menyeimbangkan strategi korektif dan preventif dalam pengelolaan piutang BHP Frekuensi Radio, sehingga mencerminkan tata kelola yang akuntabel, adaptif, dan selaras dengan praktik pengelolaan piutang negara yang efektif di tingkat nasional.

Adapun Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio yang telah dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.32 Pelaksanaan Penanganan Pencegahan dan Pengurangan Piutang BHP Frekuensi

No	Bulan	Target Bulanan	Jumlah Penyampaian Tagihan BHP				Jumlah Penanganan Piutang Dihubungi			"Capaian (%) (Total Piutang dihubungi / Total Target Bulanan)"
			Annual	Renewal	Reminder	Total	Lewat Media	Datang Langsung	Total	
1	Januari	67	44	17	6	67	67	0	67	100%
2	Februari	58	45	6	7	58	58	0	58	100%
3	Maret	45	28	2	14	44	44	0	44	100%
4	April	49	26	10	13	49	49	0	49	100%
5	Mei	66	29	2	35	66	66	0	66	100%
6	Juni	58	20	6	32	58	58	0	58	100%
7	Juli	95	41	16	38	95	95	0	95	100%
8	Agustus	95	41	18	36	95	95	0	95	100%
9	September	93	54	4	35	93	93	0	93	100%
10	Oktober	94	71	4	19	94	94	0	94	100%
11	November	87	50	12	25	87	87	0	87	100%
12	Desember	153	98	3	52	153	153	0	153	100%
Jumlah		960	547	100	312	959	959	0	959	100%

Tabel pelaksanaan penanganan pencegahan dan pengurangan piutang BHP Frekuensi Radio menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang telah melaksanakan penyampaian tagihan dan penanganan piutang secara konsisten setiap bulan dengan capaian sebesar 100% dari target bulanan yang telah ditetapkan. Dari total target bulanan sebanyak 960 tagihan, sebanyak 959 tagihan berhasil disampaikan dan ditindaklanjuti melalui media komunikasi seperti telepon (WhatsApp), dan sarana lainnya atau kunjungan langsung. Jumlah penyampaian tagihan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebanyak 153 tagihan, sedangkan jumlah terendah terjadi pada bulan Maret sebanyak 44 tagihan. Capaian ini menunjukkan

efektivitas strategi pencegahan piutang yang dilakukan melalui komunikasi aktif kepada wajib bayar sehingga mampu menjaga tingkat kepatuhan pembayaran dan meminimalkan potensi timbulnya piutang baru sepanjang tahun berjalan.

► **Tabel 3.33**
Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Piutang dan Pengumpulan Dokumen Penghapusan Mutlak dan PPNTD

Triwulan	Bulan	Jumlah Pelaksanaan	Capaian (%)
1	Januari	0	100%
	Februari	0	
	Maret	1	
2	April	0	100%
	Mei	0	
	Juni	1	
3	Juli	0	100%
	Agustus	0	
	September	1	
4	Oktober	1	100%
	November	0	
	Desember	0	
Total		4	100%

Tabel pelaksanaan koordinasi penanganan piutang dan pengumpulan dokumen penghapusan mutlak serta PPNTD menunjukkan bahwa Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang telah melaksanakan kegiatan koordinasi secara konsisten sepanjang tahun dengan total pelaksanaan sebanyak 4 kegiatan dan capaian sebesar 100%. Kegiatan koordinasi tersebut dilaksanakan secara periodik pada setiap triwulan sebagai bagian dari upaya memastikan penyelesaian administrasi dan status hukum piutang dilakukan secara tertib, akuntabel, dan sesuai regulasi yang berlaku.

3. Target dan Realisasi Jangka Menengah (2021-2025)

2021			2022			2023			2024			2025		
T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	%
100	100	100	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Keterangan :
T = Target
C = Capaian
% = Persentase Capaian

4. Kendala dan Solusi

Faktor kendala/hambatan dalam pelimpahan dan penanganan piutang pada umumnya bersumber dari faktor internal (lemahnya pengawasan, administrasi dan sistem) serta faktor eksternal (kondisi pelanggan). Hambatan utama meliputi sulitnya komunikasi dengan pelanggan, pelanggan pailit/tidak mampu membayar, dan kelengkapan dokumen wajib bayar yang berpiutang.

Sebagai upaya mengatasi kendala dalam pelimpahan dan penanganan piutang tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang menerapkan sejumlah langkah strategis, antara lain penguatan pengawasan dan tertib administrasi melalui pemutakhiran data wajib bayar serta peningkatan akurasi dan kelengkapan dokumen sejak awal penerbitan tagihan. Selain itu, optimalisasi sistem penagihan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai kanal komunikasi seperti telepon, aplikasi pesan singkat, dan surat resmi guna meningkatkan keterjangkauan kepada pelanggan. Terhadap pelanggan yang mengalami

pailit atau tidak mampu membayar, dilakukan koordinasi intensif dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk penetapan langkah hukum yang tepat, termasuk penghapusan mutlak atau mekanisme Piutang Negara Dapat Ditagih Optimal (PPNTD), sehingga proses penanganan piutang tetap berjalan sesuai ketentuan dan berorientasi pada kepastian hukum serta akuntabilitas pengelolaan piutang negara.

5. Strategi Keberhasilan/Inovasi

Melakukan pemetaan data piutang dan klasifikasi Wajib Bayar berdasarkan besaran tunggakan serta koordinasi intensif dengan KPKNL dan/atau Pemerintah setempat dengan turun langsung lapangan untuk melacak keberadaan wajib bayar.

6. Implementasi BerAKHLAK

Pada tahun 2025 Balmon Kelas I Palembang dalam upaya untuk menyelesaikan masalah penanganan piutang dan Koordinasi ke KPKNL Palembang dan Lahat telah

mengimplementasikan budaya nilai berakhlak dengan cara sebagai berikut :

- Berorientasi Pelayanan, Kegiatan pelaksanaan penanganan piutang dan Koordinasi Ke KPKNL ini dilakukan dengan tujuan agar pelayanan yang diberikan adalah pelayanan prima dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan keterbukaan kepada para pengguna frekuensi radio.
- Akuntabel, Dalam melakukan kegiatan penanganan piutang dan Koordinasi Ke KPKNL ini petugas yang diberikan amanat dapat bertanggungjawabkan hasil kerjanya.
- Kompeten, Jika ada aturan baru terkait dengan kegiatan ini, maka petugas dapat segera menyesuaikan diri dan dapat mengembangkan dan memberikan informasi baru tersebut kepada rekan-rekan yang lainnya.
- Harmoni, Dapat bekerjasama dengan rekan-rekan dalam satu tim tanpa membedakan status sosial dan berani menghargai perbedaan diantara rekan-rekan satu tim lainnya.
- Loyal, Bekerja secara profesional dengan tujuan bukan untuk kepentingan tim, melainkan untuk keberhasilan Balmon Kelsa I Palembang secara keseluruhan.
- Adaptif, Selalu berusaha untuk terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan
- Kolaboratif, Selalu berusaha bekerjasama dengan tim lain dengan cara sinergis untuk mencapai hasil yang memuaskan untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu Balmon Kelas I Palembang.

7. Dampak

Dampak penanganan dan pelimpahan piutang kepada masyarakat adalah mencakup kepastian hukum, perbaikan disiplin finansial dan potensi pemulihan aset negara. Jika hal ini dikelola dengan baik, maka dapat menertibkan keuangan, namun jika tidak dapat meningkatkan beban finansial individu atau entitas.

8. Efisiensi

Dalam mencapai target yang telah ditetapkan harus ada langkah-langkah efisiensi yang harus dilakukan agar target tepat sasaran dimana langkah-langkah efisiensi yang harus dilakukan meliputi :

- Optimalisasi Data dan Dokumen dimana langkah ini untuk memastikan bahwa data piutang adalah data yang akurat dan lengkap agar tidak tertolak oleh sistim KPKNL (khusus untuk piutang yang nilainya diatas Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);

- Penyusunan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN), yaitu menyiapkan berkas fisik dan dokumen pendukung secara sistimatis dan patuh hukum untuk mempercepat proses Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N);
- Peningkatan Efektifitas Penagihan;
- Efisiensi Anggaran dan Administrasi, yaitu dengan melakukan digitalisasi administrasi dengan cara mengurangi korespondensi fisik dan beralih ke sistim elektronik dalam pemantauan (monitoring) piutang;
- Melakukan revisi anggaran yang tepat, yaitu melakukan revisi anggaran untuk perjalanan dinas penagihan secara efisien dan berbasis resiko untuk debitur yang mampu bayar piutangnya.

9. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Adapun tindak lanjut dari pemanfaatan laporan kinerja pelimpahan dan penanganan piutang adalah melakukan analisis capaian, evaluasi kendala, dan perumusan strategi perbaikan.

Laporan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, seperti optimalisasi penagihan, penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP) dan peningkatan penagihan piutang negara.

10. Rekomendasi Tindak Lanjut Tahun 2026

Sebagai rekomendasi tindak lanjut tahun 2026, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang perlu memperkuat pengelolaan piutang BHP Frekuensi Radio melalui peningkatan akurasi data dengan rekonsiliasi berkala dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Selain itu, perlu ditetapkan SOP internal yang lebih terstruktur untuk mempercepat penyelesaian dan kelengkapan dokumen pelimpahan, disertai koordinasi proaktif guna memonitor perkembangan penanganan piutang yang telah dilimpahkan. Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan teknis manajemen piutang negara agar proses penagihan dan penyelesaian piutang dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan tepat waktu.

11. Benchmarking

Tabel 3.34
Benchmarking Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio

Indikator Kinerja	Balmon Tangerang		Balmon Palembang		Perbandingan Capaian
	Target	Capaian	Target	Capaian	
Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%	100%	100%	100%	0%

Sumber : Aplikasi Janji Kinerja 2025

Dalam indikator pelaksanaan penanganan piutang BHP Frekuensi Radio, Balmon Kelas I Palembang mencatatkan capaian sebesar 100%, setara dengan Balmon Tangerang yang juga mencapai 100%. Kesamaan nilai ini menunjukkan bahwa kedua UPT memiliki kepatuhan regulasi dan standar koordinasi yang sangat tinggi dalam mengamankan penerimaan negara.

Meskipun secara angka keduanya identik, Balmon Palembang menunjukkan keunggulan pada aspek mitigasi preventif. Melalui pengiriman 959 tagihan pengingat

secara masif (via telepon, WhatsApp, dan pos), Balmon Palembang berhasil menekan potensi munculnya piutang baru sebelum jatuh tempo.

Keberhasilan dalam menuntaskan status hukum 7 wajib bayar melalui koordinasi berkala dengan KPKNL membuktikan bahwa proses birokrasi di Palembang berjalan sangat efisien. Capaian ini menegaskan posisi Balmon Palembang sebagai unit kerja dengan manajemen risiko piutang yang sehat dan akuntabel.

Indikator Kinerja 1-10

Sosialisasi Pelayanan Publik

1. Latar Belakang

Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik bertujuan untuk memberikan edukasi tentang regulasi penggunaan spektrum frekuensi radio agar tidak terjadi interferensi antara pengguna sehingga masyarakat mendapatkan jaminan kenyamanan akses komunikasi. Lebih lanjut, instansi pemerintah, perusahaan swasta, sektor pertahanan dan keamanan, sektor UMKM juga memanfaatkan konektivitas untuk kegiatan ekonomi. dengan demikian penyebaran informasi penggunaan frekuensi radio perlu dilakukan untuk terciptanya terbit frekuensi sehingga komunikasi menjadi lancar.

Pada tahun 2025 sehubungan dengan perkembangan teknologi dan perubahan regulasi di bidang penggunaan frekuensi radio dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 yang mengatur tentang pengenaan denda administratif terhadap pelanggaran penggunaan frekuensi radio, maka Balmon Kelas I Palembang melakukan sosialisasi terkait peraturan baru tersebut. Target sosialisasi pelayanan publik adalah para pengguna frekuensi radio yang berasal dari para pengguna frekuensi radio Konsensi, Seluler, Broadcasting, dan Amatir.

Adapun penerima manfaat dari kegiatan sosialisasi pelayanan publik ini adalah pelaku usaha penyiaran, pengguna layanan seluler, instansi pengguna radio komunikasi (maritim dan penerbangan), amatir radio dan pengguna

Gambar 3.35
Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik



HT yang mendapatkan kemudahan prosedur, legalitas dan transparansi layanan.

Sosialisasi pelayanan publik juga memastikan penggunaan spektrum frekuensi radio teratur dan sesuai peraturan. Selain kegiatan sosialisasi pelayanan publik dengan mengundang para pengguna frekuensi, Balmon Kelas I Palembang juga melakukan kegiatan sosialisasi Bimtek E-Licensing, dengan mendatangi pengguna frekuensi radio secara langsung (on the spot).

2. Analisa Capaian Kinerja 2025

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	100%

Sumber: Aplikasi APSTARD (<https://apstard.postel.go.id/>) dan Aplikasi New Rol (<https://rol.postel.go.id/>)

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang melaksanakan sosialisasi pelayanan publik sebagai bagian dari komitmen dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan penggunaan frekuensi radio. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 September 2025 di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan salah satu wilayah dengan tingkat penggunaan layanan frekuensi radio tertinggi di Indonesia.

Secara nasional, peningkatan kebutuhan layanan frekuensi radio sejalan dengan tren global, dimana berbagai negara juga menempatkan sosialisasi dan edukasi publik sebagai instrumen penting dalam menjaga keteraturan pemanfaatan spektrum frekuensi yang bersifat terbatas. Negara-negara dengan tata kelola spektrum yang baik umumnya mengedepankan pendekatan preventif melalui peningkatan literasi pengguna, transparansi layanan, serta kemudahan akses informasi perizinan dan pengawasan.

Target kinerja sosialisasi pelayanan publik tahun 2025 ditetapkan sebesar 100% dengan kriteria minimal satu kali pelaksanaan dalam satu tahun dan jumlah peserta paling sedikit 30 orang. Balmon Kelas I Palembang berhasil mencapai target tersebut dengan realisasi pelaksanaan satu kali kegiatan sosialisasi dan tingkat partisipasi sebanyak 93 orang peserta, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 100%. Capaian ini berada di atas standar minimal yang ditetapkan dan mencerminkan efektivitas strategi penyebaran informasi yang diterapkan. Jika dibandingkan dengan praktik di tingkat regional dan internasional, pendekatan sosialisasi langsung (tatap muka) yang dikombinasikan dengan penyampaian materi teknis dan regulasi terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman serta kepatuhan pengguna frekuensi radio.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan, Balmon Kelas I Palembang juga melaksanakan survei kepuasan masyarakat pada kegiatan sosialisasi tersebut untuk mengukur persepsi pengguna terhadap pelayanan publik yang diberikan. Hasil survei ini digunakan sebagai dasar evaluasi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan pengawasan frekuensi radio. Analisa kinerja pelayanan publik difokuskan pada efektivitas layanan melalui indikator *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, dan *empathy*, yang diukur dari kecepatan pelayanan, kepatuhan terhadap prosedur, tingkat kepuasan pengguna, serta optimalisasi sarana pengawasan.

Keberhasilan pencapaian target ini didukung oleh strategi pemilihan lokasi sosialisasi yang tepat, pendekatan

komunikatif kepada pemangku kepentingan, serta komitmen organisasi dalam menerapkan prinsip pelayanan publik yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Adapun Sosialisasi Pelayanan Publik yang telah dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.35
Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik

No	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Nilai Sosialisasi
1	Dilaksanakan minimal 1 x secara tatap muka /online	Kegiatan Sosialisasi telah dilaksanakan pada tanggal 25 September 2025 di Kabupaten Lahat	100%	100%
2	Minimal 30 Peserta	93 Peserta	100%	100%

Tabel pelaksanaan sosialisasi pelayanan publik menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan sesuai dengan target perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, yaitu minimal satu kali pelaksanaan dalam setahun dan jumlah peserta minimal 30 orang. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2025 di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, diikuti oleh 93 peserta yang berasal dari pemerintah daerah, perusahaan, dan radio amatir. Dengan demikian, capaian pelaksanaan kegiatan mencapai 100% dan nilai sosialisasi juga tercapai sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa kegiatan telah terlaksana secara efektif dalam mendukung penyebaran informasi pelayanan publik di bidang frekuensi radio.

Gambar 3.36
Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik



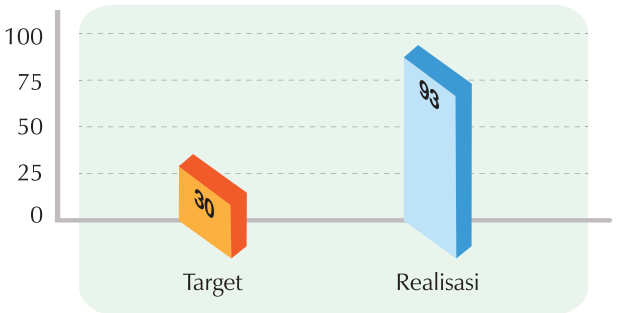
Tabel 3.36
Kegiatan Bimtek E-Licensing

No.	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi	Keterangan
1	19 - 21 Februari 2025	Kabupaten Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir	Melakukan Bimbingan Teknis, tata cara pengurusan izin, dan Sosialisasi PP 43 Tahun 2023 kepada 12 pengguna
2	22-23 April 2025	Kota Palembang	Melakukan Bimbingan Teknis, tata cara pengurusan izin, dan Sosialisasi PP 43 Tahun 2023 kepada 6 pengguna
3	24- 27 April 2025	Kota Palembang	Melakukan Bimbingan Teknis, tata cara pengurusan izin, dan Sosialisasi PP 43 Tahun 2023 kepada 21 pengguna
4	29 - 30 Juli 2025	Kota Palembang	Melakukan Bimbingan Teknis, tata cara pengurusan izin, dan Sosialisasi PP 43 Tahun 2023 kepada 8 pengguna
5	26 -28 Agustus 2025	Kab. Muara Enim	Melakukan Bimbingan Teknis, tata cara pengurusan izin, dan Sosialisasi PP 43 Tahun 2023 kepada 12 pengguna
6	25-Sep-25	Kabupaten Lahat	Melaksanakan Sosialisasi Pelayanan Publik dan PP 43 Tahun 2023 dihadiri oleh 93 peserta
7	25 - 28 November 2025	Kota Palembang	Melakukan Bimbingan Teknis, tata cara pengurusan izin, dan Sosialisasi PP 43 Tahun 2023 kepada 12 pengguna
8	02 - 04 Desember 2025	Kabupaten Lahat	Melakukan Bimbingan Teknis, tata cara pengurusan izin, dan Sosialisasi PP 43 Tahun 2023 kepada 9 pengguna

Sumber: Lapoan Hasil Pelaksanaan Tugas

Tabel kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) E-Licensing menunjukkan bahwa Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang telah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis secara berkelanjutan sepanjang tahun 2025 di beberapa wilayah, yaitu Kabupaten Ogan Ilir, Kota Palembang, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Lahat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengguna layanan terkait tata cara pengurusan izin serta sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023. Selain itu, Bimtek E-Licensing merupakan bagian dari upaya strategis Balmon Palembang dalam menyebarluaskan informasi di bidang frekuensi radio kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, meminimalkan kesalahan dalam proses perizinan, serta mendukung tertib pemanfaatan spektrum frekuensi radio.

Grafik 3.21
Target dan Realisasi Peserta Sosialisasi Pelayanan Publik



Grafik target dan realisasi peserta sosialisasi pelayanan publik menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah melampaui target yang ditetapkan. Dari target peserta sebanyak 30 orang, realisasi yang dicapai mencapai 93 peserta, sehingga menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang sangat tinggi terhadap kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan sosialisasi dalam menyebarluaskan informasi layanan frekuensi radio serta meningkatnya kesadaran dan antusiasme masyarakat terhadap pemahaman regulasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio.

Gambar 3.37
Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik



3. Target dan Realisasi Jangka Menengah (2021-2025)

2021			2022			2023			2024			2025		
T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	%
80	129	161	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Keterangan :
T = Target
C = Capaian
% = Persentase Capaian

4. Kendala dan Solusi

Kendala/hambatan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan terkait Kendala dalam pencapaian target pelayanan publik pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang antara lain keterbatasan sumber daya, baik dari sisi anggaran maupun dukungan teknologi, yang berdampak pada optimalisasi kinerja monitoring dan pelayanan. Selain itu, rendahnya tingkat kepatuhan serta kesadaran sebagian masyarakat pengguna frekuensi radio terhadap kewajiban memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) juga menjadi tantangan tersendiri. Luasnya wilayah kerja yang mencakup 17 kabupaten/kota dengan jumlah personel terbatas turut memengaruhi efektivitas pengawasan dan pelayanan. Faktor peningkatan kompetensi, keterampilan, serta motivasi SDM juga masih perlu diperkuat, disertai evaluasi terhadap sistem dan prosedur kerja agar lebih adaptif dan efisien. Dalam menghadapi hambatan tersebut, berbagai upaya terus dilakukan melalui sosialisasi langsung, pelaksanaan Bimtek E-Licensing, serta pendekatan door to door kepada pengguna frekuensi radio guna meningkatkan pemahaman, kepatuhan, dan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

5. Strategi Keberhasilan/Inovasi

Melalui program Bimtek E-Licensing dengan cara mendatangi secara langsung pengguna frekuensi radio (door to door) dan pemanfaatan media sosial dalam penyebaran informasi dapat memberikan edukasi kepada masyarakat yang lebih luas. Selain itu melakukan penyebaran informasi dan edukasi melalui media sosial.

6. Dampak

Dampak yang diterima oleh secara umum dari pelayanan publik yang diberikan oleh Balmon Kelas I Palembang yang telah dilakukan adalah terjaminnya kenyamanan komunikasi dimana dapat meminimalisir interferensi (gangguan) pada frekuensi radio, sehingga layanan radio, televisi, dan komunikasi darurat berjalan lancar, legalitas penggunaan frekuensi dan optimalisasi infrastruktur digital bagi masyarakat.

Gambar 3.38
Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik



Dampak utama lainnya adalah berkurangnya gangguan frekuensi radio, kepastian hukum penggunaan spektrum frekuensi serta peningkatan kualitas layanan telekomunikasi.

7. Implementasi BerAKHLAK

Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi pelayanan publik dan survey kepuasan masyarakat yang telah dilakukan Balmon Kelas I Palembang telah mengimplementasikan core values bearkhlak yang meliputi nilai-nilai sebagai berikut:

- Berorientasi Pelayanan, Kegiatan ini adalah kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa puas atas pelayanan yang diberikan.
- Akuntabel, Setiap informasi yang diberikan oleh narasumber dalam kegiatan ini adalah informasi yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan bersumber dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.
- Kompeten, Narasumber yang dihadirkan adalah narasumber sesuai dengan bidang keahliannya dan selalu berusaha untuk mempelajari aturan-aturan terbaru terkait dengan penggunaan frekuensi radio.
- Harmoni, Saling peduli dan menghargai setiap perbedaan yang ada.

Gambar 3.39
Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik



- e. Loyal, Bekerja secara profesional dengan tujuan bukan untuk kepentingan tim, melainkan untuk keberhasilan Balmon Kelas I Palembang secara keseluruhan.
- f. Adaptif, Selalu berusaha untuk terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan
- g. Kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis dengan dinas-dinas terkait dan pengguna frekuensi radio agar tujuan tertib penggunaan frekuensi dapat tercapai.

8. Efisiensi

- Adapun efisiensi yang harus dilakukan agar target yang diharapkan dapat tercapai adalah dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Peningkatan Kualitas Layanan dengan cara menyusun standar pelayanan untuk menjamin konsistensi, transparansi, dan efisiensi waktu serta mempermudah akses informasi bagi pengguna spektrum frekuensi radio;
 - b. Penggunaan Teknologi, optimalisasi layanan melalui pemanfaatan QR Code;
 - c. Kepatuhan Integritas, selain efisien, layanan dipastikan bebas dari praktik korupsi, gratifikasi, pungli yang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengawasan spektrum frekuensi radio.

9. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Tindak lanjut pemanfaatan laporan kinerja Balmon Kelas I Palembang dalam pelayanan publik adalah difokuskan pada peningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan pengawasan spektrum, seperti penertiban alat tidak bersertifikat dan penguatan tata kelola birokrasi.

- Bentuk tindak lanjut dari pemanfaatan laporan kinerja Balmon kelas I Palembang meliputi :
- a. Peningkatan Kualitas Pengawasan;
 - b. Optimalisasi Tata Kelola (SAKIP), laporan digunakan untuk mengevaluasi perencanaan dan capaian kinerja, memastikan pelayanan publik beroperasi secara efektif dan efisien;
 - c. Melakukan Evaluasi Pelayanan dimana hal ini dimaksudkan untuk mengukur indikator responsivitas dan kepastian layanan, memastikan tindak lanjut atas kendala yang dihadapi dilapangan

10. Rekomendasi Tindak Lanjut Tahun 2026

Dengan memperhatikan target yang sudah dicapai pada tahun 2025 dan target yang akan dicapai pada tahun 2026, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Balmon Kelas I Palembang terkait pelayanan publik adalah lebih berfokus pada penguatan pengawasan frekuensi illegal, optimalisasi teknologi digital, serta peningkatan respon layanan.

Langkah strategis yang harus dilakukan meliputi peningkatan intensitas penertiban frekuensi yang tidak sesuai izin ISR, sosialisasi secara terus menerus dan mempercepat penanganan gangguan yang masuk melalui aplikasi trouble ticket serta melakukan kegiatan pengujian alat telekomunikasi

11. Benchmarking

Tabel 3.37
Benchmarking Sosialisasi Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Balmon Tangerang		Balmon Palembang		Perbandingan Capaian
	Target	Capaian	Target	Capaian	
Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	0%

Sumber : Aplikasi Janji Kinerja 2025

Dalam rangka menjaga akuntabilitas kinerja, Balmon Kelas I Palembang melakukan *benchmarking* dengan Balmon Kelas I Tangerang. Kedua instansi menunjukkan performa yang setara secara kuantitatif dengan keberhasilan mencapai target realisasi 100% dan pemenuhan kriteria pelaksanaan sosialisasi sesuai standar yang ditetapkan. Lebih lanjut, instrumen survei kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur evaluasi untuk memastikan kualitas pelayanan publik tetap terjaga.

Namun, Balmon Kelas I Palembang memiliki keunggulan strategis melalui integrasi program Bimtek e-Licensing di dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Jika UPT pembanding berfokus pada diseminasi informasi pelayanan secara umum, Balmon Palembang melangkah lebih jauh dengan memberikan pendampingan teknis langsung terkait sistem perizinan. Penambahan program bimtek ini memberikan nilai tambah pada aspek *Reliability* dan *Responsiveness*, karena masyarakat tidak hanya terpapar informasi, tetapi juga memiliki kemampuan praktis dalam mengakses layanan perizinan secara mandiri dan akurat.

Indikator Kinerja 1-11

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)

1. Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik prima dan transparan. Sebagai instrumen evaluasi atas komitmen tersebut, Balmon Kelas I Palembang menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala.

Survei ini berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memotret persepsi masyarakat serta mengukur efektivitas layanan yang telah diberikan. Hasil dari survei ini tidak hanya menjadi tolak ukur capaian kinerja, namun juga menjadi basis data krusial dalam melakukan evaluasi mendalam serta perbaikan berkelanjutan demi meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarkat (pengguna frekuensi radio) di wilayah kerja Sumatera Selatan.

Penerima manfaat dari pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini meliputi para pemegang Izin Stasiun Radio (ISR), penyelenggara telekomunikasi, lembaga penyiaran, instansi pemerintah, badan usaha, serta masyarakat umum yang memanfaatkan layanan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio. Selain itu, hasil survei juga memberikan manfaat internal bagi Balmon Kelas I Palembang sebagai dasar pengambilan kebijakan, penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP), peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan sistem pelayanan publik secara menyeluruh.



2. Analisa Capaian Kinerja 2025

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%	100%

Sumber: Aplikasi APSTARD (<https://apstard.postel.go.id/>) dan Aplikasi New Rol (<https://rol.postel.go.id/>)

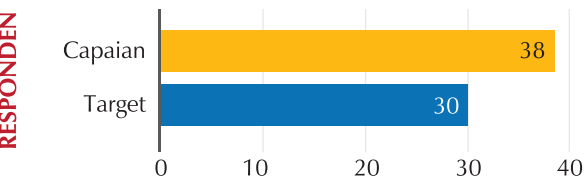
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang secara konsisten melaksanakan Survei Kepuasan Pelayanan Publik melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) sesuai Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017. Pada tahun pelaporan, jumlah responden yang berpartisipasi sebanyak 38 responden, melampaui target minimal 30 responden.

Berdasarkan hasil survei, Balmon Kelas I Palembang memperoleh nilai indeks sebesar 3,78 (skala 4) dengan capaian kinerja sebesar 100%, yang menunjukkan kualitas pelayanan berada pada kategori sangat baik. Secara nasional, nilai IKM/IPKP instansi pemerintah umumnya berada pada rentang nilai tinggi, sehingga capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Balmon Kelas I Palembang telah sejalan dengan standar pelayanan publik nasional serta mencerminkan konsistensi dalam penyelenggaraan pelayanan yang transparan dan akuntabel.

Survei ini tidak hanya menjadi pemenuhan persyaratan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan standar minimum 3,2, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi untuk mengidentifikasi kualitas layanan pada sembilan unsur pelayanan, meliputi persyaratan, sistem dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi dan perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, serta sarana dan prasarana.

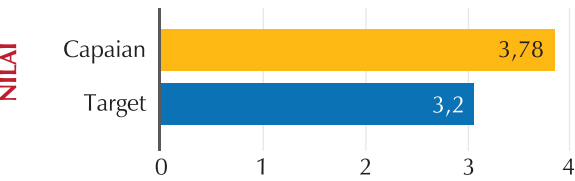
Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh strategi peningkatan transparansi biaya, penguatan kompetensi dan perilaku pelayanan petugas, serta pemanfaatan hasil survei sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Ke depan, hasil IKM dan IPKP akan terus dimanfaatkan sebagai dasar peningkatan sistem layanan dan sarana prasarana guna memastikan pelayanan publik yang semakin akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Grafik 3.22 Responden Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)



Grafik responden pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) menunjukkan bahwa Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang berhasil melaksanakan survei dengan capaian melampaui target yang ditetapkan. Dari target minimal 30 responden, realisasi survei mencapai 38 responden, yang mencerminkan tingginya partisipasi pengguna layanan serta komitmen instansi dalam menghimpun umpan balik masyarakat secara memadai sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Grafik 3.23 Capaian Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)



Grafik capaian pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang menunjukkan bahwa berhasil melaksanakan survei dengan capaian telah melampaui target yang ditetapkan. Nilai indeks yang diperoleh sebesar 3,78 (skala 4) berada di atas standar minimum sebesar 3,2, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan berada pada kategori sangat baik serta mencerminkan keberhasilan instansi dalam menjaga mutu pelayanan yang akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Gambar 3.40 Pelaksanaan Survei IKM



3. Target dan Realisasi Jangka Menengah (2021-2025)

2021			2022			2023			2024			2025		
T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100

Keterangan :
T = Target
C = Capaian
% = Persentase Capaian

4. Kendala dan Solusi

Survei kepuasan masyarakat di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang masih menghadapi beberapa tantangan teknis, di antaranya adalah mekanisme pengambilan data yang bersifat periodik tahunan sehingga belum mampu memotret dinamika kepuasan publik secara menyeluruh. Meskipun jumlah responden telah melampaui ambang batas minimal, basis sampling yang masih terfokus pada peserta kegiatan sosialisasi publik menyebabkan belum terserapnya aspirasi pengguna layanan secara merata.

Menyikapi kendala tersebut, langkah strategis melalui transformasi sistem survei menjadi lebih digital dan berkelanjutan. Strategi utama yang diambil adalah berkolaborasi dengan Direktorat Pelayanan Infrastruktur Digital berbasis QR Code di setiap titik layanan dan produk perizinan, guna memastikan pengumpulan data berjalan secara kontinyu sepanjang tahun tanpa bergantung pada agenda sosialisasi tertentu. Melalui perluasan jangkauan sampling dan evaluasi berkala setiap triwulan, organisasi berkomitmen untuk menjadikan setiap masukan masyarakat sebagai dasar perbaikan prosedur dan sarana prasarana yang lebih responsif. Upaya ini dilakukan demi menjaga konsistensi nilai IKM yang telah mencapai predikat sangat baik dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan prima sesuai dengan standar pembangunan Zona Integritas.



5. Strategi Keberhasilan/Inovasi

Strategi utama Balmon Kelas I Palembang dalam menjaga kualitas pelayanan adalah melalui transformasi digital dan kolaborasi strategis. Dengan menggandeng Direktorat Pelayanan Infrastruktur Digital, organisasi mengimplementasikan sistem survei berbasis QR Code pada setiap titik layanan dan produk perizinan. Langkah ini memungkinkan pengumpulan data kepuasan masyarakat dilakukan secara kontinyu sepanjang tahun, sehingga hasil evaluasi tidak lagi bersifat statis namun lebih dinamis dan akurat.

6. Dampak

Pencapaian target Survei Kepuasan Masyarakat dengan nilai 3,78 memberikan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para pengguna spektrum frekuensi radio di Sumatera Selatan. Dampak utama yang dihasilkan adalah meningkatnya kepastian layanan, di mana masyarakat kini mendapatkan prosedur pelayanan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari biaya tidak resmi (pungli).

Selain itu, dampak langsung lainnya adalah peningkatan kualitas responsivitas petugas. Dengan adanya survei yang terukur, setiap masukan masyarakat direspons dengan perbaikan sarana dan prasarana serta peningkatan kompetensi pelaksana, sehingga hambatan teknis dalam pelayanan dapat diminimalisir. Secara luas, hal ini berkontribusi pada terciptanya ekosistem penggunaan frekuensi radio yang lebih tertib dan kondusif, karena masyarakat merasa didengar dan dilayani dengan standar kualitas yang prima.

7. Implementasi BerAKHLAK

Implementasi nilai budaya BerAKHLAK dalam kegiatan pelaksanaan survei pelayanan publik dilakukan melalui beberapa cara:

- Berorientasi Pelayanan, survei kepuasan pelayanan publik sebagai bahan untuk melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Akuntabel, menjamin integritas survei dengan memastikan seluruh data dikelola secara jujur dan transparan.



11. Benchmarking

Tabel 3.38
Benchmarking Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Balmon Tangerang		Balmon Palembang		Perbandingan Capaian
	Target	Capaian	Target	Capaian	
Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	0%

Sumber : Aplikasi Janji Kinerja 2025

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang dan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas Tangerang menunjukkan performa setara dengan keberhasilan mencapai target pelaksanaan survei sebesar 100%.

Capaian ini membuktikan komitmen kedua UPT dalam mematuhi standar evaluasi pelayanan publik secara tuntas dan akuntabel. Meskipun secara kuantitatif sama, Balmon Palembang unggul dalam efisiensi melalui integrasi survei pada kegiatan sosialisasi publik yang menjangkau masyarakat secara langsung.

Hasil perbandingan ini menegaskan bahwa target 100% dapat dicapai melalui pendekatan yang adaptif terhadap karakteristik wilayah masing-masing. Keberhasilan ini menjadi landasan untuk terus mempertahankan nilai IKM pada predikat “Sangat Baik” sekaligus memperkuat infrastruktur digital guna memastikan sistem survei yang lebih berkelanjutan dan responsif terhadap seluruh pengguna layanan spektrum frekuensi radio.

Indikator Kinerja 1-12

Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)

1. Latar Belakang

Penetapan indikator Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP) atau Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan manifestasi komitmen Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sebagai unit pelaksana teknis pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi radio, Balmon Palembang memandang penting pengukuran integritas secara periodik untuk memastikan seluruh layanan mulai sistensi perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi perangkat, hingga pengawasan dan pengendalian di lapangan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional.

Penerima manfaat dari pencapaian indikator integritas ini sangat luas mulai dari pelaku usaha dan operator telekomunikasi untuk mendapatkan kepastian hukum serta layanan yang adil tanpa biaya tambahan tidak resmi, hingga instansi pemerintah dan lembaga penyiaran yang menggunakan frekuensi untuk kepentingan publik.

Selain itu, masyarakat luas turut menjadi penerima manfaat tidak langsung melalui terciptanya ekosistem komunikasi yang sehat dan bebas gangguan, yang mendukung kelancaran layanan digital, sektor kesehatan dan pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi UMKM berbasis konektivitas.

Dengan tercapainya indeks integritas yang tinggi, Balmon Palembang tidak hanya memastikan optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara bersih, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap kedaulatan digital dan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang tertib dan berintegritas.



- c. Kompeten, Petugas pelaksana survei di Balmon Kelas I Palembang dibekali dengan kompetensi teknis dan literasi digital dalam pemanfaatan alat survei berbasis teknologi.
- d. Harmoni, memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam memberikan penilaian tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun tingkat pendidikan.
- e. Loyal, Bekerja secara profesional dengan tujuan bukan untuk kepentingan tim, melainkan untuk keberhasilan Balmon Kelas I Palembang secara keseluruhan.
- f. Adaptif, penggunaan produk digital (Qrcode) dalam pelaksanaan survei dan penyebaran informasi melalui media sosial.
- g. Kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis dengan instansi pusat dalam pelaksanaan survei.

8. Efisiensi

Secara kuantitatif, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat tahun ini menunjukkan tingkat efisiensi sumber daya yang sangat tinggi melalui strategi integrasi kegiatan dengan analisis efisiensi dengan mengintegrasikan pengambilan data survei dalam agenda sosialisasi pelayanan publik Balmon Kelas I Palembang berhasil menekan biaya operasional survei hingga 0% (nol rupiah) dari anggaran khusus survei. Hal ini dikarenakan biaya perjalanan dinas, sewa tempat, dan konsumsi sudah melekat pada anggaran kegiatan utama, sehingga tidak diperlukan alokasi anggaran tambahan untuk pengumpulan data.

9. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Tindak lanjut laporan kinerja dari survey kepuasan pelayanan publik (IKM/IPKP) fokus pada peningkatan kecepatan pelayanan, optimalisasi sarana prasarana dan perbaikan materi berdasarkan masukan peserta. Langkah konkrit yang dapat dilakukan oleh Balmon Kelas I Palembang adalah melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP), perbaikan prosedur agar lebih efisien, serta peningkatan sarana prasarana untuk aksesibilitas yang lebih baik.

10. Rekomendasi Tindak Lanjut Tahun 2026

Dalam rangka meningkatkan hasil Survei Kepuasan Pelayanan Publik pada tahun berikutnya, diperlukan langkah perbaikan yang terarah dan berkelanjutan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain fokus terhadap kualitas layanan, peningkatan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan, serta penerapan digitalisasi survei guna memperoleh hasil yang lebih akurat dan terukur. Evaluasi juga diprioritaskan pada tiga unsur dengan nilai terendah sebagai dasar perbaikan yang lebih spesifik dan berdampak langsung. Selain itu, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terhadap persepsi masyarakat, akan dilakukan penambahan periode pelaksanaan survei sehingga data yang diperoleh lebih representatif dan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat.

2. Analisa Capaian Kinerja 2025

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik	100%	100%

Sumber: Aplikasi APSTARD (<https://apstard.postel.go.id/>) dan Aplikasi New Rol (<https://rol.postel.go.id/>)

Pada tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang mencatatkan capaian kinerja indikator integritas yang sangat baik. Realisasi nilai indeks integritas pelayanan publik mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Dari sisi partisipasi responden, jumlah responden survei tercatat sebanyak 38 responden, melampaui target minimal 30 responden, dengan cakupan layanan yang dinilai meliputi Izin Stasiun Radio (ISR), Surat Operasi Radio (SOR), dan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi (SAPT). Selain itu, target nilai minimal indeks sebesar 3,2 (skala 4) juga berhasil dilampaui dengan capaian nilai sebesar 3,72. Pencapaian ini mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan Reformasi Birokrasi serta keseriusan unit kerja dalam membangun dan memperkuat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

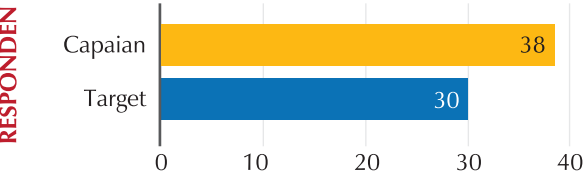
Secara nasional, penguatan indeks integritas dan kualitas tata kelola pelayanan publik di Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif seiring dengan peningkatan standar evaluasi yang diterapkan oleh Kementerian PANRB. Dibandingkan dengan praktik di kawasan regional dan internasional, negara-negara dengan birokrasi yang telah matang umumnya menempatkan transparansi layanan, kepastian prosedur, serta pengendalian diskresi petugas sebagai faktor kunci dalam menjaga integritas sektor publik. Dalam konteks tersebut, capaian Balmon Kelas I Palembang menunjukkan keselarasan dengan arah kebijakan nasional, khususnya dalam upaya meminimalkan potensi penyimpangan melalui sistem pelayanan yang terstandar dan terukur.

Pemanfaatan teknologi digital dan penguatan mekanisme akuntabilitas menjadi instrumen utama dalam meningkatkan

persepsi integritas. Sejalan dengan praktik tersebut, Balmon Kelas I Palembang telah mengadopsi sistem pelayanan berbasis daring untuk layanan perizinan dan administrasi spektrum frekuensi. Digitalisasi layanan ini berperan penting dalam mengurangi interaksi tatap muka langsung, meningkatkan transparansi proses, serta memberikan kepastian waktu dan biaya layanan kepada pengguna.

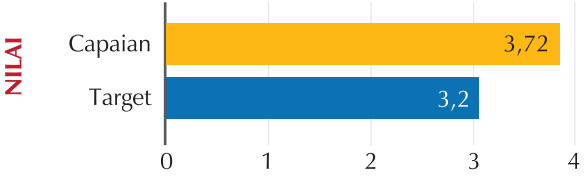
Keberhasilan pencapaian target indikator survei integritas pelayanan publik ini juga didukung oleh sejumlah faktor strategis, antara lain penguatan kanal pengaduan masyarakat yang mudah diakses, pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai antikorupsi secara berkelanjutan kepada pengguna layanan dan pegawai, serta konsistensi penerapan standar operasional prosedur. Upaya tersebut secara kumulatif membentuk budaya kerja yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pemantauan dan perizinan spektrum frekuensi di wilayah Sumatera Selatan. Dengan demikian, capaian ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan pemenuhan target kinerja, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas layanan komunikasi dan ekosistem digital yang berintegritas dan berkelanjutan.

Grafik 3.24
Capaian Responden Survei Pelaksanaan Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)



Grafik capaian responden Survei Pelaksanaan Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) menunjukkan bahwa jumlah responden yang berpartisipasi telah melampaui target yang ditetapkan. Dari target sebanyak 30 responden, realisasi capaian mencapai 38 responden, yang mencerminkan tingginya partisipasi pengguna layanan dalam memberikan penilaian terhadap integritas pelayanan. Capaian ini menunjukkan komitmen Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang dalam mengumpulkan umpan balik masyarakat sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan yang transparan dan akuntabel.

Grafik 3.25
Capaian Nilai Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)



Grafik Capaian Nilai Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh sebesar 3,72 (skala 4) telah melampaui target minimal yang ditetapkan sebesar 3,2. Capaian ini menandakan bahwa tingkat integritas pelayanan berada pada kategori sangat baik dan mencerminkan efektivitas upaya penguatan transparansi, akuntabilitas, serta penerapan prinsip antikorupsi dalam setiap proses pelayanan. Hasil tersebut sekaligus memperlihatkan komitmen instansi dalam menjaga kualitas tata kelola pelayanan publik yang berintegritas.

3. Target dan Realisasi Jangka Menengah (2021-2025)

2021			2022			2023			2024			2025		
T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100

Keterangan :

T = Target

C = Capaian

% = Persentase Capaian

4. Kendala dan Solusi

Pelaksanaan Survei Pelaksanaan Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) di Balmon Palembang menghadapi tantangan pada mekanisme pengambilan data yang bersifat periodik dan basis sampling yang masih terfokus pada peserta sosialisasi, sehingga belum memotret dinamika integritas layanan secara menyeluruh. Kondisi ini menyebabkan aspirasi pengguna layanan harian belum terserap secara merata sebagai dasar pemetaan risiko korupsi yang komprehensif.

Sebagai solusi, Balmon Palembang bertransformasi ke sistem survei digital berbasis QR Code yang terintegrasi pada produk perizinan dan titik layanan. Strategi ini memungkinkan pengumpulan data integritas berjalan secara kontinyu sepanjang tahun tanpa bergantung pada momen sosialisasi. Dengan evaluasi berkala, instansi dapat secara responsif memperbaiki prosedur dan menutup celah maladministrasi. Dampaknya, masyarakat dan pelaku usaha mendapatkan jaminan layanan yang bersih dan transparan, sekaligus memperkuat predikat Zona Integritas serta kepercayaan publik terhadap profesionalisme Balmon Palembang.

5. Strategi Keberhasilan/Inovasi

Strategi Balmon Kelas I Palembang dalam menjaga integritas layanan adalah melalui transformasi digital dan kolaborasi strategis. Dengan menggandeng Direktorat Pelayanan Infrastruktur Digital, organisasi mengimplementasikan sistem survei berbasis QR Code pada setiap titik layanan dan produk perizinan. Langkah ini memungkinkan pengumpulan data survei integritas pelayanan publik dilakukan secara kontinyu sepanjang tahun, sehingga hasil evaluasi tidak lagi bersifat statis namun lebih dinamis dan akurat.

6. Dampak

Dampak dari pelaksanaan survei integritas pelayanan publik tidak hanya memperkuat akuntabilitas internal, tetapi juga memberikan kepastian bagi masyarakat pengguna frekuensi. Dengan sistem yang lebih inklusif, para pelaku usaha, instansi pemerintah, hingga masyarakat umum di wilayah Sumatera Selatan dapat merasakan kualitas pelayanan yang lebih transparan dan profesional. Upaya ini menjadi langkah krusial bagi Balmon Palembang dalam menjaga konsistensi nilai IIPP pada predikat sangat baik sekaligus memperkuat standar pelayanan prima dalam kerangka pembangunan Zona Integritas.

7. Implementasi BerAKHLAK

Implementasi nilai budaya BerAKHLAK dalam kegiatan pelaksanaan survei pelayanan publik dilakukan melalui beberapa cara:

- Berorientasi Pelayanan, survei integritas pelayanan publik sebagai bahan untuk melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas dan keterbukaan dalam memberikan pelayanan publik.
- Akuntabel, Menjamin integritas survei dengan memastikan seluruh data dikelola secara jujur dan transparan.
- Kompeten, Petugas pelaksana survei di Balmon Kelas I Palembang dibekali dengan kompetensi teknis dan literasi digital dalam pemanfaatan alat survei berbasis teknologi.
- Harmoni, Memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam memberikan penilaian tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun tingkat pendidikan.

Gambar 3.41
Pelaksanaan Survei IIPP



- e. Loyal, Bekerja secara profesional dengan tujuan bukan untuk kepentingan tim, melainkan untuk keberhasilan Balmon Kelas I Palembang secara keseluruhan.
- f. Adaptif, penggunaan produk digital (QR Code) dalam pelaksanaan survei dan penyebaran informasi melalui media sosial.
- g. Kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis dengan instansi pusat dalam pelaksanaan survei.

8. Efisiensi

Dalam mencapai target indikator Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK), Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang menerapkan efisiensi sumber daya dengan melaksanakan survei bersamaan dengan kegiatan sosialisasi pelayanan publik serta menggunakan metode survei berbasis QR Code. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan data dilakukan secara cepat tanpa penggunaan kertas dan tanpa penambahan kegiatan khusus dengan penggunaan anggaran dan sumber daya yang tetap. Selain mempercepat proses pengumpulan dan pengolahan data, metode ini juga mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia sehingga capaian indikator dapat diperoleh secara efektif, terukur, dan efisien.



9. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Hasil pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) pada tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti sebagai dasar perbaikan kualitas layanan pada tahun 2025. Rekomendasi perbaikan yang berfokus pada peningkatan transparansi proses layanan dan kemudahan penyampaian umpan balik masyarakat telah diimplementasikan melalui integrasi pelaksanaan survei dalam kegiatan sosialisasi pelayanan publik dan penggunaan sistem survei berbasis QR Code pada titik layanan dan produk perizinan. Langkah ini memungkinkan pengumpulan data integritas dilakukan secara lebih berkelanjutan dan menjangkau pengguna layanan secara lebih luas dibandingkan metode sebelumnya.

Selain itu, hasil survei juga dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi internal dalam penyempurnaan prosedur pelayanan, penguatan kanal pengaduan masyarakat, serta peningkatan sosialisasi nilai-nilai antikorupsi kepada pegawai dan pengguna layanan spektrum frekuensi radio. Tindak lanjut tersebut berdampak pada meningkatnya capaian nilai indeks integritas di atas target minimal, serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas layanan. Implementasi hasil rekomendasi ini menunjukkan bahwa survei integritas tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kinerja, tetapi juga sebagai instrumen perbaikan berkelanjutan yang mendukung penguatan Zona Integritas dan peningkatan kepercayaan publik terhadap layanan Balmon Palembang.

10. Rekomendasi Tindak Lanjut Tahun 2026

Dalam rangka meningkatkan hasil Survei Integritas Pelayanan Publik pada tahun 2026, diperlukan langkah perbaikan yang terarah dan berkelanjutan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain fokus terhadap kualitas layanan, peningkatan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan, serta penerapan digitalisasi survei guna memperoleh hasil yang lebih akurat dan terukur. Evaluasi juga diprioritaskan pada tiga unsur dengan nilai terendah sebagai dasar perbaikan yang lebih spesifik dan berdampak langsung. Selain itu, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terhadap persepsi masyarakat, akan dilakukan penambahan periode pelaksanaan survei sehingga data yang diperoleh lebih representatif dan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat.

11. Benchmarking

Tabel 3.39
Benchmarking Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Balmon Tangerang		Balmon Palembang		Perbandingan Capaian
	Target	Capaian	Target	Capaian	
Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	0%

Sumber : Aplikasi Janji Kinerja 2025

Benchmarking kinerja antara Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang dan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang menunjukkan capaian indikator Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) yang sama, yaitu sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Kesamaan capaian ini menggambarkan bahwa kedua unit kerja telah menjalankan penguatan integritas dan pembangunan Zona Integritas secara konsisten sesuai kebijakan nasional, melalui penerapan standar pelayanan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pencegahan praktik korupsi. Benchmarking dilakukan sebagai pembandingan kinerja untuk melihat kesesuaian implementasi program integritas di lingkungan Direktorat Infrastruktur Digital, sehingga capaian yang setara tersebut menunjukkan bahwa upaya penguatan budaya kerja berintegritas dan peningkatan kualitas pelayanan publik telah berjalan selaras dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

Indikator Kinerja 1-13

Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi)

1. Latar Belakang

Sejak 2023, Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang melakukan verifikasi koordinat site ISR dan menemukan banyak site ISR *Microwave Link* yang data koordinatnya di sistem perizinan tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Ketidakesesuaian ini umumnya disebabkan oleh perbedaan metode pengukuran, akurasi GPS, kesalahan pencatatan historis, serta belum adanya referensi koordinat baku sebagai acuan nasional.

Dampaknya, banyak permohonan ISR ditolak karena analisis teknis menunjukkan potensi interferensi yang sebenarnya bersumber dari kesalahan data koordinat, bukan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, hasil temuan verifikasi pada tahun sebelumnya belum seluruhnya ditindaklanjuti oleh pemegang ISR sehingga kesalahan data terus berulang.

Untuk mengatasi hal tersebut, diterapkan MDRS (Master Data Referensi Site) sebagai referensi koordinat baku, dan pada tahun 2025 difokuskan kegiatan Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi) agar seluruh site yang telah teridentifikasi tidak sesuai benar-benar diperbaiki oleh pemegang ISR melalui modifikasi data koordinat ISR atau penghentian ISR, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, kegiatan Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi) merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akurasi data ISR nasional, menurunkan tingkat penolakan ISR akibat

Gambar 3.42
Kegiatan Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR
Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi)



kesalahan data, memastikan kesesuaian antara data sistem dan kondisi lapangan, serta mendukung implementasi MDRS sebagai referensi koordinat baku dalam perizinan dan pengawasan spektrum frekuensi radio.

2. Analisa Capaian Kinerja 2025

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi)	100%	88.08%

Sumber: Aplikasi APSTARD (<https://apstard.postel.go.id/>) dan Aplikasi New Rol (<https://rol.postel.go.id/>)

Indikator kinerja Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi) Tahun 2025 ditetapkan dengan target 100%, yang diukur dari persentase site ISR yang telah ditindaklanjuti melalui modifikasi koordinat sesuai MDRS atau penghentian ISR. Dari total 520 site yang menjadi objek tindak lanjut, sebanyak 458 site berhasil diselesaikan sehingga capaian kinerja mencapai 88,08%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar hasil verifikasi koordinat yang dilakukan UPT pada tahun-tahun sebelumnya telah benar-benar ditindaklanjuti oleh pemegang ISR di dalam sistem perizinan.

Secara teknis, pelaksanaan Prima Aksi diawali dengan evaluasi data hasil verifikasi tahun 2023–2024, penetapan daftar site prioritas, serta koordinasi awal dengan pemegang ISR. Proses tindak lanjut dilakukan tanpa verifikasi ulang di lapangan, melainkan melalui pendekatan on-desk monitoring berbasis data SIMS dan MDRS. Pemegang ISR melakukan pengecekan ulang koordinat riil site di lapangan, kemudian mengajukan modifikasi data ISR atau penghentian ISR melalui sistem perizinan. Kegiatan ini dimonitor secara triwulanan oleh UPT melalui mekanisme evaluasi progres bersama operator, serta didukung layanan fast-track perizinan untuk mempercepat proses administrasi. Pendekatan teknis ini menunjukkan bahwa keberhasilan capaian sangat dipengaruhi oleh respons, kesiapan data teknis operator, serta pemahaman penggunaan MDRS sebagai referensi koordinat baku.

Secara nasional, capaian indikator Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi) menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan disemua UPT telah berjalan dengan arah yang sama, yaitu memastikan hasil verifikasi koordinat tahun sebelumnya benar-benar ditindaklanjuti oleh pemegang ISR melalui modifikasi data sesuai MDRS atau penghentian ISR.

Sebagai pembanding, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan mampu mencapai 100% penyelesaian dari 2.174 ISR yang menjadi objek tindak lanjut. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa secara persentase beberapa UPT telah mencapai penyelesaian penuh, sementara UPT lain termasuk Palembang masih menyisakan sebagian kecil site yang belum dimodifikasi.

Namun demikian, perbandingan capaian antar-UPT dalam indikator Prima Aksi tidak dapat dinilai secara langsung hanya dari persentase capaian. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan jumlah objek ISR, luas wilayah kerja, tingkat kompleksitas site, serta kesiapan masing-masing pemegang ISR dalam menindaklanjuti hasil verifikasi. Pada praktiknya, keberhasilan capaian tidak hanya ditentukan oleh proses verifikasi oleh UPT, tetapi sangat bergantung pada proses validasi teknis dan administratif di sisi operator sebelum modifikasi ISR dapat dilakukan di sistem.

Dengan mempertimbangkan faktor tersebut, posisi Balmon Kelas I Palembang secara nasional tetap menunjukkan kinerja yang progresif dan matang dari sisi proses. Fokus kegiatan yang sudah bergeser dari verifikasi menjadi tindak lanjut hasil verifikasi, efisiensi pelaksanaan berbasis on-desk monitoring, serta konsistensi penerapan MDRS menjadi indikator bahwa mekanisme Prima Aksi di Balmon Palembang telah berjalan efektif. Kesenjangan capaian yang masih ada lebih bersifat administratif pada sisi pemegang ISR.

Gambar 3.43 Kegiatan Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi)

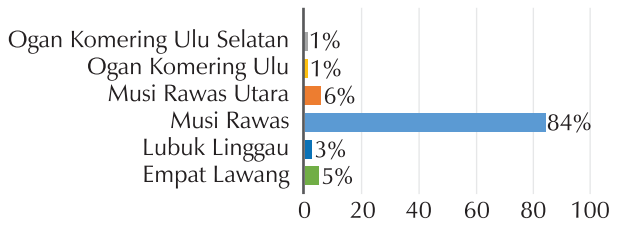


Tabel 3.40 Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi) Tahun 2025

Nama Operator	Jumlah ISR	Sudah Ditindaklanjuti	Belum Ditindaklanjuti
Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT	220	168	52
Telekomunikasi Selular, PT.	159	155	4
Mobikom Telekomindo, PT.	2	2	0
Smart Telecom, PT.	1	1	0
XI Axiata, Tbk	45	40	5
Indosat Tbk, PT.	93	92	1
Total	520	458	62

Pada tabel di atas menyajikan gambaran kuantitatif capaian tindak lanjut dari 520 site ISR yang menjadi target. Dari tabel tersebut terlihat bahwa 458 site telah ditindaklanjuti, yang terdiri dari site yang telah dimodifikasi koordinatnya dan site yang telah dihentikan ISR-nya. Sementara itu, 62 site masih dalam proses tindak lanjut. Tabel ini memperlihatkan bahwa mayoritas temuan verifikasi sebelumnya telah berhasil dikoreksi di sistem perizinan, sehingga meningkatkan akurasi data ISR secara nasional.

Grafik 3.26 Capaian Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi) Berdasarkan Wilayah



Grafik 3.27 menggambarkan sebaran tindak lanjut site ISR berdasarkan wilayah kabupaten/kota. Grafik ini menunjukkan bahwa penyelesaian tidak terpusat pada satu lokasi, tetapi tersebar di beberapa wilayah seperti Empat Lawang, Lubuk Linggau, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, OKU, dan OKU Selatan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan Prima Aksi berjalan secara menyeluruh di wilayah kerja Balmon Palembang dan tidak bersifat parsial. Sebaran ini juga menunjukkan bahwa koordinasi dengan berbagai operator di wilayah berbeda dapat berjalan efektif.

Tabel 3.41 Pelaksanaan Kegiatan Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi)

No	Triwulan	Operator
1	Triwulan Ke -2	TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK, PT dan TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT.
2	Triwulan Ke -3	MOBILKOM TELEKOMINDO, PT., SMART TELECOM, PT., XL AXIATA, Tbk
3	Triwulan Ke -4	INDOSAT TBK, PT.

Tabel di atas menjelaskan aspek teknis pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bertahap melalui monitoring triwulanan. Tabel ini memperlihatkan keterlibatan operator pada setiap triwulan dalam melakukan modifikasi atau penghentian ISR. Dari tabel tersebut dapat dipahami bahwa progres capaian sangat dipengaruhi oleh tahapan waktu dan kesiapan masing-masing operator dalam menindaklanjuti hasil verifikasi UPT.

3. Target dan Realisasi Jangka Menengah (2021-2025)

2021			2022			2023			2024			2025		
T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	88.08	88.08

Keterangan :
T = Target
C = Capaian
% = Persentase Capaian

4. Kendala dan Solusi

Berdasarkan Indikator Tindak Lanjut Verifikasi Prima Aksi, target kinerja ditetapkan sebesar 100%, namun pada periode pelaksanaan capaian baru mencapai 88,08%. Masih terdapat 62 site ISR Microwave Link yang belum melakukan modifikasi data ISR sesuai hasil verifikasi UPT.

Belum tercapainya target tersebut bukan disebabkan oleh kendala pada sisi pelaksanaan verifikasi oleh UPT, melainkan lebih pada proses tindak lanjut di sisi pemegang ISR. Perbaikan data ISR sepenuhnya bergantung pada kesiapan operator untuk melakukan pengecekan ulang data teknis dan koordinat riil di lapangan sebelum mengajukan modifikasi atau penghentian ISR di sistem perizinan. Proses ini memerlukan waktu karena melibatkan validasi internal, penyesuaian administrasi, serta pertimbangan operasional jaringan yang masih aktif. Selain itu, pada beberapa lokasi site, pemegang ISR juga harus terlebih dahulu mengajukan pembuatan MDRS sebelum dapat melakukan modifikasi ISR.

Sebagai upaya penyelesaian kendala tersebut, langkah yang telah dan akan dilakukan ke depan meliputi:

1. Peningkatan monitoring dan evaluasi triwulanan antara UPT dan pemegang ISR.
2. Pemanfaatan layanan fast-track perizinan ISR dari Direktorat Layanan Infrastruktur Digital untuk mempercepat proses modifikasi.
3. Pendampingan teknis kepada operator terkait penggunaan MDRS dan konversi koordinat berbasis pluscode.
4. Penegasan hasil verifikasi UPT sebagai target kinerja resmi yang harus ditindaklanjuti oleh pemegang ISR.

5. Strategi Keberhasilan/Inovasi

Untuk mencapai target Perjanjian Kinerja Kegiatan Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi) didukung oleh pergeseran fokus dari kegiatan verifikasi menjadi tindak lanjut hasil verifikasi yang dijadikan target kinerja UPT. Implementasi MDRS sebagai referensi koordinat baku nasional menjadi inovasi kunci untuk memastikan kesesuaian data ISR dengan kondisi lapangan dan mencegah kesalahan koordinat berulang.

Selain itu, diterapkan monitoring dan evaluasi triwulanan, pendampingan teknis kepada pemegang ISR, untuk mempercepat proses modifikasi atau penghentian ISR.

6. Dampak

Pencapaian indikator Prima Aksi berdampak langsung pada meningkatnya keandalan layanan telekomunikasi yang dirasakan masyarakat. Dengan data koordinat ISR yang akurat dan terstandar melalui MDRS, potensi interferensi frekuensi dapat ditekan sehingga kualitas jaringan menjadi lebih stabil.

Perbaikan data ISR juga mempercepat proses perizinan jaringan, mendukung pemerataan infrastruktur telekomunikasi, serta memastikan layanan komunikasi dan



internet yang lebih baik, lebih cepat, dan minim gangguan bagi masyarakat.

7. Implementasi BerAKHLAK

Implementasi nilai budaya BerAKHLAK dalam Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi) dilakukan melalui beberapa cara:

- a. Berorientasi Pelayanan, Meningkatkan kualitas layanan perizinan ISR dan keandalan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat.
- b. Akuntabel, Hasil verifikasi lapangan dijadikan dasar perbaikan data ISR yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Kompeten, Peningkatan kemampuan teknis dalam verifikasi koordinat, penggunaan MDRS, dan konversi pluscode.
- d. Harmonis, Kerja sama yang baik antara UPT dan pemegang ISR.
- e. Loyal: Mendukung program nasional Prima Aksi sebagai bagian dari penataan data ISR nasional.
- f. Adaptif, Penerapan MDRS dan layanan fast-track sebagai inovasi dalam proses perizinan ISR.
- g. Kolaboratif, Koordinasi aktif antara UPT dan operator dalam mempercepat modifikasi atau penghentian ISR.

8. Efisiensi

Dalam mencapai target indikator Prima Aksi, efisiensi sumber



daya terlihat secara kuantitatif dimana 458 dari 520 site (88,08%) dapat ditindaklanjuti tanpa verifikasi ulang on-site. Pemanfaatan data verifikasi sebelumnya serta monitoring berbasis sistem (SIMS dan MDRS) memungkinkan proses dilakukan secara *on-desk*, sehingga menghemat waktu kerja personel, mengurangi kebutuhan perjalanan dinas, dan menekan biaya operasional lapangan secara signifikan.

9. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Tindak lanjut diwujudkan dalam beberapa bentuk, yaitu Melakukan pengecekan titik koordinat melalui google maps agar tidak terjadi data yang terverifikasi secara berulang serta Melakukan analisis data pembanding yang diambil dari database SIMS dengan data melalui google maps dan data lapangan.

10. Rekomendasi Tindak Lanjut Tahun 2026

Pada tahun 2026, kegiatan Prima Aksi perlu difokuskan pada penyelesaian seluruh sisa site ISR yang belum dimodifikasi agar capaian kinerja dapat mencapai 100%. Strategi yang perlu dilakukan adalah penguatan monitoring berbasis target individu per operator, penetapan batas waktu penyelesaian yang lebih tegas, serta melakukan koordinasi yang lebih intensif secara langsung dengan penanggung jawab teknis masing-masing operator. Selain itu, pemanfaatan layanan *fast-track* dan pendampingan teknis penggunaan MDRS perlu ditingkatkan agar proses modifikasi data dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

11. Benchmarking

Benchmarking dilakukan dengan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan, dengan jumlah Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR *Microwave Link* yang Tidak Sesuai (Prima Aksi) sebanyak 2.174 ISR.

Tabel 3.42
Benchmarking Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi)

Indikator Kinerja	Balmon Medan		Balmon Palembang		Perbandingan Capaian
	Target	Capaian	Target	Capaian	
Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi)	100%	100%	100%	88.08%	11.92%

Sumber : Aplikasi Janji Kinerja 2025

Hasil benchmarking dengan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan menunjukkan bahwa dari 2.174 ISR yang menjadi objek tindak lanjut, Balmon Medan mampu mencapai 100% penyelesaian. Sementara itu, Balmon Palembang dari 520 site yang ditetapkan sebagai target, telah menindaklanjuti 88,08%.

Selisih capaian sebesar 11,92% ini memberikan gambaran bahwa secara metode pelaksanaan, mekanisme Prima Aksi telah berjalan efektif di Palembang, namun masih terdapat ruang perbaikan terutama pada percepatan tindak lanjut oleh pemegang ISR. Perbandingan ini menjadi referensi untuk penguatan koordinasi, monitoring, serta pemanfaatan MDRS dan layanan fast-track agar sisa site yang belum dimodifikasi dapat segera diselesaikan dan capaian kinerja dapat ditingkatkan pada periode selanjutnya.

KINERJA 2. MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien merupakan upaya untuk mewujudkan pengelolaan organisasi pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Hal ini dilakukan melalui penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan negara, serta peningkatan kualitas pelaporan kinerja yang didukung oleh pemanfaatan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta optimalisasi penggunaan sumber daya organisasi juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien. Dengan tata kelola yang baik, pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih tepat sasaran, memberikan manfaat optimal, serta mendukung peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai upaya peningkatan pada kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang melaksanakan kegiatan dalam 2 indikator sasaran kegiatan sebagai berikut:

Indikator Kinerja 2-1

Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas I Palembang Tahun 2025

1. Latar Belakang

Nilai Kinerja Anggaran merupakan indikator strategis yang digunakan untuk menilai tingkat efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada suatu instansi pemerintah. Indikator ini menjadi penting karena pengelolaan anggaran negara yang baik, transparan, dan berorientasi hasil merupakan fondasi utama dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan keuangan negara yang semakin kompleks, dengan alokasi anggaran yang besar dan tersebar pada berbagai program dan kegiatan, diperlukan sistem evaluasi kinerja anggaran yang komprehensif dan berkelanjutan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara optimal, tepat sasaran, serta selaras dengan target dan prioritas pembangunan. Oleh karena

itu, indikator Nilai Kinerja Anggaran menjadi instrumen penting dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan, penguatan disiplin anggaran, serta peningkatan kualitas belanja pemerintah.

Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas I Palembang ditetapkan sebesar 86.95, yang mencerminkan komitmen kuat dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang berkualitas.

Pencapaian target ini diharapkan mampu mendorong perencanaan anggaran yang lebih matang, pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, serta penguatan fungsi monitoring dan evaluasi untuk memastikan hasil pelaksanaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi pembangunan infrastruktur digital nasional. Penerima manfaat dari pencapaian indikator Nilai Kinerja Anggaran ini mencakup berbagai pemangku kepentingan.

2. Analisa Capaian Kinerja 2025

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Nilai Kinerja Anggaran Balmon Palembang Tahun 2025	86.95	84.56

Sumber: Aplikasi APSTARD (<https://apstard.postel.go.id/>) dan Aplikasi New Rol (<https://rol.postel.go.id/>)

Pada Tahun 2025, indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas I Palembang ditetapkan target sebesar 86.95. Adapun realisasi capaian kinerja pada tahun berjalan tercatat sebesar 84.56, atau mencapai sekitar 97.25% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan anggaran telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat selisih capaian yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan berkelanjutan.

Perbandingan antara target dan realisasi tersebut mencerminkan bahwa kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi anggaran telah dilaksanakan secara konsisten, namun belum sepenuhnya optimal. Beberapa faktor yang memengaruhi belum tercapainya target antara lain penyesuaian kebijakan di tengah tahun anggaran, dinamika pelaksanaan kegiatan di Balmon Palembang yang bersifat teknis dan lintas sektor, serta tantangan dalam menjaga keselarasan antara rencana penarikan dana dengan realisasi fisik kegiatan. Meskipun demikian, capaian 84.56 menunjukkan adanya kesinambungan peningkatan kinerja dibandingkan pola pengelolaan anggaran sebelumnya, serta mencerminkan komitmen kuat dalam menjaga disiplin dan akuntabilitas anggaran.

Jika dilihat dalam konteks praktik pengelolaan anggaran secara regional dan internasional, Indonesia berada pada jalur yang sejalan dengan negara-negara berkembang yang

Secara langsung, Balai Monitor SFR Kelas I Palembang memperoleh peningkatan kualitas tata kelola anggaran yang mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan strategis. Secara tidak langsung, masyarakat luas terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) mendapatkan manfaat melalui tersedianya infrastruktur dan layanan digital yang lebih merata dan berkelanjutan.

Selain itu, pelaku UMKM, sektor pendidikan, sektor kesehatan, serta instansi pemerintah lainnya turut memperoleh dukungan dari pemanfaatan anggaran yang lebih efektif, sehingga layanan publik, aktivitas ekonomi digital, pembelajaran jarak jauh, dan layanan kesehatan berbasis teknologi dapat berjalan dengan lebih optimal. Dengan demikian, peningkatan Nilai Kinerja Anggaran berkontribusi nyata terhadap percepatan transformasi digital, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan inklusi dan kesejahteraan masyarakat.

sedang mendorong perbaikan kualitas belanja pemerintah (*quality of spending*). Secara global, banyak negara yang mengadopsi kerangka performance-based budgeting dan *results-oriented public financial management*, di mana fokus tidak hanya pada tingkat serapan anggaran, tetapi juga pada kualitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan, serta dampak nyata dari belanja publik.

Dalam konteks kawasan regional, sejumlah negara di Asia Tenggara juga menghadapi tantangan serupa, khususnya dalam pengelolaan anggaran sektor infrastruktur dan transformasi digital yang memerlukan koordinasi lintas unit, kesiapan teknis, serta fleksibilitas kebijakan. Praktik baik yang banyak diterapkan antara lain penguatan sistem monitoring real-time, peningkatan kapasitas perencana anggaran, serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan anggaran. Dibandingkan dengan kondisi tersebut, capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas I Palembang menunjukkan bahwa Indonesia telah berada pada arah yang tepat, meskipun masih memiliki ruang untuk meningkatkan konsistensi dan ketepatan pelaksanaan anggaran.

Adapun inovasi dan strategi yang berkontribusi terhadap capaian kinerja anggaran sebesar 84,56 antara lain penguatan kualitas perencanaan anggaran berbasis kinerja, peningkatan koordinasi internal antarunit kerja dalam pelaksanaan

kegiatan, serta pemanfaatan sistem monitoring dan evaluasi untuk memantau realisasi anggaran secara berkala. Selain itu, penerapan pengendalian internal, reviu pelaksanaan anggaran secara rutin, serta tindak lanjut atas hasil evaluasi turut menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas kinerja anggaran. Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan dan perencanaan juga berperan dalam membentuk kinerja anggaran yang lebih akuntabel dan berorientasi hasil.

Dengan mempertimbangkan capaian dan tantangan tingkat regional dan internasional, capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas I Palembang Tahun 2025 menjadi landasan penting untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Optimalisasi strategi perencanaan, penguatan monitoring dan evaluasi, serta adopsi inovasi pengelolaan anggaran diharapkan dapat menutup gap capaian dan mendukung pencapaian target kinerja anggaran pada tahun-tahun berikutnya secara lebih optimal.

Indikator penilaian Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas I Palembang yaitu:

Tabel 3.43
Nilai IKPA Tahun 2025

SATKER		694701 (Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang)			
Keterangan Penilaian		Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	100	10	10	92,00
	Deviasi Halaman III DIPA	83,99	15	12,60	
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	88,33	20	17,67	83,52
	Belanja Kontraktual	50	10	5	
	Penyelesaian Tagihan	100	10	10	
	Pengelolaan Up Dan Tup	95,74	10	9,57	
Kualitas Hasil Pelaksanaana Anggaran	Capaian Output	100	25	25	100
Nilai Total					89,84
Konversi Bobot				100%	
Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)				89,84	

Sumber : Aplikasi OM-SPAN Ditjen Pembendaharaan Kemenkeu

Berdasarkan hasil penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2025 pada Satker 694701 (Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang), diperoleh nilai akhir sebesar 89.84. Pada aspek kualitas perencanaan anggaran, nilai aspek mencapai 92.00, yang didukung oleh nilai Revisi DIPA sebesar 100 dengan kontribusi nilai akhir 10, serta Deviasi Halaman III DIPA sebesar 83,99 dengan kontribusi 12,60. Capaian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih terdapat deviasi perencanaan yang perlu terus diminimalkan untuk meningkatkan konsistensi antara rencana dan realisasi anggaran.

A. Indikator pada penilaian IKPA

1. Kualitas perencanaan anggaran
 - a. Revisi Dipa
 - b. Deviasi halaman III DIPA.
2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran
 - a. Penyerapan Anggaran
 - b. Belanja Kontraktual
 - c. Penyelesaian Tagihan
 - d. Pengelolaan TU/TUP
 - e. Dispensasi SPM
3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran
 - Capaian Output

B. Indikator Smart DJA

1. Penyerapan Anggaran
2. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan penarikan dana (RPD)
3. Capaian Rincian Output (RO)
4. Efisiensi
5. Nilai Efisiensi

Pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran, nilai aspek tercatat 83.52, yang dipengaruhi oleh nilai penyerapan anggaran sebesar 88.33, belanja kontraktual sebesar 50, penyelesaian tagihan sebesar 100, serta pengelolaan UP dan TUP sebesar 95.74. Sementara itu, pada aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran, Satker memperoleh nilai 100 dari indikator capaian output, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap nilai total IKPA. Secara keseluruhan, hasil penilaian ini mencerminkan bahwa pengelolaan anggaran Satker 694701 pada Tahun 2025 telah berjalan sangat baik, khususnya dari sisi pencapaian output, dengan tetap memerlukan penguatan pada pelaksanaan belanja kontraktual agar kinerja anggaran semakin optimal.

Tabel 3.44
Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025

No.	Uraian	Satker 613455	Satker 694701
1.	Nilai Perencanaan Anggaran	85,00	75,00
2.	Nilai Pelaksanaan Anggaran	98,37	89,84
3.	Nilai Kinerja Anggaran	91,69	82.42

Sumber : Aplikasi monev SMART Ditjen Anggaran Kemenkeu

Nilai kinerja anggaran Tahun 2025 pada Satker 694701 menunjukkan capaian yang cukup baik. Pada aspek perencanaan anggaran, Satker 694701 memperoleh nilai 75.00, yang mencerminkan bahwa proses perencanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai ketentuan, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan agar perencanaan semakin selaras dengan kebutuhan dan target kinerja yang ditetapkan.

Pada aspek pelaksanaan anggaran, Satker 694701 mencatat nilai 89.84, yang menunjukkan tingkat realisasi anggaran yang tinggi dan pengelolaan pelaksanaan anggaran yang efektif. Secara keseluruhan, nilai kinerja anggaran Satker 694701 Tahun 2025 mencapai 82.42, yang merupakan hasil penggabungan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Capaian ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran telah berjalan dengan baik, dengan tetap memerlukan penguatan pada tahap perencanaan agar kinerja anggaran di tahun berikutnya dapat semakin optimal.



3. Target dan Realisasi Jangka Menengah (2021-2025)

2021			2022			2023			2024			2025		
T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	%
86	91.5	106.4	100	200	200	87	90	103.4	90	118.32	118.3	86.95	84.56	97.25

Keterangan :

T = Target

C = Capaian

% = Persentase Capaian

4. Kendala dan Solusi

Ketidaktercapaian target Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas I Palembang Tahun 2025 menunjukkan masih adanya tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas pengelolaan anggaran. Kompleksitas pelaksanaan kegiatan yang melibatkan koordinasi lintas unit kerja dan pemangku kepentingan menjadi faktor utama, ditambah dinamika teknis di lapangan yang memicu penyesuaian jadwal. Kondisi tersebut berdampak pada ketidaksinkronan antara rencana penarikan dana dan realisasi kegiatan, serta memengaruhi stabilitas pelaksanaan program akibat adanya perubahan kebijakan dan prioritas di tengah tahun anggaran.

Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan penguatan kualitas perencanaan dan koordinasi sejak awal tahun anggaran melalui penyelarasan rencana kegiatan dengan rencana penarikan dana. Selain itu, manajemen risiko akan ditingkatkan untuk mengantisipasi perubahan kebijakan dan dinamika pelaksanaan kegiatan, sehingga diharapkan capaian Nilai Kinerja Anggaran pada periode berikutnya dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

5. Strategi Keberhasilan/Inovasi

Balai Monitor SFR Kelas I Palembang memperkuat pengelolaan anggaran berbasis kinerja melalui peningkatan kualitas perencanaan serta kesiapan pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun anggaran. Penajaman keterkaitan antara rencana kerja, indikator kinerja, dan alokasi anggaran menjadi langkah strategis untuk memastikan keselarasan antara perencanaan dan realisasi, sekaligus meminimalkan potensi deviasi dalam pelaksanaan anggaran. Dengan perencanaan yang lebih terukur dan komprehensif, diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

6. Dampak

Pengelolaan anggaran yang efektif memungkinkan pelaksanaan kegiatan pengawasan, pengukuran, dan penertiban frekuensi berjalan secara optimal, sehingga potensi gangguan dapat ditekan dan kepatuhan pengguna frekuensi semakin meningkat. Dampak akhirnya dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk layanan telekomunikasi yang lebih stabil, akses informasi yang lebih lancar, serta dukungan yang lebih kuat terhadap kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik berbasis digital.

7. Implementasi BerAKHLAK

Implementasi nilai budaya BerAKHLAK dalam kegiatan Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 dilakukan melalui beberapa cara:

- a. Berorientasi Pelayanan
Perencanaan kegiatan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan tujuan untuk memberikan manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat seperti perencanaan kegiatan UNAR,

Penanganan Gangguan, serta kegiatan sosialisasi kepada pengguna frekuensi.

- b. Akuntabel
Pengelolaan anggaran yang efektif memfokuskan pada pelayanan masyarakat yang bermanfaat dan menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- c. Kompeten
Pengelola anggaran menjalankan tugasnya dengan jujur, menghindari penyalahgunaan dana, dan melaporkan setiap transaksi anggaran secara tepat dan akurat kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran.
- d. Harmonis
Kerjasama yang baik dengan instansi terkait (Kementerian Keuangan) dalam perencanaan kegiatan, pencairan dana, pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan.
- e. Loyal
Pengelola anggaran bekerja dengan penuh tanggung jawab dalam memverifikasi pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan.
- f. Adaptif
Menggunakan Aplikasi baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil pelaksanaan anggaran seperti SAKTI, OM-SPAN, MONEV PA, dan Satu DJA. Hal ini memudahkan pengelola anggaran dalam memantau penggunaan Anggaran.
- g. Kolaboratif
Kolaborasi antar petugas perencanaan penganggaran, Bendahara, PPK, PPSPM, KPA, serta instansi terkait (KPPN) dalam memonitoring pelaksanaan kegiatan sesuai program kerja yang telah disusun sebelumnya. Sehingga terciptanya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan.

8. Efisiensi

Memastikan bahwa alokasi dana didasarkan pada hasil/output yang ingin dicapai, bukan hanya pada jumlah dana yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan. Efisiensi ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi output yang ingin dicapai dengan menyusun anggaran secara spesifik dan terukur, serta menilai prioritas program dan kegiatan. Hal ini akan membuat Penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien karena setiap dana yang dikeluarkan diharapkan menghasilkan output yang terukur dan meminimalisir pemborosan dengan berorientasi pada kinerja dan ouput yang dihasilkan.

9. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Tindak lanjut yang dilakukan pada Tahun 2025 adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap Program Kerja dan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah ditetapkan. Kegiatan ini dilakukan melalui pemantauan laporan realisasi anggaran secara periodik, disertai dengan analisis perbandingan antara pagu anggaran dan realisasi anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan. Melalui langkah tersebut, potensi deviasi pelaksanaan anggaran dapat

diidentifikasi sejak dini sehingga dapat dilakukan tindakan korektif secara tepat waktu.

Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang telah disusun dan dialokasikan dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, serta selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

10. Rekomendasi Tindak Lanjut Tahun 2026

Rekomendasi tindak lanjut Tahun 2026 difokuskan pada kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui dashboard monitoring anggaran untuk memantau keselarasan antara realisasi anggaran, progres kegiatan, dan capaian output secara sistematis. Upaya ini didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola anggaran melalui pembinaan dan pengembangan kompetensi, sehingga efektivitas pengendalian anggaran dapat meningkat dan capaian Nilai Kinerja Anggaran pada periode selanjutnya menjadi lebih optimal.

11. Benchmarking

Benchmarking dilakukan dengan Balai Monitor Kelas II Jambi, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kelas II Jambi yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital yang bertugas melaksanakan pengawasan, monitoring, pengendalian, dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio.

Wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas II Jambi mencakup seluruh Provinsi Jambi, yang terdiri dari 11 kabupaten/kota (9 kabupaten dan 2 kota) di provinsi tersebut. Cakupan ini mencerminkan tanggung jawab Balai Monitor dalam memastikan tertib penggunaan frekuensi radio dan kualitas layanan telekomunikasi di wilayah kerja yang dibinanya.

Tabel 3.45
Benchmarking Nilai Kinerja Anggaran

Indikator Kinerja	Balmon Jambi		Balmon Palembang		Perbandingan Capaian
	Target	Capaian	Target	Capaian	
Nilai Kinerja Anggaran Balmon Palembang Tahun 2025	86.95	84.24	86.95	84.56	0.34

Sumber : Aplikasi Janji Kinerja 2025

Berdasarkan perbandingan capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Jambi dan Balai Monitor SFR Kelas I Palembang menunjukkan kinerja yang relatif sebanding. Balmon Jambi mencatat capaian sebesar 84.24 dari target 86.95 atau setara dengan 96.91%, sedangkan Balmon Palembang mencapai nilai 84,56 atau sebesar 97.25%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Balmon Palembang memiliki tingkat pencapaian yang sedikit lebih tinggi dibandingkan Balmon Jambi, dengan selisih sebesar 0.34%. Meskipun perbedaannya relatif kecil, hal ini mencerminkan adanya variasi dalam efektivitas pelaksanaan dan pengendalian anggaran di masing-masing UPT, sekaligus menunjukkan bahwa kedua balai telah mampu menjaga kinerja anggaran pada kategori baik. Perbandingan ini dapat menjadi dasar untuk saling berbagi praktik baik (best practices) dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran pada periode berikutnya.



Indikator Kinerja 2-2

Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

1. Latar Belakang

Nilai Kinerja Anggaran merupakan indikator strategis yang digunakan untuk menilai tingkat efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada suatu instansi pemerintah. Indikator ini menjadi penting karena pengelolaan anggaran negara yang baik, transparan, dan berorientasi hasil merupakan fondasi utama dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelaporan keuangan yang berkualitas merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di sektor publik. Dalam lingkungan pengelolaan keuangan negara yang semakin kompleks dan dinamis, diperlukan sistem pelaporan keuangan yang mampu menyajikan informasi secara akurat, andal, dan tepat waktu. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) memiliki peran strategis dalam mendukung hal tersebut, karena bertanggung jawab atas pencatatan, pengelolaan, dan penyusunan laporan keuangan yang menjadi dasar pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.

Pelaksanaan indikator kualitas pelaporan keuangan dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap proses pengelolaan keuangan di UAKPA telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator ini

tidak hanya menilai tingkat kepatuhan administratif, tetapi juga menekankan pada kualitas informasi keuangan yang disajikan, termasuk relevansi, keandalan, dan transparansi dalam menggambarkan kondisi keuangan unit organisasi. Dengan laporan keuangan yang berkualitas, pimpinan dan pemangku kepentingan dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai realisasi anggaran, posisi keuangan, serta kinerja pengelolaan keuangan secara menyeluruh, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang tepat baik pada level operasional maupun strategis.

Penerima manfaat dari pencapaian indikator kualitas pelaporan keuangan ini mencakup berbagai pihak. Secara internal, pimpinan dan pengelola keuangan di lingkungan UAKPA memperoleh dasar informasi yang kuat untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi anggaran. Secara eksternal, instansi pembina, auditor, serta pemangku kepentingan lainnya mendapatkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Pada akhirnya, masyarakat umum menjadi penerima manfaat tidak langsung melalui meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara, yang berkontribusi pada penyelenggaraan layanan publik yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

2. Analisa Capaian Kinerja 2025

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97	100

Sumber: Aplikasi APSTARD (<https://apstard.postel.go.id/>) dan Aplikasi New Rol (<https://rol.postel.go.id/>)

Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) diperoleh dari hasil penilaian Biro Keuangan Kementerian Komunikasi dan Digital. Pada tahun berjalan, target nilai yang ditetapkan sebesar 97, sementara realisasi capaian mencapai 100. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan UAKPA telah melampaui target yang ditetapkan dan mencerminkan kinerja pengelolaan serta pelaporan keuangan yang sangat baik. Keberhasilan tersebut mengindikasikan konsistensi UAKPA dalam menjaga kepatuhan, ketepatan waktu, dan keandalan laporan keuangan dibandingkan dengan target kinerja tahun berjalan.

Nilai tersebut digunakan untuk mengukur kualitas kinerja dan pelaporan keuangan UAKPA berdasarkan sejumlah aspek utama, antara lain jumlah transaksi koreksi audit, ketepatan penggunaan akun belanja modal dan belanja barang, pengelolaan saldo kas pada bendahara pengeluaran dan penerimaan akhir tahun, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan kepada entitas pelaporan, serta hasil penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan dan ketepatan waktu penyampaiannya. Pencapaian nilai maksimal menunjukkan bahwa seluruh aspek tersebut telah dikelola secara tertib, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Dalam konteks yang lebih luas, capaian kualitas pelaporan keuangan UAKPA ini sejalan dengan upaya Indonesia dalam memperkuat tata kelola keuangan publik (public financial management). Secara internasional, banyak negara mendorong peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah melalui penerapan standar akuntansi yang andal, penguatan sistem pengendalian intern, serta peningkatan ketepatan waktu pelaporan. Dibandingkan dengan praktik di sejumlah negara berkembang di kawasan regional, tantangan umum yang masih sering dihadapi adalah keterlambatan pelaporan, kelemahan pengendalian intern, serta tingginya koreksi audit. Dengan capaian nilai maksimal, UAKPA menunjukkan kinerja yang berada pada level sangat baik dan sejalan dengan praktik baik internasional dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan sektor publik.

Keberhasilan pencapaian target ini didukung oleh sejumlah strategi dan inovasi, antara lain penguatan pengendalian intern atas pelaporan keuangan, peningkatan koordinasi antara pengelola keuangan dan unit terkait, serta pemantauan rutin terhadap ketepatan penggunaan akun dan penyampaian laporan keuangan.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, serta pemanfaatan sistem informasi keuangan secara optimal, turut menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas laporan keuangan. Strategi tersebut membentuk budaya kerja yang tertib, patuh, dan akuntabel, sehingga capaian kualitas pelaporan keuangan dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Tabel 3.46
Hasil Penilaian Kualitas Pelaporan UAKPA

No	Indikator Penilaian Laporan Keuangan	Nilai
NILAI AWAL		100
1	Jumlah transaksi koreksi audit	0
2	Kesalahan Penggunaan akun Belanja Modal/Barang	0
3	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Penerimaan akhir tahun	0
4	Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan ke Entitas Pelaporan	0
5	Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	0
6	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan ke Entitas Pelaporan	0
Nilai Pengurang		0
Total (Nilai Awal-Nilai Pengurang)		100

Tabel 3.46 menyajikan hasil penilaian kualitas pelaporan UAKPA yang dilakukan berdasarkan beberapa indikator penilaian laporan keuangan. Penilaian ini diawali dengan nilai awal sebesar 100.

Berdasarkan hasil penilaian, seluruh indikator menunjukkan tidak adanya nilai pengurang. Hal ini terlihat dari tidak ditemukannya transaksi koreksi audit, kesalahan penggunaan akun belanja modal/barang, selisih saldo kas di bendahara pada akhir tahun, serta keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan maupun laporan hasil penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan ke entitas pelaporan. Dengan demikian, nilai pengurang adalah 0, sehingga nilai total yang diperoleh tetap sebesar 100. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas pelaporan UAKPA telah dilaksanakan dengan sangat baik, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mencerminkan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang akuntabel.

3. Target dan Realisasi Jangka Menengah (2021-2025)

2021			2022			2023			2024			2025		
T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	%
-	-	-	87	89	102.3	80	0	0	100	95	95	97	100	103.09

Keterangan :

T = Target

C = Capaian

% = Persentase Capaian

4. Kendala dan Solusi

Meskipun Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA telah mencapai hasil optimal, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi guna menjaga keberlanjutan kinerja. Kompleksitas transaksi dan dinamika kebijakan akuntansi pemerintah menuntut ketelitian tinggi dalam proses pencatatan dan pelaporan, sehingga berpotensi menimbulkan risiko kesalahan administrasi apabila tidak dikelola dengan baik. Selain itu, ketepatan waktu penyampaian data dari tim terkait menjadi faktor krusial, karena keterlambatan atau ketidaksinkronan data dapat memengaruhi efektivitas rekonsiliasi dan meningkatkan beban koreksi pada akhir periode pelaporan.

Sebagai langkah tindak lanjut, dilakukan penguatan pengendalian intern melalui pemantauan berkala, reviu internal sebelum penyampaian laporan, serta penegasan standar operasional prosedur (SOP) dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Di samping itu, koordinasi dan komunikasi antarunit kerja terus ditingkatkan untuk menjamin kelengkapan dan ketepatan waktu data keuangan, pemanfaatan sistem informasi keuangan, sehingga kualitas pelaporan keuangan UAKPA dapat terjaga dan semakin meningkat secara berkelanjutan.

5. Strategi Keberhasilan/Inovasi

Keberhasilan pencapaian Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA didukung oleh pengelolaan pelaporan yang berorientasi pada kepatuhan dan kualitas melalui penerapan standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten, sehingga setiap transaksi dicatat secara akurat, tepat waktu, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Penguatan pengendalian intern dilakukan melalui reviu internal dan rekonsiliasi data secara berkala untuk meminimalkan kesalahan serta koreksi audit, sehingga laporan yang disampaikan telah melalui proses pengujian kualitas yang memadai. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi keuangan turut mendukung terjaganya konsistensi dan keberlanjutan kualitas pelaporan keuangan secara optimal.

6. Dampak

Pencapaian target indikator Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA memberikan dampak langsung bagi masyarakat melalui meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara. Laporan keuangan yang disusun secara akurat dan tepat waktu memastikan bahwa penggunaan anggaran dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan dengan baik, sehingga masyarakat memperoleh jaminan bahwa dana publik dikelola secara tertib dan sesuai dengan peruntukannya. Dengan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang berkualitas, pelaksanaan program dan layanan publik dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga manfaat pembangunan



dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

7. Implementasi BerAKHLAK

- Berorientasi Pelayanan, mengutamakan keterbukaan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. UAKPA memastikan bahwa setiap permintaan informasi keuangan atau laporan yang dibutuhkan oleh pengguna anggaran dapat dipenuhi dengan cepat dan tepat.
- Akuntabel, Pengelola Keuangan bertanggung jawab atas kualitas laporan keuangan yang disusun, dengan memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan pengawas.
- Kompeten, Pengelola keuangan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai mengenai akuntansi pemerintahan dan standar akuntansi yang berlaku.
- Harmonis, kolaborasi yang baik antara pengelola keuangan dan pengguna anggaran akan menciptakan proses pelaporan yang lebih efektif dan efisien.
- Loyal, berkomitmen terhadap tujuan organisasi dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Adaptif, beradaptasi dengan perubahan regulasi dan teknologi yang berkaitan dengan akuntansi pemerintahan dan pelaporan keuangan. Hal ini penting untuk memastikan pelaporan keuangan tetap relevan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- Kolaboratif, kolaborasi antara UAKPA, UAPA, Pengguna Anggaran (PA), dan auditor dalam penyusunan laporan keuangan. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa data yang dibutuhkan tersedia secara lengkap dan laporan keuangan dapat disusun dengan akurat.

8. Efisiensi

Pencapaian target Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA didukung oleh efisiensi sumber daya melalui pemanfaatan Aplikasi SAKTI dan SPAN serta penguatan tata kelola pelaporan. Penggunaan sistem terintegrasi tersebut mengurangi pencatatan manual dan duplikasi data, mempercepat penyusunan laporan, serta menekan potensi kesalahan, yang tercermin dari ketepatan waktu penyampaian laporan tanpa keterlambatan dan minimnya koreksi audit. Selain itu, monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala memungkinkan pengendalian realisasi dilakukan lebih dini dan akurat, sehingga penggunaan

sumber daya keuangan menjadi lebih optimal dan proses pelaporan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan.

9. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Tindak lanjut pemanfaatan laporan kinerja dilakukan dengan menjadikan hasil evaluasi Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA sebagai dasar dalam perbaikan berkelanjutan terhadap proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan. Informasi capaian indikator dimanfaatkan untuk menilai kepatuhan terhadap standar akuntansi, ketepatan waktu pelaporan, serta efektivitas pengendalian intern, sehingga kualitas laporan keuangan dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara konsisten.

Selain itu, laporan kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi internal dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun berikutnya, khususnya dalam penguatan pengendalian intern dan peningkatan kapasitas pengelola keuangan. Pemanfaatan laporan kinerja ini mendorong terciptanya pelaporan keuangan yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian dan keberlanjutan Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA yang optimal.

10. Rekomendasi Tindak Lanjut Tahun 2026

Rekomendasi tindak lanjut Tahun 2026 untuk memastikan tercapainya Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA difokuskan pada penguatan konsistensi penerapan standar akuntansi dan pengendalian intern secara berkelanjutan. Perlu dilakukan penegasan kembali kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) pencatatan dan pelaporan, disertai dengan reviu internal dan rekonsiliasi data secara berkala sebelum penyampaian laporan, guna meminimalkan potensi kesalahan dan koreksi audit.

11. Benchmarking

Benchmarking dilakukan dengan Balai Monitor Kelas II Jambi, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kelas II Jambi yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital yang bertugas melaksanakan pengawasan, monitoring, pengendalian, dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio. Wilayah kerja Balai Monitor

SFR Kelas II Jambi mencakup seluruh Provinsi Jambi, yang terdiri dari 11 kabupaten/kota (9 kabupaten dan 2 kota) di provinsi tersebut. Cakupan ini mencerminkan tanggung jawab Balai Monitor dalam memastikan tertib penggunaan frekuensi radio dan kualitas layanan telekomunikasi di wilayah kerja yang dibinanya.

Tabel 3.47
Benchmarking Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA

Indikator Kinerja	Balmon Jambi		Balmon Palembang		Perbandingan Capaian
	Target	Capaian	Target	Capaian	
Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA	97	100	97	100	0

Sumber : Aplikasi Janji Kinerja 2025

Hasil benchmarking menunjukkan bahwa kedua UPT mendapatkan target yang sama yaitu sebesar 97, dan sama-sama mampu mencapai nilai maksimal 100. Kondisi ini mengindikasikan bahwa praktik pengelolaan dan pelaporan keuangan pada kedua satuan kerja telah berada pada level yang optimal dan sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

Kesetaraan capaian tersebut mencerminkan adanya kesamaan kualitas tata kelola keuangan, khususnya dalam aspek ketepatan waktu pelaporan, akurasi pencatatan transaksi, serta efektivitas pengendalian intern. Melalui benchmarking ini, Balmon Palembang dapat memastikan bahwa strategi dan inovasi yang diterapkan telah sebanding dengan praktik terbaik (*best practices*) pada UPT sejenis. Selain itu, hasil benchmarking ini juga menjadi dasar untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai sekaligus mendorong peningkatan berkelanjutan melalui penguatan koordinasi, pemanfaatan sistem terintegrasi, dan peningkatan kompetensi SDM di bidang pelaporan keuangan.

D
CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Selain capaian kinerja organisasi, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang juga melaksanakan layanan administrasi dan penatausahaan rumah tangga untuk menunjang tugas pokok dan fungsi yang terdiri dari:

1. Pengadaan Barang/Jasa

Penerima manfaat dari pencapaian indikator ini mencakup pegawai internal Balmon SFR Kelas I Palembang dalam hal pemenuhan tugas pokok dan fungsi yang dapat dilakukan secara mobile dan mudah dibawa ke lapangan pada saat penugasan seperti penggunaan data realtime yang memerlukan perangkat pengolah data, selain itu, masyarakat menerima manfaat secara tidak langsung melalui pemeliharaan alat perangkat yang digunakan oleh Balmon SFR Kelas I Palembang dalam melaksanakan kegiatan seperti pengukuran kualitas layanan di daerah yang kurang terjangkau sinyal sehingga didapatkan data blank spot area. Dengan demikian, baik pengadaan barang dan pemeliharaan yang dilakukan dapat memberikan manfaat tidak langsung kepada masyarakat.

Di Balmon SFR Kelas I Palembang terdapat tambahan beberapa pegawai yakni dari 4 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 19 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sehingga diperlukan tambahan sarana dan prasarana yang memadai dalam pemenuhan tugas pokok dan fungsi. Selain itu, diperlukan pemeliharaan atas sarana dan prasarana yang menunjang tugas pokok dan fungsi seperti pemeliharaan perangkat monitoring, kebocoran pada gedung, penangkal petir yang ada kurang memadai,



dan lain sebagainya. Dengan demikian, perlu dilaksanakan penambahan sarana dan prasarana serta pemeliharaan rutin untuk menjamin tugas pokok dan fungsi tercapai sesuai target yang telah ditentukan.

Dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai, Balmon Palembang mengadakan tambahan fasilitas sarana dan prasarana perkantoran, melakukan pemeliharaan serta konsultasi untuk menunjang tugas pokok dan fungsi. Pada

Tahun 2025, Balmon Palembang telah melaksanakan 3 paket pengadaan barang, 12 paket pengadaan jasa lainnya. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut dilakukan dengan metoda e-purchasing dan pengadaan langsung sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.48
Rekapitulasi Pengadaan Barang/Jasa

No	Bulan	Pekerjaan	Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)
E-PURCHASING (KATALOG)				
1	Maret	Langganan Internet Kantor Balmon SFR Kelas I Palembang	PT Indonesia Comnets Plus	Rp. 129.999.990
2	Maret	Langganan Internet SMFR Balmon SFR Kelas I Palembang	PT Indonesia Comnets Plus	Rp. 149.999.990
3	Desember	Pengadaan Perangkat Pengolah Data UPT Balmon SFR Kelas I Palembang	CV Sinergi Subur Makmur	Rp. 103.680.996
4	Desember	Belanja Bahan Keperluan Olahraga Pegawai Balmon SFR Kelas I Palembang	CV Aussy Putra Pratama	Rp. 120.560.000
5	November	Pemeliharaan Perangkat Portable DDF 007 Balai Monitor SFR Kelas I Palembang	PT. Rohde & Schwarz Indonesia	Rp. 273.171.000
PENGADAAN LANGSUNG				
1	November	Pengadaan Jasa Medical Checkup	PT Mitra Pramita Medika	Rp. 101.200.000
2	November	Pengadaan Seragam Teknis	CV Ausy Putra Pratama	Rp. 84.769.100
3	Juli	Penyusunan dan Pencetakan LAKIP Balmon SFR Kelas I Palembang	PT Ragam Jaya Persada	Rp. 18.111.870
4	Oktober	Pemeliharaan Fasad	CV Setia Manunggal Enterprise	Rp. 46.187.000
5	September	Pemeliharaan Mess	CV Maju Sempurna	Rp. 46.027.000
6	September	Pemeliharaan Rumah Dinas	CV Maju Sempurna	Rp. 25.796.400
7	Agustus	Perbaikan Dak Talang Gedung Kantor	Hendri	Rp. 25.796.400
8	September	Pemeliharaan Perangkat Monitoring Berupa Proteksi Penangkal Petir	CV Swada Khatulistiwa	Rp. 41.360.820
PENGADAAN YANG DIKECUALIKAN				
1	Januari	Sewa Lokasi Stasiun Transportable di Sungai Pinang Balmon SFR Kelas I Palembang	Deden Taufik Ibrahim	Rp. 120.000.000
2	Januari	Sewa Lokasi Stasiun Transportable di Talang Keramat Balmon SFR Kelas I Palembang	Yoga Budiman	Rp. 120.000.000

2. Data Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang menjadi aset Balai Monitor SFR Kelas I Palembang dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum atas aset negara. Pengelolaan BMN dilakukan secara administratif dan didukung oleh pemanfaatan Aplikasi SIMAN V2 guna memastikan seluruh aset tercatat secara akurat, mutakhir, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan kualitas tata kelola aset negara, meminimalkan risiko kehilangan atau penyalahgunaan aset, serta mendukung penyajian laporan keuangan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada Tahun 2025, Balmon Palembang telah melaksanakan kegiatan Penetapan Status Pengguna (PSP). Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan BMN ini

mencakup pemerintah secara umum melalui meningkatnya akurasi data aset dan optimalisasi penerimaan negara, serta Kementerian Komunikasi dan Digital selaku entitas induk yang memperoleh dukungan pengelolaan aset yang tertib dan transparan. Selain itu, manfaat juga dirasakan oleh satuan kerja Balmon Palembang dalam bentuk ketersediaan data BMN yang valid untuk perencanaan kebutuhan sarana prasarana, peningkatan kualitas laporan keuangan, serta penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang pada akhirnya berdampak positif terhadap pelayanan publik di bidang pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio.

Tabel 3.49
Kegiatan Pengelolaan BMN

No	Bulan	Kegiatan	Total Nilai Perolehan	
1	Mei	PSP Peralatan dan Mesin Dengan Nilai Perolehan Sampai Dengan Rp. 100.000.000 (SK No. 195 Tahun 2025)	Rp.	11.181.200
2	Mei	PSP Selain Tanah dan/Bangunan Dengan Nilai Perolehan di Atas Rp. 100.000.000 (SK No. 114/MK/KNL.0402/2025)	Rp.	625.400.000

Tabel Kegiatan Pengelolaan BMN diatas menunjukkan bahwa pada bulan Mei 2025 telah dilaksanakan kegiatan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN yang meliputi peralatan dan mesin dengan nilai perolehan sampai dengan Rp. 100.000.000 sesuai SK Nomor 195 Tahun 2025 dengan total nilai perolehan sebesar Rp. 211.181.200, serta PSP BMN selain tanah dan bangunan dengan nilai perolehan di atas Rp. 100.000.000 berdasarkan SK Nomor 114/MK/KNL.0402/2025 dengan total nilai perolehan sebesar Rp. 625.400.000.

3. Penatausahaan Kepegawaian

Subbagian Umum mempunyai peran strategis dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang melalui pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga satuan kerja. Seiring dengan meningkatnya tuntutan kinerja organisasi dan kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang profesional, pengelolaan dan penatausahaan kepegawaian serta kearsipan menjadi aspek penting yang harus dikelola secara tertib, akurat, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, pengelolaan kepegawaian dan kearsipan di lingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas

I Palembang menjadi tanggung jawab Subbagian Umum sebagai bagian dari upaya mewujudkan efektivitas organisasi dan akuntabilitas administrasi.

Kegiatan penatausahaan dan pengelolaan kepegawaian dilaksanakan untuk memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban pegawai serta tersedianya data kepegawaian yang valid sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Kegiatan tersebut meliputi pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, serta pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, kursus, dan bimbingan teknis. Selain itu, Subbagian Umum juga melakukan pengelolaan database kepegawaian dan kearsipan secara tertib guna mendukung administrasi kepegawaian yang efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah seluruh pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang yang memperoleh kepastian administrasi kepegawaian, peningkatan kompetensi, serta pengembangan karier yang lebih terencana. Di sisi lain, organisasi turut merasakan manfaat melalui tersedianya data kepegawaian dan arsip yang akurat dan terintegrasi, yang mendukung



perencanaan kebutuhan SDM, peningkatan kinerja organisasi, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

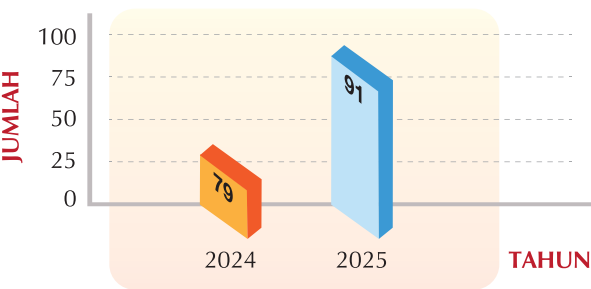
Tabel 3.50
Daftar Kenaikan Pangkat Tahun 2025

No	Nama	Kenaikan Pangkat		TMT
		Lama	Baru	
1	SAUDI, ST., MM	Pembina IV/a	Pembina TK.I/IV.b	01 Februari 2025
2	MARULAM DAMANIK, SE., MM	Penata TK.I/III.d	Pembina IV/a	01 Februari 2025
3.	ARIA DINATA. S.Kom., M.Kom	Penata/III.c	Penata TK.I/III.d	01 Agustus 2025
4.	RULLY, ST	Penata/III.c	Penata TK.I/III.d	01 Agustus 2025

Tabel 3.51
Daftar Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Tahun 2025

No	Nama	Kenaikan Pangkat		TMT
		Lama	Baru	
1	DEBBY AYU ANDINA,	Pengatur Tingkat I/II.d	01 Februari 2025	09 Tahun
2	PARADITHA PURNAMASARI, ST	Pengatur Tingkat I/II.d	01 Februari 2025	09 Tahun
3	MUCHARI, S.Kom	Penata Tingkat I/III.d	01 Maret 2025	30 Tahun
4	TOMY PURNAWAN, SE	Penata Tingkat I/III.d	01 Maret 2025	26 Tahun
5	FIRMANSYAH, SH., MH	Penata Tingkat I/III.d	01 Maret 2025	30 Tahun
6	ILHAMSYAH, ST., MM	Pembina IV/a	01 Maret 2025	30 Tahun
7	JEFRY YOGATAMA, ST	Penata/III.c	01 Maret 2025	10 Tahun
8	SAMSI AH	Penata Muda III/a	01 April 2025	20 Tahun
9	HALIMATUSA'DIA, SE	Penata TK.I/III.d	01 Mei 2025	16 Tahun
10	DIAN MAYA SAKTI	Penata Muda III/a	01 Juni 2025	18 Tahun
11	KHOLIL FAHRUROZI, ST	IX	01 Juli 2025	2 Tahun
12	OKTARIZA PURWITASARI, SE	Penata TK.I/III.d	01 Oktober 2025	18 Tahun
13	ADE ANDRYANI, ST., M.Kom	Penata Muda TK I/III.b	01 November 2025	12 Tahun

Grafik 3.27
Perbandingan Jumlah Pelatihan yang Diikuti Pegawai 2024 dan 2025



Grafik 3.28 menunjukkan perbandingan jumlah pelatihan yang diikuti oleh pegawai pada tahun 2024 dan 2025. Pada tahun 2024, jumlah pelatihan yang diikuti pegawai tercatat sebanyak 79 kegiatan. Jumlah tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2025 menjadi 91 kegiatan. Peningkatan sebanyak 12 kegiatan pelatihan ini menunjukkan adanya komitmen organisasi dalam mendorong peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia. Bertambahnya jumlah

pelatihan yang diikuti pegawai diharapkan dapat berdampak positif terhadap peningkatan kinerja, profesionalisme, serta kualitas pelayanan yang diberikan.

4. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang, pengelolaan anggaran Tahun Anggaran 2025 dilakukan secara dinamis dan akuntabel melalui mekanisme revisi anggaran yang tercatat dalam Arsip Data Anggaran Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Balmon Palembang melakukan beberapa kali revisi anggaran yang bertujuan untuk menyelaraskan kebutuhan program dan kegiatan dengan kondisi aktual pelaksanaan di lapangan. Proses revisi ini menjadi bagian penting dalam memastikan setiap kegiatan tetap berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.

Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini mencakup berbagai pihak. Secara internal, pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang memperoleh manfaat berupa terpenuhinya kebutuhan operasional,

kelancaran administrasi, serta dukungan anggaran yang memadai untuk menjalankan tugas pengawasan dan pelayanan. Secara eksternal, masyarakat dan para pengguna spektrum frekuensi radio merasakan manfaat melalui peningkatan kualitas pengawasan, tertibnya penggunaan spektrum frekuensi, serta terjaminnya layanan komunikasi yang lancar dan bebas gangguan. Dengan demikian, pengelolaan anggaran yang adaptif dan akuntabel ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada Tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang melaksanakan pengelolaan anggaran melalui dua kode satuan kerja, yaitu Satker lama dengan kode 613455 dan Satker baru dengan kode 694701, sebagai dampak dari restrukturisasi organisasi di lingkungan Komdigi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID). Pengelolaan anggaran dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi melalui penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Meskipun terjadi restrukturisasi organisasi, pelaksanaan anggaran tetap berjalan secara terkendali dan berorientasi pada hasil.

► **Tabel 3.52**
Pagu Anggaran Satker 613455 (Januari - Juni 2025)

Pagu Anggaran	Blokir	Realisasi sebelum cut off anggaran (pagu satker lama)	sisa pagu setelah cut off anggaran (pagu satker baru)
11.957.837.000	2.679.556.000	3.976.894.000	5.301.387.000

Sumber : Aplikasi OM-SPAN Ditjen Pembendaharaan Kemenkeu

Dari pagu awal sebesar Rp. 11.957.837.000,- setelah dilakukan pemblokiran sebesar Rp. 2.679.556.000,-, terdapat sisa pagu sebesar Rp. 9.278.281.000,-. Namun, pagu yang dapat direalisasikan pada periode Januari sampai dengan Juni 2025 sebelum cut off anggaran yang menjadi pagu satker lama (613455) sebesar Rp. 3.976.894.000,-, Sedangkan sisa pagu setelah cut off anggaran yang merupakan pagu anggaran satker baru (694701) sebesar Rp. 7.980.943.000,-. Penyesuaian anggaran ini mengakibatkan Balmon SFR Kelas I Palembang harus melakukan pengelolaan keuangan yang lebih proporsional dan menyusun skala prioritas kegiatan agar tetap dapat menjalankan fungsi pengawasan spektrum frekuensi radio secara optimal. Meski demikian, hingga Juni 2025, Balmon SFR Kelas I Palembang (satker 613455) berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp. 3.976.662.005,- atau sebesar 99,98%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 597.074,-.

► **Tabel 3.53**
Realisasi Anggaran Sebelum Cut off Satker 613455 (Januari - Juni 2025)

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai (51)	2.077.088.000	2.076.706.136	99.98
Belanja Barang (52)	1.899.806.000	1.899.590.790	99.99
Belanja Modal (53)	0	0	0
TOTAL	3.976.894.000	3.976.296.926	99.98

Sumber : Aplikasi OM-SPAN Ditjen Pembendaharaan Kemenkeu

Realisasi anggaran yang tercapai secara optimal tersebut mencerminkan bahwa seluruh program, kegiatan, serta kewajiban pembayaran sebelum pelaksanaan restrukturisasi organisasi telah dituntaskan secara tepat waktu dan selaras dengan rencana kerja serta alokasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

a. Realisasi Anggaran Satker 613455

Pada awal Tahun 2025, pagu anggaran Balai Monitor SFR Kelas I Palembang sebelum terdampak restrukturisasi sebesar Rp. 12.245.098.000,- Namun, sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia dalam rangka efisiensi anggaran, terjadi pemblokiran pagu sebesar Rp. 2.679.556.000,- serta pengurangan pagu belanja modal sebesar Rp. 287.261.000,- sehingga pagu DIPA 2025 yang dapat diaktualisasikan menjadi sebesar Rp. 9.278.281.000,-.

Selanjutnya dengan adanya restrukturisasi Organisasi, Balmon SFR Kelas I Palembang mengalami perubahan satuan kerja (satker) dari 613455 menjadi 694701. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan Nomor SP DIPA- 059.03.2.613455/2025 tanggal 2 Desember 2024 mengalami cut off per tanggal 30 Juni 2025, yang berdampak pada penyesuaian pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 3.976.894.000,-

b. Realisasi Anggaran Satker 694701

Terhitung mulai bulan Juli 2025, kode satuan kerja Balai Monitor SFR Kelas I Palembang berubah menjadi 694701 seiring dengan restrukturisasi organisasi di lingkungan Komdigi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Perubahan anggaran ditetapkan melalui DIPA Nomor SP DIPA- 059.09.2.694701/2025 tanggal 8 Juli 2025 dengan pagu anggaran awal sebesar Rp7.980.943.000,-. Pagu anggaran tersebut berasal dari penggabungan antara pagu yang sebelumnya diblokir sebesar Rp2.679.556.000,- dan pagu sisa cut off anggaran Satker lama (613455) sebesar Rp5.301.387.000,-.

Selanjutnya pada bulan Oktober 2025 sesuai dengan kebijakan pemerintah, sebagian pagu yang diblokir tersebut dilakukan penyesuaian kembali dengan prosedur relaksasi anggaran sebesar Rp 1.717.015.000,- dengan ketentuan Rp.1.056.1922.000,- dialokasikan ke Pagu Direktoral Jenderal Infrastruktur Digital dan Rp. 660.823.000,- untuk kebutuhan Internal Balai Monitor SFR Kelas I Palembang, sehingga pagu pada akhir tahun Anggaran 2025 menjadi sebesar Rp6.841.860.000,-, dengan Pagu efektif yang dapat direalisasikan sebesar Rp6.299.893.000,- yang selanjutnya menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian anggaran pada Satker 694694 hingga akhir Tahun Anggaran 2025. Penyesuaian pagu akibat kebijakan efisiensi tersebut mendorong satuan kerja untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, menetapkan skala prioritas kegiatan, serta memastikan bahwa pelaksanaan anggaran tetap berorientasi pada pencapaian kinerja dan hasil yang optimal.

► **Tabel 3.54**
Pagu Anggaran Satker 694701 (Oktober - Desember 2025)

Pagu Anggaran	Blokir	Pagu Efektif	Realisasi
6.841.860.000	541.967.000	6.299.893.000	6.154.434.852

Sumber : Aplikasi OM-SPAN Ditjen Pembendaharaan Kemenkeu

Sehingga pagu anggaran kode satker 694694 sebesar Rp. 6.841.860.000,-. Realisasi anggaran hingga akhir tahun mencapai Rp. 6.154.434.852,- atau sebesar 97,69%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 145.458.148,-.

► **Tabel 3.55**
Realisasi Anggaran Satker 694701 (Juli - Desember 2025)

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai (51)	2.207.734.000	2.170.650.080	98.32
Belanja Barang (52)	3.980.446.000	3.880.103.776	97.48
Belanja Modal (53)	111.713.000	103.680.996	92.81
TOTAL	6.299.893.000	6.154.434.852	97.69

Sumber : Aplikasi OM-SPAN Ditjen Pembendaharaan Kemenkeu

Secara keseluruhan, tingkat serapan anggaran satker 694701 tergolong baik. Hal ini menunjukkan komitmen satuan kerja dalam menjaga efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mendukung pencapaian kinerja organisasi pada Tahun 2025.

Realisasi anggaran yang tercapai secara optimal tersebut mencerminkan bahwa seluruh program, kegiatan, serta kewajiban pembayaran telah dituntaskan secara tepat waktu dan selaras dengan rencana kerja serta alokasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

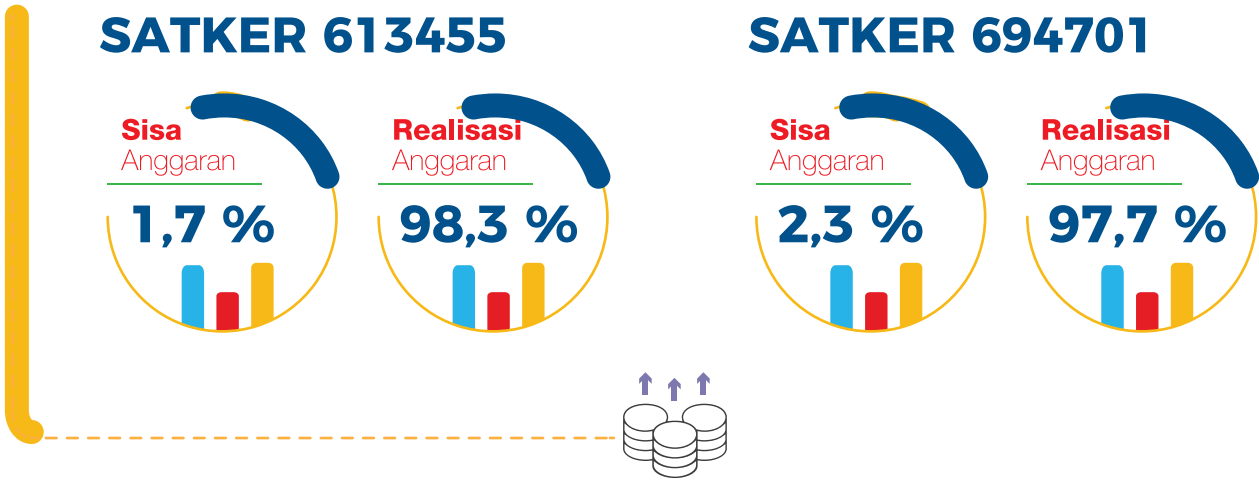
Tingkat realisasi anggaran yang tinggi mencerminkan komitmen dan tanggung jawab Balai Monitor SFR Kelas I Palembang dalam mengelola keuangan negara secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

c. **Total Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025**
Secara keseluruhan, pagu dan realisasi anggaran Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.56
Realisasi Anggaran Keseluruhan

Kode Satker	Tota Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase
613455	3.976.894.000	3.976.296.926	597.074	98.32
694701	6.299.893.000	6.154.434.852	145.458.148	97.69
Total	10.276.787.000	10.130.731.778	146.055.222	98.57

Sumber : Aplikasi OM-SPAN Ditjen Pembendaharaan Kemenkeu



Secara umum sisa anggaran pada tabel/grafik diatas 1,7%, pelaksanaan anggaran Tahun 2025 dilaksanakan secara maksimal meskipun terdapat dinamika kelembagaan akibat restrukturisasi organisasi. Restrukturisasi di lingkungan DJID pada Tahun 2025 berdampak pada pengelolaan keuangan, namun juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola keuangan yang lebih adaptif dan berorientasi pada hasil. Pengelolaan anggaran pada satker lama dapat diselesaikan seluruh kewajiban anggaran secara optimal, sedangkan pengelolaan pada satker baru mampu merealisasikan sebagian besar program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja.

Tingkat realisasi anggaran rata rata pada kedua kode satker Balai Monitor SFR Kelas I Palembang sebesar 98.57% mencerminkan komitmen Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan negara serta menunjukan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dalam mendukung pencapaian target indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja 2025.



04

PENUTUP

“

Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang Tahun 2025 disusun sebagai bentuk upaya penyajian potret capaian kinerja secara komprehensif dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi utama, serta kegiatan yang bersifat administratif. Laporan ini sekaligus merupakan wujud akuntabilitas kinerja instansi dalam meningkatkan Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien serta Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi, dan Layanan Telekomunikasi guna mewujudkan pengelolaan spektrum frekuensi radio yang tertib, efisien, dan berkelanjutan

Secara umum, capaian kinerja pada program Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien serta program Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi, dan Layanan Telekomunikasi telah dapat direalisasikan sesuai dengan target dan sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pelaksanaan program tersebut menunjukkan bahwa Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang mampu menjalankan fungsi pengelolaan organisasi secara profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi di wilayah kerja.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja dan menjamin keberhasilan pelaksanaan program kerja secara berkelanjutan, diperlukan komitmen yang kuat serta sinergi dan kerja sama dari berbagai pihak, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi utama. Upaya tersebut dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Ke depan, langkah-langkah strategis yang perlu terus ditingkatkan antara lain penguatan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait, baik internal maupun eksternal, serta dengan para pemangku kepentingan, guna mendukung efektivitas pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio.

Selain itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam mendukung tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien.

Hal ini dilakukan melalui partisipasi aktif pegawai dalam kegiatan pembinaan, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta workshop yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, maupun instansi lain yang berkompeten, baik secara daring maupun luring. Di samping itu, evaluasi terhadap kegiatan yang belum optimal akan terus dilakukan sebagai dasar perumusan kebijakan dan penetapan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan, akurat, dan akuntabel kepada seluruh pihak terkait mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang. Laporan ini juga diharapkan menjadi sarana untuk memperoleh kritik dan saran yang konstruktif sebagai bahan perbaikan berkelanjutan, sehingga kinerja organisasi di masa yang akan datang dapat semakin meningkat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

Penutup

DOKUMENTASI KEGIATAN

Lampiran Foto Kegiatan





Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik



Pelaksanaan kegiatan bimtek dan sertifikasi operator radio (MOTS)



Kegiatan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Kab. Empat Lawang



Kegiatan Pengukuran Kualitas Layanan di Kota Palembang



Kegiatan kalibrasi perangkat SMFR bergerak



Kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio di Kabupaten Banyuasin



Pelaksanaan kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) reguler



Kegiatan monitoring Alat/Perangkat Telekomunikasi di Kota Palembang

